



PEMERINTAH KOTA CIREBON



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD) TAHUN 2025



DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Kata Pengantar	iii
Bab I Pendahuluan	1
1. Latar Belakang.....	1
1.1 Penjelasan Umum	1
1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah.....	27
1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	37
Bab II Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	41
2.1 Capaian Kinerja Makro.....	41
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	42
2.2.1 Kinerja Kunci Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar	42
2.2.2 Kinerja Kunci Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	51
2.2.3 Capaian Indikator Urusan Pilihan	60
2.2.4 Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	63
2.2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	67
Bab III Capaian Kinerja Tugas Pembantuan.....	320
1 Dasar Hukum penyelenggaraan urusan pembantuan	321
2 Gambaran Umum pelaksanaan tugas pembantuan	322
3 Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan.....	322
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah	323
3.1.1 Target Kinerja	323
3.1.2 Realisasi.....	323
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah	324
3.2.1 Target Kinerja	324
3.2.2 Realisasi.....	324
3.3. Permasalahan dan Kendala.....	325
3.4 Saran dan Tindak Lanjut.....	325

Bab IV Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	326
4.1 Bidang urusan Pendidikan	326
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	326
4.1.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	339
4.1.3 Realisasi	339
4.1.4 Alokasi Anggaran	340
4.1.5 Dukungan Personil.....	342
4.1.6 Permasalahan dan Solusi.....	343
4.2 Bidang Urusan Kesehatan	343
4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar	344
4.2.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	344
4.2.3 Realisasi	344
4.2.4 Alokasi Anggaran	344
4.2.5 Dukungan Personil.....	355
4.2.6 Permasalahan dan Solusi.....	355
4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum	355
4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar	355
4.3.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	341
4.3.3 Realisasi	341
4.3.4 Alokasi Anggaran	341
4.3.5 Dukungan Personil.....	352
4.3.6 Permasalahan dan Solusi.....	352
4.4 Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman	352
4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar	352
4.4.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	356
4.4.3 Realisasi	356
4.4.4 Alokasi Anggaran	356
4.4.5 Dukungan Personil.....	357

4.4.6 Permasalahan dan Solusi.....	357
4.5 Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat .	357
4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar	357
4.5.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	356
4.5.3 Realisasi	360
4.5.4 Alokasi Anggaran	360
4.5.5 Dukungan Personil.....	367
4.5.6 Permasalahan dan Solusi.....	368
4.6 Bidang Urusan Sosial	369
4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar	369
4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	369
4.6.3 Realisasi	369
4.6.4 Alokasi Anggaran	370
4.6.5 Dukungan Personil.....	370
4.6.6 Permasalahan dan Solusi.....	371
4.7 Program dan Kegiatan	376
Bab V Penutup.....	386
Lampiran – Lampiran	388
Daftar Gambar.....	388
Daftar Tabel	390

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, sehingga kami mendapatkan kekuatan dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta mewujudkan pemerintahan yang bersih, bertanggung jawab, dan mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), untuk hal dimaksud Kepala Daerah wajib melaporkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) untuk Tahun 2025, mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019. Dalam penyusunan laporan ini meliputi Indikator Kinerja Kunci, bobot dan Penilaian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2025 memberikan informasi yang sangat bermanfaat bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan evaluasi mandiri dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang selanjutnya akan dilakukan perbaikan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat. Selain itu pula, LPPD sebagai bahan evaluasi,

pembinaan dan pengawasan bagi Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah tidak terlepas dari kendala, hambatan maupun tantangan. Namun demikian dengan semangat dan tekad untuk bersinergi dalam menggerakkan segala kemampuan dan potensi daerah, serta inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka pencapaian visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Semoga penyelenggaraan pemerintahan daerah baik dari segi kualitas dan kuantitas semakin baik, dan meningkat setiap tahunnya, serta berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



WALI KOTA CIREBON

EFFENDI EDO, S.AP, M.Si

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang - Undang Pembentukan Daerah

Kota Cirebon disahkan menjadi Gemeente Cheirebon berdasarkan Stlb 1906 No. 122 dan Stlb. 1926 No. 370. Tahun 1942 Kota Cirebon diperluas menjadi 2.450 hektar dan pada tahun 1957 status pemerintahannya ditingkatkan menjadi Kota Praja. Kota Cirebon sendiri ditetapkan menjadi daerah Kotamadya berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 551), sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat.

Selanjutnya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Cirebon berpedoman pada dasar hukum dibawah ini :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 8. Undang-Undang Nomor 108 Tahun 2024 tentang Kota Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7045);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) ; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan

- Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evalausi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
21. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 9; Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 17 Seri E);
22. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Nomor 3);
23. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5);
24. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Cirebon Tahun 2024-2026.

b. Data Geografis Wilayah

Kondisi Daerah Kondisi Daerah di deskripsikan dari berbagai aspek yaitu: Geografi, Demografi, Kesejahteraan Rakyat, Daya Saing Daerah, Pelayanan Umum, Pemenuhan Pelayanan Dasar, Kerjasama Daerah dan Kinerja BUMD. 2.1.1 Aspek Geografi Karakteristik geografis Kota Cirebon meliputi informasi mengenai letak, luas, geologi, topografi, iklim, dan hidrologi yang memiliki potensi bahaya dan risiko terhadap wilayah tersebut. Karakteristik Geografi lainnya seperti pemanfaatan dalam Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW), laju konversi lahan, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Risiko Bencana (IRB), Indeks Ketahanan Daerah (IKD), Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan

Energi, Indeks Ketahanan Air dan informasi indikator lainnya. 2.1.1.1 Wilayah Administrasi Kota Cirebon adalah kota yang terletak di daerah pesisir Pulau Jawa pada bagian timur laut wilayah Jawa Barat berbatasan langsung dengan Laut Jawa mendekati perbatasan Jawa Tengah pada sisi bagian Timur Laut setelah melewati wilayah Kabupaten Cirebon. Sebelum dokumen Rencana Tata Ruang & Wilayah 2011-2031 Kota Cirebon yg ditetapkan dalam tahun 2012, luas daerah Kota Cirebon adalah 38,1 km² sedangkan luas daerah Kota Cirebon pada Peraturan Daerah Kota Cirebon nomor 3 tahun 1989 adalah 37,35 km². Selanjutnya Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 18 tahun 2013 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, ditetapkan luas daerah administrasi Kota Cirebon 37,36 km². Dengan adanya Peraturan Menteri dalam Negeri RI nomor 75 tahun 2018 mengakhiri perseteruan batas wilayah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon, dampak dari penetapan batas daerah terakhir adalah luas daerah Kota Cirebon menjadi bertambah. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI nomor 050-145 tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, menetapkan luas daerah administratif Kota Cirebon sebesar 39,44 km². Luas daerah tadi belum termasuk daerah Pelabuhan yg dikelola PT Pelabuhan Indonesia Regional II Cirebon seluas ±0,03 km² sehingga usulan perubahan perda Kota Cirebon nomor 8 tahun 2012 untuk luas wilayah Kota Cirebon sebesar 39,47 km². Mengacu pada Undang-Undang terbaru di tahun 2024 terkait Kota Cirebon sehingga luas Kota Cirebon dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 300.2.2 2138 tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau maka ditetapkan daerah Kota Cirebon saat ini seluas 39,398 km². Wilayah administrasi Kota Cirebon terdiri menurut 5 (lima) Kecamatan & 22 (dua puluh dua) Kelurahan dengan 249 total Rukun Warga (RW) dan 1.385 Rukun Tetangga (RT). Berikut merupakan Peta Wilayah Administrasi Kota Cirebon dengan pembagian wilayah kecamatan & wilayah kelurahan beserta rincian untuk RT/RW di 22 kelurahan per kecamatan.

Gambar 1.
Peta Wilayah Kota Cirebon



1) **Kondisi Topografi**

Kondisi topografi sebagian besar wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dan sebagian kecil merupakan dataran tinggi yang berada di wilayah selatan kota. Kondisi wilayah kota yang sebagian besar berupa dataran rendah menjadi kendala tersendiri, karena kecepatan aliran air hujan yang terbuang ke laut menjadi lambat dan sangat berpotensi menimbulkan genangan banjir di beberapa lokasi. Karenanya di beberapa titik dibangun stasiun pompa yang berfungsi mempercepat pembuangan air hujan ke laut. Secara umum kondisi lingkungan di Kota Cirebon dapat dibagi menjadi dua bagian besar yaitu kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan yang masih baik yaitu memiliki indikator lingkungan di bawah ambang batas, dan kawasan yang kondisi lingkungannya telah berada di atas ambang batas kualitas lingkungan yang diperkenankan. Kawasan yang masih memiliki kualitas lingkungan di bawah ambang batas tersebar di seluruh wilayah kota, ditandai dengan masih adanya kawasan ruang terbuka hijau seperti di wilayah Argasunya, Harjamukti, wilayah Perumnas, dan lain sebagainya. Namun yang harus menjadi perhatian adalah

kawasan-kawasan yang kondisi lingkungannya telah terjadi penurunan kualitas. Kawasan-kawasan tersebut diantaranya adalah kawasan bekas galian C Argasunya, kawasan-kawasan persimpangan jalan yang padat lalu lintas yaitu di sekitar area Jl. Siliwangi, Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Jl. Karanggetas, Jl. Pekiringan, Jl. Rajawali, Terminal Bus, dan Jl. Pemuda-By Pass. Selain itu ada beberapa aliran sungai yang memiliki indikator lingkungan yang telah melampaui ambang batas (*Amoniak, Deterjen, dan Pecal Coli*) yaitu diantaranya di sungai Sipadu, Sukalila, Suradinaya, Sigujeg, dan Gang Sontong.

Wilayah Kota Cirebon merupakan dataran rendah dengan ketinggian bervariasi antara 0-200 meter di atas permukaan laut. Peningkatan ketinggian mulai dari daerah pantai menuju ke arah Selatan dengan ketinggian maksimal 200 meter, yaitu di Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti. Kemiringan lahan di wilayah Kota Cirebon dapat diklasifikasikan berdasarkan persentase kemiringan sebagai berikut:

- a. Kemiringan 0-3 % terdapat di sebagian besar wilayah Kota Cirebon, kecuali sebagian kecil wilayah di Kecamatan Harjamukti;
- b. Kemiringan 3-8 % terdapat di sebagian besar wilayah Kelurahan Kalijaga, sebagian kecil di Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Harjamukti;
- c. Kemiringan 8-15 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti;
- d. Kemiringan 15-18 % terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti

2) **Kondisi Geologi**

Kondisi tanah di Kota Cirebon berdasarkan data spasial dikelompokkan menjadi dua kelompok besar jenis tanah yang didominasi oleh jenis berupa material *alluvial* endapan *quarter* (Qa) dengan luas wilayah 2.877,76 Ha dan jenis batuan berupa endapan batuan sedimen *pliosen-plistosen* dengan luas total 1.061,24 Ha. Jenis tanah yang terbentuk di Kota Cirebon dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu jenis tanah *alluvial* dengan luas lahan 2.509,27 Ha,

tanah *latosol* dengan luas 322,84 Ha dan jenis tanah *grumosol* dengan luas lahan 1.106,91 Ha.

Jenis tanah di Kota Cirebon adalah *tipe argosol* yang berasal dari endapan lava dan *piroklastik* (pasir, lempung, tanah liat, tupa, breksi lumpur, dan kerikil) hasil intrusi Gunung Ciremai. Secara rinci jenis tanah di Kota Cirebon terdiri atas :

- a. Regosol coklat kelabu, asosiasi regosol kelabu
- b. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu
- c. Asosiasi glei humus rendah/aluvial kelabu
- d. Asosiasi regosol kelabu, regosol coklat kelabu, dan latosol
- e. Asosiasi mediteran coklat dan litosol
- f. Latosol coklat kemerahan

Sementara itu kedalaman efektif tanah di Kota Cirebon terdiri atas 3 macam, yaitu:

- a. Kedalaman 0-30 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kecamatan Harjamukti
- b. Kedalaman 30-60 meter : terdapat di sebagian wilayah Kelurahan Argasunya, Kelurahan Harjamukti Kecamatan Harjamukti dan Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi
- c. Kedalaman lebih dari 60 meter : terdapat di seluruh wilayah Kota Cirebon, kecuali di wilayah-wilayah yang telah disebutkan di atas

c. Jumlah Penduduk

Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Keputusan Semester 2 Tahun 2025 Jumlah Penduduk Kota Cirebon adalah 359.150 Jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 180.165 (seratus delapan puluh ribu seratus enam puluh lima) penduduk laki-laki dan 178.985 (seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh lima) penduduk perempuan yang menempati wilayah Kota Cirebon seluas 39,478 km², sehingga tingkat kepadatan penduduk di Kota Cirebon adalah sebanyak 9.097 jiwa/km².

Tabel 1.1
Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
Tahun 2025

Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Kejaksan	5.044	5.201	10.245
Sukapura	8.873	8.877	17.750
Kesenden	7.237	7.253	14.490
Kebonbaru	4.700	4.928	9.628
Kec Kejaksan	25.854	26.259	52.113
Pegambiran	12.676	12.293	24.969
Lemahwungkuk	4.466	4.520	8.986
Kesepuhan	8.874	8.568	17.442
Panjunan	5.276	5.367	10.643
Kec. Lemahwungkuk	31.292	30.748	62.040
Kalijaga	19.829	19.328	39.157
Harjamukti	11.798	11.518	23.316
Kecapi	12.129	12.383	24.512
Larangan	8.166	8.748	16.914
Argasunya	14.633	13.598	28.231
Kec. Harjamukti	66.555	65.575	132.130
Jagasatru	5.432	5.284	10.716
Pekalipan	3.268	3.328	6.596
Pulasaren	4.055	3.956	8.011
Pekalangan	3.061	3.076	6.137
Kec. Pekalipan	15.816	15.644	31.460
Pekiringan	6.536	6.804	13.340
Sunyaragi	6.588	6.628	13.216
Kesambi	4.561	4.645	9.206
Drajat	8.065	8.014	16.079
Karyamulya	14.898	14.668	29.566
Kec. Kesambi	40.648	40.759	81.407
Kota Cirebon	180.165	178.985	359.150

d. Jumlah Kecamatan dan Kelurahan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon Tahun 2011-2031,

Kota Cirebon memiliki 5 (lima) Kecamatan dengan 22 (dua puluh dua) kelurahan. Struktur ruang Kota Cirebon dibagi menjadi 4 Sub Wilayah Kota, yaitu :

- (1) Sub Wilayah Kota (SWK) I meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Lemahwungkuk dan Pegambiran, dengan fungsi utama pelayanan pelabuhan dan perikanan dan fungsi pendukung, fasilitas kesehatan, fasilitas peribadatan, pendidikan, wisata, perdagangan dan jasa, industri kecil rumah tangga, Ruang Terbuka Hijau dan perumahan;
- (2) Sub Wilayah Kota (SWK) II meliputi sebagian dari Kelurahan Kesenden, Kebonbaru, Pekiringan, Kesambi, Kesenden, Panjunan, Pekalangan, Jagasatru, Pulasaren, Kesambi, Drajat, Sunyaragi, Pekiringan, Pekalipan, Lemahwungkuk, Kasepuhan, Pegambiran dan Kecapi, dengan fungsi utama pelayanan perdagangan dan jasa dan fungsi pendukung pemerintahan, fasilitas sosial, perumahan, wisata, pendidikan, perkantoran dan ruang terbuka hijau.
- (3) Sub Wilayah Kota (SWK) III meliputi sebagian dari Kelurahan Sunyaragi, Karyamulya, Harjamukti, Larangan, Kecapi, dan Pegambiran dengan fungsi utama pelayanan perumahan dan fungsi pendukung pemerintahan, perdagangan dan jasa, wisata, pergudangan, pemakaman, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau, fasilitas olah raga dan fasilitas pendidikan.
- (4) Sub Wilayah Kota (SWK) IV meliputi wilayah Kelurahan Argasunya dengan fungsi utama pelayanan pertanian campuran dan fungsi pendukung wisata, pemakaman, agrobisnis, fasilitas sosial, ruang terbuka hijau dan hankam.

Secara administrastif Kota Cirebon terdiri dari 5 Kecamatan dan 22 Kelurahan, yang terbagi menjadi 249 RW dan 1.370 RT

Tabel 1.2
Wilayah Administrasi Kota Cirebon

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
1	Harjamukti	1.760,17	5	Argasunya, Kalijaga, Harjamukti,	77	469

No	Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Kelurahan	Nama Kelurahan	Jumlah RW	Jumlah RT
				Kecapi, Larangan		
2	Lemahwungkuk	719,09	4	Pegambiran, Kesepuhan, Lemahwung kuk, Panjungan	42	232
3	Pekalipan	158,82	4	Pekalipan, Pulasaren, Jagasatru, Pekalangan	39	186
4	Kesambi	865,29	5	Karyamulya, Sunyaragi, Drajat, Kesambi, Pekiringan	56	313
5	Kejaksan	444,12	4	Kejaksan, Sukapura, KebonbaruK esenden	35	183
	JUMLAH	3.947	22		249	1.383

e. Jumlah Perangkat Daerah, Unit Kerja Perangkat Daerah, dan Pegawai Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon terbagi menjadi :

- 1. Sekretariat Daerah Tipe B;
- 2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tipe B;
- 3. Inspektorat tipe B;
- 4. Dinas – Dinas;
 - a. Dinas Pendidikan Tipe B;
 - b. Dinas Kesehatan Tipe B;

- c. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Tipe C;
 - d. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Tipe C
 - e. Satuan Polisi Pamong Praja Tipe B;
 - f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Tipe C;
 - g. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe A;
 - h. Dinas Tenaga Kerja Tipe C;
 - i. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan Tipe A;
 - j. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A;
 - k. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B;
 - l. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A;
 - m. Dinas Perhubungan Tipe B;
 - n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Tipe A;
 - o. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Tipe A;
 - p. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A;
 - q. Dinas Pemuda dan Olahraga Tipe C;
 - r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tipe C;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A
5. Badan Badan :
- a. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Tipe A;
 - b. Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Tipe A;
 - c. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C;
 - d. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tipe C;
 - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C.
6. Kecamatan – Kecamatan :
- a. Kecamatan Kejaksan Tipe B;
 - b. Kecamatan Kesambi Tipe B;
 - c. Kecamatan Harjamukti Tipe B;
 - d. Kecamatan Lemahwungkuk Tipe B;
 - e. Kecamatan Pekalipan Tipe B.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon memiliki ASN sebanyak 7.280 Pegawai terdiri laki – laki berjumlah 3.518 pegawai dan perempuan berjumlah 3.762 pegawai.

Tabel 1.3

Rincian PNS per Perangkat Daerah

OPD	Jenis Kelamin		ASN			Grand Total
	L	P	PNS	PPPK	PPPK PW	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	24	22	46			46
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	18	13	23	6	2	31
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	36	9	13	25	7	45
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	80	34	66	14	34	114
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	29	31	46	11	3	60
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	24	20	30	11	3	44
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	18	21	23	10	6	39
DINAS KESEHATAN	704	1.340	1.113	385	546	2.044
DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN	47	41	52	16	20	88
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	48	33	51	17	13	81
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	36	23	44	12	3	59
DINAS LINGKUNGAN HIDUP	222	58	138	49	93	280
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	146	31	64	13	100	177
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	240	28	18	64	186	268
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	14	31	31	9	5	45

OPD	Jenis Kelamin		ASN			Grand Total
	L	P	PNS	PPPK	PPPK PW	
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA	23	13	26	6	4	36
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	20	16	21	7	8	36
DINAS PENDIDIKAN	1.068	1.663	1.243	1.180	308	2.731
DINAS PERHUBUNGAN	80	17	80	11	6	97
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	29	34	36	17	10	63
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	82	24	36	16	54	106
DINAS SOSIAL	21	24	27	11	7	45
DINAS TENAGA KERJA	25	7	23	6	3	32
INSPEKTORAT DAERAH	31	23	44	6	4	54
KECAMATAN HARJAMUKTI	84	30	45	19	4	68
KECAMATAN KEJAKSAN	30	22	35	10	50	95
KECAMATAN KESAMBI	43	21	46	10	7	63
KECAMATAN LEMAHWUNGKUK	42	20	33	22	8	63
KECAMATAN PEKALIPAN	39	17	28	18	7	53
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	65	9	63	7	10	80
SEKRETARIAT DAERAH	107	64	112	22	37	171
SEKRETARIAT DPRD	43	23	25	14	27	66
Grand Total	3.518	3.762	3.681	2.024	1.575	7.280

f. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2025



PEMERINTAHAN KOTA CIREBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (KONSOLIDASI) TAHUN
ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember
2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4	PENDAPATAN DAERAH	1.736.233.794.469,00	1.631.933.046.774,00	93,99
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	757.697.317.274,00	658.858.379.367,00	86,96
4.1.01	Pajak Daerah	382.594.769.831,00	296.622.032.190,00	77,53
4.1.01.09	Pajak Reklame	8.833.668.502,00	9.203.940.885,00	104,19
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	7.247.730.914,00	8.128.052.265,00	112,15
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	7.247.730.914,00	8.128.052.265,00	112,15
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	1.228.013.532,00	854.408.050,00	69,58
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	1.228.013.532,00	854.408.050,00	69,58
4.1.01.09.04	Pajak Reklame Selebaran	107.039.125,00	0,00	0,00
4.1.01.09.04.0001	Pajak Reklame Selebaran	107.039.125,00	0,00	0,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	250.884.931,00	211.330.570,00	84,23
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	250.884.931,00	211.330.570,00	84,23
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	0,00	10.150.000,00	#DIV/0!
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	0,00	10.150.000,00	#DIV/0!
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	329.019.659,00	164,51
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	329.019.659,00	164,51
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	329.019.659,00	164,51
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	70.421.248.093,00	44.499.857.094,00	63,19
4.1.01.15.01	PBBP2	70.421.248.093,00	44.499.857.094,00	63,19
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	70.421.248.093,00	44.499.857.094,00	63,19
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	60.621.096.716,00	28.554.662.679,00	47,10
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	60.621.096.716,00	28.554.662.679,00	47,10
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	60.621.096.716,00	28.554.662.679,00	47,10
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	164.527.758.250,00	144.046.340.673,00	87,55
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	80.993.498.382,00	75.394.306.034,00	93,09
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	76.392.315.721,00	70.892.484.757,00	92,80
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	4.601.182.661,00	4.501.821.277,00	97,84
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	38.000.000.000,00	38.739.919.844,00	101,95
4.1.01.19.02.0001	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik dari Sumber Lain	38.000.000.000,00	38.739.919.844,00	101,95
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	23.402.775.949,00	19.280.925.861,00	82,39
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	23.071.781.402,00	19.100.124.426,00	82,79
4.1.01.19.03.0006	PBJT-Losmen	201.119.901,00	169.816.113,00	84,44
4.1.01.19.03.0009	PBJT-Rumah Penginapan/Guesthouse/Bungalo/Resort/Cottage	129.874.646,00	10.985.322,00	8,46
4.1.01.19.04	PBJT-Jasa Parkir	6.079.291.143,00	2.409.391.849,00	39,63
4.1.01.19.04.0001	PBJT-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	6.079.291.143,00	2.409.391.849,00	39,63
4.1.01.19.05	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	16.052.192.776,00	8.221.797.085,00	51,22
4.1.01.19.05.0001	PBJT-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	12.053.745.625,00	4.300.923.018,00	35,68
4.1.01.19.05.0002	PBJT-Pergelaran Kesenian, Musik, Tari, dan/atau Busana	41.055.769,00	45.181.750,00	110,05
4.1.01.19.05.0007	PBJT-Pacuan Kuda dan Perlombaan Kendaraan Bermotor	2.417.464.929,00	0,00	0,00
4.1.01.19.05.0008	PBJT-Permainan Ketangkasan	91.027.565,00	2.534.182.253,00	2.783,97
4.1.01.19.05.0011	PBJT-Panti Pijat dan Pijat Refleksi	411.359.038,00	539.928.036,00	131,25
4.1.01.19.05.0012	PBJT-Distrotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa	1.037.539.850,00	801.582.028,00	77,26
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	53.860.441.245,00	47.467.607.400,00	88,13
4.1.01.20.01	Opsen PKB	53.860.441.245,00	47.467.607.400,00	88,13
4.1.01.20.01.0001	Opsen PKB	53.860.441.245,00	47.467.607.400,00	88,13

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	24.130.557.025,00	22.520.603.800,00	93,33
4.1.01.21.01	Opsen BBNKB	24.130.557.025,00	22.520.603.800,00	93,33
4.1.01.21.01.0001	Opsen BBNKB	24.130.557.025,00	22.520.603.800,00	93,33
4.1.02	Retribusi Daerah	339.822.727.989,00	344.164.337.651,00	101,28
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	334.761.509.614,00	338.566.248.673,00	101,14
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	325.098.661.264,00	330.386.000.673,00	101,63
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	26.498.611.326,00	25.417.185.060,00	95,92
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	298.550.049.938,00	304.940.160.613,00	102,14
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	50.000.000,00	28.655.000,00	57,31
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	3.020.840.000,00	65,15

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	4.637.073.350,00	3.020.840.000,00	65,15
4.1.02.01.14	Retribusi Pelayanan Kebersihan	5.025.775.000,00	5.159.408.000,00	102,66
4.1.02.01.14.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan	5.000.000.000,00	5.065.683.000,00	101,31
4.1.02.01.14.0002	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	14.925.000,00	65.075.000,00	436,01
4.1.02.01.14.0003	Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga, Perkantoran, dan Industri	10.850.000,00	28.650.000,00	264,06
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	2.915.921.375,00	3.127.653.584,00	107,26
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	936.202.375,00	945.276.984,00	100,97
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	936.202.375,00	945.276.984,00	100,97
4.1.02.02.03	Retribusi Tempat Pelelangan	1.398.949.000,00	1.501.141.600,00	107,30
4.1.02.02.03.0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	1.398.949.000,00	1.501.141.600,00	107,30
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00	117.390.000,00	260,87
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	45.000.000,00	117.390.000,00	260,87
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	41.540.000,00	103,85
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	40.000.000,00	41.540.000,00	103,85
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	68.530.000,00	91,37
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	75.000.000,00	68.530.000,00	91,37
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	245.770.000,00	253.744.000,00	103,24
4.1.02.02.11.0001	Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	25.770.000,00	27.895.000,00	108,25
4.1.02.02.11.0002	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	180.000.000,00	185.300.000,00	102,94
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	40.000.000,00	40.549.000,00	101,37
4.1.02.02.20	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00	200.031.000,00	114,30
4.1.02.02.20.0001	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah	175.000.000,00	200.031.000,00	114,30
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	2.145.297.000,00	2.470.435.394,00	115,16
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.335.000.000,00	1.847.971.394,00	138,42
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.335.000.000,00	1.847.971.394,00	138,42
4.1.02.03.08	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00	622.464.000,00	76,82
4.1.02.03.08.0001	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	810.297.000,00	622.464.000,00	76,82
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.900.000.000,00	6.561.639.947,00	41,27
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	15.900.000.000,00	6.561.639.947,00	41,27
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00	1.626.174.355,00	38,72
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	4.200.000.000,00	1.626.174.355,00	38,72
4.1.03.02.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00	403.150.157,00	23,71
4.1.03.02.02.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	1.700.000.000,00	403.150.157,00	23,71
4.1.03.02.03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00	4.532.315.435,00	45,32

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LAPORAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN 2025)				
4.1.03.02.03.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	10.000.000.000,00	4.532.315.435,00	45,32
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.379.819.454,00	11.510.369.579,00	59,39
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	792.577.388,00	941.724.300,00	118,82
4.1.04.01.08	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain	792.577.388,00	941.724.300,00	118,82
4.1.04.01.08.0001	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Rusak Berat/Usang	300.000.000,00	22.699.000,00	7,57
4.1.04.01.08.0002	Hasil Penjualan Aset Lain-Lain-Aset Lain-Lain-Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	492.577.388,00	919.025.300,00	186,57
4.1.04.05	Jasa Giro	1.911.918.812,00	2.480.015.186,00	129,71
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	1.901.335.412,00	2.457.498.743,00	129,25
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.758.196,00	16.947.206,00	218,44
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	7.758.196,00	16.947.206,00	218,44
4.1.04.05.04	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2.825.204,00	5.569.237,00	197,13
4.1.04.05.04.0001	Jasa Giro pada Rekening Dana BOS	2.825.204,00	5.569.237,00	197,13
4.1.04.07	Pendapatan Bunga	456.481.155,00	40.265.385,00	8,82
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	456.481.155,00	40.265.385,00	8,82
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	456.481.155,00	40.265.385,00	8,82
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	18.497.790,00	50.899.092,00	275,16
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.497.790,00	50.899.092,00	275,16
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	18.497.790,00	50.899.092,00	275,16
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.784.050.880,00	44.800.906,00	2,51
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.784.050.880,00	44.800.906,00	2,51
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	1.784.050.880,00	44.800.906,00	2,51
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	3.237.127.773,00	523.865.859,00	16,18
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	45.024.261,00	68.191.589,00	151,46
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	45.024.261,00	68.191.589,00	151,46
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00	1.014.600,00	60,84
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.667.565,00	1.014.600,00	60,84
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	3.000.000.000,00	102.260.014,00	3,41
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	3.000.000.000,00	102.260.014,00	3,41
4.1.04.12.19	Pendapatan Denda Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	190.435.947,00	352.399.656,00	185,05
4.1.04.12.19.0001	Pendapatan Denda PBJT-Makanan dan/atau Minuman-Restoran	75.040.435,00	330.705.075,00	440,70
4.1.04.12.19.0005	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Perhotelan-Hotel	50.026.956,00	8.628.232,00	17,25
4.1.04.12.19.0016	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Parkir-Penyediaan atau Penyelenggaraan Tempat Parkir	46.691.826,00	9.318.847,00	19,96
4.1.04.12.19.0018	Pendapatan Denda PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan-Tontonan Film atau Bentuk Tontonan Audio Visual Lainnya yang Dipertontonkan secara Langsung di Suatu Lokasi Tertentu	18.676.730,00	3.747.502,00	20,07
4.1.04.13	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	2.553.657.852,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	2.553.657.852,00	0,00	0,00
4.1.04.13.02.0012	Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-Penyewaan Tanah dan Bangunan	2.553.657.852,00	0,00	0,00
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	8.570.603.205,00	7.361.893.720,00	85,90
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	169.790.880,00	91.054.886,00	53,63
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	169.790.880,00	91.054.886,00	53,63
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	8.400.812.325,00	7.270.838.834,00	86,55
4.1.04.15.15.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	8.400.812.325,00	7.270.838.834,00	86,55
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	54.904.599,00	66.905.131,00	121,86
4.1.04.21.01	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	54.904.599,00	66.905.131,00	121,86
4.1.04.21.01.0001	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	54.904.599,00	66.905.131,00	121,86
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	978.536.477.195,00	973.074.667.407,00	99,44
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	924.253.503.932,00	921.296.977.675,00	99,68
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	78.949.940.000,00	83.988.349.700,00	106,38

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2019				
4.2.01.07.01	DBH Pajak	66.584.998.000,00	65.426.141.700,00	98,26
4.2.01.07.01.0001	DBH PBB	4.039.253.000,00	4.559.301.700,00	112,87
4.2.01.07.01.0002	DBH PPh Pasal 21	50.432.363.000,00	48.556.567.700,00	96,28
4.2.01.07.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	3.951.047.000,00	3.921.792.300,00	99,26
4.2.01.07.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.162.335.000,00	8.388.480.000,00	102,77
4.2.01.07.02	DBH Sumber Daya Alam (SDA)	12.364.942.000,00	18.562.208.000,00	150,12
4.2.01.07.02.0001	DBH SDA Minyak Bumi	3.529.315.000,00	3.670.652.000,00	104,00
4.2.01.07.02.0002	DBH SDA Gas Bumi	479.917.000,00	1.284.338.000,00	267,62
4.2.01.07.02.0003	DBH SDA Pengusahaan Panas Bumi	6.843.601.000,00	11.641.503.000,00	170,11
4.2.01.07.02.0004	DBH SDA Mineral dan Batubara- Landrent	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.01.07.02.0005	DBH SDA Mineral dan Batubara- Royalty	626.363.000,00	1.073.849.000,00	171,44
4.2.01.07.02.0006	DBH SDA Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	27.515.000,00	33.635.000,00	122,24
4.2.01.07.02.0009	DBH SDA Perikanan	858.231.000,00	858.231.000,00	100,00
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	623.043.598.000,00	623.021.803.600,00	100,00
4.2.01.08.01	DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya	559.248.842.000,00	559.227.047.600,00	100,00
4.2.01.08.01.0001	DAU	559.248.842.000,00	559.227.047.600,00	100,00
4.2.01.08.02	DAU yang Ditentukan Penggunaannya	63.794.756.000,00	63.794.756.000,00	100,00
4.2.01.08.02.0001	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	4.400.000.000,00	4.400.000.000,00	100,00
4.2.01.08.02.0003	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	18.399.250.000,00	18.399.250.000,00	100,00
4.2.01.08.02.0004	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	27.031.794.000,00	27.031.794.000,00	100,00
4.2.01.08.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	13.963.712.000,00	13.963.712.000,00	100,00
4.2.01.08.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	0,00	0,00	#DIV/0!
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	222.259.965.932,00	214.286.824.375,00	96,41
4.2.01.09.01	DAK Fisik	60.684.822.000,00	59.957.638.216,00	98,80
4.2.01.09.01.0075	DAK Fisik-Bidang Kesehatan-Penguatan Sistem Kesehatan	60.684.822.000,00	59.957.638.216,00	98,80
4.2.01.09.02	DAK Non Fisik	161.575.143.932,00	154.329.186.159,00	95,52
4.2.01.09.02.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	49.854.180.000,00	49.844.317.669,00	99,98
4.2.01.09.02.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	75.960.698.000,00	72.590.281.303,00	95,56
4.2.01.09.02.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	686.000.000,00	607.732.500,00	88,59
4.2.01.09.02.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.453.460.000,00	4.359.619.800,00	97,89
4.2.01.09.02.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesenjangan	3.843.830.000,00	3.842.694.200,00	99,97
4.2.01.09.02.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	7.312.980.000,00	8.593.899.233,00	117,52
4.2.01.09.02.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	13.539.479.932,00	9.083.145.682,00	67,09
4.2.01.09.02.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	3.377.550.000,00	2.860.529.772,00	84,69
4.2.01.09.02.0023	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	31.920.000,00	31.920.000,00	100,00
4.2.01.09.02.0027	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Kinerja	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	100,00
4.2.01.09.02.0029	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP PAUD Kinerja	45.000.000,00	45.000.000,00	100,00
4.2.01.09.02.0031	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOP Kesenjangan Kinerja	135.000.000,00	135.000.000,00	100,00
4.2.01.09.02.0041	'Dana Bantuan Pengembangan Program (BPP) Perpustakaan Daerah	995.046.000,00	995.046.000,00	100,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	54.282.973.263,00	51.777.689.732,00	95,38
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	50.386.496.335,00	49.373.688.532,00	97,99
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	50.386.496.335,00	49.373.688.532,00	97,99
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	1.940.716.830,00	1.940.716.830,00	100,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	1.614.920.790,00	1.614.920.790,00	100,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	26.124.627.453,00	25.796.316.717,00	98,74
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	11.483.441,00	0,00	0,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.694.747.821,00	20.021.734.195,00	96,75
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	3.896.476.928,00	2.404.001.200,00	61,70
4.2.02.02.01	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi	3.896.476.928,00	2.404.001.200,00	61,70
4.2.02.02.01.0001	Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	3.896.476.928,00	2.404.001.200,00	61,70
5	BELANJA DAERAH	1.783.291.694.082,00	1.649.388.268.851,78	92,49
5.1	BELANJA OPERASI	1.589.575.724.110,65	1.483.635.808.913,78	93,34
5.1.01	Belanja Pegawai	820.088.912.831,81	757.741.828.212,00	92,40
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	426.642.564.194,57	386.605.277.970,00	90,62
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	306.702.675.800,41	284.996.665.853,00	92,92
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	229.856.983.786	215.255.653.173,00	93,65
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	76.845.692.014,00	69.741.012.680,00	90,75
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	26.590.115.098,56	25.289.201.874,00	95,11
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	20.284.960.424,56	19.555.160.252,00	96,40
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	6.305.154.674,00	5.734.041.622,00	90,94
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	4.922.827.400,00	4.447.074.500,00	90,34
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	4.922.827.400,00	4.447.074.500,00	90,34
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	25.373.989.513,00	24.503.047.673,00	96,57

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2019				
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.793.334.291,00	18.165.682.000,00	96,66
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	6.580.655.222,00	6.337.365.673,00	96,30
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	3.118.381.220,00	2.909.211.114,00	93,29
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.446.259.000	2.287.226.900,00	93,50
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	672.122.220,00	621.984.214,00	92,54
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	15.011.961.805,00	14.558.076.254,00	96,98
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.790.046.959,00	10.443.470.940,00	96,79
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	4.221.914.846,00	4.114.605.314,00	97,46
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	9.194.489.558,00	2.758.184.688,00	30,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	9.194.489.558,00	2.758.184.688,00	30,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	12.942.474,95	3.825.755,00	29,56
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	10.400.344,95	2.652.652,00	25,51
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	2.542.130	1.173.103,00	46,15
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	30.033.496.769,00	24.785.929.813,00	82,53
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	25.703.148.999,00	20.825.889.239,00	81,02
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	4.330.347.770,00	3.960.040.574,00	91,45
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	731.680.126,00	588.517.218,00	80,43
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	548.744.702,00	439.752.801,00	80,14
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	182.935.424,00	148.764.417,00	81,32
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	2.215.598.145,65	1.765.543.228,00	79,69
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.655.609.177,65	1.319.266.526,00	79,68
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	559.988.968,00	446.276.702,00	79,69
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	2.734.406.284,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	1.470.744.229,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	1.263.662.055,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	299.619.210.230,00	280.919.829.940,00	93,76
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	206.357.792.564,00	195.197.653.385,00	94,59
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	195.842.058.926,00	184.898.661.796,00	94,41
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	10.515.733.638,00	10.298.991.589,00	97,94
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	19.551.600,00	19.163.692,00	98,02
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	19.551.600,00	19.163.692,00	98,02
5.1.01.02.06	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	93.241.866.066,00	85.703.012.863,00	91,91
5.1.01.02.06.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Reklame	441.683.425,00	441.683.425,00	100,00
5.1.01.02.06.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Air Tanah	10.000.000,00	10.000.000,00	100,00
5.1.01.02.06.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	2.816.849.924,00	1.408.424.962,00	50,00
5.1.01.02.06.0019	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	6.768.772.077,00	5.553.869.602,00	82,05
5.1.01.02.06.0020	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	2.617.127.033,00	1.885.115.443,00	72,03
5.1.01.02.06.0021	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.107.330.270,00	844.569.496,00	76,27
5.1.01.02.06.0023	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	250.000.000,00	250.000.000,00	100,00
5.1.01.02.06.0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	231.853.668,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0030	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang Dilakukan oleh Pemerintah Daerah	746.250,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Umum-Pengolahan Limbah Cair	542.500,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0035	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	55.560.119,00	49.810.000,00	89,65
5.1.01.02.06.0037	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	69.947.450,00	69.947.450,00	100,00
5.1.01.02.06.0039	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	2.250.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0041	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00
5.1.01.02.06.0045	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	12.288.500,00	12.288.500,00	100,00

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025				
5.1.01.02.06.0050	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	66.750.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0051	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Perizinan Tertentu-Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	40.514.850,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0060	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah- Retribusi Jasa Usaha-Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga	3.750.000,00	0,00	0,00
5.1.01.02.06.0064	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	75.960.698.000,00	72.590.281.303,00	95,56
5.1.01.02.06.0066	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	686.000.000,00	685.732.500,00	99,96
5.1.01.02.06.0067	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	2.097.202.000,00	1.899.290.182,00	90,56
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	36.983.413.757,00	35.458.004.601,00	95,88
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	782.040.000,00	782.040.000,00	100,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00	71.937.600,00	94,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	76.528.200,00	71.937.600,00	94,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00	84.007.200,00	77,44
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	108.485.160,00	84.007.200,00	77,44
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	67.032.000,00	85,71
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	78.204.000,00	67.032.000,00	85,71
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1.133.958.000,00	1.133.958.000,00	100,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	352.992.000,00	312.000.000,00	88,39
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	352.992.000,00	312.000.000,00	88,39
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	395.586.350,00	315.056.700,00	79,64
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	395.586.350,00	315.056.700,00	79,64
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.145.000.000,00	4.410.000.000,00	85,71
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	5.145.000.000,00	4.410.000.000,00	85,71
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	100,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	1.102.500.000,00	1.102.500.000,00	100,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00	986.652,00	21,77
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	4.531.226,00	986.652,00	21,77
5.1.01.04.11	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00	1.548,00	3,69
5.1.01.04.11.0001	Belanja Pembulatan Gaji DPRD	42.000,00	1.548,00	3,69
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	17.926.795.493,00	17.875.749.528,00	99,72
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	115.170.262,00	68.164.992,00	59,19
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.876.896,00	1.608.768,00	85,71
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	5.630.688,00	4.826.304,00	85,71
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	17.804.117.647,00	17.801.149.464,00	99,98
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.341.176.469,00	9.302.735.373,00	99,59
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.341.176.469,00	9.302.735.373,00	99,59
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	535.574.859,00	0,00	0,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	535.574.859,00	0,00	0,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	173.443.000,00	135.161.032,00	77,93
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00	42.900.000,00	78,12
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.919.000,00	42.900.000,00	78,12
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00	5.148.000,00	85,03
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.054.000,00	5.148.000,00	85,03
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	78,57
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	77.220.000,00	78,57
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00	4.345.200,00	85,70
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	5.070.000,00	4.345.200,00	85,70
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00	617.232,00	23,15
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	2.666.000,00	617.232,00	23,15
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.000,00	50,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	2.000,00	1.000,00	50,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.829.000,00	4.555.200,00	78,15
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.829.000,00	4.555.200,00	78,15
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00	93.600,00	48,25
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	194.000,00	93.600,00	48,25
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00	280.800,00	65,45
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	429.000,00	280.800,00	65,45
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.116.180.000,00	922.076.588,00	82,61
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.116.180.000,00	922.076.588,00	82,61
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	1.116.180.000,00	922.076.588,00	82,61
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	55.554.101.650,24	53.701.478.081,00	96,67

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2019				
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	55.554.101.650,24	53.701.478.081,00	96,67
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	55.554.101.650,24	53.701.478.081,00	96,67
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	709.908.158.268,84	667.903.867.279,78	94,08
5.1.02.01	Belanja Barang	139.274.517.944,63	129.161.416.241,00	92,74
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	139.149.128.388,63	129.036.501.903,00	92,73
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	18.071.228.760,44	17.648.572.114,00	97,66
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	85.629.835,00	80.559.252,00	94,08
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	6.165.392.820,00	5.132.803.368,00	83,25
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	95.417.318,00	78.695.466,00	82,48
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	116.599.377,00	113.632.224,00	97,46
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	70.500.743,00	60.645.575,00	86,02
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	241.988.514,00	176.140.340,00	72,79
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	224.858.172,00	223.274.557,00	99,30
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	149.403.140,00	147.389.678,00	98,65
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	122.291.861,00	99.585.692,00	81,43
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	754.940,00	750.000,00	99,35
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	3.874.257,00	1.476.300,00	38,11
5.1.02.01.01.0019	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	25.664.000,00	24.478.745,00	95,38
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	28.821.448,00	9.872.800,00	34,26
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	5.418.885.169,00	5.016.619.910,00	92,58
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	5.852.890.042,19	5.075.922.058,00	86,73
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	2.180.051.680,00	1.935.941.534,00	88,80
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	255.927.480,00	244.045.000,00	95,36
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Persediaan Dokumen/Administrasi Tender	447.945.041,00	401.939.807,00	89,73
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	2.486.372.009,00	2.304.785.090,00	92,70
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	3.520.957.987,00	3.377.711.547,00	95,93
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	2.041.119.709,00	1.942.813.404,00	95,18
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	3.938.301.062,00	3.531.826.070,00	89,68
5.1.02.01.01.0033	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kaporlap dan Perlengkapan Satwa	17.679.000,00	17.673.646,00	99,97
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	739.077.254,00	671.398.695,00	90,84
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	2.338.529.135,00	2.178.544.350,00	93,16
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	266.408.526,00	229.874.085,00	86,29
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	329.747.866,00	283.901.918,00	86,10
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	11.062.120.907,00	10.806.293.374,00	97,69
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	2.867.338.972,00	2.795.201.006,00	97,48
5.1.02.01.01.0040	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	25.281.596.955,00	24.900.530.000,00	98,49
5.1.02.01.01.0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	3.618.020.456,00	3.226.672.551,00	89,18
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	95.185.353,00	95.116.400,00	99,93
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	32.480.000,00	32.447.520,00	99,90
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	30.142.383.036,00	25.676.215.308,00	85,18
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	5.668.067.764,00	5.455.288.846,00	96,25
5.1.02.01.01.0054	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.717.044.000,00	2.676.630.000,00	98,51
5.1.02.01.01.0055	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Pendidikan	24.240.000,00	24.240.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	626.755.000,00	625.960.000,00	99,87
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	134.500.000,00	133.332.100,00	99,13
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	175.872.500,00	174.125.000,00	99,01
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	9.270.000,00	9.270.000,00	100,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	202.086.000,00	195.957.000,00	96,97
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	58.292.000,00	58.259.504,00	99,94
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	296.640.000,00	293.787.500,00	99,04
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	25.000.000,00	0,00	0,00
5.1.02.01.01.0070	Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	67.975.000,00	55.923.219,00	82,27
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	34.608.000,00	34.328.750,00	99,19
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	202.894.800,00	196.933.500,00	97,06
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	401.932.500,00	399.193.500,00	99,32
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	168.508.000,00	159.923.600,00	94,91
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	113.188.544,00	112.770.329,00	99,63
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	2.316.014,00	2.297.799,00	99,21
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	110.872.530,00	110.472.530,00	99,64

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025				
5.1.02.01.04	Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	12.201.012,00	12.144.009,00	99,53
5.1.02.01.04.0117	Belanja Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.807.000,00	3.750.000,00	98,50
5.1.02.01.04.0404	Belanja Peralatan dan Mesin-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	8.394.012,00	8.394.009,00	100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	230.856.131.514,45	208.419.896.420,00	90,28
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	158.665.028.108,45	144.616.115.921,00	91,15
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.450.290.000,00	6.428.825.000,00	68,03
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	9.659.066.000,00	8.821.122.000,00	91,32
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	431.954.000,00	399.106.000,00	92,40
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	1.080.600.000,00	1.075.740.000,00	99,55
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	39.772.000,00	33.480.000,00	84,18
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	214.588.000,00	205.797.000,00	95,90
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	1.191.288.000,00	1.191.288.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	416.134.000,00	406.189.000,00	97,61
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	591.721.000,00	531.742.473,00	89,86
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	12.843.000.400,05	11.223.714.281,00	87,39
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	167.586.000,00	167.586.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	25.760.000,00	25.760.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	145.148.000,00	145.148.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	593.166.000,00	593.002.000,00	99,97
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	167.895.000,00	148.727.000,00	88,58
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	24.679.301.000,00	23.746.273.194,00	96,22
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	359.837.000,00	289.312.600,00	80,40
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	3.441.542.900,00	3.209.709.550,00	93,26
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	8.180.050.856,00	7.026.275.699,00	85,90
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.000.730.000,00	20.924.593.018,00	99,64
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	14.093.916.000,00	14.015.321.700,00	99,44
5.1.02.02.01.0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	28.944.000,00	28.944.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	1.362.659.400,00	1.354.944.561,00	99,43
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	183.693.120,00	165.783.120,00	90,25
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1.079.826.000,00	1.065.203.000,00	98,65
5.1.02.02.01.0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	129.112.000	129.112.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	68.602.000,00	53.782.714,00	78,40
5.1.02.02.01.0042	Belanja Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	55.000.000,00	55.000.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	48.755.000,00	48.755.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	55.900.000,00	54.164.000,00	96,89
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	7.500.496.500,00	6.274.455.950,00	83,65
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	22.524.000,00	16.200.000,00	71,92
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	19.053.000,00	17.310.000,00	90,85
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	25.581.000,00	25.571.000,00	99,96
5.1.02.02.01.0054	Belanja Jasa Jalan/Tol	1.275.581.500,00	909.437.434,00	71,30
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	8.402.712.000,00	8.212.946.899,00	97,74
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon	474.756.280,00	254.611.803,00	53,63
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	1.407.314.800,00	993.748.506,00	70,61
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	18.193.867.836,40	16.369.590.733,00	89,97
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	2.228.798.000,00	2.076.765.000,00	93,18
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	3.620.204.000,00	3.225.906.075,00	89,11
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	17.632.000,00	9.815.000,00	55,67
5.1.02.02.01.0065	Belanja Penambahan Daya	351.362.000,00	241.221.400,00	68,65
5.1.02.02.01.0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	151.884.000,00	144.000.000,00	94,81
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.176.893.516,00	578.364.144,00	49,14
5.1.02.02.01.0069	Belanja Pengolahan Air Limbah	6.800.000,00	6.000.000,00	88,24
5.1.02.02.01.0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	35.550.000,00	35.550.000,00	100,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	56.980.000,00	19.276.067,00	33,83
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	840.068.000,00	694.456.000,00	82,67
5.1.02.02.01.0081	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.071.132.000,00	946.489.000,00	88,36
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	42.205.350.306,00	39.876.750.275,00	94,48
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPJ dan BP Kelas 3	35.561.755.000,00	33.586.257.500,00	94,44

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015				
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PRPU dan BP Kelas 3	3.276.913.528,00	3.195.839.600,00	97,53
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	1.128.228.088,00	1.040.652.377,00	92,24
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	425.270.000,00	383.424.147,00	90,16
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	501.055.690,00	478.949.843,00	95,59
5.1.02.02.02.0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	1.238.544.000,00	1.155.994.008,00	93,33
5.1.02.02.02.0012	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Pekerja Rentan	43.800.000,00	21.210.000,00	48,42
5.1.02.02.02.0013	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Pekerja Rentan	29.784.000	14.422.800,00	48,42
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	10.037.810.500,00	7.361.398.661,00	73,34
5.1.02.02.04.0003	Belanja Sewa Excavator	92.680.000,00	92.680.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	208.711.000,00	201.511.612,00	96,55
5.1.02.02.04.0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	171.275.000,00	135.291.000,00	78,99
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	2.632.169.000,00	1.432.928.000,00	54,44
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	5.609.485.500,00	4.244.880.065,00	75,67
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	1.316.365.000,00	1.247.506.000,00	94,77
5.1.02.02.04.0405	Belanja Sewa Personal Computer	6.365.000,00	6.365.000,00	100,00
5.1.02.02.04.0411	Belanja Sewa Peralatan Komputer Lainnya	760.000,00	236.984,00	31,18
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18.842.820.600,00	15.547.229.797,00	82,51
5.1.02.02.05.0005	Belanja Sewa Bangunan Gedung Laboratorium	9.770.000,00	9.770.000,00	100,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	2.776.319.000,00	2.416.230.000,00	87,03
5.1.02.02.05.0011	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Olahraga	4.277.000,00	3.597.000,00	84,10
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka	120.744.000,00	107.818.952,00	89,30
5.1.02.02.05.0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	247.488.000,00	223.200.000,00	90,19
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	15.684.222.600,00	12.786.613.845,00	81,53
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	423.229.000,00	348.540.000,00	82,35
5.1.02.02.06.0131	Belanja Sewa Jaringan Telepon Lainnya	423.229.000,00	348.540.000,00	82,35
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	681.043.000,00	669.011.766,00	98,23
5.1.02.02.08.0001	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Nasihat dan Pra Desain Arsitektural	371.043.000,00	363.739.566,00	98,03
5.1.02.02.08.0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	310.000.000,00	305.272.200,00	98,47
5.1.02.02.15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	850.000,00	850.000,00	100,00
5.1.02.02.15.0005	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Software	850.000,00	850.000,00	100,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	35.980.806.393,00	32.019.837.105,00	88,99
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	17.917.214.050,00	16.208.916.378,00	90,47
5.1.02.03.02.0001	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Tractor	234.000.000,00	233.000.000,00	99,57
5.1.02.03.02.0003	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Excavator	187.200.000,00	186.200.000,00	99,47
5.1.02.03.02.0006	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Asphalt Equipment	354.000.000,00	353.652.000,00	99,90
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	84.500.000,00	83.390.000,00	98,69
5.1.02.03.02.0023	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pompa	8.166.000,00	7.296.000,00	89,35
5.1.02.03.02.0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	77.482.000,00	56.850.500,00	73,37
5.1.02.03.02.0027	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Pembangkit Uap Air Panas/Steam Generator	59.995.000,00	59.500.000,00	99,17
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	84.500.000,00	84.460.000,00	99,95
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	6.680.887.000,00	5.843.179.920,00	87,46
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	239.624.000,00	220.759.121,00	92,13
5.1.02.03.02.0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	4.619.360.000,00	4.419.352.528,00	95,67
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	1.348.754.750,00	1.168.362.950,00	86,63
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	162.869.000,00	148.540.375,00	91,20
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	251.722.000,00	195.719.132,00	77,75
5.1.02.03.02.0044	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	111.800.000,00	111.150.000,00	99,42
5.1.02.03.02.0061	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Perkakas Bengkel Listrik	12.860.000,00	10.200.000,00	79,32
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	60.605.000,00	56.905.000,00	93,89
5.1.02.03.02.0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	113.839.000,00	103.779.000,00	91,16

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah DPRD KOTA CIREBON TAHUN 2025				
5.1.02.03.02.0105	Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	4.342.000,00	4.271.000,00	98,36
5.1.02.03.02.0113	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	434.000,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	342.485.300,00	325.017.390,00	94,90
5.1.02.03.02.0118	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Mebel	30.000.000	29.700.000,00	99,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1.323.934.000,00	1.219.005.290,00	92,07
5.1.02.03.02.0122	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	24.024.000,00	11.648.536,00	48,49
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	1.575.000,00	1.125.000,00	71,43
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar- Alat Studio-Peralatan Studio Audio	15.000.000,00	14.900.000,00	99,33
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	107.458.000,00	46.528.000,00	43,30
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	731.987.000,00	615.589.323,00	84,10
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	268.639.000,00	263.699.313,00	98,16
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	375.172.000,00	335.136.000,00	89,33
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.996.341.187,00	8.169.292.527,00	90,81
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	5.016.129.322,00	4.667.463.481,00	93,05
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	1.833.561.118,00	1.824.552.200,00	99,51
5.1.02.03.03.0032	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	2.146.650.747,00	1.677.276.846,00	78,13
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	9.067.251.156,00	7.641.628.200,00	84,28
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	3.403.409.600,00	3.327.664.000,00	97,77
5.1.02.03.04.0010	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Lainnya	5.243.248.050,00	3.984.591.200,00	75,99
5.1.02.03.04.0050	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai	63.930.506,00	0,00	0,00
5.1.02.03.04.0071	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor	356.663.000,00	329.373.000,00	92,35
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	20.587.284.580,00	17.623.658.299,00	85,60
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	20.587.284.580,00	17.623.658.299,00	85,60
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	13.523.440.400,00	11.662.990.564,00	86,24
5.1.02.04.01.0002	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	1.130.038.980,00	534.107.735,00	47,26
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.933.805.200,00	5.426.560.000,00	91,45
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.077.182.348,00	1.898.835.040,00	91,41
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	2.077.182.348,00	1.898.835.040,00	91,41
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	1.755.339.708,00	1.583.228.400,00	90,19
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	13.695.776,00	13.695.776,00	100,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	308.146.864,00	301.910.864,00	97,98
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	32.859.957.625,00	32.857.477.004,00	99,99
5.1.02.89.01	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	32.859.957.625,00	32.857.477.004,00	99,99
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Reguler	31.519.957.625,00	31.517.477.004,00	99,99
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS Kinerja	1.340.000.000,00	1.340.000.000,00	100,00
5.1.02.90	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.568.923.000,00	11.929.478.233,00	94,91
5.1.02.90.01	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.568.923.000,00	11.929.478.233,00	94,91
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	12.568.923.000,00	11.929.478.233,00	94,91
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.703.354.863,76	233.993.268.937,78	99,27
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.703.354.863,76	233.993.268.937,78	99,27
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	235.703.354.863,76	233.993.268.937,78	99,27
5.1.04	Belanja Subsidi	1.872.500.000,00	1.757.069.805,00	93,84
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.850.000.000,00	1.734.569.805,00	93,76
5.1.04.02.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.850.000.000,00	1.734.569.805,00	93,76
5.1.04.02.02.0001	Belanja Subsidi kepada BUMD	1.850.000.000,00	1.734.569.805,00	93,76
5.1.04.03	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
5.1.04.03.01	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
5.1.04.03.01.0001	Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	22.500.000,00	22.500.000,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	55.568.153.010,00	54.095.043.617,00	97,35

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah				
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2024				
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000,00	850.000.000,00	68,00
5.1.05.01.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000,00	850.000.000,00	68,00
5.1.05.01.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	1.250.000.000,00	850.000.000,00	68,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.973.288.730,00	22.161.135.799,00	96,46
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.981.523.880,00	12.527.256.393,00	96,50
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	12.981.523.880,00	12.527.256.393,00	96,50
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.377.900.000,00	2.320.300.000,00	97,58

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	% 2025
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	2.377.900.000,00	2.320.300.000,00	97,58
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.563.864.850,00	7.263.579.406,00	96,03
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	7.563.864.850,00	7.263.579.406,00	96,03
5.1.05.05.06	Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.1.05.05.06.0001	Belanja Hibah Uang kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	9.607.560.000,00	9.604.544.142,00	99,97
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.607.560.000,00	9.604.544.142,00	99,97
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	9.607.560.000,00	9.604.544.142,00	99,97
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.789.188.180,00	1.781.700.060,00	99,58
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.789.188.180,00	1.781.700.060,00	99,58
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.789.188.180,00	1.781.700.060,00	99,58
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	19.948.116.100,00	19.697.663.616,00	98,74
5.1.05.08.01	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	11.470.826.100,00	11.315.349.616,00	98,64
5.1.05.08.01.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOS	11.470.826.100,00	11.315.349.616,00	98,64
5.1.05.08.02	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.483.460.000,00	4.404.619.800,00	98,24
5.1.05.08.02.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	4.483.460.000,00	4.404.619.800,00	98,24
5.1.05.08.03	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.993.830.000,00	3.977.694.200,00	99,60
5.1.05.08.03.0001	Belanja Hibah Dana BOSP-BOP Kesetaraan	3.993.830.000,00	3.977.694.200,00	99,60
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	100,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	100,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	100,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	100,00
5.2	BELANJA MODAL	188.693.236.309,35	164.964.572.154,00	87,42
5.2.01	Belanja Modal Tanah	789.181.030,00	0,00	0,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	789.181.030,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03	Belanja Modal Lapangan	789.181.030,00	0,00	0,00
5.2.01.01.03.0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	789.181.030,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.312.548.678,00	86.721.319.727,00	80,81
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	540.050.000,00	526.172.812,00	97,43
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	540.050.000,00	526.172.812,00	97,43
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	135.000.000,00	133.409.500,00	98,82
5.2.02.01.03.0005	Belanja Modal Pompa	290.050.000,00	278.710.812,00	96,09
5.2.02.01.03.0006	Belanja Modal Mesin Bor	115.000.000,00	114.052.500,00	99,18
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	9.023.205.933,00	8.006.808.300,00	88,74
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	8.499.430.008,00	7.595.237.000,00	89,36
5.2.02.02.01.0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	4.205.281.782,00	3.450.450.000,00	82,05
5.2.02.02.01.0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	350.000.000,00	349.428.000,00	99,84
5.2.02.02.01.0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.270.000.000,00	1.175.659.000,00	92,57
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	111.382.910,00	107.215.000,00	96,26
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	2.557.670.050,00	2.512.485.000,00	98,23
5.2.02.02.01.0008	Belanja Modal Alat Angkutan Kereta Rel	5.095.266,00	0,00	0,00
5.2.02.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	523.775.925,00	411.571.300,00	78,58
5.2.02.02.02.0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	300.467.475,00	295.071.300,00	98,20
5.2.02.02.02.0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	223.308.450,00	116.500.000,00	52,17

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025				
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	240.337.164,00	205.376.856,00	85,45
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	624.432,00	624.432,00	100,00
5.2.02.03.02.0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	624.432,00	624.432,00	100,00
5.2.02.03.03	Belanja Modal Alat Ukur	239.712.732,00	204.752.424,00	85,42
5.2.02.03.03.0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	7.011.732,00	6.882.437,00	98,16
5.2.02.03.03.0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	196.626.000,00	161.961.487,00	82,37
5.2.02.03.03.0011	Belanja Modal Anak Timbangan/Biara	36.075.000,00	35.908.500,00	99,54
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	53.775.000,00	53.337.500,00	99,19
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	53.775.000,00	53.337.500,00	99,19
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	53.775.000,00	53.337.500,00	99,19
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	13.205.458.203,00	10.564.786.615,00	80,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	1.767.558.121,00	1.633.602.466,00	92,42
5.2.02.05.01.0002	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	636.377.921,00	609.699.081,00	95,81
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	1.126.680.200,00	1.019.403.385,00	90,48
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	10.711.693.795,00	8.234.416.142,00	76,87

1.1.2. Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

Pembangunan Kota Cirebon telah menunjukkan kemajuan dari tahun ke tahun. Berdasarkan realisasi indikator makro pembangunan Kota Cirebon memperlihatkan angka yang terus meningkat dengan capaian yang cukup menggembirakan. Namun demikian, angka-angka tersebut tidak lantas membuat Kota Cirebon berhenti berbenah untuk terus mengatasi permasalahan dan isu strategis yang muncul. Permasalahan di berbagai aspek pembangunan harus segera ditangani melalui pembangunan yang berkelanjutan. Perubahan lingkungan yang sangat pesat di masa depan juga memunculkan isu-isu strategis yang perlu diantisipasi agar tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Permasalahan pembangunan Kota Cirebon dirumuskan dari hasil analisis data yang telah tersaji dan hasil Focus Group Discussion (FGD) yang telah dilakukan oleh Bappelitbangda. Dari hasil tersebut permasalahan pembangunan kota Cirebon dapat dikategorikan dalam 5 (lima) aspek utama yaitu: (1) Aspek Geografi, (2) Aspek Demografi, (3) Aspek Kesejahteraan Masyarakat, (4) Aspek Daya Saing Daerah, dan (5) Aspek Pelayanan Umum.

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
GEOGRAFI	Sumber daya air	Terbatasnya sumber air bersih yang tersedia di wilayah Kota Cirebon.	• Kondisi hidrologi Intrusi air laut di kawasan pesisir • Status daya dukung air telah terlampaui di sebagian besar wilayah • Ketergantungan yang tinggi terhadap suplai air bersih dari luar wilayah
	Sumber daya lahan	Terbatasnya luas wilayah dengan proporsi kawasan terbangun yang tinggi.	• Luas wilayah administrasi relatif kecil. • Karakter kawasan perkotaan dengan intensitas lahan terbangun yang tinggi. • Masih lemahnya komitmen terhadap konsistensi pengendalian pemanfaatan ruang.

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
	Kualitas lingkungan hidup	Degradasi kualitas lingkungan hidup perkotaan.	• Belum terpenuhinya 20 persen luasan RTH publik di Kota Cirebon. • Belum optimalnya pengelolaan persampahan. • Dampak perubahan iklim di lingkungan perkotaan meningkat • Degradasi ekosistem lingkungan di kawasan pesisir • Pengendalian tutupan lahan yang rendah • Potensi Keanekaragaman hayati yang rendah • Masih tingginya ketergantungan terhadap energi fosil dan masih rendahnya pemanfaatan EBT pada berbagai sektor
	Kerawanan bencana	Risiko Bencana berada pada kategori sedang dengan tingkat kerentanan bencana umumnya relatif tinggi.	• Belum tersedianya early warning system multi bencana. • Belum optimalnya aksi mitigasi dan adaptasi bencana. • Belum tersedianya rencana kontigensi bencana. • Dampak perubahan iklim. • Dukungan infrastruktur belum sepenuhnya mengintegrasikan faktor resiko bencana. • Tingginya intensitas alih fungsi lahan. • Belum optimalnya kinerja penanggulangan bencana yang multisektor.
	Sumber daya pangan	Belum optimalnya sistem pangan yang berkelanjutan.	• Terbatasnya produksi pangan yang dihasilkan karena terbatasnya lahan pertanian dan perkebunan dan penggunaan teknologi pertanian belum optimal. • Pemanfaatan sumber daya perikanan sebagai sumber pangan belum dikelola secara optimal. • Ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan pangan dari luar wilayah. • Belum optimalnya pengembangan urban farming

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			melalui pemanfaatan lahan perkotaan untuk mendukung ketersediaan pangan. • Pengelolaan distribusi dan pergudangan yang belum efektif.
	Pengelolaan pesisir	Belum optimalnya pengelolaan kawasan pesisir, termasuk di dalamnya potensi ekonomi perikanan dan ekowisata pesisir.	• Masih rendahnya upaya konservasi keanekaragaman hayati. • Terjadi okupasi lahan pada kawasan tanah timbul di pesisir. • Penatagunaan lahan di kawasan tanah timbul belum berjalan efektif. • Pengendalian pemanfaatan ruang kawasan pesisir yang belum optimal. • Masih terbatasnya implementasi hasil inovasi penelitian dan pengembangan potensi pesisir. • Belum efektifnya koordinasi lintas lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan pesisir, antara lain dengan Pelindo dan PPN Kejawan.
	Pengelolaan ruang kota	Pemanfaatan ruang belum efektif dalam memenuhi kualitas ruang perkotaan yang layak huni dan berkelanjutan.	• Rencana pola ruang yang belum ideal karena persoalan status lahan dan kompleksitas pemanfaatan lahan eksisting. • Konsistensi pengendalian tutupan lahan masih rendah. • Masih lemahnya dukungan regulasi penegakan pelanggaran pemanfaatan ruang. • Masih terbatasnya SDM di bidang penataan ruang
DEMOGRAFI	Pertambahan penduduk	Laju pertumbuhan penduduk cenderung meningkat.	• Migrasi masuk terjadi dalam gelombang tenaga kerja (khususnya perempuan) • Jumlah kelahiran yang surplus terhadap jumlah kematian
	Distribusi penduduk	Distribusi penduduk yang kurang merata	• Penduduk kota Cirebon cenderung berdomisili di wilayah pusat kota • Sebaran layanan sarana

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			prasarana yang belum merata
	Kualitas sumber daya manusia	Kesenjangan kualitas sumber daya manusia.	• Terdapat kesenjangan kualifikasi pendidikan di masyarakat dimana proporsi lulusan pendidikan tinggi sangat rendah. • Belum meratanya derajat kesehatan masyarakat. Upaya pencegahan balita stunting belum optimal.
	Urbanisasi	Tekanan pada infrastruktur dan layanan publik.	• Ketersediaan lapangan kerja terpusat di perkotaan. • Kelengkapan infrastruktur terkonsentrasi di pusat perkotaan • Tingginya jumlah komuter yang beraktivitas di Kota Cirebon.
	Angkatan kerja dan penduduk lanjut usia	Tingginya proporsi penduduk usia produktif yang memiliki daya saing rendah memunculkan meningkatnya risiko ketergantungan dari penduduk lanjut usia.	• Tingkat pendidikan angkatan kerja didominasi oleh lulusan dasar dan menengah. • Rasio ketergantungan usia produktif cenderung tinggi. • Penanganan penduduk lanjut usia belum optimal.
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Kesejahteraan ekonomi		
	Ketimpangan	Ketimpangan pendapatan masih tinggi.	• Ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. • Distribusi pendapatan masyarakat kurang merata. • Kesenjangan pasar kerja. • Jaminan sosial yang belum menyeluruh. • Keterbatasan akses ke pelayanan sosial.
	Kemiskinan	Masih tingginya tingkat kemiskinan, di atas persentase penduduk miskin Provinsi Jawa Barat.	• Tingkat pendidikan kepala rumah tangga rendah, umumnya lulusan SD dan SMP. • Rendahnya akses ke fasilitas layanan rujukan tingkat lanjut. • Ketidakstabilan pekerjaan. • Akses yang terbatas terhadap air bersih dan sanitasi. • Terdapat fenomena siklus

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			kemiskinan yang diturunkan antar generasi.
	Pengangguran	Tingkat pengangguran masih tinggi	• Rendahnya kompetensi yang dimiliki pencari kerja. • Adanya kesenjangan kompetensi yang dimiliki dengan kebutuhan pasar kerja. • Kurang tersedianya pekerjaan fomal bagi pencari kerja lulusan SD dan SMP. • Masih rendahnya kompetensi nalaria realistik pada lulusan SMA Kejuruan untuk dapat bersaing di pasar kerja. • Tingkat pendidikan tenaga kerja didominasi lulusan pendidikan SLTA ke bawah, terutama yang berpendidikan SD dan SMA.
	Daya beli	Daya beli masyarakat masih rendah.	• Tingkat pendapatan riil sebagian besar masyarakat masih rendah. • Pengeluaran kebutuhan sehari-hari cenderung tinggi.
	Kesejahteraan sosial budaya		
	Akses layanan sosial	Belum meratanya akses layanan sosial	• Belum optimalnya verifikasi dan validasi data penduduk miskin secara berkala. • Belum terpadunya program layanan sosial di tingkat kota. • Kurangnya jumlah SDM yang terlibat pelayanan sosial.
	Keluarga sehat	Kota Cirebon termasuk dalam Kota dengan kategori Keluarga Tidak Sehat.	• Belum optimalnya penderita penyakit menular dan tidak menular yang melakukan pengobatan. • Minimnya penderita gangguan jiwa berat yang terobati. • Belum optimalnya pelaksanaan perilaku hidup sehat di masyarakat.
	Kualitas keluarga	Belum optimalnya pembangunan keluarga	• Terdapat fenomena disfungsi keluarga. • Masih tingginya keluarga yang rentan secara ekonomi. • Masih rendahnya pemahaman dan keterampilan dalam manajemen keluarga.

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
	Perlindungan anak	Masih terjadi peningkatan pada masing-masing kategori kasus kekerasan.	• Masih rendahnya kesadaran terhadap perlindungan anak. Tekanan ekonomi yang tinggi. • Diskriminasi terhadap kelompok rentan (kelompok minoritas, disabilitas, status sosial rendah). • Kurangnya pendidikan dan pengetahuan mengenai hak anak. • Maraknya paparan konten kekerasan dari media.
	Ketimpangan gender	Peningkatan Indeks Ketimpangan Gender	• Turunnya Indeks Pemberdayaan Gender. Masih terdapat budaya patriarki di sebagian kelompok masyarakat. Masih rendahnya kesadaran terhadap stereotif gender.
	Peran pemuda	Masih rendahnya peran dan partisipasi pemuda dalam pembangunan.	• Kurangnya anggota aktif yang memiliki komitmen dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan organisasi. • Kurangnya pemanfaatan teknologi dengan efektif untuk menarik perhatian pemuda. • Minimnya jumlah fasilitator atau pelatih yang berpengalaman dan berkualitas sehingga program tidak berjalan efektif. • Kurangnya program pelatihan yang memadai untuk mengembangkan keterampilan kepemimpinan dan organisasi di kalangan anggota muda dapat menghambat proses kaderisasi.
	Pembangunan kebudayaan	Masih minimnya upaya pelestarian budaya Cirebon	• Dukungan regulasi belum optimal. • Penggunaan atribut kebudayaan Cirebon belum melekat dalam keseharian masyarakat.
DAYA SAING DAERAH	Daya saing ekonomi daerah	Pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan.	• Menurunnya kontribusi dari sektor-sektor strategis.

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
		Belum optimalnya pertumbuhan potensi ekonomi lokal	• Investasi yang masuk di daerah belum optimal dalam mendorong tumbuhnya investasi lokal. • Produk-produk unggulan daerah masih mengalami hambatan di bidang pemasaran, permodalan, pemanfaatan teknologi dan informasi • Belum optimalnya sinergitas kerjasama ekonomi antar wilayah maupun antar pelaku ekonomi lokal. • Kurangnya akses sumber daya seperti modal, teknologi dan pelatihan. • Infrastruktur yang kurang memadai. • Minimnya inovasi dan ketergantungan daerah terhadap ketersediaan dan produksi pangan. Belum optimalnya pemanfaatan shelter bagi sektor informal.
		Daya saing IKM/UMKM yang masih rendah.	• Masih terbatasnya pemasaran produk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. • Masih terbatasnya akses keuangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah. • Masih terbatasnya inovasi dalam pengembangan produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah maupun Industri Kecil dan Menengah.
		Belum maksimalnya penataan dan pengelolaan pasar tradisional, baik dari segi kualitas layanan maupun okupansi kios pasar.	• Tingginya aktivitas ekonomi di Kota Cirebon belum sejalan dengan penataan dan pengelolaan pasar tradisional. • Kurangnya perhatian terhadap penataan infrastruktur fisik, mobilitas barang dan manusia. • Belum optimalnya strategi manajemen untuk mengoptimalkan okupansi kios. • Belum optimalnya kompetensi

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			SDM pelaku usaha di pasar tradisional.
		Kurang signifikannya peningkatan kualitas koperasi.	• Masih terdapat koperasi yang belum memenuhi kelengkapan legalitas usaha. • Manajemen yang masih konvensional. • Kurangnya akses terhadap sumber daya finansial. • Kurangnya pemberdayaan anggota koperasi. • Pola kemitraan antara koperasi dan usaha mikro-kecil belum optimal.
		Belum optimalnya pengelolaan pariwisata lokal dan industri kreatif sebagai sektor ekonomi potensial.	• Masih terbatasnya atraksi, aksesibilitas, kapasitas pengelolaan dan penerapan pariwisata berkelanjutan. • Kurang memadainya sarana dan prasarana pendukung pariwisata dan event-event yang diselenggarakan di Kota Cirebon. • Belum optimalnya kolaborasi pentahelix. • Kompetensi SDM industri kreatif masih di skala lokal. • Transformasi digital yang belum merata. • Promosi dan pemasaran belum efektif menjangkau pasar baru. • Kurangnya dukungan dan kebijakan yang memadai.
		Belum optimalnya sinergitas pelayanan perizinan.	• Keterbatasan SDM (tim teknis) dalam asesmen perijinan. • Dukungan regulasi masing-masing jenis perizinan belum optimal. • Proses bisnis pelayanan perizinan belum berjalan optimal. • Belum optimalnya kinerja pertimbangan teknis perijinan.
	Daya saing SDM	Terdapat gap kompetensi tenaga kerja.	• Angkatan kerja didominasi oleh lulusan SMA ke bawah. • Produktivitas tenaga kerja daerah tinggi tidak disertai dengan peningkatan

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			pendapatan per kapita. • Jenis pelatihan berbasis kompetensi belum memadai.
		Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).	• Pemanfaatan TIK belum sepenuhnya digunakan untuk kegiatan produktif.
	Daya saing infrastruktur	Layanan infrastruktur yang belum merata.	• Infrastruktur strategis terpusat di pusat perkotaan. • Perencanaan sebaran infrastruktur belum optimal. • Belum optimalnya keterlibatan swasta dalam penyediaan infrastruktur.
		Sistem transportasi massal yang belum optimal.	• Layanan BRT belum menjangkau seluruh area wilayah Kota Cirebon. • Belum terwujudnya integrasi antar moda transportasi. • Perencanaan jaringan transportasi belum kebutuhan pergerakan lintas wilayah.
		Tingkat kemacetan di Kota Cirebon belum tertangani.	• Tingginya intensitas aktivitas di pusat-pusat kegiatan. • Adanya perlintasan sebidang dengan jalur kereta api. • Perilaku ketidakdisiplinan masyarakat dalam berlalu lintas.
		Belum optimalnya pengelolaan sampah di tingkat kota.	• Volume sampah semakin bertambah, sementara penanganan sampah masih menggunakan metode sanitary landfill. • Masih rendahnya upaya pengurangan sampah dari sumbernya. • Kapasitas dan daya tampung fasilitas pengelolaan sampah di TPA Kopi Luhur masih sangat terbatas. • Keberadaan bank sampah belum efektif. • Peran dan partisipasi masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah belum optimal.

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
	Daya saing iklim investasi	Regulasi terkait insentif investasi masih terbatas.	• Belum ada kebijakan khusus terkait investasi. • Masih didominasi oleh investasi resiko rendah.
		Belum optimalnya kepastian ruang untuk investasi.	• Luas wilayah yang terbatas. • Layanan infrastruktur yang kurang mendukung. • Belum optimalnya ruang informasi bagi investor.
PELAYANAN UMUM	Tata kelola regulasi daerah	Tata kelola regulasi daerah	• Proses bisnis pembentukan regulasi daerah belum optimal. • Belum tersedia dukungan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan SOP pembentukan regulasi daerah di lingkup internal Pemda Kota Cirebon . • Belum dilakukan upaya pengukuran efektivitas regulasi daerah. • Komitmen pengendalian dan penegakan regulasi daerah belum berjalan konsisten. • Keterbatasan SDM, baik dalam hal jumlah maupun kapasitas.
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik belum berjalan optimal.	• Kebijakan arsitektur SPBE yang telah disusun belum diimplementasikan sepenuhnya. • Belum dilakuakn pengukuran efektivitas pada aplikasi-aplikasi penyelenggaraan layanan publik yang telah dibuat. • Pelayanan publik pada layanan publik prioritas belum terintegrasi. • Keamanan siber belum memenuhi standar.
	Pelayanan publik	Kualitas pelayanan publik belum optimal.	• Dukungan infrastruktur digital belum terpenuhi sesuai standar. • Penggunaan TIK belum merata. • Kompetensi digital penyelenggara dan pengguna pelayanan publik • Proses bisnis dalam penyelenggaraan pemerintahan belum efektif • Penyederhanaan struktur organisasi belum disesuaikan

Aspek Pembangunan Daerah	Permasalahan Pembangunan	Uraian Permasalahan	Akar Permasalahan
			sepenuhnya pasca penyetaraan jabatan • Masih terdapat gap dalam sinkronisasi kebijakan pembangunan makro dengan sektoral • Penerapan Aspek Pengelolaan Kegiatan Statistik belum dilaksanakan secara merata
	Manajemen ASN	Pengelolaan sumber daya manusia ASN belum optimal.	• Penerapan sistem merit belum berjalan sepenuhnya. • Belum diterapkan manajemen talenta. • Distribusi SDM belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan unit kerja
	Manajemen resiko	Belum tersedianya manajemen resiko yang handal	• Proses MR belum diterapkan sesuai kebijakan • Struktur MR belum berjalan • Perencanaan belum mempertimbangkan risiko • Kompetensi pengelolaan risiko pada pegawai belum merata
	Inovasi daerah	Belum terbentuk ekosistem inovasi daerah yang efektif.	• Belum tersedia regulasi daerah untuk pengembangan inovasi daerah. • Belum optimalnya dukungan kelembagaan dalam pengelolaan inovasi daerah. • Keikutsertaan dalam gelaran inovasi masih minim. • Kemitraan dan kolaborasi belum optimal.

1.1.2. Penerapan Standar Pelayanan Minimal

Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dimana dalam Bab 2 pasal 4 dijelaskan bahwa untuk mendapatkan Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengumpulan Data
- b. Penghitungan Kebutuhan Dasar Pelayanan
- c. Penyusunan Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar

d. Pelaksanaan Pemenuhan Layanan Dasar

Keempat tahapan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pengumpulan Data

Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, padapasal 11 ayat 3 yang menyebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib yangberkaitan dengan pelayanan dasar adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan pelayanan dasar. Kemudian pada pasal 18 mengamanatkan bahwa penyelenggara pemerintahan daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar harus berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Atas ketentuan tersebut pemerintah melalui menteri dalam negeri menetapkan keputusan menteri dalam negeri nomor 59 tahu 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dalam pasl 4 ayat (4) point a penerapan Standar Pelayanan Minimal adalah pengumpulan data.

Perangkat Daerah dalam melakukan pengumpulan data meliputi :

1. Jumlah dan identitas lengkap warga negara yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar warga negara secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya
2. Jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk sarana dan prasarana yang tersedia

Dalam pengumpulan data Perangkat Daerah pengampu urusan SPM dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021.

1. Urusan Pendidikan untuk Standar Jumlah dan Kualitas Barang pendataan meliputi :
 - a. Data Lulusan yang memiliki standar kompetensi
 - b. Perlengkapan dasar peserta didik pada anak usia dini, peserta didik pada sekolah dasar dan peserta didik pada anak usia sekolah menengah serta pendidikan kesetaraan

- c. Jenis Pendidik dan tenaga kependidikan
- d. Kualitas Pendidik
- 2. Urusan Kesehatan untuk Standar Jumlah dan Kualitas Barang pendataan meliputi :
 - a. Jumlah Ibu Hamil, Ibu Bersalin, Bayi Baru Lahir, Jumlah Balita, Jumlah Anak pada usia pendidikan dasar, Jumlah Usia Produktif dan Lansia
 - b. Jumlah Penderita Hipertensi, Diabetes Mellitus, Jumlah ODGJ, Penderita HIV
 - c. Sarana yang mendukung pelayanan tersebut antara lain vaksin, Media Informasi/KIE, Jarum Suntik, Buku-buku pedoman, dll
- 3. Urusan Pekerjaan Umum untuk Standar Jumlah dan Kualitas Barang pendataan meliputi:
 - a. Jumlah Penduduk yang terdampak limbah
 - b. Jumlah akses air bersih untuk warga yang terdampak
- 4. Urusan Perumahan Rakyat untuk Standar Jumlah dan Kualitas Barang pendataan meliputi :
 - a. Jumlah Rasio Rumah yang mengalami rehabilitasi jika terjadi bencana
 - b. Jumlah Rasio Rumah layak huni yang mengalami rehabilitasi
- 5. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk Standar Jumlah dan Kualitas Barang pendataan meliputi :
 - a. Jumlah Personil Pemadam Kebakaran yang bersertifikat, Jumlah Personil Penegakkan Perda, Jumlah tenaga kegawatdaruratan yang berkompetensi
 - b. Jumlah unit pemadam kebakaran
 - c. Kebutuhan tenaga kegawatdaruratan serta tenda beserta kelengkapan pendukungnya
 - d. engadaan informasi kebencanaan
- 6. Urusan Sosial untuk Standar Jumlah dan Kualitas Barang pendataan meliputi
 - a. Jumlah Penyandang disabilitas terlantar, Jumlah anak terlantar, anak gelandangan, Jumlah Pengemis, Korban Bencana, lansia terlantar
 - b. Sarana layanan kedaruratan
 - c. Sarana sandang, pangan dan rehabilitasi rumah

- d. Jumlah panti
- e. Sarana Jaminan Perlindungan dan Pendampingan Sosial

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Pihak Swasta dan Pihak Terkait Lainnya dalam pembangunan Nasional.

Capaian Kinerja Makro menggunakan indikator sebagai berikut::

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Makro

No.	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja 2025
1	Indeks Pembangunan Manusia	78.09	78.99	1.15
2	Angka Kemiskinan	29.17	28.12	-3.60
3	Angka Pengangguran	6.29	6.41	1.91
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.02	5.11	1.79
5	Pengeluaran Per Kapita	30.53	33.07	8.32
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.424	0.422	-0.47

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja Urusan Pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan Daerah memuat data/informasi kinerja setiap Urusan Pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing Urusan Pemerintah dan Urusan Penunjang. Data/Informasi setiap indikator wajib diisi oleh Pemerintah Daerah secara lengkap.

2.2.1 Kinerja Kunci Urusan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

a. Pendidikan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan anak usia dini	Jumlah anak usia 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) tahun pada kabupaten/kota yang bersangkutan	8.877	12.258	72.42
1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang sedang belajar di satuan pendidikan dasar	Jumlah anak usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun pada kab/kota yang bersangkutan	53.863	54.310	99.18
1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	Jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan/atau menengah	2.334	2.382	97.98
1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah seluruh toilet	155	278	55.76

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	Jumlah ruang kelas	923	1.109	83.23

b. Kesehatan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.b.1	Persentase kematian ibu	Jumlah kematian ibu tahun N	Jumlah ibu melahirkan tahun N	9	3.925	0.23
1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan dengan panjang badan atau tinggi badan kurang dari -2 Standar deviasi pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu	Jumlah balita umur 0 sampai 59 bulan yang diukur panjang badan atau tinggi badan pada suatu wilayah dan kurun waktu yang sama	13.95	14.07	99,15
1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun (nominator)	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.941	4.054	97.21
1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah sasaran ibu bersalin di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama	3.925	4.054	96,82
1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan	Jumlah sasaran bayi baru lahir di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam	3.937	4.057	97,04

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
		kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dalam kurun waktu satu tahun	kurun waktu satu tahun yang sama			
1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	Jumlah Balita usia 12-23 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar 1 + jumlah balita usia 24-35 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 2 + balita usia 36-59 bulan mendapatkan pelayanan sesuai standar 3	Jumlah balita usia 12-59 bulan di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut pada kurun waktu satu tahun yang sama	16.523	17.586	93,96
1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun ajaran	Jumlah semua anak usia pendidikan dasar yang ada di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran yang sama	53.196	53.196	100
1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota yang mendapatkan layanan kesehatan produktif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang usia 15–59 tahun di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun	183.072	183.072	100
1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	Jumlah warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar minimal 1 kali di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun	Jumlah semua warga negara berusia 60 tahun atau lebih yang ada di suatu wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama (denominator)	31.385	31.385	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
		waktu satu tahun (nominator)				
1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	Jumlah penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita hipertensi usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerjanya berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	26.622	26.622	100
1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	Jumlah penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun di dalam wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah estimasi penderita diabetes melitus usia ≥ 15 tahun yang berada di dalam wilayah kerja kabupaten/kota berdasarkan angka prevalensi kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	5.916	5.916	100
1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat di wilayah kerja kabupaten/kota yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa berat berdasarkan proyeksi di wilayah kerja kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	745	745	100
1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	Jumlah orang terduga Tuberkulosis yang dilakukan pemeriksaan penunjang dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah perkiraan orang yang terduga Tuberkulosis dalam kurun waktu satu tahun yang sama.	10.519	10.519	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus yang mendapatkan pelayanan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi Human Immunodeficiency Virus di kabupaten/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama	11.533	11.533	100

c. Sosial

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah penyandang disabilitas terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi penyandang disabilitas terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	189	189	100
1.f.2	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah anak terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi anak terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	451	451	100
1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah lanjut usia terlantar di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi lanjut usia terlantar di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	455	455	100
1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi gelandangan dan pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	16	16	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	Jumlah korban bencana alam, sosial dan non alam kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	Populasi korban bencana alam, sosial dan non alam yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	433	433	100
1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Jumlah penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	Populasi masyarakat miskin, fakir miskin dan kelompok rentan yang membutuhkan pemenuhan kebutuhan dasar cakupan daerah kabupaten/kota	145.919	164.972	88.45

d. Ketentraman, ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	Jumlah dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku pada tahun N	Jumlah dokumen kebencanaan (Kajian Risiko Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana, dan Rencana Kontinjensi) yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten/kota = 3	3	3	100
1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	Jumlah pengaduan Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditangani	Jumlah pengaduan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan	48	48	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	Jumlah peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi yang ditegakkan	Jumlah keseluruhan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang memuat sanksi	31	31	100
1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara dan aparatur yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah warga negara yang tinggal di kawasan rawan bencana berdasarkan target yang telah ditetapkan	9.975	20.898	47.73
1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana	56.628	56.628	100
1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap	Total kejadian kebakaran di kabupaten/kota	110	111	99.10

e. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	Jumlah warga negara korban bencana kabupaten/kota yang mendapatkan layanan penyediaan rumah layak huni dan rehabilitasi rumah pada tahun N	Jumlah total rencana warga negara korban bencana kabupaten/kota yang akan ditangani pada tahun N	0	0	0
1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah	Luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha yang	Target luas kawasan kumuh di bawah 10 Ha pada tahun N	9.766	7	139,51

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
	10 Ha yang ditangani	ditangani tahun N (Ha)				
1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani pada tahun N	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni pada Tahun N	162	3.224	5.02
1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	Realisasi jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	Target jumlah perumahan yang dilaksanakan penyelenggaraan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di tahun N	3	3	100

f. Pekerjaan Umum

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota dalam kondisi baik (Ha)	Luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota (Ha)	0	0	-
1.c.2	Persentase kemandapan jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kondisi baik + panjang jalan kondisi sedang) panjang jalan kewenangan kabupaten/kota (Km)	Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota (Km)	128.92	139.4	92.48
1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah	Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N	Jumlah total penduduk kabupaten/kota	67.294	80.198	83.91

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
	penduduk di kabupaten/kota					
1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di Pengolahan Lumpur Tinja + jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah rumah di kabupaten/kota	71.797	80.198	89.52
1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir (ha)	Luas kawasan permukiman rawan banjir yang telah ditentukan dalam dokumen perencanaan daerah dengan mempertimbangkan kajian risiko bencana banjir (ha)	81.4	81.4	100
1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob yang terlindungi infrastruktur pengaman pantai kewenangan kabupaten/kota (Ha)	Luas kawasan sepanjang pantai yang rawan abrasi dan banjir rob kewenangan kabupaten/kota (Ha)	3.55	18.1	19.61
1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	Jumlah pemanfaatan Persetujuan Bangunan Gedung yang digunakan sesuai peruntukannya	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku	236	236	100
1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat	Jumlah pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung untuk	Jumlah permohonan Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan	604	604	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
	berpenghasilan rendah	masyarakat berpenghasilan rendah yang diterbitkan	rendah yang telah ditetapkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk			
1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis	Jumlah kebutuhan tenaga kerja operator dan teknis/analisis yang terlibat dalam kegiatan konstruksi pemerintah kabupaten/kota	131	209	62.68
1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah dinilai pelaksanaannya dalam waktu 1 tahun	Jumlah Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan dalam waktu 1 tahun	1	1	100

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

a. Kebudayaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	-	-	-
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	-	-	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
	pusat seni dan pusat sejarah	kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1				

b. Kepemudaan dan Olahraga

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan	Jumlah cagar budaya dan obyek pemajuan kebudayaan yang telah ditetapkan	-	-	-
2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N - Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	Jumlah kunjungan ke pusat peninggalan bersejarah tahun N-1	-	-	-

c. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah anak yang memerlukan perlindungan khusus (penduduk usia kurang dari 18 tahun)	33	33	100
2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	Jumlah perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang	42	42	100.

d. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	Akta kelahiran yang diterbitkan	Jumlah anak usia 0 – 17 tahun	98.488	102.548	96,04
2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Jumlah anak yang memiliki Kartu Identitas Anak	Jumlah anak wajib Kartu Identitas Anak	94.312	96.280	97,96
2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	Jumlah data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	2 dokumen	2	2	100
2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	Jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik	Jumlah penduduk 17 tahun ke atas	260.666	262.871	99,16.
2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta kematian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (kematian) yang tercatat dan melaporkan	3.441	3.441	100
2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perkawinan yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perkawinan) yang tercatat dan melaporkan	130.728	130.728	100
2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	Akta perceraian yang diterbitkan	Jumlah penduduk yang mengalami peristiwa kependudukan (perceraian) yang tercatat dan melaporkan	9.369	9.369	100

e. Pemberdayaan Masyarakat dan desa

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang per tahun berdasarkan indeks desa per tahun	Jumlah desa tertinggal (per-awal tahun N)	0	0	0
2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Jumlah desa berkembang yang memenuhi kriteria desa maju dan mandiri per tahun berdasarkan Indeks Desa per tahun	Jumlah desa berkembang (per-awal tahun N)	0	0	0
2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Jumlah kerja sama desa yang telah ditetapkan dan berlaku	Jumlah kerja sama desa yang ditangani	0	0	0

f. Penanaman Modal

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.l.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	(Jumlah nilai investasi tahun N- Jumlah nilai investasi tahun N-1) di kabupaten/kota	Jumlah nilai investasi tahun N-1 di kabupaten/kota	870.416.968.003	983.290.301.701	-11.48
2.l.2	Realisasi total terhadap target investasi	Total realisasi investasi kabupaten/kota	Target investasi kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi kepada kabupaten/kota yang bersangkutan	1.853.707.269.704	980.000.000.000	189.15

g. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	Σ Volume usaha koperasi tahun berjalan - Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	Σ Volume usaha koperasi tahun sebelumnya	749.811.773.683	726.255.898.539	3.24
2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	Σ Usaha mikro yang memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)	Σ Usaha mikro	1.201	5.353	22.44

h. Tenaga Kerja

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke Rencana Tenaga Kerja Daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang direncanakan di kabupaten/kota	9	9	100
2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	Jumlah perusahaan	1.149	3.841	29.91

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	Jumlah pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten/Kota	304	365	83.29

i. Komunikasi dan Informasi

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	Jumlah Perangkat Daerah (PD) dan atau unit pelaksana teknis daerah	32	32	100
2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan Publik	377	377	100
2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	Jumlah penduduk	235.297	235.297	100

j. Statistik

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang di laporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	Jumlah daftar data yang disepakati oleh forum satu data daerah	798	1.041	76.6

k. Persandian

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	Nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI) hasil verifikasi	Nilai optimal indeks Keamanan Informasi (KAMI) (918)	679	918	73.97

l. Pertanahan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	Luas tanah yang telah bersertifikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah	Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah	2.237.468	3.841.141	58.25
2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Luas Rencana Pola Ruang yang telah terwujud pada Kondisi Eksisting	Luas Rencana Pola Ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	1	1	100
2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang sudah legal	Jumlah Rencana Detail Tata Ruang yang diamanatkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah	4	4	100

m. Perhubungan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	KTDaerah = (KTD x WTD) + (KTL x WTL)	-	1	-	100
2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	V/C ratio di jalan Kabupaten/Kota	-	0.48	-	0.48
2.i.3	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	Jumlah perusahaan angkutan umum yang terdata	0	17	0

n. Lingkungan Hidup

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang taat terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan perundang-undangan	Jumlah target tahunan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan pengawasan secara langsung	59	80	73.75
2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	Jumlah sampah yang diangkut, pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah	Jumlah seluruh timbulan sampah di wilayah kabupaten/kota	71.218,01	79.964,75	89.06

o. Pangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten/Kota	Target jumlah cadangan pangan	51.58	36.23	142.37

p. Perpustakaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	$TKM = ((0.15 \times \text{Pra Membaca}) + (0.50 \times \text{Saat Membaca}) + (0.35 \times \text{Pasca Membaca})) \times 100$	-	58.18	-	58.18
2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	$IPLM = ((0,30 \times \text{Dimensi Kepatuhan}) + (0,70 \times \text{Dimensi Kinerja})) \times 100$	-	9.93	-	9.93

q. Kearsipan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	$T = (a + i + s + j)/4$	-	67.1	-	6.10

r. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia	Total Fertility Rate/TFR kabupaten/kota	Target Fertility Rate/TFR Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh	1.99	1.99	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
	Subur usia 15-49 Tahun		Pemerintah Pusat terhadap kabupaten/kota yang bersangkutan			
2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	Total peserta Keluarga Berencana aktif modern	Total pasangan usia subur usia 15–49 tahun	26.847	43.269	62.05
2.h.3	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	Persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota	Target persentase kebutuhan ber-Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need) kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk kabupaten/kota yang bersangkutan	2.277	9.475	24.03

2.2.3 Capaian Indikator Urusan Pilihan

a. Pariwisata

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	Realisasi investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum yang dapat diperoleh dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	Realisasi investasi Tahun N	-	-	-
3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	Jumlah wisatawan asing tahun N – Jumlah	Jumlah wisatawan asing tahun N-1	36.885	36.881	0,01

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
		wisatawan asing tahun N-1				
3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	Jumlah wisatawan tahun N – Jumlah wisatawan tahun N-1	Jumlah wisatawan tahun N-1	4.963.144	4.634.851	7.08

b. Perindustrian

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	Pencapaian dari setiap sasaran pembangunan industri daerah dihitung dengan cara membandingkan antara target yang ada dalam dokumen perencanaan pembangunan industri daerah tahunan	-	-	-	-

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah seluruh pelaku usaha industri kecil dan menengah	50	113	44.25
3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N – Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	Jumlah industri kecil dan menengah tahun N-1	2.347	2.227	5.39
3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	Nilai investasi sektor industri	Total investasi seluruh sektor	11.747.318.175	1.736.914.715.559	0.68

c. Perdagangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya bertanda tera sah yang berlaku	Jumlah potensi Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab/kota	6.209	5.700	108.93

d. Pertanian

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	Produksi tanaman pangan tahun N – Produksi tanaman pangan tahun N-1	Produksi tanaman pangan tahun N-1	1.154,3	996.6	15.82

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	Produksi hortikultura tahun N – Produksi hortikultura tahun N-1	Produksi hortikultura tahun N-1	488.92	377.4	29.55
3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	Produksi komoditas peternakan tahun N – Produksi komoditas peternakan tahun N-1	Produksi komoditas peternakan tahun N-1	12.892,58	9.475,02	36.07
3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	Luas wilayah terkendali dari penyakit hewan menular strategis tahun ini	Luas Wilayah yang terdampak penyakit hewan menular strategis	37.3	37.3	100

e. Kelautan dan Peikanan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	Angka KI = Angka KRT + Angka KLRT + Angka KTT	-	42.95	-	42.95
3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	Produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	Target produksi perikanan tangkap dan budidaya (ton)	8.442,72	5.466,9	154.43

2.2.4 Capaian Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

a. Perencanaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.a.1	Persentase kesesuaian antara Rencana Kerja	Program dan/atau kegiatan yang dianggarkan	Program kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang	17	17	100

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
	Pemerintah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	dalam peraturan daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan direalisasikan	berkaitan dengan 17 Program prioritas presiden			

b. Keuangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.b.1	Persentase belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya	Anggaran belanja pegawai daerah di luar tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari Transfer ke Daerah (TKD)	Anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	743.442.214.921,81	1.783.291.694.082	41.69
4.b.2	Persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah	Realisasi Pendapatan Asli Daerah	Realisasi pendapatan daerah	658.858.379.367	1.631.933.046.744	40.37
4.b.3	Persentase realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar terhadap total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	Total realisasi belanja urusan wajib pelayanan dasar tahun N	Total realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun N	1.138.631.926.528,78	1.649.388.268.851,78	69.03

4.b.4	Persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik	Total belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	153.068.846.784,23	1.783.291.694.082	8.58
-------	---	--	---	--------------------	-------------------	------

c. Kelembagaan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.c	Persentase Aparatur Sipil Negara pendidikan perguruan tinggi (Aparatur Sipil Negara tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara lulusan perguruan tinggi (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah Aparatur Sipil Negara (tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	1.698	2.348	72.32

d. Fungsi Pengawasan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.e.1	Maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	2	-	2
4.e.2	Kapabilitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (APIP)	Nilai 1/2/3/4/5	-	3	-	3
4.e.3	Manajemen risiko Indeks	Nilai 1/Nilai 2/Nilai 3/Nilai 4/Nilai 5	-	2	-	2

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.e.4	Persentase tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran N-1	Tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran Tahun N-1	Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan tahun anggaran tahun N-1	998	1.343	74.31

e. Pengadaan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.f.1	Tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ)	Skor indikator tingkat kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	-	40	-	40.00
4.f.2	Pemanfaatan sistem pengadaan	Skor indikator pemanfaatan sistem pengadaan	-	19	-	19.00
4.f.3	Kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa (SDM PBJ)	Skor indikator kualifikasi dan kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa	-	18	-	18.00

f. Hubungan dengan Perwakilan Daerah

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.g.1	Ketepatan Waktu Penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun N	Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu	-	Tepat	-	Tepat
4.g.2	Persentase penetapan	Skor indikator	Jumlah Peraturan	Jumlah Rancangan	-	-

	Rancangan Peraturan Daerah tahun N	pemanfaatan sistem pengadaan	Daerah yang ditetapkan Tahun N	Peraturan Daerah yang tertuang dalam program pembentukan peraturan daerah tahun N		
--	------------------------------------	------------------------------	--------------------------------	---	--	--

g. Pelayanan Publik

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.h	Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	Nilai Penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik	-	95.09	-	95.09

h. Penelitian dan Pengembangan

No IKK	IKK	Definisi Parameter Pembilang	Definisi Parameter Penyebut	Nilai Pembilang	Nilai Penyebut	Capaian
4.d	Persentase perangkat daerah yang menerapkan inovasi dan telah menjadi bagian dari program kegiatan	Jumlah produk inovasi perangkat daerah yang menjadi bagian dari program dan atau kegiatan perangkat daerah	Jumlah produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah	34	34	100

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif, yang dilakukan secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan kewajiban melaporkan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahanya melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon yang dibuat dengan berpedoman pada ketentuan yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2016 Tentang

Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025 memuat gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, RKT Tahun 2025, RKPD Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan realisasinya, kemudian realisasi dan target tersebut dilakukan penghitungan untuk menemukan selisih atau celah kinerja (performance gap). pada umumnya penghitungan capaian menggunakan rumus $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\%$, jika semakin tinggi realisasi semakin baik, namun jika semakin rendah realisasi semakin baik maka menggunakan rumus $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\%$ Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mendapat strategi yang tepat dalam rangka perbaikan di masa yang akan datang (performance improvement). Predikat capaian kinerja dapat dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna

Persentase	Predikat	Kode Warna
<100%	Tidak tercapai	Merah
=100%	Tercapai / Sesuai Target	Hijau
>100%	Melebihi Target	Biru

Sementara predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (<100%) dilakukan pendekatan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Tabel Predikat Capaian Kinerja

Predikat	Rata Rata Capaian
Sangat Tinggi	>90
Tinggi	75.00 – 89.99
Sedang	65.00 – 74.99
Rendah	50.00 – 64.99
Sangat Rendah	0 – 49.99

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran utama keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis, dimana hal tersebut merupakan ejawantah dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau Rencana Pemerintah Daerah. Melalui penetapan indikator kinerja utama diharapkan pencapaian kinerja dapat lebih fokus dan terukur. Setelah melalui analisis dan reviu Indikator Kinerja Utama tersebut ditetapkan melalui Keputusan Wali Kota Cirebon Nomor 84 Tahun 2026 tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2025 didasarkan pada Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029, sehingga seluruh sasaran dan indikator tersebut menjadi sasaran dan indikator yang diperjanjikan. Hasil pengukuran atas akuntabilitas kinerja melalui capaian Indikator Kinerja Utama sekaligus Perjanjian Kinerja Tahun 2025 disajikan pada tabel sebagai berikut:

A.1. Pengukuran, Analisis, dan Evaluasi Pencapaian Kinerja

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan ataupun kegagalan terkait pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan, khususnya memberikan gambaran pencapaian terhadap indikator kinerja utama (IKU) dimana indikator tersebut juga diperjanjikan sebagai Perjanjian Kinerja Wali Kota Tahun 2025. Hasil pengukuran tersebut kemudian dianalisis guna mendapatkan informasi yang akurat terkait faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi

kendala. Hal ini menjadi informasi yang valid guna melakukan evaluasi terhadap keberhasilan ataupun kegagalan dari suatu indikator yang telah ditetapkan.

Pada konteks pembahasan dalam laporan kinerja di masa transisi antara Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan kinerja ini menyajikan informasi mengenai capaian sasaran dan indikator Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta sasaran dan indikator yang merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sasaran dan indikator RPD Tahun 2025 diposisikan sebagai sasaran dan indikator transisi, mengingat RPD tersebut hanya berlaku sementara dan tidak lagi digunakan pada Tahun 2026. Oleh karena itu, dalam laporan kinerja ini capaian sasaran dan indikator RPD tidak diulas secara mendalam, melainkan disajikan secara ringkas sebagai gambaran pelaksanaan pembangunan pada masa peralihan perencanaan.

Sementara itu, sasaran dan indikator RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Wali Kota menjadi fokus utama pembahasan dalam laporan ini. Uraian terhadap capaian sasaran dan indikator RPJMD dilakukan secara lebih mendalam dan komprehensif, karena hasil evaluasinya digunakan sebagai dasar penilaian kinerja pemerintah daerah serta menjadi bahan perumusan tindak lanjut dan penyempurnaan pelaksanaan pembangunan pada tahun berikutnya.

A.2. Capaian Sasaran dan Indikator Kinerja (Berdasar RPJMD dan PK Perubahan terakhir)

Sebagai upaya memberi gambaran pencapaian target atas kinerja yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon secara komprehensif serta dalam rangka keperluan menganalisa dan mengevaluasi seluruh sasaran strategis yang telah ditetapkan, kami lakukan analisa setiap indikator pada tujuan dan sasaran strategis, berdasarkan analisa tersebut bahwa sasaran dengan rata-rata pencapaian indikator tertinggi adalah sasaran 2.2 “Meningkatnya Iklim Investasi yang Kompetitif” dengan rata-rata capaian indikator 389,04%, sementara sasaran dengan pencapaian terendah adalah sasaran 3.5 “Meningkatnya Inovasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pelayanan Publik” dengan pencapaian 89,65%, sementara rata-rata pencapaian Indikator pada seluruh Tujuan/Sasaran adalah 135,86%. Masing-masing Tujuan/Sasaran serta

indikatornya akan dijelaskan secara terperinci dengan memuat analisa dan evaluasi sebagai berikut:

1. Perbandingan Realisasi kinerja tahun ini dengan target
2. Perbandingan realisasi kinerja dengan target beberapa tahun lalu
3. Perbandingan dengan target realisasi tahun ini dengan target jangka menengah RPJMD
4. Perbandingan target tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan (kendala) serta alternative solusi
6. Analisis Program/Kegiatan yang mendukung keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja
7. Analisis atas efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya (akan dijelaskan secara lebih rinci pada sub bab tersendiri)

Pengukuran, analisa dan evaluasi tersebut dijelaskan per masing-masing Sasaran sebagai berikut :

Tujuan 1 : "Terwujudnya SDM yang Unggul, Kompetitif dan Berkarakter"

"Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter ", sesuai dengan arah kebijakan dalam Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah 2025-2029, terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter menjadi tujuan ke 1 (satu) dalam perencanaan strategis transisi. Tujuan "Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter memiliki 4 (empat) sasaran, akan dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.4

Capaian Kinerja Tujuan 1 "Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter" Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1 (2024)	2025		
1.	Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif, dan berkarakter	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Poin	77,91	78,09	78,99	80,30	101,38%
Rata Rata Capaian Indikator Kinerja								101,38%

Tujuan "Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter" diukur oleh 1 (satu) indikator yang lazim digunakan dalam mengukur sejauh mana kualitas sumber daya manusia sebagai berikut:

Pencapaian Indikator ke – 1 Indeks Pembangunan Manusia

Gambar 2.1 Infografis Indeks Pembangunan Manusia (IPM)



Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah. IPM dikembangkan oleh *United Nations Development Programme (UNDP)* dan

mengukur tiga dimensi utama, Kesehatan, Pendidikan, dan Standar Hidup Layak melalui pengukuran angka pengeluaran perkapita.

IPM dinyatakan dalam angka antara 0 hingga 100, di mana semakin tinggi angka IPM, semakin baik tingkat pembangunan manusia di daerah tersebut. Pemerintah Kota Cirebon menjadikan IPM sebagai indikator dalam Tujuan ke-1 mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap upaya meningkatkan kesejahteraan di Kota Cirebon. Pengukuran pada IPM dapat menjadi evaluasi berharga bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk menganalisa keberhasilan pembangunan sosial dan ekonomi, membantu perencanaan dan prioritas kebijakan, serta menentukan alokasi anggaran yang tepat.

Berdasarkan data yang di rilis BPS pada Berita Resmi Statistik Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon tahun 2025 terus mengalami kemajuan dan peningkatan mencapai 78,99 meningkat 0,90 poin dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 78,09 poin.

Gambar 2.2

Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Tahun 2025



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Cirebon, 2025

Selama periode tersebut, IPM Kota Cirebon rata-rata tumbuh sebesar 0,90 persen per tahun, disandingkan dengan target Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2025 maka capaian Kinerja pada indikator ini adalah : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% =$

$\frac{78,99}{77,91} \times 100\% = 101,38\%$ IPM Kota Cirebon **lebih tinggi daripada rata-rata IPM Nasional Tahun 2025** yaitu 75,90.

Gambar 2.3

IPM Kota Cirebon 2021-2025



Sumber : BPS Kota Cirebon-Cirebon Satu Data, diolah

Dalam pencapaian IPM tahun 2025 berikut faktor pendukung, penghambat serta strategi pemecahan masalah sebagai evaluasi untuk implementasi kinerja pada tahun berikutnya.

Tabel 2.5

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
“Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
- Tersedianya fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, serta tenaga kesehatan yang mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat. - Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur	- Masih terdapat kesenjangan tingkat pendidikan pada sebagian masyarakat, terutama terkait rata-rata lama sekolah. - Keterbatasan kesempatan kerja yang berkualitas sehingga berdampak pada	- Meningkatkan akses pelayanan kesehatan, kualitas layanan kesehatan, sarana prasarana, serta lingkungan yang mendukung hidup sehat. - HLS ditingkatkan melalui program wajib belajar dan pencegahan putus sekolah, sementara RLS ditingkatkan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
panjang dan hidup sehat. • Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk usia 7 tahun ke atas dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. • Standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. • Dukungan program pemberdayaan ekonomi masyarakat, termasuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.	tingkat pendapatan masyarakat. • Masih adanya kelompok masyarakat yang memiliki akses terbatas terhadap layanan kesehatan berkualitas. • Tingkat kemiskinan dan kerentanan ekonomi pada sebagian masyarakat yang mempengaruhi kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. • Belum meratanya kualitas sarana pendidikan dan kesehatan di beberapa wilayah. • Dampak kondisi ekonomi makro dan dinamika sosial yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat.	dengan mendorong pendidikan kesetaraan (paket A/B/C) serta pendidikan orang dewasa untuk mengurangi kesenjangan pendidikan. • Meningkatkan daya beli masyarakat dengan melibatkan kombinasi kebijakan pemerintah dan aksi korporasi untuk menjaga stabilitas pendapatan dan harga. • Mendorong pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal guna meningkatkan pendapatan masyarakat.

Evaluasi Tujuan 1 “Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter”

Tujuan 1 “Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter” yang ditetapkan dengan pengukuran pada 1 indikator memiliki rata-rata pencapaian **101,38%**. Pencapaian ini menjadi trend positif adanya *impact* dari upaya pembangunan baik secara fisik maupun non fisik oleh Pemerintah Kota Cirebon.

Pencapaian Tujuan 1 “Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter”, merupakan gambaran makro yang didukung 16 program yang tersebar di 4 sasaran dengan jumlah anggaran Rp. 491.631.279.699 dan realisasi Rp. 461.675.518.247 atau 94%. Sebagai upaya mempertahankan pencapaian kinerja berikut adalah faktor yang mendukung, kendala serta strategi pemecahan masalah juga akan terurai secara komprehensif pada setiap sasaran :

Sasaran 1.1 “Meningkatnya Akses dan Mutu Pendidikan yang berkualitas”

Tabel 2.6

Capaian Sasaran 1.1 “ Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1 (2024)	2025		
1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	Harapan Lama Sekolah	Persen	13,18	13,17	13,45	13,23	102,05%
		Angka Literasi/Numerasi	Skor	82,00	67,00	79,28	87,00	94,61%
		Rata-rata Lama Sekolah	Persen	10,63	13,16	10,54	13,23	99,15%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								98,6%

Sasaran Strategis 1.1 “Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas” merupakan upaya mendukung Visi Misi Kota Cirebon dari bidang peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran di tetapkan tiga indikator yaitu rata-rata lama sekolah, angka

literasi/numerasi dan harapan lama sekolah dimana ketiganya juga ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon.

Pencapaian Indikator ke-1 dan ke-2 “Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah”

Rata-rata Lama Sekolah “RLS” adalah jumlah rata-rata tahun pendidikan yang telah dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas sementara Harapan Lama Sekolah atau HLS adalah perkiraan jumlah tahun sekolah yang diharapkan dapat dijalani oleh anak yang baru memasuki dunia pendidikan dengan asumsi bahwa pola partisipasi sekolah saat ini tetap berlaku di masa depan. Pada Tahun 2025 Kota Cirebon menargetkan RLS berada pada angka 10,63 dan HLS pada angka 13,18 tahun.

Berdasarkan data yang di rilis BPS Kota Cirebon , pada tahun 2025 bahwa di **Kota Cirebon RLS mencapai angka 10,54 Tahun** yang dapat diartikan bahwa rata-rata penduduk Kota Cirebon yang berusia 25 tahun ke atas rata-rata telah menempuh Pendidikan hingga SMA kelas 1, hal ini **lebih baik daripada RLS Nasional 9,07 tahun** yang berarti penduduk usia 25 tahun keatas rata-rata mencapai Pendidikan kelas 3 SMP dan terdapat sebagian kecil yang dapat menempuh Pendidikan SMA kelas 1. Capaian kinerja atas indikator RLS ini dapat dihitung sebagai berikut : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{10,54}{10,63} \times 100\% = 99,15\%$.

Sementara HLS Kota Cirebon pada tahun 2025 mencapai 13,45 yang berarti penduduk Kota Cirebon berusia 7 tahun dapat menikmati Pendidikan hingga jenjang Diploma 1 hal ini **tidak jauh berbeda dengan kondisi nasional dengan angka HLS 13,30 Tahun yang berarti** penduduk berusia 7 tahun dapat menikmati Pendidikan hingga jenjang Diploma 1. Secara kinerja capaian atas indikator ini dihitung sebagai berikut : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{13,45}{13,18} \times 100\% = 102,05\%$

Gambar 2.4



Sumber Data : BPS, 2025

Pencapaian Indikator ke 3 “ Angka Literasi/Numerasi”

Kemampuan literasi dan numerasi merupakan kompetensi dasar yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan proses pembelajaran siswa pada jenjang pendidikan dasar. Pengukuran kedua kemampuan tersebut dilakukan melalui Asesmen Nasional (AN), khususnya melalui Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) yang menilai kemampuan siswa dalam memahami bacaan serta menggunakan konsep matematika dalam berbagai konteks kehidupan. Angka Literasi/Numerasi adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai upaya pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana belajar sepanjang hayat guna mencapai budaya literasi di masyarakat.

Berdasarkan hasil Asesmen Nasional pada jenjang pendidikan dasar di Kota Cirebon, kemampuan literasi siswa menunjukkan bahwa sebagian siswa telah mampu memahami isi bacaan dan menemukan informasi penting dalam teks. Namun demikian, masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan dalam menafsirkan makna tersirat serta menghubungkan berbagai informasi dalam bacaan. Secara umum, tingkat kompetensi literasi siswa di Kota Cirebon masih didominasi pada kategori dasar hingga cakap, sementara jumlah siswa yang mencapai kategori mahir masih relatif terbatas.

Dengan penguatan literasi dan numerasi secara berkelanjutan, diharapkan siswa di Kota Cirebon memiliki kemampuan berpikir kritis, logis, dan analitis yang lebih baik sehingga mampu mendukung keberhasilan belajar pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Angka Literasi/Numerasi sebesar 82,0 dan memperoleh capaian sebesar 79,28 sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{79,28}{82,0} \times 100\% = 94,61\%$ atau **pencapaian belum memenuhi target namun Sangat Baik**. Capaian ini tidak relevan diperbandingkan dengan kondisi nasional.

Evaluasi sasaran 1.1 “Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas”

Trend positif dalam pencapaian sasaran yang ditunjukkan melalui 3 indikator yang meningkat capainya dari tahun ke tahun, menjadi bukti bahwa setiap tahun akses dan mutu pendidikan serta literasi masyarakat di Kota Cirebon semakin baik. Hal ini ditunjang program-program utama yang mempengaruhi secara langsung sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.7

Capaian Realisasi Anggaran program pendukung sasaran 1.1

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Pendidikan	2.200.079.109	2.115.322.159	96,148%
Program Pengembangan Kurikulum	756.585.025	739.498.215	97,742%
Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1.631.583.922	1.618.003.922	99,168%
Program Pembinaan Perpustakaan	2.182.219.647	2.076.232.034	95,143%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			97,0 5%

Berikut sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.8

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.1. “ Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 Harapan Lama Sekolah		
- Akses PAUD dan pendidikan dasar universal - Dukungan kebijakan wajib belajar - Pembangunan unit sekolah baru - Digitalisasi Pendidikan - Dukungan orang tua dan lingkungan	- Ketimpangan wilayah - Keterbatasan sarana prasarana - Disparitas kualitas guru - Angka putus sekolah pada jenjang SMP/SMA - Faktor sosial-budaya	- Pemerataan akses PAUD hingga SMA/SMK - Peningkatan kualitas pembelajaran dasar - Transformasi sekolah berbasis mutu - Percepatan pembangunan di daerah tertinggal - Monitoring transisi antar jenjang Pendidikan
Indikator 2 Angka Literasi/Numerasi		
- Implementasi Kurikulum Merdeka - Asesmen Nasional (AN) berbasis literasi & numerasi - Ketersediaan bahan bacaan	- Rendahnya budaya literasi di rumah - Kesenjangan kualitas guru - Metode pembelajaran masih berorientasi hafalan	- Pembelajaran berbasis kompetensi & HOTS - Program 15 menit membaca sebelum Pelajaran - Penguatan komunitas belajar guru - Penggunaan asesmen diagnostic

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Pelatihan guru berbasis kompetensi • Budaya membaca di sekolah	• Minimnya perpustakaan dan bahan bacaan • Learning loss pasca pandemic	• Integrasi numerasi dalam semua mata pelajaran
Indikator 3 Rata-rata Lama Sekolah		
• Program wajib belajar 12 tahun, • Bantuan pendidikan (KIP, BOS, beasiswa daerah) • Akses sekolah yang semakin merata • Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan • Peningkatan kualitas dan ketersediaan guru	• Kemiskinan dan anak putus sekolah • Perkawinan usia dini • Akses terbatas di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) • Anak bekerja membantu ekonomi keluarga • Rendahnya motivasi belajar	• Perluasan akses pendidikan menengah & kejar paket • Intervensi pencegahan putus sekolah berbasis data • Penguatan pendidikan vokasi yang relevan dengan dunia kerja • Kolaborasi dengan dunia usaha & industri • Insentif bagi siswa rentan dan wilayah 3T

Sasaran 1.2 “ Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata ”

Tabel 2.9

Capaian Sasaran 1.2 “ Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,48	75,48	75,97	76,13	100,64%
		Prevalensi Stunting	Persen	13,95	14,90	14,07	10,00	99,13%
		Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	Per 100.000 Pddk	451	1136	1057	359	234,36%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								144,71%

Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata merupakan sasaran strategis yang penting bagi Pemerintah Kota Cirebon. Hal ini sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap individu, sehingga tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Dalam beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan strategi "Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan"

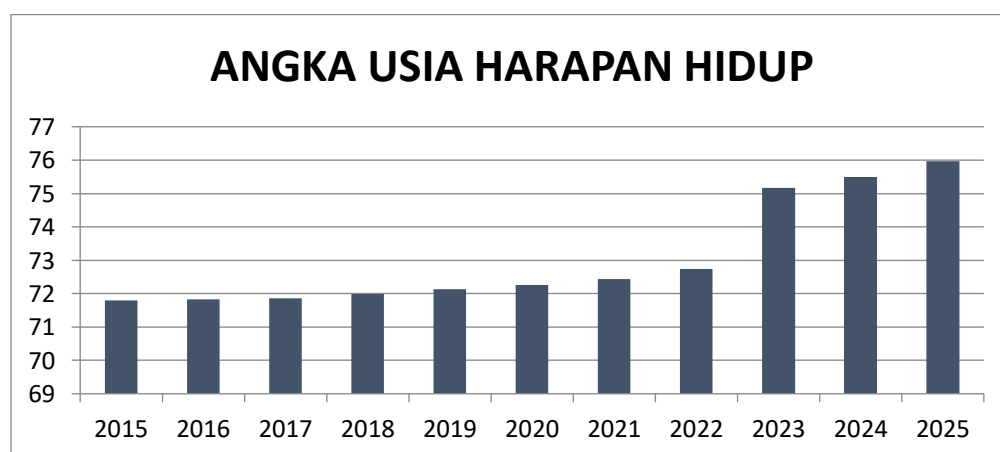
untuk mencapai sasaran ini. Salah satu program yang diimplementasikan adalah "Program Kampung Siaga", yang bertujuan meningkatkan peran serta masyarakat dalam menangani masalah kesehatan, khususnya terkait ibu hamil, bayi, dan anak balita. Selain itu, upaya penurunan angka stunting juga menjadi fokus, dengan memberikan akses bagi masyarakat untuk memperoleh bahan pangan bergizi yang terjangkau, sehingga anak-anak di Kota Cirebon mendapatkan asupan gizi seimbang sejak usia dini. Sasaran ini ditopang 3 indikator yang menjadi gambaran pencapaian keberhasilan atas sasaran yaitu Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, dan Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk . Berikut gambaran capaian tiap indikator tersebut.

Pencapaian Indikator 1 “Usia Harapan Hidup ”

Usia Harapan Hidup secara umum mencerminkan kualitas kesehatan suatu populasi, termasuk akses terhadap layanan kesehatan, pola hidup, serta kondisi lingkungan. Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Usia Harapan Hidup di tahun 2025 adalah 75,48. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) Usia Harapan Hidup Kota Cirebon tahun 2025 adalah 75,97 tahun. Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{75,97}{75,48} \times 100\% = 100,41\%$ atau **Melebihi Target**, bahkan pencapaian ini **melebihi Usia Harapan Hidup Nasional** yang berada pada angka 74,47 tahun per tahun 2025.

Gambar 2.5

Perkembangan Usia Harapan Hidup 2015-2025



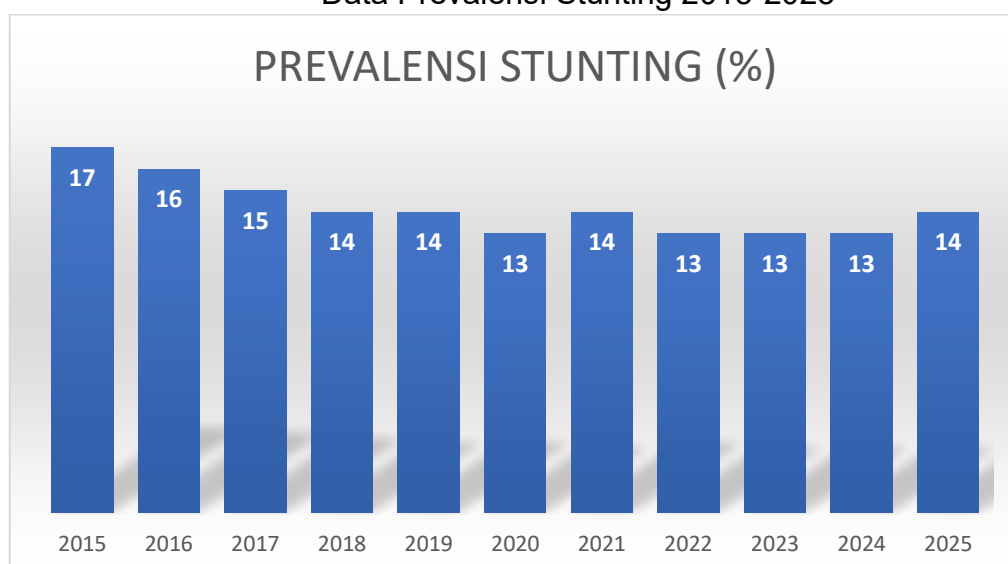
Sumber data : BPS-Cirebon Satu Data , diolah

Pencapaian Indikator 2 “Prevalensi Stunting”

Prevalensi stunting adalah persentase anak di bawah usia lima tahun yang mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan akibat kekurangan gizi kronis, infeksi berulang, atau kondisi sosial-ekonomi yang kurang mendukung. Stunting diukur berdasarkan tinggi badan anak dibandingkan dengan standar WHO, di mana anak dengan tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi dari median standar dianggap mengalami stunting. Indikator ini digunakan untuk menggambarkan jumlah kasus stunting yang ada di suatu daerah berdasarkan data yang telah dihimpun.

Pemerintah Kota Cirebon memiliki perhatian yang besar terhadap isu ini dengan menekan angka prevalensi stunting serendah-rendahnya, pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan angka prevalensi stunting sebesar 13,95%, berdasarkan data yang didapat dari BPS dan Dinas Kesehatan, pada tahun 2025 prevalensi stunting Kota Cirebon adalah 14,07%, maka capaian kinerja adalah $\frac{Target + (Target - Realisasi)}{Target} \times 100\% = \frac{13,95\% + (13,95\% - 14,07\%)}{13,95\%} \times 100\% = 99,13\%$, kondisi prevalensi stunting Kota Cirebon dengan angka 14,07% ini lebih baik dibandingkan kondisi nasional yang Menurut Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 yang dirilis pada Mei 2025, prevalensi stunting nasional di Indonesia turun menjadi 19,8 persen.

Gambar 2.6
Data Prevalensi Stunting 2015-2025



Sumber data : Badan Pusat Statistik, diolah

Pencapaian Indikator 3 “ Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk”

Angka kejadian Tuberkulosis (TB) pada tahun 2024 tercatat sebesar 1.136 per 100 ribu penduduk. Angka ini menunjukkan beban kesehatan yang cukup signifikan dalam masyarakat. Pada tahun 2025, target yang ditetapkan adalah penurunan hingga 451 per 100 ribu penduduk, yang mencerminkan komitmen untuk menekan penyebaran penyakit tersebut. Namun, data realisasi pada tahun 2025 justru menunjukkan kenaikan angka kejadian menjadi 1.057 per 100 ribu penduduk.

Hal ini menandakan bahwa strategi yang diterapkan untuk mencapai target kemungkinan belum optimal. Beberapa faktor penyebab yang mungkin memengaruhi kegagalan pencapaian target yaitu ketidakpatuhan pengobatan, kurangnya edukasi masyarakat, serta kendala pada sistem kesehatan. TB merupakan salah satu penyakit menular yang dapat menyebabkan komplikasi serius hingga kematian jika tidak tertangani dengan baik, sehingga tingginya angka kejadian TB bisa menurunkan angka harapan hidup di masyarakat.

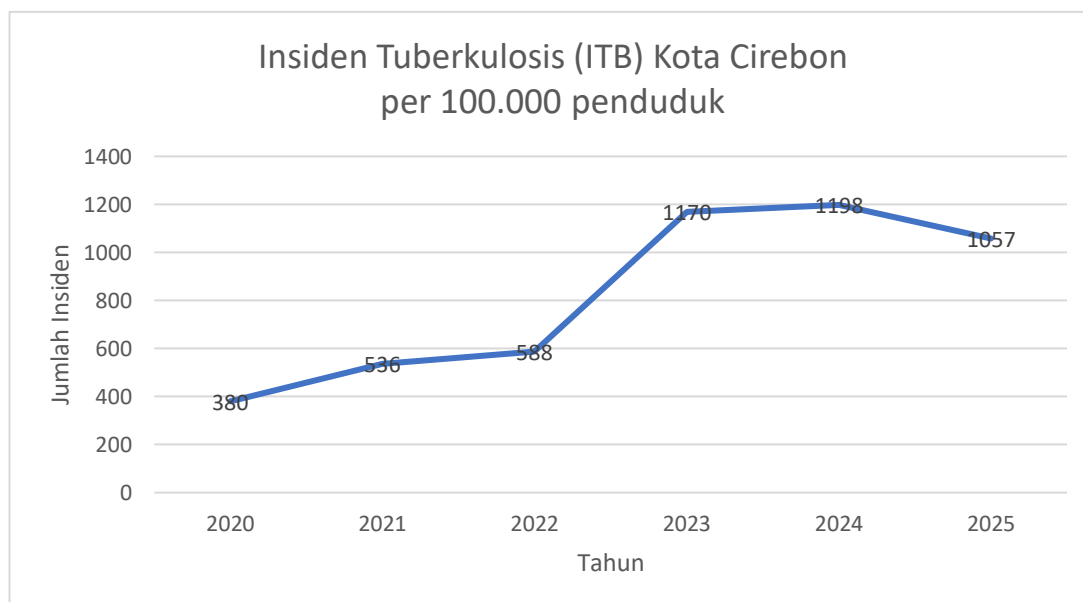
Semakin banyak kasus yang ditemukan, penanganan dan pengobatan dapat dilakukan lebih dini, sehingga risiko penularan dalam komunitas dapat diminimalkan. Langkah ini selaras dengan tujuan Eliminasi TB 2030 yang bertujuan untuk menekan angka kejadian TB secara signifikan. Penemuan kasus yang tinggi menjadi landasan penting untuk mencapai target tersebut, karena memungkinkan pemberian pengobatan yang tepat kepada pasien sekaligus mencegah terjadinya komplikasi yang lebih berat.

Merujuk pada target pada tahun 2025 Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian

$$\text{kinerja} \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{451 - (1057 - 451)}{451} \times 100\% = 234,36\%.$$

Capaian ini tidak relevan diperbandingkan dengan kondisi nasional.

Gambar 2.7
Insiden Tuberkulosis (ITB) Kota Cirebon
per 100.000 penduduk Tahun 2020-2025



Sumber data : Open Data Dataset Kota Cirebon, diolah

Evaluasi Sasaran 1.2 “Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat secara merata”

Sasaran meningkatnya “Meningkatnya Kuliatas Kesehatan Masyarakat secara merata” memiliki pencapaian **144,71%** atau **Sangat Tinggi**, melalui berbagai upaya peningkatan derajat kesehatan dan gizi masyarakat tergambarkan dalam program-program pendukung sasaran strategis ini, sebagai berikut:

Tabel 2.10
Capaian Realisasi Program Anggaran Pendukung Sasaran 1.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	133.577.957.913	129.134.672.808	96,674%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	499.410.960	498.222.960	99,762%
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	1.149.396.739	1.090.514.500	94,877%
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	245.145.500	245.139.500	99,998%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			97,83%

Gambar 2.8
Penghargaan Universal Health Coverage Awards 2026



KOTA CIREBON RESMI MENERIMA PENGHARGAAN DALAM AJANG UNIVERSAL HEALTH COVERAGE (UHC) AWARDS 2026 ATAS KEBERHASILAN MENJAGA CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) YANG MELAMPAUI STANDAR NASIONAL. (CIREBONKOTA.GO.ID, 2025)

Dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di Kota Cirebon, dilakukan berbagai upaya strategis yang mencakup akses layanan kesehatan. Pada tahun 2026 Komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam menjamin hak dasar kesehatan masyarakat kembali mendapat pengakuan di tingkat nasional.

Kota Cirebon resmi menerima penghargaan dalam ajang Universal Health Coverage (UHC) Awards 2026 atas keberhasilan menjaga cakupan kepesertaan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang melampaui standar nasional. Penghargaan ini menegaskan posisi Kota Cirebon sebagai salah satu daerah pelopor di Indonesia yang mampu memastikan akses layanan kesehatan yang adil dan merata bagi warganya. Saat ini, kepesertaan JKN di Kota Cirebon telah mencapai lebih dari 99 persen penduduk dengan tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen. Wali Kota Cirebon, Effendi Edo, mengatakan, pencapaian ini merupakan buah dari kerja keras kolektif dan sinergi lintas sektoral yang terjaga dengan baik

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 2.11

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.2 “ Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata”
Tahun 2025

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 Usia Harapan Hidup		
- Akses dan kualitas pelayanan kesehatan yang semakin baik; Peningkatan fasilitas kesehatan, tenaga kesehatan, dan akses layanan kesehatan secara merata membantu menurunkan angka kematian dan meningkatkan kesehatan masyarakat, yang berkontribusi pada meningkatnya AHH - Perbaikan perilaku hidup sehat di masyarakat	- Masih belum tercapainya Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) karena Faktor sosial, budaya dan agama yang mempengaruhi persepsi masyarakat, sehingga imunisasi belum dianggap penting sebagai investasi masa depan pertumbuhan seorang anak. - Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga menyulitkan pelaksanaan	- Meningkatkan komitmen dan dukungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pencapaian program kesehatan terutama dalam pencapaian target IDL yang berpengaruh secara langsung terhadap indikator AHH. - Meningkatkan akselerasi DOFU (Drop Out Follow Up) melalui kegiatan Inovasi dengan melakukan sweeping dan mendatangi serta memobilisasi sasaran

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup bersih dan sehat turut memperpanjang usia harapan hidup melalui pencegahan penyakit dan pengelolaan kesehatan yang lebih baik. • Tingginya partisipasi dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta program imunisasi dan perlindungan ibu-anak dapat menurunkan kematian bayi/ibu serta penyakit lainnya, sehingga mendorong AHH lebih tinggi. • Tercapaiannya UHC di Kota Cirebon	sweeping dan Drop Out Follow Up (DOFU) yaitu melengkapi imunisasi bagi sasaran yang belum lengkap status imunisasi dasarnya.	yang belum pernah mendapatkan imunisasi dasar. • Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Cirebon dan Pemerintah Daerah Provinsi di bidang kesehatan khususnya dalam Implementasi IDL.
Indikator 2 Prevalensi Stunting		
• Kepwal Kota Cirebon Nomor 440.05/Kep. 345-DP3APPKB/2023 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Cirebon • Terlaksananya Program-program yang mendukung	• Belum optimalnya konvergensi antar OPD di TPPS • Keterampilan kader yang masih kurang dalam pengukuran antropometri dan edukasi • Terbatasnya anggaran untuk percepatan penurunan stunting	• Meningkatkan Koordinasi dan sinergitas antara Dinas Kesehatan dan Lintas Perangkat Daerah serta stake holder terkait urusan kesehatan untuk melakukan upaya bersama dalam menyelesaikan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
tercapainya Sasaran • Dukungan dari pemerintah dalam bentuk kebijakan kesehatan, program bantuan pangan, dan kampanye nasional yang fokus pada pencegahan stunting. • Pengawasan dan evaluasi berkala terhadap program-program yang sudah berjalan untuk memastikan efektivitasnya. • Layanan Gizi Ibu dan Anak • Sanitasi dan Kebersihan • Akses ke Layanan Kesehatan • Kondisi Ekonomi Keluarga • Pemanfaatan Pemberdayaan Masyarakat (Kader) • SDM Kesehatan	• Pengesahan anggaran yang lambat dan adanya perubahan sistem pencairan anggaran daerah sehingga pelaksanaan kegiatan intervensi stunting kurang optimal.	permasalahan kesehatan. • Pelatihan dan pendampingan kader • Kerjasama dengan swasta, CSR • Meningkatkan koordinasi lintas program dan lintas sector terkait
Indikator 3 Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk		
• Terlaksananya Program Program yang mendukung Sasaran • Tersusunnya Rencana Aksi Daerah • Ketersediaan fasilitas kesehatan yang mudah diakses	• Program penanggulangan TBC belum dilaksanakan secara menyeluruh lintas program dan lintas sektor. • Belum maksimalnya pelacakan kasus yang loss to follow	• Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. • Meningkatkan kualitas SDM tenaga kesehatan dan kader

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
- Dukungan internasional dari organisasi kesehatan dunia yaitu Global Fund, menyediakan panduan teknis dan pendanaan tambahan untuk program TB. - Adanya kerjasama dengan LSM dalam pemberian bantuan paket sembako untuk pasien TB	up yang berakibat belum maksimalnya pengobatan semua kasus TB. Kepatuhan dan disiplin berobat pasien TB masih rendah.	- Melakukan koordinasi antar batas wilayah untuk pelacakan kasus mangkir dan rujukan. - Meningkatkan peran serta komunitas, pemangku kepentingan, dan multi sektor lainnya dalam penanggulangan TB.

Sasaran 1.3 “ Meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif”

Tabel 2.12

Capaian Sasaran 1.3 “ Meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
1.3	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja	Tingkat produktivitas tenaga kerja kota	Rupiah per Tenaga Kerja	49.360.000	47.920.181,23	120.381.028	57.220.000	243,88%

masyarakat usia produktif								
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								243,88%

Sasaran 1.3 “Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif” menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja. Sasaran ini di gambarkan dalam satu indikator yaitu Tingkat produktivitas tenaga kerja kota.

Pencapaian indikator ke 1 yaitu Tingkat produktivitas tenaga kerja kota:

Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan nilai tambah terhadap perekonomian daerah. Indikator ini umumnya dihitung dari perbandingan antara Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dengan jumlah tenaga kerja yang bekerja dalam suatu wilayah. Semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, maka semakin besar pula kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Peningkatan produktivitas tenaga kerja juga didorong oleh berbagai program pemerintah daerah yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, antara lain melalui pelatihan keterampilan kerja, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, semakin berkembangnya sektor ekonomi kreatif dan digital turut membuka peluang kerja baru yang lebih produktif bagi masyarakat.

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan tingkat produktifitas tenaga kerja kota sebesar 49.360.000 rupiah per tenaga kerja sesuai target pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, sementara realisasi tingkat produktifitas tenaga kerja kota pada tahun 2024 adalah 47.920.181,23 rupiah per tenaga kerja yang dapat diartikan tingkat produktifitas tenaga kerja kota di Kota Cirebon tahun 2025 sebesar 120.381.028 rupiah per tenaga kerja, sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% =$

$\frac{120.381.028}{49.360.000} \times 100\% = 243,88\%$ atau **Melebihi Target**. Jika dibandingkan dengan rata-rata tingkat produktifitas tenaga kerja nasional, Pemerintah Kota Cirebon

memperoleh capaian sebesar 120.381.028 rupiah per tenaga kerja, sedangkan capaian nasional sebesar Rp 89,33 juta. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat produktifitas tenaga kerja Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional.

Tabel 2.13
Data tingkat produktifitas tenaga kerja kota 2021-2025

Tahun	PDRB (Milyar)	Jumlah Tenaga Kerja	Produktivitas Tenaga Kerja
2021	17.155	139.397	123.071.156
2022	18.030	149.860	120.313.960
2023	18.934	167.037	113.354.526
2024	19.884	171.167	116.167.251
2025	20.947	174.003	120.382.028

Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, diolah

Evaluasi sasaran 1.3 “ Meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif”

Sasaran meningkatnya “Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif” memiliki pencapaian **243,88%** atau **Sangat Tinggi**, melalui berbagai upaya peningkatan tingkat produktifitas tenaga kerja kota tergambar dalam program-program pendukung sasaran strategis ini, sebagai berikut:

Tabel 2.14
Capaian Realisasi Program Anggaran Pendukung Sasaran 1.3

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.167.855	22.258.100	96,073%
Program Pelatihan Kerja dan	4.356.853.601	1.206.098.161	27,683%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Produktivitas Tenaga Kerja			
Program Hubungan Industrial	397.627.842	356.488.700	89,654%
Program Penempatan Tenaga Kerja	468.669.564	428.301.116	91,387%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			76,20%

Dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian Sasaran 1.3 “Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif”, berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.15

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Pemecahan Masalah Sasaran 1.3

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1 : Tingkat produktivitas tenaga kerja kota		
- Ketersediaan SDM yang kompeten - Adanya kebijakan efisiensi anggaran mendorong optimalisasi perencanaan kegiatan serta peningkatan efektivitas pelaksanaan pelatihan melalui prioritas program yang lebih strategis	- Keterbatasan jumlah SDM pada bidang tertentu seperti di UPT LTK - Terbitnya Instruksi Presiden (Inpres) terkait efisiensi anggaran mengakibatkan pengurangan volume pelatihan yang bersumber dari dana APBN pada awal Tahun 2025	- Optimalisasi pembagian tugas dan penjadwalan kerja yang lebih efektif - Melakukan penyesuaian perencanaan dan target kinerja melalui prioritas kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta penajakan alternatif sumber pendanaan untuk menjaga capaian kinerja tetap optimal. - Pengusulan penambahan formasi pegawai, Peningkatan kompetensi melalui

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		pelatihan/bimtek, dan dibantu dengan Non-ASN Melakukan penyesuaian perencanaan dan target kinerja melalui prioritas kegiatan, optimalisasi pemanfaatan anggaran yang tersedia, serta penajakan alternatif sumber pendanaan untuk menjaga capaian kinerja tetap optimal.

Sasaran 1.4 “Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius”

Tabel 2.16

Capaian Sasaran 1.4 “Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
1.4	Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	Indeks Pengembangan SDM Berkarakter	Poin	60,61	60,61	60,61	60,85	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								100%

Sasaran 1.4 “Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius” menjadi salah satu tolak ukur dalam mewujudkan kinerja. Sasaran ini di gambarkan dalam satu indikator yaitu Indeks Pengembangan SDM Berkarakter.

Pencapaian Indikator “Indeks Pengembangan SDM Berkarakter”

Indeks pengembangan SDM berkarakter merupakan salah satu indikator baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Indikator Indeks Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Berkarakter di Kota Cirebon merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan manusia tidak hanya berfokus pada aspek kemampuan intelektual dan keterampilan, tetapi juga pada pembentukan karakter masyarakat yang berkarakter, berintegritas, serta memiliki nilai-nilai religius yang kuat. Indeks ini mencerminkan kualitas manusia yang memiliki keseimbangan antara kompetensi, moralitas, kedisiplinan, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial dan budaya.

Pada komponen berkarakter (30%), kontribusi nilai mencapai 17,56 poin. Capaian tertinggi berasal dari integrasi pendidikan karakter dan nilai-nilai agama dalam kurikulum, yang telah diterapkan pada 100% lembaga pendidikan (470 lembaga). Namun demikian, kontribusi indikator lainnya masih relatif rendah, terutama pada persentase pemuda pelopor (0,28) dan rumah ibadah yang memiliki program pembinaan karakter masyarakat (0,47). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan karakter di lingkungan pendidikan telah berjalan baik, tetapi peran komunitas pemuda dan institusi keagamaan dalam pembinaan karakter masyarakat masih perlu ditingkatkan.

Pada komponen berintegritas (30%), diperoleh kontribusi 21,43 poin, yang berasal dari Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) sebesar 0,67 dan Indeks Harmoni Indonesia sebesar 0,76. Capaian ini menunjukkan bahwa budaya integritas dan nilai ideologi kebangsaan di masyarakat relatif terjaga, meskipun masih terdapat ruang perbaikan dalam penguatan tata kelola dan budaya integritas di lingkungan pemerintahan maupun masyarakat.

Sementara itu, komponen religius (40%) memberikan kontribusi 21,62 poin. Nilai ini didukung oleh Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 0,73 yang menunjukkan kondisi kerukunan yang cukup baik. Namun, partisipasi pemuda

dalam organisasi keagamaan dan sosial masih berada pada tingkat sedang (0,35), sehingga belum optimal dalam mendorong pembentukan karakter religius berbasis aktivitas sosial keagamaan. Perkembangan SDM berkarakter tidak dapat di perbandingkan secara historis dengan beberapa Tahun sebelumnya karena inidikator ini baru di ditetapkan menjadi IKU pada Tahun 2025.

Secara keseluruhan, hasil indeks ini menunjukkan bahwa fondasi pendidikan karakter dan kerukunan sosial telah terbentuk dengan baik, tetapi penguatan peran pemuda, komunitas keagamaan, dan ruang pembinaan karakter berbasis masyarakat masih menjadi area prioritas perbaikan guna meningkatkan kualitas SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius secara lebih berkelanjutan. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Indeks pengembangan SDM berkarakter sebesar 60,61 poin dan memperoleh capaian sebesar 60,61 poin, sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{60,61}{60,61} \times 100\% = 100\%$ atau **Sesuai Target**.

Evaluasi Sasaran 1.4 “Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius”

Pencapaian sasaran indikator ini tidak lepas dari upaya pembangunan manusia di Kota Cirebon serta dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon bersama pemangku kepentingan terkait. Berikut merupakan berbagai program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran ini :

Tabel 2.17

Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 1.4 “Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	996.983.806	992.149.356	99,515%
Program Pengembangan	453.015.610	442.414.850	97,660%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Kapasitas Kepramukaan			
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	11.842.918.479	11.536.738.963	97,415%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			98,20%

Meskipun demikian, untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian indikator ini di tahun-tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri. Berikut kami telah melakukan analisa terhadap keberhasilan atau faktor pendukung pencapaian sasaran, kendala atau faktor penghambat serta strategi pemecahan masalah :

Tabel 2.18

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 1.4 “ Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius”
Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1.4: Indeks Pengembangan SDM Berkarakter		
- Adanya komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam meningkatkan kualitas pembangunan manusia melalui program pendidikan karakter dan pembinaan moral masyarakat. - Dukungan kebijakan daerah yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter, integritas, dan	- Pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi pola perilaku dan nilai-nilai karakter generasi muda. - Belum optimalnya integrasi program pembangunan karakter antar perangkat daerah. - Masih adanya kesenjangan dalam	- Meningkatkan penguatan pendidikan karakter di lingkungan sekolah melalui kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, dan pembinaan peserta didik. - Mengoptimalkan kolaborasi antar perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembinaan karakter dan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indikator 1.4: Indeks Pengembangan SDM Berkarakter		
religiusitas dalam berbagai program pembangunan. • Peran aktif lembaga pendidikan dalam menerapkan pendidikan karakter kepada peserta didik melalui kegiatan intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. • Tingginya partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial, budaya, dan keagamaan yang mendukung pembentukan karakter individu. • Adanya kearifan lokal dan nilai budaya masyarakat Cirebon yang menjunjung tinggi sikap toleransi, gotong royong, dan saling menghormati. • Keterlibatan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam membina moral serta perilaku sosial masyarakat.	pemahaman dan penerapan nilai-nilai integritas dan kedisiplinan di sebagian masyarakat. • Terbatasnya program pembinaan karakter yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. • Kurangnya sinergi antara lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam pembentukan karakter individu. • Tantangan sosial seperti perubahan gaya hidup dan pergaulan yang dapat mempengaruhi perilaku generasi muda.	penguatan nilai integritas. • Mendorong partisipasi aktif masyarakat, tokoh agama, dan tokoh budaya dalam kegiatan pembinaan moral dan sosial kemasyarakatan. • Memanfaatkan teknologi informasi secara positif sebagai media edukasi dan kampanye nilai-nilai karakter serta integritas. • Mengembangkan program pembinaan kepemudaan, kegiatan sosial, dan kegiatan keagamaan yang dapat membentuk karakter generasi muda. • Memperkuat sinergi antara keluarga, sekolah, dan masyarakat dalam menanamkan nilai-nilai karakter, kedisiplinan, dan tanggung jawab sosial.

Tujuan 2 : “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah”

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cirebon untuk tahun perencanaan 2025-2029, salah satu tujuannya adalah ‘Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor unggulan daerah’ Tujuan ini merupakan arahan untuk meningkatkan daya saing pembangunan daerah melalui peningkatan potensi kontribusi pertumbuhan ekonomi daerah. Beberapa program yang mendukung capaian tujuan ini terdapat 60 program yang tersebar di 7 sasaran dengan jumlah anggaran Rp. 36.184.012.612 dan realisasi Rp. 29.974.073.345 atau 83%.

Tabel 2.19

Tujuan 2 “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor unggulan daerah”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui	Laju pertumbuhan ekonomi	Persen	5,06	5,02	5,26	6,18-8,00	103,95%
		PDRB per kapita	Rupiah Juta	91,98	88,56	91,88	112,97-119,18	99,89%
		Tingkat pengangguran terbuka	Persen	6,21	6,29	6,41	5,81	96,87%
		Indeks Gini	Indeks	0,422	0,424	0,402	0,409	104,74%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
	sektor unggulan daerah							
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								101,36%

Tujuan “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor unggulan daerah” diukur dengan sebuah Indikator : “Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB per kapita, Tingkat Pengangguran Terbuka, dan Indeks Gini”. Indeks ini relevan menjadi tolak ukur dalam menilai secara umum kapabilitas dan manajemen Pemerintahan di suatu Instansi karena cakupan faktor dalam pengukuran pertumbuhan ekonomi di Kota Cirebon. Salah satu tolak ukur penting dalam menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi nasional atau daerah adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan suatu dampak nyata dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. Tanpa adanya pertumbuhan ekonomi maka pembangunan ekonomi suatu daerah/wilayah kurang bermakna (Meier, 1995).

Gambar 2.9
Infografis Laju Pertumbuhan Ekonomi



Gambar 2.10
Infografis PDRB Per Kapita



Gambar 2.11
Infografis Tingkat Pengangguran Terbuka



Gambar 2.12
Infografis Indeks Gini



Pencapaian Indikator “Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)”

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini

mencerminkan tingkat kenaikan atau penurunan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan digunakan sebagai parameter utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Di Kota Cirebon indikator ini memiliki urgensi sebagai tolak ukur kondisi ekonomi di Kota Cirebon, untuk menunjukkan sejauh mana kebijakan ekonomi daerah berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan laporan perekonomian regional per awal 2026, perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di wilayah Ciayumajakuning (Kota/Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan) tahun 2025 menunjukkan performa yang positif dan stabil, dengan beberapa daerah mencatatkan pertumbuhan yang sangat kuat. Sepanjang 2024 hingga awal 2025, Majalengka dan Kuningan termasuk yang mampu tumbuh lebih cepat dibandingkan rata-rata Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon menunjukkan capaian positif sepanjang tahun 2025, pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,89% pada triwulan-I bahkan meningkat menjadi 5,20% pada triwulan-III.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Indikator tujuan tersebut adalah 5,06% dan memperoleh capaian sebesar 5,26% Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan realiasi dari tahun sebelumnya yaitu 5,02%. berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa capaian kinerja indikator

LPE adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{5,26\%}{5,06\%} \times 100\% = 103,95\%$, atau **Melebihi Target**.

Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 5,26%, sedangkan capaian nasional sebesar 5,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan tren laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

Gambar 2.13

Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2021 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pencapaian Indikator “ PDRB per kapita”

PDRB Per Kapita merupakan indikator strategis yang menggambarkan rata-rata nilai tambah yang dihasilkan oleh setiap penduduk dalam satu tahun, sehingga dapat menjadi tolok ukur tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, struktur perekonomian Kota Cirebon didominasi oleh sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor, sektor jasa-jasa, serta industri pengolahan. Kontribusi signifikan dari sektor-sektor tersebut mendorong peningkatan nilai PDRB secara agregat, yang pada akhirnya berdampak pada kenaikan PDRB Per Kapita.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Indikator tujuan tersebut adalah 91,98 (Rupiah Juta) dan memperoleh capaian sebesar 91,88. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan realiasi dari tahun sebelumnya yaitu 88,56. berdasarkan data tersebut menunjukkan bahwa capaian kinerja indikator PDRB Per Kapita adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{91,88}{91,98} \times 100\% = 99,89\%$ atau belum memenuhi target namun pencapaian **Sangat Tinggi**.

Pencapaian Indikator “Tingkat pengangguran terbuka”

Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan indikator “Tingkat Pengangguran Terbuka” adalah 6,21% sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan memperoleh realisasi sebesar 6,41%. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kenaikan dari realisasi tahun sebelumnya yaitu sebesar 6,29%. Namun dapat dibandingkan data Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kota Cirebon dengan regional Jawa Barat yaitu:

Tabel 2.20

Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kota Cirebon
dengan regional Jawa Barat

No	Kota Cirebon	Tahun				Ket
		2022	2023	2024	2025	
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	8,31	7.44	6.75	6,77	TPT Per Agustus 2025 (masih dilakukan proses pengukuran oleh BPS)

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan data realisasi tersebut pencapaian kinerja atas indikator tingkat pengangguran terbuka adalah $\frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} \times 100\% =$

$$\frac{6,21 - (6,41 - 6,21)}{6,21} \times 100\% = 96,87\%, \text{ jika disandingkan dengan Regional Provinsi}$$

Jawa Barat pun dengan tingkat pengangguran terbuka 6.77% dan Kota Cirebon 6.41% maka Kota Cirebon memiliki kondisi tingkat pengangguran yang lebih rendah atau berarti lebih baik daripada rata-rata di Jawa Barat.

Pencapaian Indikator “Indeks Gini”

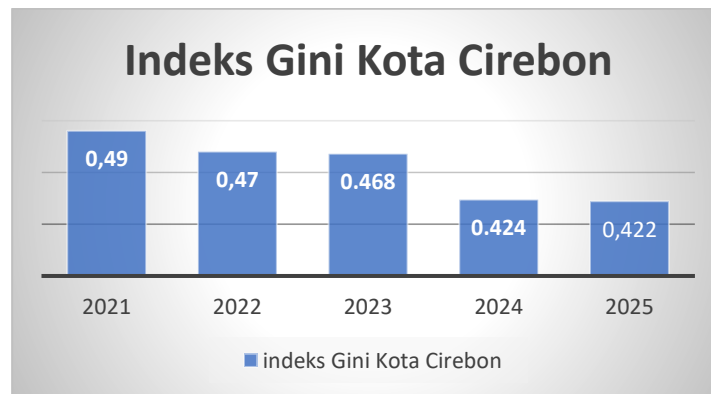
Indeks Gini merupakan indikator utama dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu daerah dalam periode tertentu. Indikator ini mencerminkan tingkat kenaikan atau penurunan produksi barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah dan digunakan sebagai parameter utama dalam menilai keberhasilan pembangunan ekonomi. Di Kota Cirebon indikator ini memiliki urgensi sebagai tolak ukur kondisi ekonomi di Kota Cirebon, untuk menunjukkan sejauh mana

kebijakan ekonomi daerah berhasil meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Indikator tujuan tersebut adalah 0,422 dan memperoleh capaian sebesar 0,402. Hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan realiasi dari tahun sebelumnya yaitu 0,424, berdasarkan data tersebut menunjukan bahwa capaian kinerja indikator Indeks Gini adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{0,402}{0,422} \times 100\% = 104,73\%$ atau **Melebihi Target**. Jika dibandingkan dengan rata-rata indeks gini nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 0,4022, sedangkan capaian nasional sebesar 0,363. Hasil ini menunjukkan bahwa Indeks Gini Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan Indeks Gini Kota Cirebon.

Gambar 2.14

Indeks Gini Kota Cirebon Tahun 2021 - 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Evaluasi Indikator Tujuan "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor unggulan daerah"

Tujuan 2 "Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui sektor unggulan daerah" merupakan gambaran makro yang dipengaruhi dengan 4 indikator tujuan memiliki rata-rata pencapaian 101,36%. Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian indikator tujuan kinerja diatas, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah :

Tabel 2.21

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Tujuan 2

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Laju Pertumbuhan Ekonomi		
• Meningkatnya aktivitas perekonomian masyarakat pada sektor perdagangan, jasa, dan UMKM. • Stabilitas kondisi sosial dan keamanan daerah yang mendukung kegiatan ekonomi. • Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong investasi dan pengembangan sektor ekonomi lokal. • Peningkatan daya beli masyarakat yang berdampak pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga. • Berkembangnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang turut mendorong aktivitas ekonomi daerah. • Adanya pembangunan infrastruktur yang mendukung	• Ketidakpastian kondisi ekonomi global dan nasional yang dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian daerah. • Keterbatasan investasi di beberapa sektor strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. • Masih terbatasnya daya saing sebagian pelaku usaha, khususnya UMKM. • Fluktuasi harga bahan pokok dan komoditas yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. • Keterbatasan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah. • Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi	• Mendorong peningkatan investasi melalui penyederhanaan perizinan dan pemberian kemudahan bagi investor. • Mengembangkan dan memperkuat sektor UMKM melalui pelatihan, pendampingan, dan akses permodalan. • Mengoptimalkan potensi sektor unggulan daerah seperti perdagangan, pariwisata, dan ekonomi kreatif. • Meningkatkan kualitas infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi dan distribusi barang dan jasa. • Memperkuat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mengembangkan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
kelancaran distribusi barang dan jasa.	daerah secara maksimal.	perekonomian daerah. Mendorong inovasi dan digitalisasi usaha untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi lokal.
PDRB per kapita		
- Posisi Strategis Jalur Pantura Cirebon berada di koridor logistik Jawa Barat – Jawa Tengah, sehingga mendorong: perdagangan transportasi logistic - Kota Perdagangan dan Jasa Regional Cirebon menjadi pusat perdagangan wilayah Ciayumajakuning: Kabupaten Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan - Pertumbuhan Sektor UMKM Kontribusi besar dari: kuliner, batik, perdagangan ritel, jasa pariwisata - Infrastruktur Transportasi Tol Cipali, Jalur kereta nasional Pelabuhan Cirebon	- Luas Wilayah Terbatas Kota Cirebon hanya sekitar 37 km², sehingga: keterbatasan lahan industri ekspansi ekonomi terbatas. - Industri Pengolahan Lemah Sebagian besar ekonomi masih: perdagangan jasa Industri bernilai tambah tinggi masih kecil. - Ketergantungan pada Ekonomi Regional Sebagian konsumsi ekonomi berasal dari: komputer masyarakat kabupaten sekitar. - Produktivitas Tenaga Kerja Masih terdapat: sektor informal tinggi skill tenaga	- Penguatan Ekonomi Metropolitan Ciayumajakuning Strategi: integrasi ekonomi kota – kabupaten kawasan ekonomi regional Contoh: pusat perdagangan regional, hub logistik. - Pengembangan Industri Kreatif dan Pariwisata Potensi Cirebon: batik Cirebon, wisata budaya keraton, kuliner khas Strategi: creative economy hub, festival budaya internasional. - Transformasi Kota Jasa Modern Mendorong sektor: pendidikan,

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	kerja terbatas pada jasa perdagangan.	kesehatan, digital economy financial services. • Pusat Logistik Pantura Cirebon dapat menjadi: Regional Logistics Hub karena dekat : Pelabuhan Tol Cipali, Jalur kereta. • Digitalisasi UMKM Program: UMKM go digital, e-commerce lokal, smart market
Tingkat Pengangguran Terbuka		
• Adanya tren pertumbuhan ekonomi daerah yang positif diharapkan mampu menstimulasi dunia usaha untuk menciptakan lebih banyak peluang kerja baru bagi masyarakat. • Ketersediaan platform informasi pasar kerja (seperti SIAPkerja) dan penyelenggaraan bursa kerja (Job Fair) yang memfasilitasi pertemuan langsung antara pencari kerja dan pemberi kerja.	• Tingginya jumlah lulusan pendidikan formal (SMA/SMK dan Perguruan Tinggi) setiap tahunnya yang tidak sebanding dengan lambatnya pertumbuhan lapangan kerja formal baru. Ketidaksesuaian antara kualifikasi, keterampilan, atau jurusan pendidikan pencari kerja dengan spesifikasi kompetensi teknis yang sedang dibutuhkan oleh dunia industri. Beberapa sektor usaha masih	• Meningkatkan pelatihan berbasis kompetensi sesuai kebutuhan pasar kerja (link and match). Sertifikasi kompetensi melalui kerja sama dengan BNSP/LSP. Optimalisasi sistem informasi pasar kerja dan pendataan pencari kerja. Forum komunikasi rutin dengan HRD perusahaan. Mengintensifkan bimbingan teknis kewirausahaan, inkubasi bisnis,

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kesiapan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) di Kota Cirebon dalam memfasilitasi peningkatan kompetensi (up-skilling dan re-skilling) bagi para pencari kerja.	berfokus pada efisiensi pasca-pemulihan ekonomi, sehingga rekrutmen tenaga kerja baru cenderung dibatasi.	dan bantuan sarana usaha bagi pencari kerja untuk menciptakan wirausaha baru dan mengurangi beban antrean di sektor formal.
Indeks Gini		
- Pertumbuhan Ekonomi yang positif diharapkan mampu menciptakan lebih banyak peluang kerja dan meningkatkan pendapatan Masyarakat - Menurunnya Prosentase Penduduk Miskin - Menurunnya Angka Pengangguran yaitu dengan peningkatan produktivitas tenaga kerja sehingga menyebabkan tingginya produksi - Terkendalinya Angka Inflasi - Peningkatan Nilai Investasi - Nilai IPM yang tinggi akan memiliki kualitas	- Masih adanya kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan rendah. - Ketimpangan kesempatan kerja, terutama pada sektor formal yang memiliki tingkat upah lebih tinggi. - Konsentrasi kegiatan ekonomi pada sektor dan wilayah tertentu sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi belum dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. - Produktivitas tenaga kerja yang masih belum	- Pemerataan Pembangunan diseluruh wilayah - Mendorong pemerataan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menyerap tenaga kerja. - Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan vokasi, dan pengembangan keterampilan kerja. - Memperkuat pemberdayaan UMKM agar

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
manusia yang baik sehingga dapat menunjang Pembangunan • Nilai UMK meningkat sehingga mendukung Daya Beli masyarakat	merata, terutama pada sektor informal dan usaha kecil. • Akses masyarakat terhadap pendidikan, pelatihan, dan peningkatan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan.	mampu meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja baru.

Sasaran 2.1 “ Meningkatkan kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif”

Sasaran 2.1 Meningkatkan kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif merupakan sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yang di tetapkan pada Tahun 2025. Sasaran ini mempunyai beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 2. 22

Capaian Sasaran 2.1. “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif”
Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.1	Meningkatnya kontribusi	Kontribusi PDRB sektor Perdagangan	Persen	28,33	27,31	26,38	28,53	93,10%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
	sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	Besar dan Eceran						
		Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan	Persen	15,18	15,14	15,48	15,32	101,98%
		Kontribusi PDRB sektor Pariwisata	Persen	5,82	5,72	6,14	6,50	105,50%
		Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif	Persen	18,8	18,79	19,07	19,15	101,44%
		Indeks Akses Keuangan Daerah	Poin	6,68	6,68	6,68	6,69	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								100,40%

Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif menjadi sasaran strategis Pemerintah Kota Cirebon sebagaimana tertuang di RPJMD Kota Cirebon 2025-2029, hal ini merupakan upaya meningkatkan ekonomi di Kota Cirebon .Sebagai tolak ukur pencapain dari sasaran tersebut adalah memiliki empat indikator, diantaranya :

1. Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran

2. Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan
3. Kontribusi PDRB sektor Pariwisata
4. Kontribusi PDRB sektor Ekonomi Kreatif
5. Indeks Akses Keuangan Daerah

Ke lima indikator tersebut menjadi faktor pendorong dari sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif” dan menjadi sebuah gambaran bagaimana peran dari indikator tersebut berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomis inklusif, karena memuat data pengukuran kontribusi produksi dari beberapa sektor tersebut.

Pencapaian Indikator “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif”

Pemerintah Kota Cirebon berupaya meningkatkan pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui indikator PDRB dari sektor Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Transportasi, dan Pariwisata sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029. Pengembangan ekonomi berkelanjutan di Kota Cirebon menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya mengutamakan aspek keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan Kota Cirebon memiliki potensi besar di sektor Perdagangan, Ekonomi Kreatif, Transportasi, dan Pariwisata yang perlu dikelola dengan baik agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan.

1. **Perdagangan:** Sebagai kota yang terletak strategis di jalur transportasi, Cirebon menjadi pusat perdagangan yang penting di wilayah Jawa Barat. Peningkatan akses pasar, promosi produk lokal, dan penggunaan teknologi digital dapat mendorong keberlanjutan sektor perdagangan.
2. **Ekonomi Kreatif:** Penguatan tata kelola sektor perdagangan melalui diversifikasi ekonomi, peningkatan daya saing, peningkatan ekspor, pembukaan pasar baru, pengembangan infrastruktur, serta inkubasi usaha berbasis potensi lokal Kota Cirebon.
3. **Transportasi:** Meningkatkan penyediaan transportasi untuk mendukung tumbuhnya sektor jasa dan perdagangan serta mengembangkan fasilitas MICE (Pertemuan, Insentif, Konvensi dan Pameran).

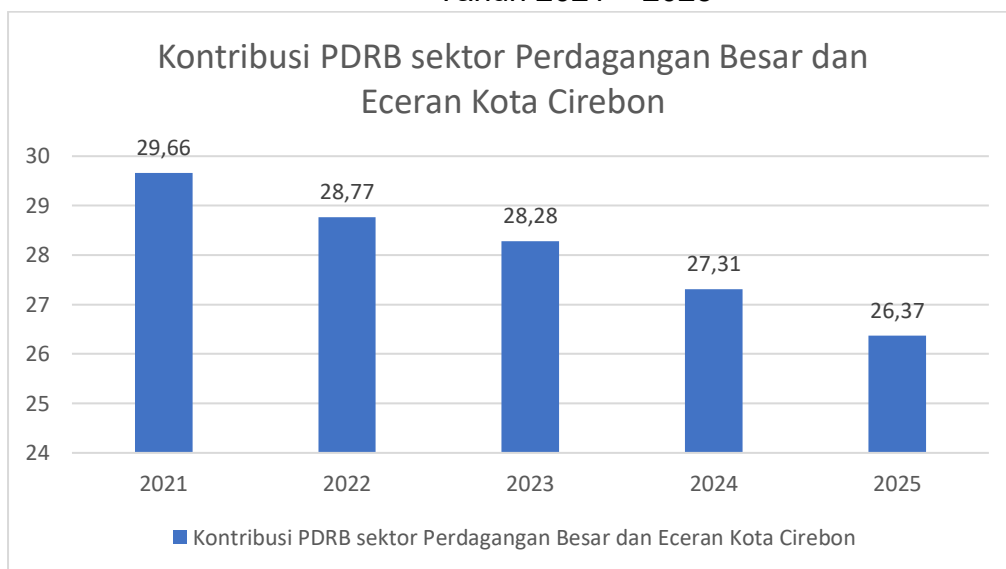
4. **Pariwisata:** Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam sektor pariwisata dengan kekayaan budaya, sejarah, dan alamnya. Mengembangkan pariwisata yang berbasis pada keberlanjutan, seperti ekowisata, dapat memberikan dampak positif jangka panjang, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga untuk pelestarian budaya dan alam.

Dalam konteks ini, penting untuk mengukur dan memantau perkembangan sektor-sektor tersebut melalui indikator-indikator yang relevan untuk mendukung jalannya misi ke 2 yaitu meningkatkan produktivitas ekonomi berbasis lokal. Pentingnya pemantauan dan pengukuran indikator-indikator tersebut akan membantu Pemerintah Kota Cirebon untuk mengambil kebijakan yang lebih terfokus dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, pada tahun 2025 secara umum pencapaian pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon cukup baik dengan capaian ke 5 (lima) indikator pencapaian PDRB sebagai berikut.

1. **Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran**

Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran menargetkan 28,33 sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan mencapai realisasi sebesar 26,37%, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari hasil tahun sebelumnya yaitu 27,31%. Jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya pertumbuhan ekonomi pada sektor industri di Kota Cirebon ini dalam 3 tahun terakhir terus mengalami perubahan karena didominasi oleh aktivitas industri di Kota Cirebon. Berdasarkan data diatas maka Pencapaian indikator tersebut dalam tahun 2025 adalah : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{26,37\%}{28,33\%} \times 100\% = 93,10\%$ atau belum memenuhi target namun capaian **Sangat Tinggi**. Jika dibandingkan dengan rata-rata Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 26,37, sedangkan capaian nasional sebesar 5,49. Hasil ini menunjukkan bahwa Indeks Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran menargetkan Kota Cirebon belum memenuhi dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan Indeks Gini Kota Cirebon.

Gambar 2.15
Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kota Cirebon
Tahun 2021 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

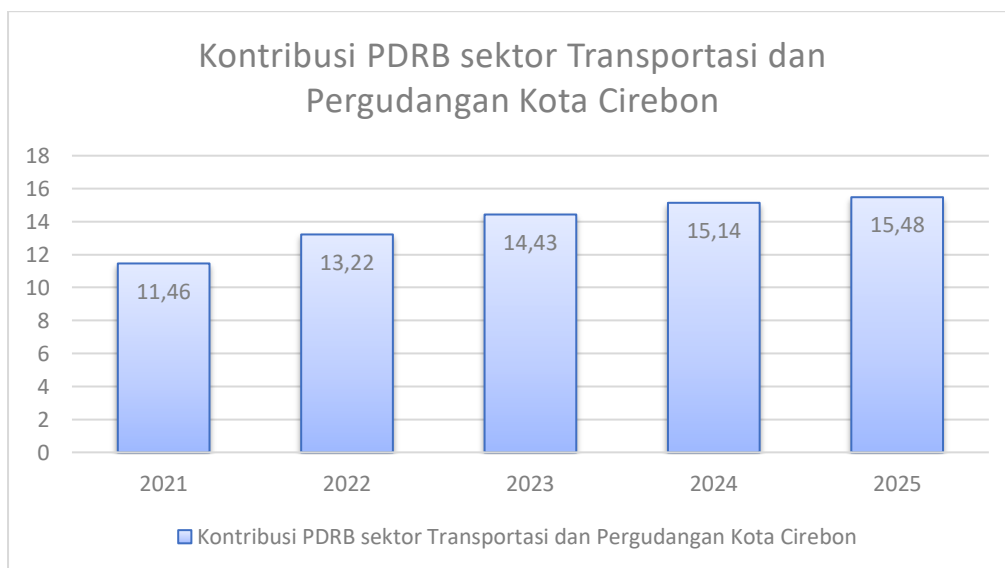
2. Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan

Sektor transportasi dan pergudangan merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas perekonomian daerah. Kontribusi sektor ini terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) mencerminkan tingkat aktivitas mobilitas barang dan jasa, serta kelancaran distribusi yang menjadi faktor penunjang utama dalam perkembangan sektor-sektor ekonomi lainnya. Keberadaan sistem transportasi yang memadai serta layanan pergudangan yang efisien mampu memperlancar arus logistik, mempercepat distribusi komoditas, dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan menargetkan 15,18% sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan mencapai realisasi sebesar 15,48%, hal ini menunjukkan bahwa adanya

perubahan dari hasil tahun sebelumnya yaitu 15,14%. Pencapaian kinerja atas indikator ini adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{15,48\%}{15,18\%} \times 100\% = \mathbf{101,98\%}$, atau **Melebihi Target**. Jika dibandingkan dengan rata-rata PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 15,48, sedangkan capaian nasional sebesar 8,78. Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Kota Cirebon.

Gambar 2.16

Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

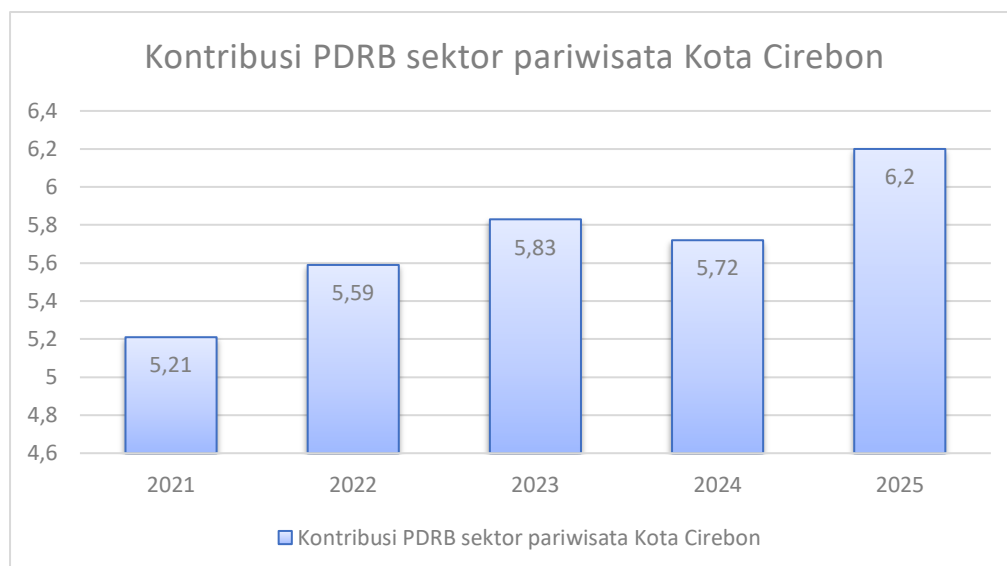
3. Kontribusi PDRB dari sektor Pariwisata

Kontribusi PDRB sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang memiliki kontribusi penting terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Aktivitas pariwisata mampu mendorong pertumbuhan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti perdagangan, transportasi, penyediaan akomodasi, kuliner, serta jasa-jasa lainnya. Dengan adanya pergerakan wisatawan yang berkunjung, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi yang memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah. Kontribusi PDRB sektor pariwisata menargetkan 5,82% sesuai dengan dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 dan mencapai realisasi sebesar 6,20%, hal ini menunjukkan bahwa adanya perubahan dari hasil tahun sebelumnya yaitu 5,72%. Pencapaian kinerja atas indikator ini adalah $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{6,20\%}{5,82\%} \times 100\% = 106,53\%$, atau **Melebihi Target**. Jika dibandingkan dengan rata-rata PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 6,20, sedangkan capaian nasional sebesar 7,41. Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Kota Cirebon Sektor pariwisata yang lebih kecil dibandingkan rata-rata nasional, sehingga sektor ini masih memiliki potensi untuk dikembangkan guna meningkatkan perekonomian daerah. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Kota Cirebon.

Gambar 2.17

Kontribusi PDRB Sektor Pariwisata Kota Cirebon



4. Kontribusi PDRB dari Sektor Ekonomi Kreatif

Ekonomi kreatif berperan dalam menciptakan nilai tambah melalui pemanfaatan kreativitas, keterampilan, dan inovasi masyarakat dalam menghasilkan berbagai produk dan jasa yang memiliki nilai ekonomi. Perkembangan sektor ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga membuka peluang usaha serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kontribusi PDRB dari Sektor Ekonomi Kreatif mencapai realisasi sebesar 19,07% dari target 18,8%

yang telah ditetapkan, hasil ini mengalami perubahan pada tahun sebelumnya yaitu 18,79%. salah satu penyebab nya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu dapat mengancam produksi pertanian dan perikanan. Berdasarkan data di atas maka pencapaian kinerja atas indikator ini adalah :

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{19,07\%}{18,8\%} \times 100\% = 101,44\%, \quad \text{atau} \quad \textbf{Melebihi Target}.$$

Perdagangan, industri pengolahan, dan jasa

Pencapaian Indikator Indeks Akses Keuangan Daerah

Nilai Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) Kota Cirebon sebesar 6,68 data ini merupakan data terakhir yang dikeluarkan OJK pada tahun 2025 menunjukkan kondisi pada tahun 2024 dan Semester 1 2025, angka ini menjadi target OJK juga pada tahun 2025, kendati realisasi IAKD tahun 2025 masih dalam penghitungan. Nilai ini menunjukkan bahwa tingkat akses masyarakat terhadap layanan keuangan berada pada kategori sangat baik jika di sandingkan dengan kota di tingkat regional bahkan nasional, di tingkat regional Jawa Barat Kota Cirebon memiliki nilai IAKD tertinggi unggul dari Kota besar seperti Kota Bandung, Kota Bogor dan Kota Bekasi, hal ini merefleksikan peran Kota Cirebon sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan Ciayumajakuning. Peran tersebut mendorong keberadaan perbankan, lembaga pembiayaan, serta layanan keuangan digital yang semakin berkembang di Masyarakat.

Dengan demikian, nilai indeks 6,68 menunjukkan bahwa akses keuangan di Kota Cirebon sudah sangat baik namun terdapat ruang peningkatan dengan melakukan upaya terutama melalui perluasan inklusi keuangan, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta penguatan pemanfaatan layanan keuangan digital untuk UMKM dan masyarakat umum. Berdasarkan data di atas maka pencapaian kinerja atas indikator ini adalah : $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{6,68\%}{6,68\%} \times 100\% = 100\%$, atau **Sesuai Target**. Jika dibandingkan dengan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 5,26%, sedangkan capaian nasional sebesar 5,11%. Hasil ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan tren laju pertumbuhan ekonomi Kota Cirebon.

Evaluasi Sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif”

Realisasi sasaran “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif” mengalami perubahan setiap tahunnya. Beberapa program yang menunjang secara langsung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.24

Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1 “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.163.604.747	576.847.382	49,574%
Program Pemasaran Pariwisata	1.025.267.295	994.543.195	97,003%
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan	120.000.000	114.781.650	95,651%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Hak Kekayaan Intelektual			
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	793.019.695	791.350.300	99,789%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	904.466.385	801.854.960	88,655%
Program Pengelolaan Permuseuman	165.769.260	162.027.150	97,743%
Program Pengembangan Kebudayaan	2.247.224.286	2.229.134.386	99,195%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			89,66%

Sebagai upaya mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dalam sasaran 2.1, berikut adalah hal-hal yang mendukung sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah:

Tabel 2.25

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Tujuan 2

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kontribusi PDRB dari Sektor Perdagangan Besar dan Eceran		
- Posisi strategis wilayah dan aktivitas ekonomi perkotaan - Jumlah pelaku usaha	- Fluktuasi harga dan pasokan barang - Daya beli masyarakat yang belum stabil	- Penguatan ekosistem perdagangan daerah - Peningkatan daya saing dan kapasitas pelaku usaha perdagangan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
perdagangan yang relatif besar dan beragam • Penguatan pasar dan pusat aktivitas perdagangan • Dukungan kebijakan dan program pemerintah daerah • Peningkatan adopsi teknologi dan digitalisasi perdagangan • Keterkaitan dengan sektor lain	• Keterbatasan infrastruktur pendukung perdagangan • Persaingan usaha yang semakin ketat • Kapasitas dan daya saing pelaku usaha yang belum merata • Kepatuhan dan legalitas usaha yang belum optimal	• Optimalisasi pasar rakyat dan pusat perdagangan • Penguatan distribusi dan stabilisasi harga barang • Peningkatan pemanfaatan perdagangan berbasis digital • Penciptaan iklim usaha perdagangan yang kondusif • Sinergi perdagangan dengan sektor unggulan lainnya
Kontribusi PDRB dari Sektor Transportasi dan Pergudangan		
• Meningkatnya aktivitas perdagangan dan jasa yang memerlukan dukungan transportasi dan layanan logistik. • Ketersediaan infrastruktur transportasi seperti jalan nasional, jalur kereta api, serta terminal yang mendukung kelancaran	• Kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu yang menghambat mobilitas transportasi. • Belum optimalnya pengelolaan sistem logistik dan pergudangan yang terintegrasi. • Keterbatasan lahan untuk pengembangan fasilitas pergudangan dan	• Mengembangkan sistem logistik daerah yang lebih terintegrasi dan efisien. • Mendorong pengembangan kawasan pergudangan dan pusat distribusi barang yang strategis. • Mengoptimalkan manajemen lalu lintas untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan kelancaran transportasi.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
mobilitas barang dan penumpang. - Berkembangnya aktivitas pergudangan dan logistik yang menunjang distribusi barang ke berbagai wilayah. - Peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang mendorong kebutuhan transportasi barang maupun penumpang. - Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor transportasi dan sistem logistik daerah.	pusat distribusi barang. - Fluktuasi harga bahan bakar yang dapat mempengaruhi biaya operasional transportasi. - Persaingan dengan daerah lain dalam pengembangan sektor logistik dan transportasi.	- Meningkatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan penyedia jasa transportasi dalam pengembangan sektor logistik. - Mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan transportasi dan distribusi barang guna meningkatkan efisiensi dan daya saing sektor tersebut.
Kontribusi PDRB dari Sektor Pariwisata		
Cirebon merupakan titik hub utama jalur kereta api dan tol (Cipali-Trans Jawa) yang menghubungkan Jakarta, Bandung, dan Jawa Tengah.	Wisatawan cenderung menjadikan Cirebon sebagai kota transit (hanya singgah untuk kuliner/ziarah) tanpa menginap dalam waktu lama.	- Melakukan penataan kawasan Pecinan dan pembangunan area Titik Nol Kilometer untuk menciptakan ikon wisata baru yang fotogenik dan ramah pejalan kaki. - Optimalisasi kawasan Kejawan sebagai pusat wisata pesisir

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
- Keberadaan keraton Kasepuhan, Kanoman Kacirebonan Keprabonan menjadi magnet bagi jutaan wisatawan nusantara setiap tahunnya - Struktur ekonomi Kota Cirebon tahun 2024 menunjukkan pertumbuhan sebesar 5,02%, yang didominasi oleh sektor akomodasi, makan-minum (kuliner), dan jasa lainnya.	- Masalah kebersihan di beberapa objek wisata dan kemacetan di area pusat kota masih menjadi kendala kenyamanan wisatawan. - Masih minimnya pemandu wisata (guide) yang tersertifikasi dan kompeten dalam narasi sejarah lintas bahasa. - Belum semua pelaku industri pariwisata (hotel kecil, rumah makan lokal, situs budaya) terintegrasi dalam ekosistem digital yang memudahkan transaksi dan reservasi.	dan kuliner laut yang modern. - Memperkuat kolaborasi antar-keraton untuk menyusun kalender kegiatan budaya terpadu (Calendar of Events) agar tidak terjadi tumpang tindih jadwal tradisi. - Fokus pada peningkatan kualitas pajak hotel, restoran, dan hiburan untuk mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berkontribusi langsung pada PDRB
Kontribusi PDRB dari Sektor Ekonomi Kreatif		
Posisi strategis Kota Cirebon sebagai Pusat Aglomerasi Rebana yaitu pusat layanan bagi kawasan Metropolitan Rebana	Belum adanya sistem pendataan sektoral yang terintegrasi sepenuhnya (Satu Data Ekraf) sehingga sulit memotret kontribusi riil	- Fasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan sertifikasi produk secara kolektif untuk meningkatkan nilai jual. - Optimalisasi Zona Kreatif (Museum

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
meningkatkan arus kunjungan dan potensi pasar produk ekraf. Keberadaan Keraton dan sentra Batik menjadi magnet utama bagi subsektor Kuliner, Kriya, dan Fashion.	subsektor non-kuliner dalam PDRB. - Sebagian besar pelaku masih berskala mikro dengan keterbatasan dalam memenuhi standar sertifikasi (Halal, BPOM, HKI) secara masif. - Keterbatasan Ruang Kreatif (Creative Hub) sehingga pemanfaatannya belum optimal sebagai tempat inkubasi bisnis kreatif yang berkelanjutan.	Topeng, Gedung Bunder Kebumen, dll) sebagai pusat pemasaran dan kolaborasi lintas subsektor. Mengintegrasikan promosi wisata kota dengan marketplace produk ekraf lokal melalui kampanye "Cirebon Creative City".
Indeks Akses Keuangan Daerah		
- Adanya dukungan kebijakan pemerintah dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di daerah. - Berkembangnya layanan lembaga keuangan seperti perbankan,	- Tingkat literasi keuangan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan sehingga pemanfaatan layanan keuangan belum optimal. - Masih adanya sebagian masyarakat yang belum memiliki akses terhadap	- Meningkatkan program edukasi dan literasi keuangan kepada masyarakat secara berkelanjutan. - Mendorong perluasan jangkauan layanan lembaga keuangan hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. - Memanfaatkan teknologi digital untuk mempermudah akses masyarakat terhadap

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
koperasi, dan lembaga pembiayaan yang semakin mudah dijangkau oleh masyarakat. • Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan keuangan seperti mobile banking dan pembayaran digital yang mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan. • Kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperluas akses layanan keuangan.	layanan keuangan formal. • Keterbatasan jaringan layanan lembaga keuangan di beberapa wilayah. • Kekhawatiran masyarakat terhadap risiko penggunaan layanan keuangan digital.	layanan keuangan. Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pelaku usaha dalam meningkatkan akses keuangan masyarakat.

Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif”

Tabel 2.26

Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	Persen PDRB	24,34	24,34	27,11	24,69	111,38%
		Persentase peningkatan investasi	Persen	13,25	18,83	88,50	15,55	667,9%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								389,64%

Sasaran strategis 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif” merupakan upaya mendukung Kota Cirebon dari bidang investasi penanaman modal. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran ditetapkan dua indikator yaitu Persentase peningkatan realisasi investasi dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) PMA dan PMDN. Investasi tersebut terdiri dari Penanaman Modal Dalam

Negeri (PMDN), Penanaman Modal Asing (PMA). Mayoritas investasi PMDN berasal dari pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), sementara PMA lebih berfokus pada industri besar. Sektor unggulan di Kota Cirebon meliputi industri makanan, perdagangan besar makanan dan minuman, serta kuliner.

Pencapaian Indikator “Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)”

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur tingkat investasi dan akumulasi aset tetap yang digunakan dalam proses produksi di suatu daerah. PMTB mencerminkan penambahan barang modal seperti pembangunan gedung, infrastruktur, mesin, dan peralatan yang digunakan dalam kegiatan ekonomi. Pencapaian indikator PMTB di Kota Cirebon menunjukkan adanya perkembangan investasi yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

PMTB yang pada dasarnya menggambarkan **tingkat investasi fisik dalam suatu wilayah**, akan menjadi **kapital produktif untuk menghasilkan barang dan jasa di masa depan**. Kapital ini berfungsi sebagai input dalam proses produksi sehingga peningkatan PMTB akan berkorelasi dengan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

Pada Tahun 2025 Pencapaian indikator PMTB di Kota Cirebon menunjukkan tren yang positif. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya aktivitas pembangunan fisik, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh sektor swasta. Pembangunan infrastruktur perkotaan, pengembangan kawasan perdagangan dan jasa, serta peningkatan investasi pada sektor properti dan industri turut mendorong peningkatan pembentukan modal tetap di daerah. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) mencapai realisasi sebesar 26,08% berdasarkan data dalam Cirebon satu angka Tahun 2025 yang di rilis BPS Kota Cirebon dari target 25,20% yang telah ditetapkan. Berdasarkan data di tersebut maka pencapaian kinerja atas indikator ini adalah : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{26,08\%}{25,20\%} \times 100\% = 103,41\%$, atau

Melebihi target. Jika dibandingkan dengan rata-rata indeks pembentukan modal tetap bruto nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 26,08%, sedangkan capaian nasional sebesar 5,11 %. Hasil ini menunjukkan bahwa Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Cirebon lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan tren Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Cirebon.

Gambar 2.18

Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Cirebon Tahun 2021- 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pencapaian Indikator “Persentase Peningkatan Investasi”

Realisasi investasi di Kawasan Rebana sepanjang 2025 mencapai Rp36,67 triliun. Dari total tersebut, wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, serta Kuningan (Ciayumajakuning) berkontribusi sekitar Rp12,79 triliun atau setara 34,9% dari total investasi kawasan metropolitan baru di Jawa Barat tersebut.

Capaian itu menempatkan Ciayumajakuning sebagai salah satu penopang utama pertumbuhan investasi Rebana, di tengah dominasi Kabupaten Subang dan Kabupaten Sumedang. Data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM menunjukkan, meskipun tidak menjadi penerima investasi terbesar secara tunggal, akumulasi investasi di Ciayumajakuning memiliki bobot strategis dalam struktur ekonomi kawasan. Kota Cirebon menyumbang investasi sebesar Rp1,85 triliun. Meski nilainya lebih kecil dibandingkan wilayah kabupaten di sekitarnya,

Kota Cirebon memiliki fungsi penting sebagai pusat jasa, perdagangan, dan distribusi regional yang menopang aktivitas ekonomi Ciayumajakuning secara keseluruhan. Perannya lebih bersifat melayani dan menghubungkan kawasan industri di *hinterland*. Persentase peningkatan investasi mencapai realisasi sebesar 88,50% dari target 13,25% yang telah ditetapkan. Berdasarkan data di atas maka pencapaian kinerja atas indikator ini adalah : $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{88,50\%}{13,25\%} \times 100\% = 667,9\%$, atau **Melebihi Target**.

Berdasarkan Teori Pertumbuhan Ekonomi (*Solow-Swan Model*), Model ini menyatakan bahwa investasi dalam modal fisik (seperti infrastruktur dan pabrik) serta modal manusia (seperti pendidikan dan keterampilan tenaga kerja) berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Dalam konteks daerah, investasi yang masuk akan meningkatkan akumulasi modal, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam beberapa tahun ke depan. Berikut data Investasi 5 tahun terakhir di Kota Cirebon:

Tabel 2.27

Nilai Realisasi Investasi Kota Cirebon Tahun 2021 - 2025

Tahun	PMA		PMDN		Jml Invs	Nilai Investasi (dalam rupiah)
	Jml Invs	Nilai Investasi	Jml Invs	Nilai Investasi		
2021	5	47.981.800.000	2170	2.085.091.255.707	2175	2.133.073.055.707
2022	63	573.100.330.659	457	218.467.000.000	520	791.567.330.659
2023	161	90.928.156.178	1293	462.611.500.000	1454	553.539.656.178
2024	240	178.384.844.238	2312	804.905.457.463	2552	983.290.301.701
2025	356	116.792.554.145	4349	1.736.914.715.559	4705	1.853.707.269.704

Sumber LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal)

Evaluasi Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif”

GAMBAR 2.19 REALISASI INVESTASI KOTA CIREBON CAPAI RP.1,85 TRILIUN DENGAN DOMINASI UMKM 	Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon Mencatat Realisasi Investasi Mencapai Rp1,85 Triliun sepanjang Tahun 2025. Angka Ini Jauh Melampaui Target Awal Yang Ditetapkan Sebesar Rp. 980 miliar atau setara 189,2%, Capaian ini mencerminkan meningkatnya aktivitas penanaman modal serta kepercayaan investor terhadap iklim usaha di Kota Cirebon. (bisnis.com, 2025)
---	--

Realisasi sasaran “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif” mengalami perubahan setiap tahunnya. Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya menggali potensi investasi di wilayahnya salah satu langkah yang kini ditempuh adalah mencoba menghidupkan kembali aset yang dinilai belum produktif agar bisa memberikan nilai ekonomi. Beberapa program yang menunjang secara langsung sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 2.28

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	237.038.155	232.122.363	97,926%
Program Promosi Penanaman Modal	170.819.952	167.134.000	97,842%
Program Pelayanan Penanaman Modal	289.776.309	244.280.262	84,300%
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	190.641.088	185.676.600	97,396%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	216.217.431	215.364.063	99,605%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,41%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.29

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif” Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)		
- Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang mendukung kegiatan ekonomi dan investasi. - Adanya peningkatan aktivitas pembangunan fisik seperti gedung, fasilitas usaha, dan sarana produksi. - Berkembangnya sektor usaha dan industri yang membutuhkan tambahan aset tetap untuk mendukung operasional usaha.	- Keterbatasan akses pembiayaan bagi pelaku usaha untuk melakukan ekspansi usaha. - Proses perizinan dan administrasi yang belum sepenuhnya optimal sehingga dapat memperlambat realisasi investasi. - Keterbatasan lahan untuk pengembangan usaha dan pembangunan infrastruktur. - Ketidakpastian kondisi pasar yang	- Memperkuat kerja sama antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam pengembangan investasi daerah. - Meningkatkan akses pembiayaan bagi pelaku usaha melalui berbagai skema pembiayaan dan dukungan lembaga keuangan. - Mengoptimalkan pemanfaatan potensi ekonomi daerah guna menarik minat investor.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Kemudahan perizinan usaha yang mendorong minat investor untuk menanamkan modal.	mempengaruhi keputusan pelaku usaha dalam melakukan investasi.	Meningkatkan promosi investasi daerah untuk memperkenalkan peluang investasi kepada investor potensial.
Persentase peningkatan investasi		
- Melakukan Pengawasan Penanaman modal melalui Inspeksi Lapangan dan Sosialisasi/ Bimtek Pengawasan Penanaman Modal - Adanya dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan investasi dan kemudahan berusaha. - Penerapan sistem perizinan berusaha berbasis elektronik yang mempermudah proses perizinan bagi pelaku usaha. - Ketersediaan potensi ekonomi daerah yang dapat dikembangkan sebagai peluang investasi.	- Rendahnya Kesadaran Pengusaha untuk Pelaporan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal). - Masih terbatasnya pemahaman pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan kegiatan penanaman modal. - Adanya kendala teknis dalam proses pelaporan LKPM melalui sistem online. - Fluktuasi kondisi ekonomi yang dapat mempengaruhi minat investor untuk menanamkan modal.	- Meningkatkan Penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal oleh Pelaku Usaha - Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara berkala kepada pelaku usaha terkait kewajiban pelaporan LKPM. - Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam proses pelaporan LKPM melalui sistem yang tersedia. - Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap realisasi penanaman modal di daerah.

Sasaran 2.3 “ Meningkatkan kinerja BUMD”

Tabel 2.30

Capaian Sasaran 2.3 “Meningkatnya kinerja BUMD” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.3	Meningkatnya kinerja BUMD	Return on Asset (ROA) BUMD	Persen	2,51	N/A	3,50	3,38	139,5%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								139,5%

Sasaran strategis 2.3 “Meningkatnya kinerja BUMD” merupakan upaya mendukung kemajuan Kota Cirebon dari Badan Usaha dibawah naungan Pemerintah Daerah. Sebagai tolak ukur pencapaian sasaran ditetapkan satu indikator yaitu Return on Asset (ROA) BUMD. Dalam konteks BUMD, ROA menjadi indikator penting bagi pemerintah daerah untuk menilai efisiensi manajemen dalam "memutar" kekayaan daerah (aset) guna memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pencapaian Indikator “Return on Asset (ROA) BUMD

Return on Asset (ROA) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas dan efisiensi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam memanfaatkan aset yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Indikator ini menunjukkan kemampuan BUMD dalam mengelola seluruh sumber daya yang dimiliki sehingga dapat memberikan nilai tambah dan kontribusi terhadap pendapatan daerah.

Pencapaian indikator Return on Asset (ROA) BUMD di Kota Cirebon mencerminkan kinerja pengelolaan aset yang dilakukan oleh BUMD dalam menjalankan kegiatan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Secara umum, BUMD di Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan kinerja perusahaan melalui

optimalisasi pemanfaatan aset, peningkatan kualitas layanan, serta pengembangan unit usaha yang memiliki potensi untuk meningkatkan pendapatan. Return on Asset (ROA) BUMD merupakan salah satu indikator baru pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Return on Asset (ROA) BUMD sebesar 2,51% dan memperoleh capaian sebesar 3,50%, sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{3,50}{2,51} \times 100\% = 139,5\%$ atau **Melebihi Target**.

Evaluasi Sasaran 2.3 “Meningkatnya kinerja BUMD”

Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya supaya tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 2.3 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.31
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.3

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.340.371.264	2.700.243.431	80,837%
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.424.276.851	863.132.088	60,601%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.862.898.980	1.683.181.536	90,353%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			77,26%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.32

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Sasaran 2.3 “Meningkatnya kinerja BUMD” Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Return on Asset (ROA) BUMD		
- Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD. - Peningkatan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dalam pengelolaan BUMD. - Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh BUMD untuk meningkatkan produktivitas usaha. - Adanya kebutuhan masyarakat terhadap layanan yang disediakan oleh BUMD, seperti layanan air minum, jasa keuangan, dan sektor usaha lainnya.	- Belum optimalnya pemanfaatan aset dan potensi usaha yang dimiliki oleh BUMD. - Keterbatasan kapasitas manajerial dan profesionalitas sumber daya manusia dalam pengelolaan BUMD. - Persaingan usaha dengan sektor swasta yang semakin kompetitif. - Terbatasnya permodalan untuk pengembangan usaha dan peningkatan kapasitas layanan BUMD.	- Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja BUMD secara berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah. - Mendorong penerapan tata kelola perusahaan yang transparan, akuntabel, dan profesional. - Melakukan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dikelola oleh BUMD untuk meningkatkan produktivitas dan pendapatan usaha. - Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan, penguatan manajemen, dan rekrutmen tenaga profesional.

Sasaran 2.4 “ Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi”

Tabel 2.33

Capaian Sasaran 2.4 “ Meningkatkan kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.4	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	Persen	2,39	2,38	2,27	2,44	94,84%
		Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB	Persen	0,30	0,28	0,28	0,55	92,39%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								93,62%

Sasaran strategis 2.4 “Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi” merupakan salah satu upaya penting Pemerintah Kota Cirebon dalam memperkuat struktur perekonomian daerah yang berbasis pada ekonomi

kerakyatan. UMKM dan koperasi memiliki peran yang sangat strategis dalam menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan koperasi melalui berbagai program pembinaan, pelatihan, serta pendampingan usaha. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam aspek manajemen usaha, pemasaran produk, pengelolaan keuangan, hingga pemanfaatan teknologi digital dalam kegiatan usaha. Dengan peningkatan kapasitas tersebut, diharapkan pelaku UMKM dan koperasi mampu meningkatkan daya saing produk serta memperluas akses pasar.

Pencapaian Indikator “Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB”

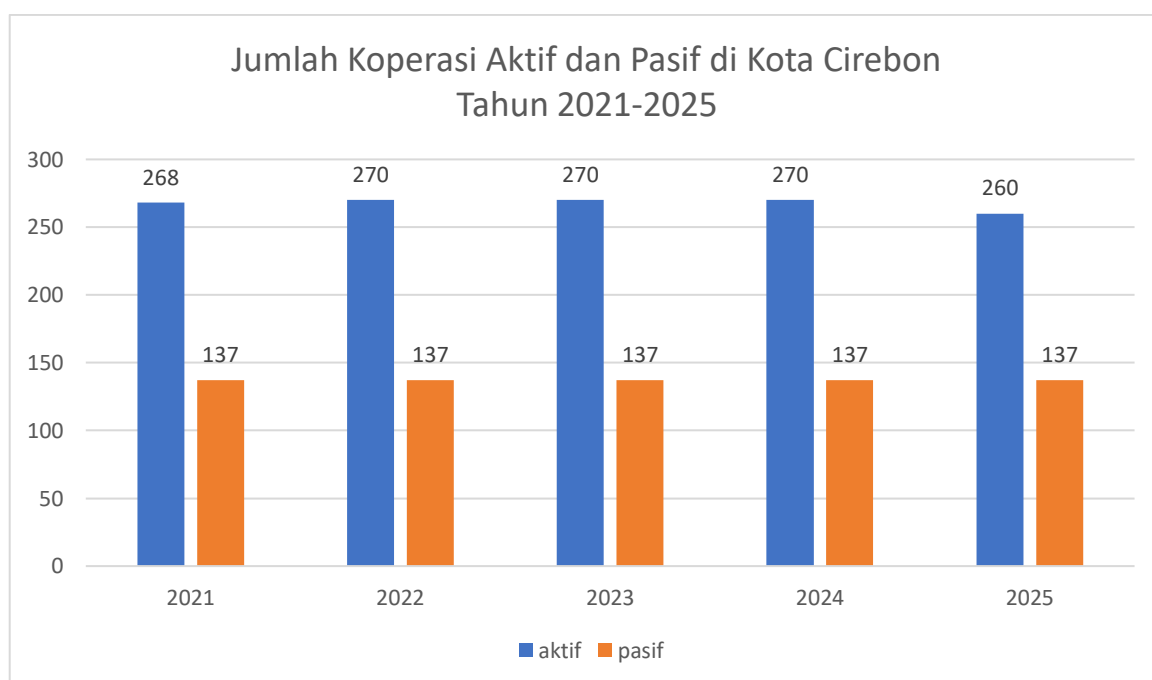
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Cirebon merupakan salah satu indikator yang menggambarkan kontribusi sektor koperasi dalam struktur perekonomian daerah. Indikator ini menunjukkan sejauh mana aktivitas usaha koperasi berperan dalam membentuk nilai tambah ekonomi dibandingkan dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cirebon. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar pula kontribusi koperasi sebagai pelaku ekonomi kerakyatan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan usaha, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi Kota Cirebon, rasio ini menjadi penting karena koperasi memiliki karakteristik berbasis anggota dan berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peningkatan rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB mencerminkan menguatnya daya saing koperasi, meningkatnya kapasitas manajerial dan permodalan, serta tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga koperasi. Sebaliknya, apabila rasio tersebut relatif kecil, hal ini menunjukkan bahwa kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah masih perlu diperkuat melalui kebijakan pembinaan, fasilitasi akses permodalan, digitalisasi usaha, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia koperasi. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB sebesar 2,39% dan memperoleh capaian

sebesar 2,27%, sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{2,27}{2,39} \times 100\% = 94,84\%$ atau **Sangat Tinggi**.

Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian gencar mendukung kemandirian ekonomi masyarakat melalui penguatan koperasi. Berikut adalah data jumlah Koperasi yang masih aktif beroperasi dan yang sudah pasif dalam 5 tahun terakhir di Kota Cirebon:

Gambar 2.20

Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif di Kota Cirebon dalam 5 tahun terakhir



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, diolah

Pencapaian Indikator “Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB”

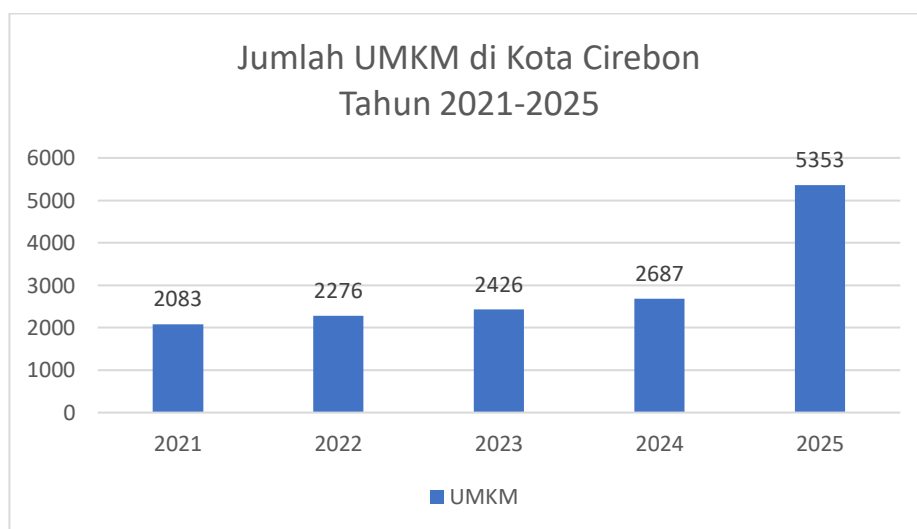
Rasio volume usaha UMKM terhadap PDRB Kota Cirebon merupakan indikator strategis yang menggambarkan tingkat kontribusi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam struktur perekonomian daerah. Rasio ini menunjukkan perbandingan antara total nilai transaksi atau omzet UMKM dengan total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Cirebon dalam periode tertentu. Semakin tinggi rasio tersebut, semakin besar peran UMKM dalam membentuk nilai tambah ekonomi daerah.

Dalam konteks pembangunan ekonomi Kota Cirebon, UMKM memiliki posisi yang sangat vital sebagai penggerak ekonomi kerakyatan, penyerap tenaga kerja, serta penopang stabilitas ekonomi lokal. Peningkatan rasio volume usaha UMKM terhadap PDRB mencerminkan menguatnya daya tahan dan daya saing UMKM, meningkatnya produktivitas usaha, serta berkembangnya ekosistem kewirausahaan di daerah. Hal ini juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah semakin inklusif karena didukung oleh pelaku usaha skala mikro dan kecil yang tersebar di berbagai sektor. Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Rasio volume usaha UMKM terhadap PDRB sebesar 0,30% dan memperoleh capaian sebesar 0,28%, sehingga capaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{0,28}{0,30} \times 100\% = 92,39\%$ atau **Sangat Tinggi**.

Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen memperkuat UMKM melalui sinergi dengan OJK/BI, fasilitas pendaftaran merk gratis, pelatihan UMKM naik kelas serta penyediaan ruang usaha. Berikut adalah data jumlah UMKM dalam 5 tahun terakhir di Kota Cirebon.

Gambar 2.21

Jumlah UMKM di Kota Cirebon dalam 5 tahun terakhir



Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon, diolah

Evaluasi Sasaran 2.4 “Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi”

GAMBAR 2.22

JADIKAN MALL UMKM RUMAH INOVASI, PEMKOT
CIREBON GELAR SATU VISI COFFEE FESTIVAL 2026



Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon sangat mengapresiasi keberadaan ruang publik seperti Mall UMKM harus mampu menangkap fenomena menjamurnya kedai kopi sebagai kekuatan ekonomi, bukan sekedar gaya hidup. Karena pentingnya mengubah tren konsumsi menjadi ekosistem industri yang sehat dan mandiri. Inovasi adalah kunci agar produk lokal tidak hanya jago kandang, tapi punya standar yang diakui secara luas. (cirebonkota.go.id)

Berdasarkan pencapaian sasaran melalui 2 (dua) indikator menunjukkan bahwa kondisi pelaku UMKM dan Koperasi di Kota Cirebon sudah baik dengan nilai rata-rata pencapaian sebesar 93,62%. Berikut beberapa program pendukung untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi”

Tabel 2.34

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.4

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	676.097.337	652.758.878	96,548%
Program Pengembangan UMKM	638.115.702	628.630.306	98,514%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	29.399.187	29.003.000	98,652%
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	34.308.180	33.837.250	98,627%
Program Pengendalian Izin Usaha Industri	19.682.067	19.330.000	98,211%
Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	1.209.033.482	1.127.362.896	93,245%
Program Pengembangan Ekspor	154.032.695	140.083.500	90,944%
Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	483.327.490	442.829.700	91,621%
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	9.274.408	8.650.000	93,267%
Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	9.752.204	9.365.000	96,030%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	186.380.163	177.550.500	95,263%
Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	302.545.172	236.893.514	78,300%
Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	379.910.360	372.223.196	97,977%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,15%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya.

Tabel 2.35

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.4 “Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi” Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB		
- Keberadaan koperasi aktif di berbagai sektor ekonomi - Dukungan kebijakan dan fasilitasi pemerintah daerah - Partisipasi anggota koperasi yang relatif stabil	- Skala usaha koperasi yang relatif kecil - Kualitas manajemen dan SDM koperasi yang belum merata - Rendahnya partisipasi anggota	- Penguatan dan konsolidasi koperasi aktif dan potensial - Peningkatan kualitas tata kelola dan profesionalisme koperasi - Penguatan peran koperasi sebagai

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Penguatan tata kelola dan akuntabilitas koperasi • Keterkaitan koperasi dengan UMKM dan sektor riil	dalam kegiatan usaha koperasi • Akses permodalan dan kemitraan usaha yang terbatas • Kepatuhan dan kesehatan koperasi yang belum optimal	agregator ekonomi anggota • Pengembangan usaha koperasi berbasis sektor unggulan daerah • Peningkatan akses permodalan dan kemitraan koperasi • Penertiban dan revitalisasi koperasi
Rasio Volume Usaha UMKM terhadap PDRB		
• Jumlah dan sebaran UMKM yang dominan dalam struktur ekonomi daerah • Peran UMKM sebagai penggerak ekonomi local • Dukungan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM • Peningkatan pemanfaatan teknologi dan pemasaran digital	• Skala usaha dan produktivitas UMKM yang relatif rendah • Keterbatasan permodalan dan akses pembiayaan • Kualitas SDM dan manajemen usaha yang belum merata • Daya saing produk yang belum optimal • Legalitas dan kepatuhan usaha yang belum optimal	• Penguatan UMKM sebagai pelaku utama ekonomi daerah • Peningkatan produktivitas dan kualitas usaha UMKM • Perluasan akses permodalan dan pembiayaan UMKM • Pengembangan akses pasar dan jaringan pemasaran • Peningkatan legalitas dan keberlanjutan usaha UMKM

Sasaran 2.5 “ Meningkatkan kesempatan kerja”

Tabel 2.36

Capaian Sasaran 2.5 “Meningkatnya kesempatan kerja” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.5	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Kesempatan Kerja	Persen	94,71	93,71	93,58	99,71	98,81%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								98,81%

Sasaran strategis 2.5 “Meningkatnya Kesempatan Kerja” di Kota Cirebon merupakan indikator positif atas kinerja pembangunan ekonomi daerah yang semakin inklusif dan produktif. Peningkatan ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di berbagai sektor mengalami pertumbuhan yang mampu menciptakan lapangan kerja baru serta menyerap tenaga kerja lokal secara lebih optimal.

Perkembangan sektor perdagangan dan jasa, penguatan UMKM, serta tumbuhnya sektor ekonomi kreatif dan informal telah berkontribusi signifikan terhadap perluasan peluang kerja di Kota Cirebon. Selain itu, kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong investasi, mempermudah perizinan berusaha, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta memperluas akses permodalan turut mendukung peningkatan penyerapan tenaga kerja.

Pencapaian Indikator “Tingkat Kesempatan Kerja”

Pencapaian indikator Tingkat Kesempatan Kerja di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif sebagai cerminan keberhasilan pembangunan sektor ketenagakerjaan dan ekonomi daerah. Tingkat Kesempatan Kerja menggambarkan persentase penduduk usia kerja yang berhasil terserap dalam kegiatan ekonomi produktif dibandingkan dengan total angkatan kerja. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin optimal daya serap pasar kerja terhadap tenaga kerja yang tersedia.

Peningkatan capaian indikator tersebut tidak terlepas dari berbagai kebijakan strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Cirebon, antara lain penguatan sektor UMKM, fasilitasi kemudahan berusaha, perluasan akses pelatihan berbasis kompetensi, serta penguatan sinergi antara dunia usaha dan lembaga pelatihan kerja. Selain itu, pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa sebagai sektor dominan di Kota Cirebon turut memberikan kontribusi signifikan dalam menciptakan peluang kerja baru.

Capaian Tingkat Kesempatan Kerja yang meningkat juga berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka serta meningkatnya pendapatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah tidak hanya bersifat agregatif, tetapi juga inklusif dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pada tahun 2025 Indikator Tingkat Kesempatan Kerja memiliki target sebesar 94,71% dan memperoleh capaian sebesar 93,58% dengan capaian kinerja indikator $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{93,58\%}{94,71\%} \times 100\% = 98,81\%$, atau **Sangat Tinggi**. Berikut adalah data jumlah Tingkat Kesempatan Kerja dalam 5 tahun terakhir di Kota Cirebon:

Gambar 2.23

Grafik Tingkat Kesempatan Kerja Kota Cirebon dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon, diolah

Evaluasi Sasaran 2.5 “Meningkatnya kesempatan kerja”

Berdasarkan pencapaian sasaran melalui indikator Tingkat Kesempatan Kerja menunjukkan bahwa Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan kesempatan kerja melalui sinergi dengan sektor swasta dan melakukan pelatihan keterampilan. Pencapaian sasaran yang ditunjukkan 1 (satu) indikator diatas sudah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan nilai rata-rata pencapaian sebesar 98,81%. Berikut beberapa program pendukung untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya kesempatan kerja”

Tabel 2.37
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.5

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Perencanaan Tenaga Kerja	23.167.855	22.258.100	96,073%
Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	4.356.853.601	1.206.098.161	27,683%
Program Hubungan Industrial	397.627.842	356.488.700	89,654%
Program Penempatan Tenaga Kerja	468.669.564	428.301.116	91,387%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			76,20%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.38

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.5 “Meningkatnya kesempatan kerja” Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Tingkat Kesempatan Kerja		
Adanya peningkatan realisasi investasi yang masuk ke daerah memberikan peluang bagi terciptanya lowongan kerja baru di sektor formal.	Pertumbuhan jumlah angkatan kerja baru (terutama lulusan baru/ fresh graduates) setiap tahunnya tidak sebanding dengan pembukaan lowongan kerja	Memberikan kemudahan perizinan atau insentif bagi investor yang mampu menyerap tenaga kerja lokal dalam jumlah besar untuk mempercepat

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Jumlah dan sebaran UMKM yang sangat besar berfungsi sebagai jaring pengaman ekonomi lokal dan penyerap tenaga kerja informal yang efektif. • Adanya kebijakan fasilitasi pelatihan keterampilan dan sertifikasi kompetensi bagi tenaga kerja untuk meningkatkan daya tawar di pasar kerja. • Lokasi strategis Kota Cirebon sebagai pusat di wilayah 3 yang menarik minat pelaku usaha untuk mendirikan atau memperluas bisnis.	baru oleh sektor swasta maupun pemerintah. • Banyak pemberi kerja yang masih dalam tahap pemulihan atau efisiensi, sehingga kapasitas serap tenaga kerja tambahan tidak bertambah secara signifikan dibandingkan lonjakan pencari kerja. • Sebagian besar angkatan kerja masih berorientasi sebagai pencari kerja (job seeker) daripada pencipta kerja (job creator).	penambahan lapangan kerja. • Memperkuat sistem informasi pasar kerja yang mempertemukan angkatan kerja secara langsung dengan pemberi kerja yang ada, guna mempercepat proses pengisian posisi yang tersedia. • Mendorong sektor industri untuk melakukan ekspansi atau pengembangan lini bisnis baru di Kota Cirebon melalui penyediaan infrastruktur pendukung yang memadai.

Sasaran 2.6 “ Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru”

Tabel 2.39

Capaian Sasaran 2.6 “Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.6	Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru	Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi	Indeks	70,12	69,19	64,24	79,31	91,61%
		Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	0,25	0,25	0,25	0,25	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								95,81%

Sasaran strategis 2.6 “Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru” menunjukkan arah pembangunan daerah yang semakin berorientasi pada prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan. Sebagai kota pesisir dengan karakteristik ekonomi perdagangan dan jasa yang kuat, Kota Cirebon memiliki potensi ekonomi hijau melalui pengembangan UMKM ramah lingkungan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta efisiensi energi pada sektor usaha dan pelayanan publik. Di sisi lain, potensi ekonomi biru tercermin dari pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengolahan hasil laut bernilai tambah, serta aktivitas

ekonomi kawasan pesisir yang produktif namun tetap menjaga kelestarian ekosistem.

Peningkatan pemanfaatan potensi tersebut terlihat dari tumbuhnya usaha berbasis lingkungan, penguatan sektor perikanan tangkap dan pengolahan hasil laut, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha terhadap praktik produksi yang berkelanjutan. Pemerintah Kota Cirebon juga mendorong kolaborasi dengan pelaku usaha, komunitas, dan masyarakat pesisir dalam pengelolaan sumber daya secara bertanggung jawab, termasuk melalui program pemberdayaan dan pendampingan usaha.

Pencapaian Indikator “Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi”

Berdasarkan data Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi Kota Cirebon, diketahui bahwa realisasi tahun 2024 mencapai 69,19. Indikator ini pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 70,12 dan memperoleh capaian sebesar 64,24 dengan capaian kinerja indikator $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{64,24\%}{70,12\%} \times 100\% = 91,61\%$, atau

Sangat Tinggi. Dengan demikian, tingkat capaian kinerja terhadap target tahun 2025 tercatat sebesar 91,61%.

Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pembangunan ekonomi hijau pada pilar ekonomi di Kota Cirebon belum sepenuhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, meskipun tingkat pencapaiannya sudah mendekati target. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2024, kinerja indeks ekonomi hijau pilar ekonomi mengalami penurunan, hal ini dapat mengindikasikan adanya tantangan dalam mempertahankan konsistensi implementasi program-program ekonomi hijau, baik dari sisi penguatan aktivitas ekonomi yang ramah lingkungan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, maupun pengembangan sektor ekonomi berkelanjutan.

Meski dengan capaian kinerja sebesar 91,61%, upaya pengembangan ekonomi hijau di Kota Cirebon masih berada pada kategori cukup baik, sehingga diperlukan penguatan strategi dan intervensi kebijakan yang lebih terarah. Pemerintah Kota Cirebon perlu mendorong peningkatan program yang mendukung investasi hijau, penguatan UMKM ramah lingkungan, efisiensi energi dalam kegiatan ekonomi, serta inovasi ekonomi hijau berkelanjutan, agar target yang telah ditetapkan dapat tercapai secara optimal pada periode berikutnya.

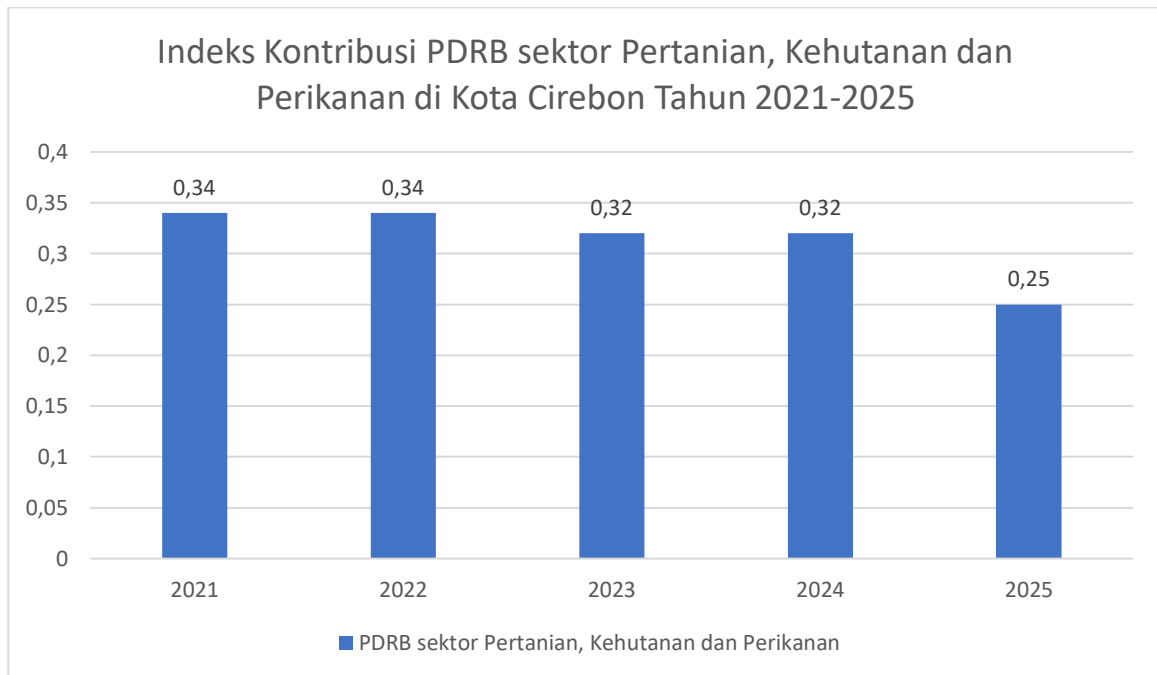
Pencapaian Indikator “Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”

Indikator kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kota Cirebon menunjukkan peran strategis sektor primer dalam menopang struktur perekonomian daerah. Capaian ini menunjukkan bahwa kontribusi sektor pertanian dan perikanan terhadap perekonomian daerah masih dapat dipertahankan pada awal periode RPJMD, meskipun Kota Cirebon memiliki karakteristik wilayah perkotaan dengan keterbatasan sumber daya lahan. Keberhasilan pencapaian indikator ini dipengaruhi oleh peran sektor perikanan tangkap dan pengolahan hasil perikanan yang relatif stabil, serta adanya upaya optimalisasi kegiatan pertanian perkotaan dan pemanfaatan lahan terbatas secara produktif

Selain sebagai penyumbang nilai tambah ekonomi, sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan juga memiliki fungsi sosial dan lingkungan yang penting, terutama dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mendukung ekonomi hijau dan biru di wilayah pesisir. Dengan demikian, capaian indikator ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga keberlanjutan sektor primer sebagai bagian integral dari pembangunan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pada tahun 2025 Indikator **Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan** menargetkan sebesar 0,25% dan memperoleh capaian sebesar 0,25% dengan capaian kinerja indikator $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{0,25\%}{0,25\%} \times 100\% = 100\%$, atau **Sesuai Target**. Data Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 5 tahun terakhir di Kota Cirebon:

Gambar 2.24

Grafik Indeks Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber : BPS-Cirebon Satu Data, diolah

Evaluasi Sasaran 2.6 “Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru”

Evaluasi terhadap meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru di Kota Cirebon menunjukkan bahwa arah pembangunan ekonomi daerah telah bergerak menuju pola yang lebih berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berbagai program pemberdayaan UMKM ramah lingkungan, pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, serta penguatan sektor perikanan dan pengolahan hasil laut telah memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan pesisir dan perkotaan.

Dari sisi capaian, terlihat adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha terhadap praktik produksi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, serta tumbuhnya inisiatif ekonomi berbasis sumber daya pesisir. Hal ini berdampak pada terbukanya peluang kerja baru, meningkatnya daya saing produk lokal, serta penguatan ekonomi masyarakat pesisir.

Secara keseluruhan, peningkatan pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru di Kota Cirebon telah berada pada jalur yang positif, namun tetap memerlukan konsistensi kebijakan dan inovasi berkelanjutan agar mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih optimal. Beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 2.6 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40
Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.6

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	184.503.950	138.160.750	74,882%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.304.174.845	1.289.958.838	98,910%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	226.991.712	225.889.372	99,514%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	148.818.502	148.637.307	99,878%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	128.785.771	128.542.598	99,811%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.696.721	13.986.000	95,164%
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	164.467.069	162.673.430	98,909%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	119.584.885	117.382.967	98,159%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.101.393.950	1.084.610.516	98,476%
Program Penyuluhan Pertanian	270.416.030	268.731.891	99,377%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,91%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala

serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.41

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.6 "Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru"
Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Ekonomi Hijau Pilar Ekonomi		
• Perkembangan UMKM dan ekonomi kreatif yang mulai mengarah pada produk ramah lingkungan dan efisiensi sumber daya. • Peningkatan investasi dan penanaman modal yang mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. • Peningkatan produktivitas tenaga kerja pada sektor industri, jasa, dan perdagangan. • Dukungan kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan melalui program pemberdayaan UMKM dan	• Ketergantungan pada sektor ekonomi konvensional yang masih menghasilkan limbah atau penggunaan energi yang kurang efisien. • Keterbatasan akses pembiayaan untuk usaha ramah lingkungan dan inovasi teknologi hijau. • Rendahnya literasi dan pemahaman pelaku usaha mengenai ekonomi hijau. • Keterbatasan infrastruktur pendukung ekonomi hijau, seperti pengelolaan limbah industri	• Meningkatkan investasi pada sektor ekonomi berkelanjutan, seperti industri kreatif, ekonomi sirkular, dan energi terbarukan. • Penguatan kebijakan daerah yang mendukung ekonomi hijau, termasuk regulasi dan insentif bagi usaha yang menerapkan prinsip ramah lingkungan. • Pengembangan kapasitas SDM dan pelaku usaha melalui sosialisasi dan edukasi terkait konsep green economy. • Peningkatan kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat dalam

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
penguatan ekonomi lokal. • Pengembangan infrastruktur ekonomi perkotaan yang mempermudah distribusi barang dan jasa.	atau energi terbarukan. • Belum optimalnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam implementasi ekonomi hijau.	pengembangan ekonomi hijau. • Pengembangan infrastruktur pendukung ekonomi hijau seperti pengelolaan limbah, transportasi ramah lingkungan, dan efisiensi energi.
Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan		
• Produksi perikanan tangkap dan kelangsungan usaha pengolahan hasil perikanan relatif terjaga, sehingga nilai output subsektor perikanan tetap berkontribusi terhadap PDRB daerah. • Pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan kepada pelaku utama pertanian dan perikanan berjalan rutin, yang membantu menjaga keberlangsungan usaha skala kecil. • Pemanfaatan lahan pekarangan melalui kegiatan	• Luas lahan pertanian produktif terus terbatas dan berpotensi berkurang akibat tekanan alih fungsi lahan perkotaan, sehingga ruang peningkatan produksi sangat sempit. • Sebagian besar pelaku usaha pertanian dan perikanan masih berskala kecil, dengan kapasitas produksi, teknologi, dan permodalan yang terbatas. • Penerapan teknologi	• Mengoptimalkan pemanfaatan lahan terbatas melalui pengembangan pertanian perkotaan (urban farming). • Mendorong peningkatan produktivitas pelaku usaha pertanian dan perikanan melalui pelatihan dan pendampingan teknis. • Memperkuat hilirisasi dan nilai tambah produk perikanan agar kontribusi ekonomi meningkat. • Memperluas akses pemasaran produk pertanian dan perikanan melalui kemitraan dan platform digital.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
pertanian perkotaan mulai berkembang, sehingga tetap menghasilkan output pertanian meskipun dalam skala terbatas. • Akses pemasaran produk perikanan di wilayah perkotaan relatif baik, didukung kedekatan dengan pasar dan pusat konsumsi masyarakat.	budidaya dan pascapanen belum merata di tingkat pelaku usaha, sehingga produktivitas dan nilai tambah belum optimal. • Kontribusi sektor pertanian dan perikanan tertahan oleh dominasi sektor perdagangan dan jasa, sehingga peningkatan share PDRB menjadi relatif sulit.	

Sasaran 2.7 “ Meningkatkan sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan”

Tabel 2.42

Capaian Sasaran 2.7 “Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2030)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
2.7	Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	Indeks Ketahanan Pangan Daerah	Indeks	65,78	68,50	65,79	70,00	100,02%
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	Persen	5,46	6,56	5,70	4,55	95,79%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								97,91%

Sasaran strategis 2.7 “Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan” merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pasokan pangan bagi seluruh masyarakat. Ketahanan pangan tidak hanya dipahami sebagai kecukupan produksi, tetapi juga mencakup distribusi yang lancar, aksesibilitas harga yang stabil, serta jaminan keamanan dan mutu pangan.

Penguatan sistem ketahanan pangan di Kota Cirebon dilakukan melalui optimalisasi produksi pertanian perkotaan dan perikanan, pengembangan cadangan pangan daerah, pemantauan harga dan pasokan secara berkala, serta penguatan kerja sama antar daerah dalam menjaga stabilitas distribusi komoditas strategis. Selain itu, pemberdayaan kelompok tani, nelayan, dan pelaku usaha pangan turut menjadi fokus dalam meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi rantai pasok.

Pencapaian Indikator “Indeks Ketahanan Pangan Daerah”

Pencapaian indikator Indeks Ketahanan Pangan Daerah di Kota Cirebon menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam memperkuat sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan. Indeks ini mengukur kinerja daerah dalam menjamin ketersediaan pangan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, serta kualitas dan keamanan pangan bagi masyarakat.

Peningkatan capaian indeks tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, memperkuat cadangan pangan daerah, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam pengendalian inflasi komoditas strategis. Selain itu, optimalisasi produksi perikanan dan pertanian skala perkotaan, pemberdayaan kelompok tani dan nelayan, serta pemantauan distribusi pangan secara berkala turut berkontribusi terhadap penguatan ketahanan pangan daerah. Pada awal periode RPJMD capaian indikator ini menunjukkan kondisi relatif stabil karena terjaganya distribusi dan ketersediaan pangan serta peran aktif koordinasi lintas sektor dalam stabilisasi pasokan dan harga pangan serta mampu memitigasi potensi gangguan ketahanan pangan di wilayah perkotaan. Indikator ini memiliki target sebesar 65,78. Dari target tersebut Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 65,79 dengan capaian kinerja sebagai berikut: indikator

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{65,79\%}{65,78\%} \times 100\% = 100,02\%, \text{ atau } \mathbf{Melebihi Target}.$$

Pencapaian Indikator “Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*)”

Pencapaian indikator Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif

dalam upaya meningkatkan kualitas konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat. Indikator ini mengukur persentase penduduk yang tingkat konsumsi energinya berada di bawah kebutuhan minimum yang ditetapkan, sehingga menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat kerawanan pangan dan kesejahteraan masyarakat.

Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan mencerminkan meningkatnya akses masyarakat terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi. Hal ini didukung oleh penguatan sistem ketahanan pangan daerah, stabilisasi harga bahan pangan pokok, peningkatan daya beli masyarakat, serta pelaksanaan program intervensi gizi dan bantuan pangan bagi kelompok rentan. Selain itu, edukasi mengenai pola konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas asupan gizi masyarakat.

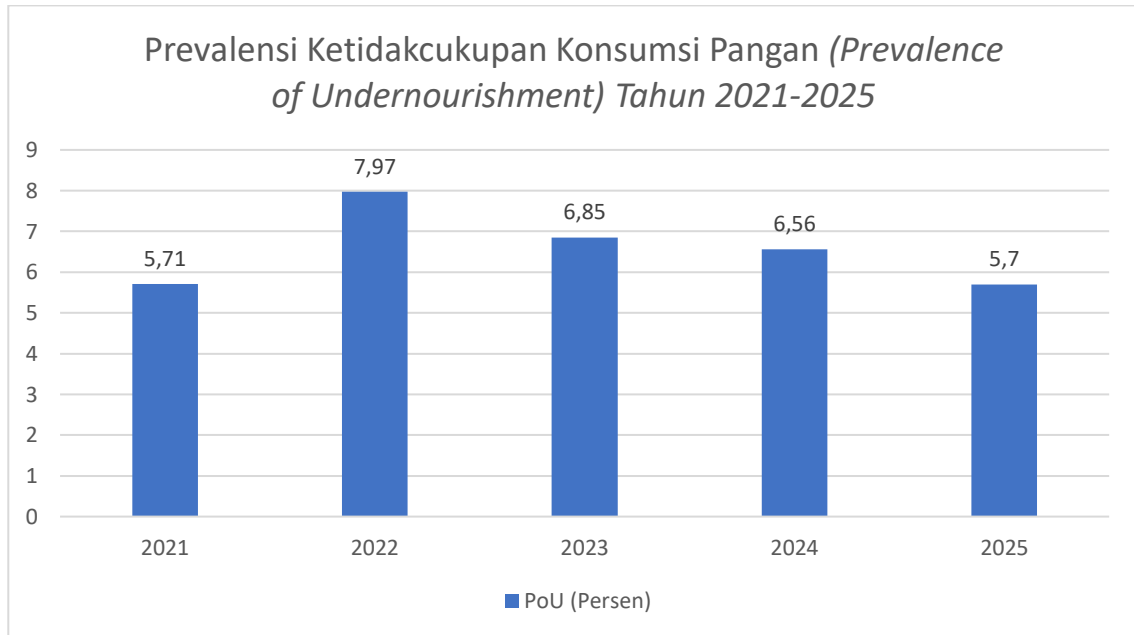
Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) merupakan indikator negatif dimana nilai yang lebih rendah menunjukkan kondisi yang lebih baik, maka capaian kinerja dihitung dengan membandingkan target terhadap realisasi. Target Indikator Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) Tahun 2025 ditetapkan sebesar 5,46%. Dari target tersebut Pemerintah Kota Cirebon memperoleh realisasi sebesar 5,70% dengan capaian kinerja sebagai berikut:

indikator $\frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\% = \frac{5,46\%}{5,70\%} \times 100\% = 95,79\%$, atau **Tidak Tercapai**

Target. Berdasarkan perhitungan tersebut capaian kinerja indikator Indeks Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dikategorikan tidak mencapai target, namun masih mendekati target yang telah ditetapkan. Belum tercapainya target indikator PoU dipengaruhi oleh masih adanya kelompok masyarakat yang rentan terhadap ketidakcukupan konsumsi pangan, terutama akibat faktor sosial ekonomi, keterbatasan daya beli, serta fluktuasi harga pangan tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun sistem ketahanan pangan secara umum relatif stabil, aspek akses dan pemanfaatan pangan pada kelompok rentan masih memerlukan perhatian lebih lanjut.

Gambar 2.25

Grafik Indeks Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) dalam 5 Tahun Terakhir



Sumber : Badan Pangan Nasional, diolah

Evaluasi Sasaran 2.7 “Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan”



Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan keseriusan dalam menjaga ketahanan pangan bagi seluruh warga. Ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau bukan sekadar agenda tahunan, melainkan komitmen nyata yang dijalankan secara berkelanjutan. Melalui Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DKP3) Kota Cirebon, Pemkot Cirebon menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) terus memastikan kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan bahan pokok, tetapi juga tentang bagaimana kita menjamin akses yang adil dan harga yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. (cirebonkota.go.id)

Berdasarkan pencapaian sasaran melalui 2 (dua) indikator yaitu Indeks Ketahanan Pangan Daerah dan Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) menunjukkan bahwa Kota Cirebon terus mendorong pengembangan pasar rakyat, mendukung UMKM pangan serta memperkuat inovasi dalam sistem distribusi bahan pangan. Pencapaian sasaran yang ditunjukkan 2 (dua) indikator diatas sudah menunjukkan pencapaian yang sangat baik dengan nilai rata-rata pencapaian sebesar 97,91%. Berikut beberapa program pendukung untuk pencapaian sasaran “Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan”

Tabel 2.43

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.7

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	184.503.950	138.160.750	74,882%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.304.174.845	1.289.958.838	98,910%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	226.991.712	225.889.372	99,514%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	148.818.502	148.637.307	99,878%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	128.785.771	128.542.598	99,811%
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.038.664.847	917.476.925	88,332%
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	226.991.712	225.889.372	99,514%
Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	14.696.721	13.986.000	95,164%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	164.467.069	162.673.430	98,909%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	119.584.885	117.382.967	98,159%
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.101.393.950	1.084.610.516	98,476%
Program Penyuluhan Pertanian	270.416.030	268.731.891	99,377%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,91%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.44

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 2.7 "Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan" Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Ketahanan Pangan Daerah		
Ketersediaan pasokan pangan pokok di pasar tradisional dan modern relatif terjaga sepanjang	Tingkat ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah masih tinggi,	Menjaga ketersediaan pangan dengan memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
tahun, sehingga mendukung stabilitas indeks ketahanan pangan. • Koordinasi pengendalian pasokan dan harga pangan melalui forum lintas sektor berjalan aktif, termasuk pemantauan harga dan pasokan komoditas pangan. • Pelaksanaan sistem kewaspadaan pangan dan gizi secara berkala, memungkinkan deteksi dini potensi kerawanan pangan di wilayah kota. • Kelancaran distribusi pangan dari daerah pemasok (hinterland) ke Kota Cirebon, didukung jaringan perdagangan dan logistik yang memadai.	sehingga ketahanan pangan daerah sensitif terhadap gangguan distribusi pangan. • Kapasitas cadangan pangan pemerintah daerah masih terbatas, sehingga ruang intervensi saat terjadi gejolak pasokan belum optimal. • Pemantauan konsumsi dan kerentanan pangan pada level rumah tangga belum sepenuhnya maksimal, sehingga intervensi belum sepenuhnya tepat sasaran. • Potensi fluktuasi harga pangan strategis masih terjadi pada periode tertentu, yang dapat mempengaruhi	• Memperluas kerja sama pasokan pangan antar daerah untuk mengantisipasi keterbatasan produksi lokal. • Meningkatkan intensitas pemantauan harga dan distribusi pangan strategis. • Memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian kerawanan pangan.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	stabilitas akses pangan masyarakat.	
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)		
• Kegiatan sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan B2SA telah dilaksanakan secara berkelanjutan, sehingga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pola konsumsi sehat. • Program kewaspadaan pangan dan gizi telah berjalan sebagai instrumen pemantauan kondisi konsumsi masyarakat, terutama pada wilayah rentan. • Stabilitas umum pasokan pangan di tingkat kota relatif terjaga, sehingga peningkatan PoU dapat ditekan. • Sinergi awal dengan program bantuan pangan dan gizi lintas sektor telah	• Masih terdapat rumah tangga berpendapatan rendah dengan daya beli terbatas, yang berdampak langsung pada kecukupan konsumsi pangan. • Intervensi penanganan kerawanan pangan belum sepenuhnya berbasis pemetaan rumah tangga sasaran, sehingga efektivitas penurunan PoU belum optimal. • Sensitivitas kelompok rentan terhadap kenaikan harga pangan masih tinggi, terutama pada komoditas	• Menajamkan intervensi bantuan pangan bagi rumah tangga rentan berbasis data terpadu. • Mendorong edukasi konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) secara lebih masif. • Memperkuat sinergi program penurunan kerawanan pangan dengan program penanggulangan kemiskinan. • Memperluas pemantauan wilayah rawan pangan sebagai dasar intervensi cepat.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
terbentuk, menjadi modal untuk penajaman intervensi ke depan.	sumber protein dan pangan bergizi. • Perubahan perilaku konsumsi masyarakat menuju pola B2SA belum merata, khususnya pada kelompok masyarakat rentan.	

Tujuan 3 : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi”

Penyusunan tujuan Pembangunan jangka menengah daerah Kota Cirebon juga memperhatikan perkembangan kondisi yang ada agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika pembangunan yang terjadi. Selain muatan visi – misi dan arah pembangunan, isu – isu strategis menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon. Dengan memperhatikan visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD, dapat dirumuskan tujuan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029. Terdapat tiga tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun perencanaan 2025-2029 salah satunya yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi hasil”.

Tabel 2.45

Capaian Kinerja Tujuan 3 “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1 (2024)	2025		
1.	Meningkatnya tata kelola	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor	85,24	85,14	87,61	85,74	102,78%
	pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	4,00	3,95	4,08	4,25 -	102%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								102,39%

Tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi” diukur dengan sebuah indikator : “Indeks Reformasi Birokrasi dan Indeks Daya Saing Daerah”. Pada tahun 2025 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) telah

menerbitkan Surat Edaran Menteri PANRB tentang Penerapan reformasi birokrasi pada periode transisi tahun 2025. Surat edaran ini diterbitkan sebagai panduan pelaksanaan reformasi birokrasi sementara hingga ditetapkan dua dokumen utama yaitu Grand Design reformasi birokrasi nasional (GDRBN) 2025-2045 dan RoadMap reformasi birokrasi nasional (RMRBN) 2025-2029. Isu strategis ini masih menjadi acuan bagi pemerintah daerah yang mengamanatkan upaya pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) harus sepenuhnya memberikan manfaat yang nyata dan berdampak secara langsung kepada masyarakat.

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) terbagi menjadi 2 (dua) yakni pelaksanaan RB General yang merupakan strategi pelaksanaan RB dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di dalam birokrasi yang menjadi isu strategis di tingkat hulu yang bersumber pada tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan RB Tematik yang merupakan strategi pelaksanaan RB yang menjadi isu strategis hilir dalam menyelesaikan masalah yang muncul di masyarakat terkait dengan agenda Program Pembangunan Nasional dan Daerah.

Gambar 2.27
Infografis Indeks Reformasi Birokrasi



Gambar 2.28
Infografis Indeks Daya Saing Daerah



Pencapaian Indikator Tujuan “Indeks Reformasi Birokrasi”

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan indeks reformasi birokrasi pada poin 85,24. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kota Cirebon mendapatkan poin **sebesar 87,61**, meningkat dari capaian tahun sebelumnya yaitu 85,14 dengan kategori A (Memuaskan) namun dengan catatan, Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.46

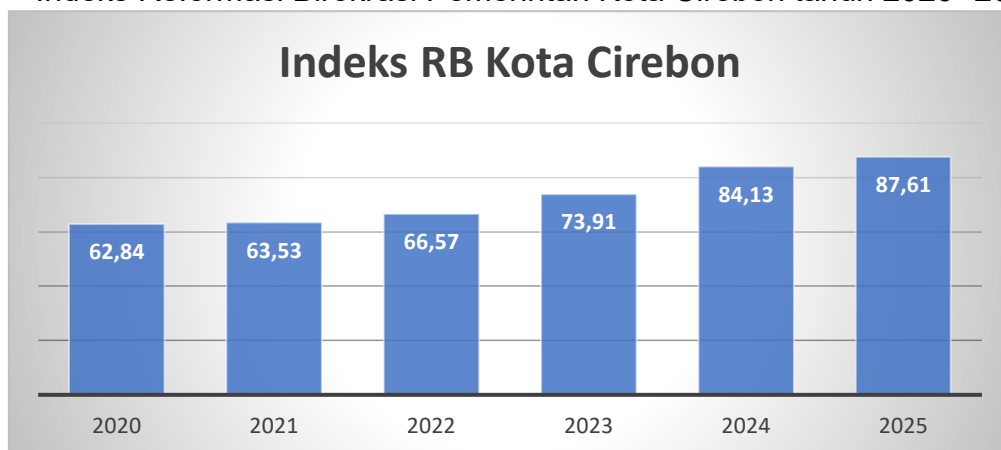
Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon 2024-2025

	Bobot	2024	2025
RB General	100,00	75,74	
RB Tematik	20,00	8,39	
Indeks Reformasi Birokrasi (RB General+RB Tematik)	120,00	84,13	

Dengan poin Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 87,61 maka pencapaian indikator kinerja pada tahun 2025 tersebut adalah $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{87,61}{85,14} \times 100\% = 102,78\%$, dengan predikat pencapaian **Memuaskan**. Bahkan pencapaian ini **melebihi** poin Indeks Reformasi Birokrasi Nasional yang berada pada angka 71,83 poin per tahun 2025. Berikut capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon tahun 2020-2025:

Gambar 2. 29

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon tahun 2020- 2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon (2025)

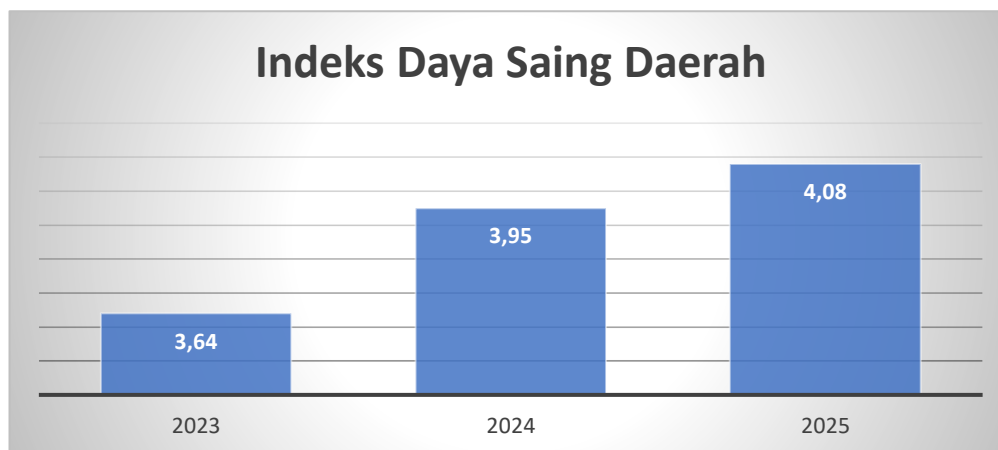
Pencapaian Indikator Tujuan “Indeks Daya Saing Daerah”

Pencapaian indikator tujuan Indeks Daya Saing Daerah di Kota Cirebon menunjukkan kemajuan dalam memperkuat fondasi ekonomi, tata kelola, serta kualitas sumber daya manusia sebagai faktor utama peningkatan daya saing wilayah. Indeks ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif, meningkatkan produktivitas, mendorong inovasi, serta menarik investasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Peningkatan capaian Indeks Daya Saing Daerah didukung oleh perbaikan layanan perizinan dan kemudahan berusaha, penguatan infrastruktur pendukung aktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi. Selain itu, pengembangan sektor unggulan seperti perdagangan, jasa, UMKM, dan ekonomi kreatif turut memperkuat posisi Kota Cirebon sebagai pusat kegiatan ekonomi regional.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan indeks Daya Saing Daerah pada poin 4,00. Berdasarkan Hasil dari pengukuran tahun 2025 indikator tersebut memperoleh capaian sebesar 4,08 dengan capaian kinerja sebagai berikut: adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{4,08}{4,00} \times 100\% = 102\%$. Indeks Daya Saing Daerah Kota Cirebon **lebih tinggi daripada rata-rata skor IDSD Nasional Tahun 2025** yaitu 3,50.

Gambar 2.30

Indeks Daya Saing Daerah 2025



Sumber : Open Data Jabar Dataset (2023-2024) dan Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon (2025)

Evaluasi Tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi”

Evaluasi terhadap meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi hasil di Kota Cirebon menunjukkan adanya perbaikan yang konsisten dalam kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan pengawasan internal, serta optimalisasi pelaporan dan akuntabilitas keuangan daerah menjadi faktor utama dalam mendorong transparansi dan pertanggungjawaban publik.

Dari aspek transparansi, pemanfaatan sistem informasi pelayanan publik dan keterbukaan informasi telah meningkatkan akses masyarakat terhadap data dan kebijakan pemerintah. Hal ini memperkuat kepercayaan publik sekaligus mendorong budaya pemerintahan yang terbuka. Dari sisi akuntabilitas, peningkatan kualitas laporan kinerja dan keuangan mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memastikan setiap program dan kegiatan memberikan hasil yang terukur dan berdampak nyata.

Namun demikian, evaluasi juga mengidentifikasi perlunya peningkatan kapasitas aparatur, penguatan integrasi sistem digital, serta konsistensi dalam pengendalian dan evaluasi kinerja. Dengan langkah perbaikan yang berkelanjutan, tata kelola pemerintah Kota Cirebon diharapkan semakin responsif, efektif, dan berintegritas dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya agar tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat. Tujuan ini terdapat 35 program yang tersebar di 5 sasaran dengan jumlah anggaran 1.065.844.644.979 dan realisasi 969.794.563.677 atau 91.0%.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian tujuan, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 2.47

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tujuan 3 “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel,
partisipatif dan berorientasi” Tahun 2025

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Reformasi Birokrasi		
• Komitmen pimpinan yang tinggi terhadap reformasi birokrasi • Sistem monitoring dan evaluasi yang telah diterapkan dengan baik • Partisipasi aktif dari ASN dalam penerapan kebijakan • Fokus pada peningkatan layanan publik yang berbasis teknologi • Adanya kebijakan pendukung dari pemerintah pusat dalam implementasi RB Tematik	• Masih terdapat resistensi dari beberapa pegawai dalam menerapkan perubahan • Jenis pelatihan yang tersedia kurang dibutuhkan oleh dunia usaha • Keterbatasan infrastruktur digital dan anggaran dalam mendukung transformasi layanan public • Kurangnya pemahaman masyarakat terkait layanan berbasis teknologi • Hambatan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung implementasi inovasi	• Adanya monitoring terhadap Perangkat Daerah Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan bagi ASN terkait perubahan yang diterapkan • Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antar instansi dengan mekanisme komunikasi yang lebih efektif • Penguatan sistem rekrutmen dan pengembangan SDM yang

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		berbasis kompetensi - Edukasi kepada masyarakat mengenai pemanfaatan layanan berbasis teknologi melalui kampanye public - Penyesuaian regulasi yang lebih fleksibel guna mendukung inovasi pelayanan
Indeks Daya Saing Daerah		
Pertumbuhan Ekonomi dan Stabilitas Makro Ekonomi tumbuh sekitar 5 % (2024), menunjukkan dinamika ekonomi	Keterbatasan Infrastruktur & Digitalisasi Adopsi teknologi dan infrastruktur digital masih belum optimal di banyak sektor, termasuk UMKM dan layanan publik. Pengaruh: menghambat	Perluas Program Pendidikan Keahlian & Literasi Digital Implementasi pelatihan berbasis

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
yang sehat meskipun tantangan perekonomian global dan regional. Dampak terhadap daya saing: menambah kepercayaan pasar, menarik investasi, dan memperbaiki produktivitas. • Sumber Daya Manusia yang Semakin Berkembang IPM terus meningkat, mencerminkan perbaikan aspek pendidikan, kesehatan, dan standar hidup. Dampak terhadap daya saing: SDM yang lebih berkualitas memperkuat inovasi dan produktivitas kerja.	adopsi teknologi, efisiensi pasar, dan integrasi ekonomi kreatif. • Kapabilitas Inovasi Belum Maksimal Kapabilitas inovasi sering menjadi hambatan dalam indeks daya saing, terutama dalam hal intensitas riset dan kualitas inovasi lokal. Pengaruh: menekan skor inovasi dan investasi berbasis pengetahuan. • Kualitas Tenaga Kerja Dinamis Tapi Tidak Merata Meski SDM meningkat, skill yang dibutuhkan pasar global dan digital belum seimbang. Pengaruh: kesenjangan antara kebutuhan industri dan supply keterampilan. • Data & Perencanaan Kebijakan Berbasis Big Data Belum Optimal Penggunaan big data dalam perencanaan strategis masih terbatas, sehingga keputusan kebijakan kadang kurang akurat atau tidak responsif terhadap	kompetensi sesuai kebutuhan industri lokal (mis. digital marketing, manufaktur canggih, pariwisata kreatif). Fokus: link and match pendidikan dengan kebutuhan pasar. • Kolaborasi Perguruan Tinggi & Industri Kerja sama riset dan kurikulum vokasi yang dirancang dengan pelaku usaha untuk meningkatkan kesiapan kerja dan inovasi produk/jasa. • Perkuat Inkubasi Startup & UMKM Digital • Fasilitasi program

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
- Sektor Unggulan Ekonomi Lokal - Sektor Unggulan Ekonomi Lokal - Posisi Geografis Strategis Cirebon berada di jalur Pantura dan dalam kawasan Rebana, memperkuat fungsi perdagangan, jasa logistik, dan distribusi. Dampak terhadap daya saing: akses pasar yang baik dan peran sebagai hub logistik regional.	tren. Pengaruh: kurangnya data real-time untuk meningkatkan efisiensi kebijakan dan respons pasar. Belum Maksimalnya Exploitasi Potensi Pariwisata & Kreatif Potensi budaya dan pariwisata (mis. heritage, batik, ekonomi kreatif) belum teroptimalkan secara komersial dan inovatif. Pengaruh: menahan kontribusi sektor wisata terhadap daya saing kompetitif.	pendampingan, akses permodalan, dan platform digital untuk usaha lokal maju secara kompetitif.

Untuk menunjang tujuan “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi”, telah ditetapkan 5 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 3.1 “ Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel”

Tabel 2.48

Capaian Sasaran 3.1 “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel”

Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
3.1	Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Persen	97,95	97,94	98,64	99,97	100,70%
		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Poin	3.100	3.074	2.907	3.300	93,77%
		Nilai SAKIP Kota	Skor	69,25	69,04	69,20	71,00	99,93%
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Poin	66,75	65,895	65.895	81,58	98,72%
		Indeks SPBE/Pemerintah Digital (Pemdi)	Poin	4,13	3,2	4,13	3,0	100%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								98,62%

Sasaran “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel” sangat relevan dijadikan sasaran karena pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan istilah *e-government* merupakan bagian dari sebuah manajemen pemerintahan di Kota Cirebon hal ini seiring untuk mendukung tujuan ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yaitu “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi”.

Pencapaian Indikator “Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah”

Pencapaian indikator *Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah* (IPPD) di Kota Cirebon menunjukkan peningkatan kualitas dalam proses perencanaan yang semakin sistematis, partisipatif, dan berbasis kinerja. Indeks ini mencerminkan sejauh mana dokumen perencanaan daerah disusun secara terintegrasi, selaras dengan dokumen perencanaan nasional dan provinsi, serta memiliki konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi. IPPD diukur oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai bagian dari evaluasi sistem perencanaan pembangunan daerah.

Meningkatnya capaian indeks tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan di Kota Cirebon telah memperhatikan prinsip sinkronisasi program prioritas, keterukuran indikator kinerja, serta kesesuaian antara kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan target Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebesar 97,95% dan memperoleh

capaian sebesar 98,64% Dengan rumusan capaian kinerja sebagai berikut:

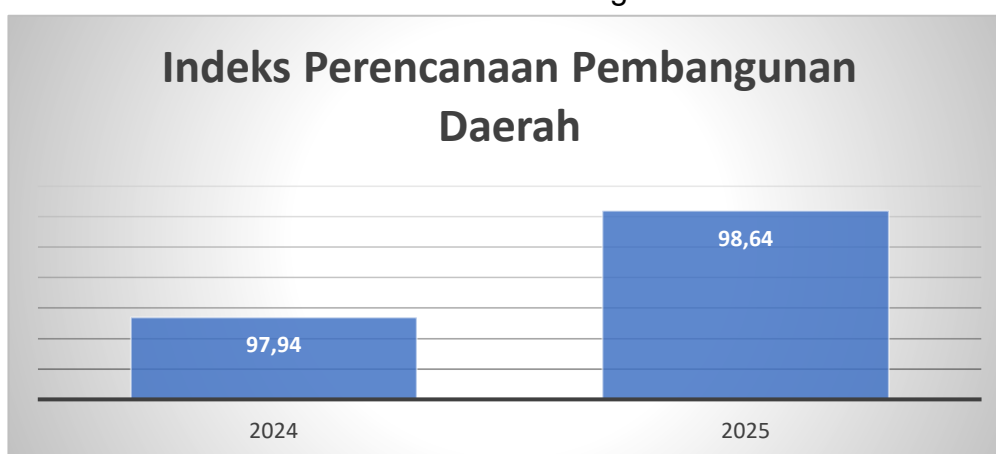
$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{98,64}{97,95} \times 100\% = 100,70\%.$$

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cirebon dengan angka 98,64% ini masuk dalam kategori sangat baik dibandingkan kondisi nasional dengan capaian IPPN 2025 yang hanya mencapai 89,14% kategori baik.

Dengan demikian, capaian tersebut cukup signifikan bagi Pemerintah Kota Cirebon karena menjadi indikator penting yang menunjukkan bahwa tata kelola perencanaan di Kota Cirebon semakin berkualitas, adaptif terhadap dinamika pembangunan, serta berorientasi pada hasil dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 2.31

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon (2025)

Pencapaian Indikator “Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)”

Pemerintah Kota Cirebon terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan transparan melalui peningkatan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). SPIP merupakan instrumen strategis dalam memastikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan program pembangunan berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Upaya meningkatkan nilai maturitas SPIP di Kota Cirebon yaitu adanya perbaikan signifikan dalam lima unsur pengendalian intern, sebagai berikut lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern. Penguatan tersebut

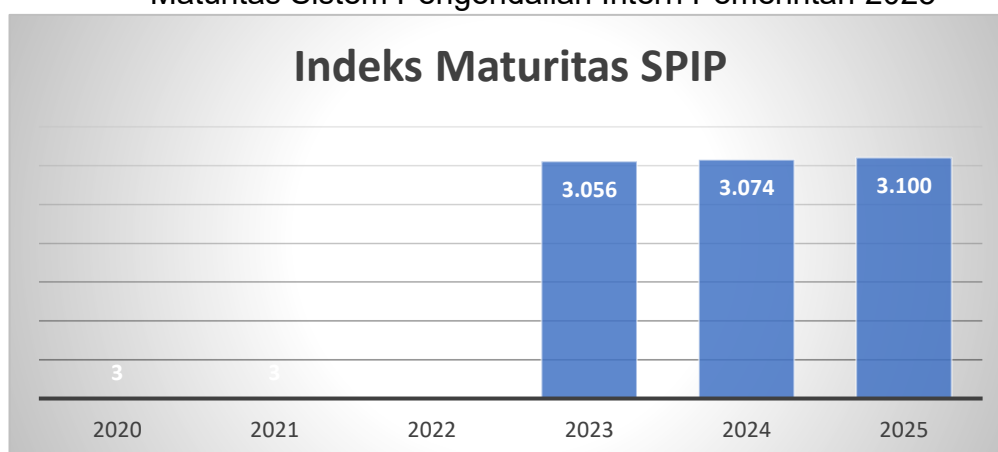
dilakukan melalui target dokumen RPJMD yaitu sebesar dan memperoleh capaian dengan rincian sebagai berikut:

Capaian tersebut menjadi acuan dalam penyusunan peta risiko perangkat daerah, integrasi manajemen risiko dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang pengawasan dan pengendalian. Dalam hal ini Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan target Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam dokumen RPJMD 2025-2029 sebesar **3.100** dan memperoleh capaian sebesar 2.907 Dengan rumusan capaian kinerja sebagai berikut:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{2.907}{3.100} \times 100\% = 93,77\%.$$

Gambar 2.32

Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon (2025)

Pencapaian Indikator “Nilai SAKIP Kota”

Indikator kinerja “Nilai SAKIP” menjadi indikator ketiga dalam sasaran “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel.” Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh nilai 69,20, dengan rata-rata capaian $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% = \frac{69,20}{69,25} \times 100\% = 99,93\%$ dengan kategori cukup baik. Bahkan pencapaian ini **melebihi Nilai SAKIP Nasional** yang berada pada angka **66,42** per tahun 2025.

Realisasi yang masuk dalam kategori capaian cukup baik ini adalah sebagai perwujudan atas akuntabilitas kinerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Cirebon, Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah telah dirilis oleh KemenPANRB pada bulan Januari tahun 2025. Hasil penilaian evaluasi tersebut jika dibandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya secara umum adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49
Perbandingan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dan Tahun
2025

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai	
		2024	2025
a. Perencanaan Kinerja	30	24,01	24,04
b. Pengukuran Kinerja	30	18,01	18,03
c. Pelaporan Kinerja	15	10,37	10,49
d. Evaluasi Kinerja	25	16,62	16,64
Nilai Hasil Evaluasi	100	69,04	69,20
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

Sumber:KemenPAN-RB 2026.

Berdasarkan data diatas, menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Cirebon sudah berada pada level baik dengan sistem yang mendukung manajemen kinerja, meskipun masih memerlukan beberapa perbaikan pada komponen SAKIP.

SAKIP juga dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat. Salah satu faktor utama yang mendorong pencapaian ini adalah penerapan konsep manajemen kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon. Sebagai bentuk dukungan terhadap

konsep tersebut, sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon juga telah dikembangkan dan disempurnakan.

Gambar 2.33

Halaman dashboard sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon



Melalui laman <https://esakip.cirebonkota.go.id/>, sistem SAKIP dapat diakses secara rinci untuk setiap komponennya, memungkinkan masyarakat untuk memperoleh informasi sebagai bentuk transparansi kinerja instansi pemerintah. Selain itu, tersedia pula tiga buku saku yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Cirebon, yaitu:

1. BUKU SAKTI (Buku Saku Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi)
2. BUKTI PRESTASI (Buku Sakti Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terintegrasi)
3. PINTAR BER-AKHLAK (Pedoman Instruksi Penerapan Budaya Kerja Ber-AKHLAK)

Implementasi SAKIP yang optimal membuat anggaran dan perencanaan berjalan selaras. SAKIP juga dapat mendorong pencapaian pembangunan melalui perencanaan, anggaran, dan kinerja yang selaras dan tepat. Setidaknya dalam kurun waktu lima tahun terakhir, SAKIP memberi kontribusi terhadap akselerasi

agenda pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan. SAKIP memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus berdampak bagi masyarakat

Pencapaian Indikator “ Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah”

Pemerintah Kota Cirebon terus menunjukkan komitmen kuat dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien melalui peningkatan capaian Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD). Indeks ini menjadi tolok ukur komprehensif dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan daerah yang meliputi aspek perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pelaporan keuangan, pengawasan, serta transparansi fiskal. Selain itu, penguatan fungsi pengawasan oleh Inspektorat serta peningkatan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah turut berkontribusi terhadap peningkatan indeks ini. Implementasi prinsip value for money dalam belanja daerah menjadi perhatian utama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Upaya untuk meningkatkan capaian IPKD di Kota Cirebon yaitu semakin baiknya konsistensi antara dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah, meningkatnya kualitas penatausahaan dan pelaporan keuangan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Pada tahun 2025 target dalam sasaran IPKD adalah sebesar 66,75 target tersebut telah ditetapkan melalui dokumen RPJMD. Pada saat laporan ini IPKD Tahun 2025 sedang dalam proses penyusunan, sehingga dalam laporan ini kami menyandingkan capaian kinerja dengan data IPKD terakhir yang terbit di Tahun 2025, dalam [Nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Berdasarkan Kategori Penilaian dan Kabupaten/Kota di Jawa Barat](#) Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 65.895, Jika disandingkan dengan daerah sekitarnya atau Wilayah III Cirebon, Kota Cirebon lebih baik dari Kabupaten Kuningan 55.737 namun lebih rendah dari Kabupaten Kota lainnya seperti kabupaten Majalengka (67.591) Dengan rumusan capaian kinerja sebagai berikut: $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% = \frac{65,895}{66,75} \times 100\% = 98,72\%$.

Pemerintah Kota Cirebon juga terus mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan berbasis elektronik guna memastikan ketepatan waktu, akurasi data, dan keterbukaan informasi kepada publik.

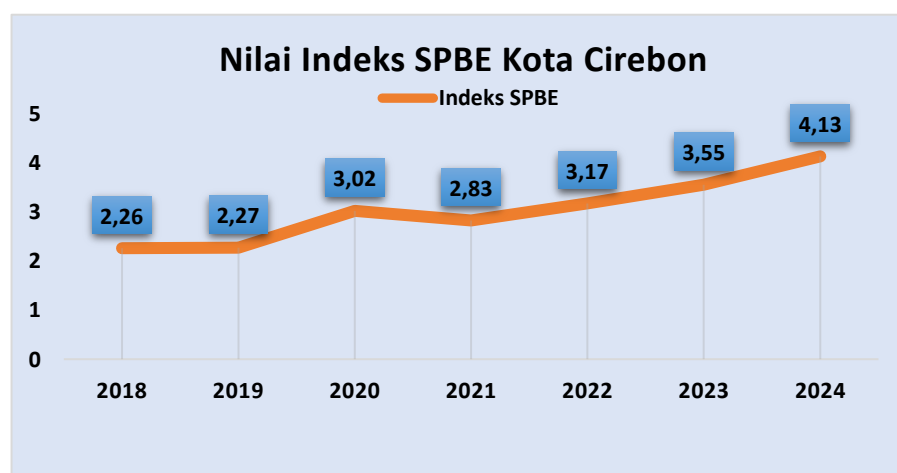
Pencapaian Indikator “Indeks SPBE/Pemerintah Digital (Pemdi)”

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah sistem yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan publik. SPBE mencakup berbagai aspek, seperti e-Government, digitalisasi data, layanan online, serta keamanan informasi dalam administrasi pemerintahan. Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan nilai SPBE sebesar 4,13. Akan tetapi, penilaian SPBE/Pemdi pada tahun 2025 masih menggunakan nilai capaian tahun 2024 karena penilaian indeks SPBE/Pemdi baru dilaksanakan pada tahun 2026. Upaya penguatan nilai SPBE/Pemdi pada tahun 2025 berdampak positif bagi Pemerintah Kota Cirebon, berdasarkan hasil evaluasi SPBE/Pemdi tahun 2024 mendapat nilai 4,13, hal ini cukup tinggi jika disandingkan dengan rata-rata indeks SPBE nasional pada Tahun 2025 tercatat 3,23. maka pencapaian indikator ini adalah : $\frac{4,13}{4,13} \times 100\% = 100\%$ atau **Sesuai Target**.

Berikut merupakan nilai indeks (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) SPBE Kota Cirebon:

Gambar 2.34

Indeks SPBE Kota Cirebon Tahun 2018-2024



Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Kota Cirebon

Evaluasi sasaran 3.1 “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel”

Pencapaian sasaran “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel” dengan satu indikator diatas, memiliki rata – rata pencapaian 98,62% berada pada predikat **Sangat Tinggi**. Kendati tingkat pencapaian sangat tinggi namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya supaya tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat hingga melebihi target, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 3.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.50
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	4.570.706.892	4.340.905.640	94,97%
Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.875.626.910	2.732.643.771	95,03%
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	1.270.794.052	1.253.941.576	98,67%
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	314.789.613	311.478.158	98,95%
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	5.274.585.432	5.064.704.047	96,02%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	934.640.772.104	858.014.734.817	91,80%
Program Perekonomian Dan Pembangunan	1.424.276.851	863.132.088	60,60%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Administrasi Pemerintahan Desa	328.624.156	67.213.370	20,45%
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.063.642.589	703.594.981	66,15%
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	12.315.639.397	9.420.006.610	76,49%
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	614.309.682	565.617.344	92,07%
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	316.093.315	207.131.272	65,53%
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	623.115.601	603.102.520	96,79%
Program Riset dan Inovasi Daerah			
Program Penyelenggaraan Pengawasan	366.063.140	262.201.149	71,63%
Program Perumusan Kebijakan,	437.000.480	283.371.521	64,84%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Pendampingan Dan Asistensi			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.862.898.980	1.683.181.536	90,35%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	12.793.258.339	8.064.226.179	63,03%
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	3.340.371.264	2.700.243.431	80,84%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.51

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.1 “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
Tersedianya dokumen perencanaan (KUA-PPAS, RPJMD, dan RKPD) Koordinasi yang baik antar Perangkat Daerah	- Berubahnya jadwal perencanaan - Berubahnya alat pengukuran yang semula menggunakan RPD menjadi RPJMD	- Menyusun jadwal perencanaan sesuai dengan aturan Koordinasi antar Perangkat Daerah ditingkatkan - Menyediakan dokumen pendukung (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS) Menyusun jadwal perencanaan sesuai dengan aturan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		Koordinasi antar Perangkat Daerah ditingkatkan Menyediakan dokumen pendukung (RPJMD, RKPD, KUA-PPAS)
Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		
- Kerangka dan unsur SPIP telah terbentuk dan diterapkan; - Peran APIP dalam pembinaan dan pengawasan internal; - Penerapan awal manajemen risiko pada Perangkat Daerah; dan - Tidak terdapat komponen SPIP pada level sangat rendah.	- Belum optimalnya integrasi SPIP, manajemen risiko, dan IEPK; - Manajemen risiko belum menjadi dasar pengambilan keputusan; - Komitmen dan pemahaman pimpinan Perangkat Daerah belum merata; dan - Pemantauan dan tindak lanjut belum optimal.	- Mengintegrasikan komponen antara SPIP, Manajemen Risiko, dan IEPK; - Sosialisasi kepada PD terkait pentingnya menerapkan Manajemen Risiko dalam perencanaan, penganggaran, dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan Perangkat Daerah; dan - Melakukan pemantauan atas efektivitas pengendalian

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		internal berbasis analisis risiko dan indikator kinerja pengendalian.
Nilai SAKIP Kota		
• Pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon telah mempermudah pemantauan dan evaluasi kinerja secara lebih efektif. • Penerapan manajemen kinerja terintegrasi sesuai Perwali No. 15 Tahun 2016. • Komitmen pimpinan daerah mendorong transparansi dan akuntabilitas.	• Masih ditemukanya Indikator kinerja pada level esslon 2 dan Esslon III yang belum sepenuhnya berorientasi hasil. • Masih terdapat rencana aksi yang belum menjabarkan kegiatan atau aksi yang secara langsung dan terukur selaras dengan pencapaian kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian	• Melakukan perbaikan dokumen perencanaan pada setiap level organisasi sehingga tujuan dan sasaran strategis menjadi berorientasi hasil, sesuai dengan mandat organisasinya, dan menjawab isu-isu strategis yang harus diselesaikan; • Melakukan reviu dan perbaikan penjenjangan kinerja dari level jabatan tertinggi hingga ke level operasional dengan memperhatikan logical framework dan CSF dalam

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	Kinerja (PK) atau cascading kinerja. Seperti pada; Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perdagangan dan Perindustrian pada penjenjangan kinerja ditetapkan crosscutting dengan DPMPTSP, namun pada rencana aksi tidak dijabarkan pembagian peran dan kinerja atas layanan perizinan bagi pelaku • Evaluasi internal masih perlu diperkuat untuk	mencapai tujuan dan sasaran organisasi sesuai acuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja. Selanjutnya, memanfaatkan hasil penjenjangan kinerja tersebut sebagai dasar dalam menyempurnakan perencanaan kinerja secara keseluruhan; • Memastikan PD menyusun penjenjangan kinerja dan Mereviu kembali rencana aksi yang disusun pada sebagian PD dengan memastikan seluruh kinerja yang ditetapkan dalam PK didukung dengan aksi-aksi yang selaras untuk

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	peningkatan kualitas kinerja. • Tindak lanjut rekomendasi evaluasi sebelumnya belum optimal	mencapai kinerja tersebut;
Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah		
• Komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas keuangan • Penerapan sistem digital seperti SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) dalam pengelolaan keuangan • Opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK yang mendorong peningkatan kualitas laporan keuangan • Meningkatnya kapasitas SDM pengelola keuangan melalui pelatihan dan bimtek	• Kualitas SDM pengelola keuangan yang belum merata di seluruh OPD • Masih adanya keterlambatan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan • Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal di beberapa perangkat daerah • Kurangnya integrasi data antar sistem perencanaan dan keuangan	• Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis pengelolaan keuangan daerah secara berkala • Optimalisasi penggunaan SIPD dan integrasi sistem keuangan daerah • Memperkuat pengawasan internal melalui audit rutin dan pembinaan oleh Inspektorat • Meningkatkan kedisiplinan dalam penyusunan dan pelaporan keuangan berbasis timeline yang jelas
Indeks SPBE/Pemerintah Digital (Pemdi)		

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Koordinasi antar SKPD untuk mengumpulkan eviden yang ditentukan • Perangkat daerah yang memanfaatkan TIK dalam menyelenggarakan layanan publik dan administrasi Pemerintahan • Koordinasi antar SKPD • Komitmen Pimpinan • Keselarasan dengan arsitektur SPBE Nasional	• Kurang maksimalnya program yang ada di SKPD kadangkala hanya sebatas untuk pemenuhan eviden saja • Keterlambatan pengumpulan evidence dari Perangkat Daerah • Evidence dari Perangkat Daerah tidak sesuai kriteria yang diharuskan • Masih rendahnya kesadaran SKPD dalam penerapan manajemen SPBE	• Koordinasi dengan SKPD dan Tim Koordinasi SPBE untuk membuat timeline kegiatan evaluasi SPBE • Perlunya komitmen pimpinan dalam menyikapi pemenuhan dokumen/evidence SPBE sesuai dengan lingkup masing – masing coordinator • Penerapan manajemen SPBE secara bertahap • Mempersiapkan penyusunan arsitektur SPBE

Sasaran 3.2 “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi Masyarakat”

Tabel 2.52

Capaian Sasaran 3.2 “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
3.2	Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi	Indeks ketentraman dan ketertiban umum	Poin	60,05	54,65	74.59	65,65	124.21%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
	masyarakat							
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								124.21%

Sasaran “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat” diukur melalui satu indikator berupa “Indeks ketentraman dan ketertiban umum”. Indikator ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja Tujuan ke-3 Kota Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu “Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas”

Pencapaian Indikator “Indeks ketentraman dan ketertiban umum”

Pencapaian Indikator “Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum” di Kota Cirebon menunjukkan tren yang semakin positif seiring dengan penguatan tata kelola keamanan lingkungan dan peningkatan sinergi antar perangkat daerah maupun organisasi masyarakat. Indeks ini mencerminkan tingkat kondusivitas wilayah yang diukur melalui berbagai parameter, antara lain tingkat gangguan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, penanganan konflik sosial, serta persepsi masyarakat terhadap rasa aman.

Pemerintah Kota Cirebon secara konsisten melakukan langkah-langkah strategis dan represif yang proporsional melalui optimalisasi peran antara perangkat daerah yang menjadi penanggung jawab indikator tersebut, dalam penegakan

Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota. Penertiban pedagang kaki lima yang tidak sesuai zonasi, pengawasan jam operasional tempat usaha, serta pengendalian reklame dan bangunan tanpa izin menjadi bagian dari upaya menjaga ketertiban ruang publik.

Berdasarkan hasil penetapan RPJMD Pemerintah Kota Cirebon, pada tahun 2025 Indeks Ketentraman dan Ketertiban Umum menetapkan target indikator sebagai bahan kebijakan daerah sebesar 60,05 poin dan memperoleh realisasi sebesar **77,21** poin Berdasarkan perhitungan atas realisasi tersebut, maka capaian kinerja adalah $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{74,59}{60,05} \times 100\% = 124,21\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi sasaran 3.2 “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat”

Evaluasi terhadap sasaran pembangunan “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat” di Kota Cirebon menunjukkan capaian yang semakin baik, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu penguatan berkelanjutan. Sasaran ini diukur melalui indikator ketentraman dan ketertiban umum, tingkat gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), efektivitas penegakan Peraturan Daerah, serta persepsi masyarakat terhadap rasa aman di lingkungan tempat tinggalnya.

Secara umum, kondisi ketentraman kota relatif terjaga melalui pengembangan kebijakan partisipasi masyarakat sipil dan adat dalam kegiatan Musrembang dari tingkat kelurahan, kecamatan dan kota, peningkatan patroli rutin dan operasi penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja, terutama pada kawasan pusat perdagangan, ruang terbuka publik, dan titik-titik rawan pelanggaran. Penataan pedagang kaki lima, pengawasan perizinan usaha, serta penertiban bangunan dan reklame yang tidak sesuai ketentuan menjadi langkah konkret dalam menjaga keteraturan tata ruang kota.

Tabel 2.53

Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 3.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	4.412.734.873	3.416.681.941	77,43%
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	8.144.851.753	6.630.404.786	81,41%
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	177.031.969	171.886.150	97,09%
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.399.646.916	26.855.872.397	91,35%
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	501.641.197	448.870.828	89,48%
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	103.144.514	97.625.500	94,65%

Meskipun demikian, target di tahun-tahun berikutnya akan menjadi tantangan, mengingat indikator “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi Masyarakat” menjadi penguatan dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum di Kota Cirebon. Capaian di tahun 2025 menjadi catatan untuk perubahan di tahun berikutnya. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah pada pencapaian kinerja sasaran 3.2:

Tabel 2.54

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.2 “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks ketentraman dan ketertiban umum - Komitmen dan kebijakan daerah dengan dukungan anggaran, regulasi, serta prioritas pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan urusan kebencanaan. - Sinergi lintas perangkat daerah serta kesiapan personel BPBD	Indeks ketentraman dan ketertiban umum - Jumlah serta kompetensi personel teknis kebencanaan dan dukungan peralatan masih perlu ditingkatkan. - Upaya pencegahan dan sistem data kebencanaan terintegrasi masih memerlukan	Indeks ketentraman dan ketertiban umum - Meningkatkan jumlah serta kompetensi personel teknis kebencanaan dan dukungan peralatan. - Upaya pencegahan dan sistem data kebencanaan terintegrasi masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. - Kondisi Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Trantibum dan Penegakan Perda perlu pembaruan - Peningkatan Kapasitas Aparat SatpolPP

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Masalah Pemecahan
dalam pelaksanaan tanggap darurat dan pelaporan kinerja. • Strategi = Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum • SDM = Pembeerdayaan SDM dan Peningkatan Kapasitas SDM • Sistem = Sarana dan Prasarana, Perencanaan dan Anggaran, dan Akuntabilitas	pengembangan lebih lanjut. SATPOLPP • Kondisi Sarana dan Prasarana untuk Pelaksanaan Trantibum dan Penegakan Perda perlu pembaruan • Jumlah Aparat Satpolpp perlu penambahan	• Pemanfaatan Teknologi Informasi (Peta Rawan Trantibum berbasis Geospasial)

Sasaran 3.3 “Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN”

Tabel 2.55

Capaian Sasaran 3.3 ” Meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025

					N- 1(2024)	2025		
3.3	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Skor	79,00	77,75	83.38	84,00	105.54%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								105.54%

Sasaran strategis 3.3 “Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN” sasaran ini merupakan bagian dari Upaya Pemerintah Kota Cirebon untuk mewujudkan tujuan ke-3 dalam dokumen RPJMD Kota Cirebon, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran ini mencakup langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemerintahan, yang mencakup optimalisasi sumber daya, kebijakan, dan layanan publik berbasis inovasi serta transparansi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan satu indikator utama, yaitu Indeks profesionalitas ASN. Indikator ini juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon.

Pencapaian indikator Indeks profesionalitas ASN

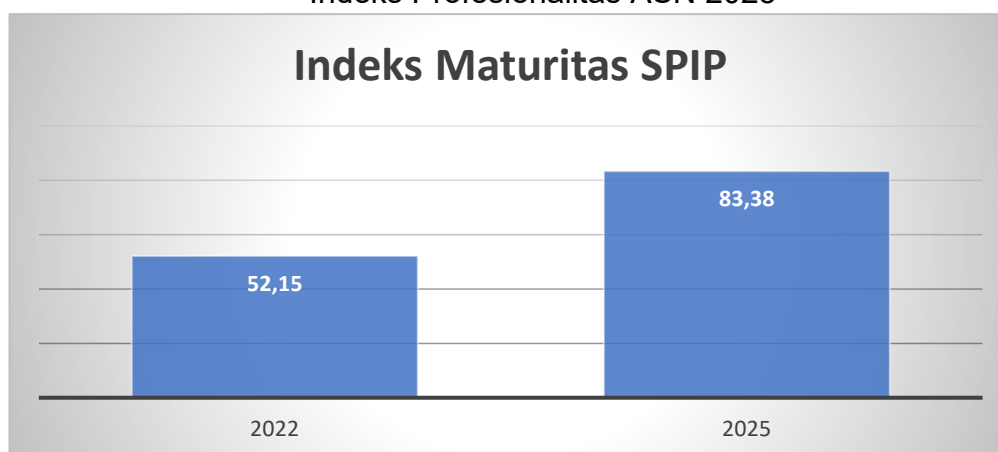
Indikator kinerja “ Indeks profesionalitas ASN” menjadi indikator pertama dalam sasaran “Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN.” Pada tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon memperoleh nilai 83.38 berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional III BKN Nomor 283/BM.01/SD/KR.III/2025 tanggal 9 Juli 2025, hasil sementara Pengukuran IP ASN Tahun 2024 yang diterbitkan pada tahun 2025 memperoleh nilai 83,38 dengan kategori Tinggi, dari target yang telah ditetapkan sebesar 79,00. Sebagai perwujudan atas konsistensi dalam mengukur hasil indeks Profesionalitas ASN Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya dalam profesionalitas ASN. Capaian tersebut jika dihitung dalam presentase sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{83.38}{79.00} \times 100\% = 105.54\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan Indeks

Profesionalitas ASN Jawa Barat yang mencapai **37,11 persen** dari skala maksimal 40 persen. Indeks Profesionalitas ASN di Kota Cirebon menunjukkan pencapaian dengan kategori **Tinggi**.

Berdasarkan data diatas, maka Indeks Profesionalitas ASN terus menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan kinerja yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Gambar 2.35

Indeks Profesionalitas ASN 2025



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon (2025)

Evaluasi Sasaran 3.3 “ Meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN”

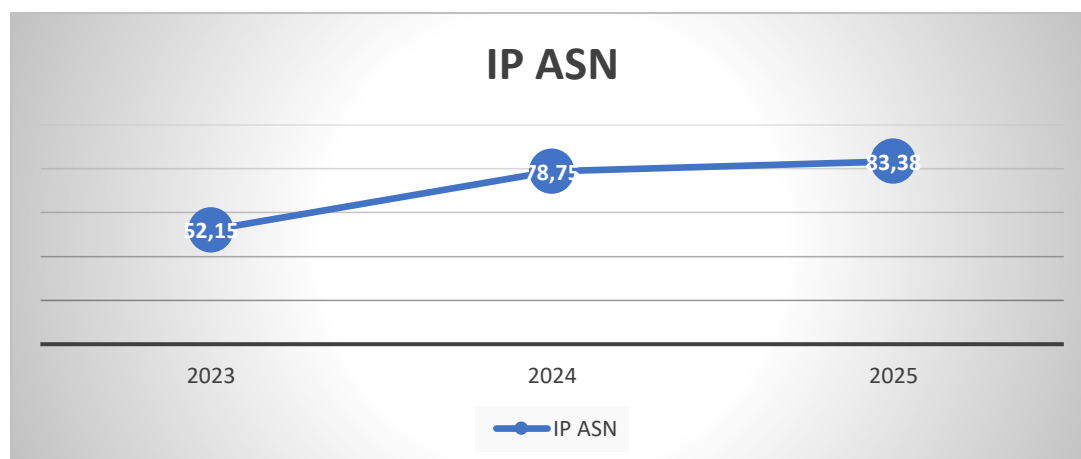
Evaluasi terhadap sasaran “Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme ASN” di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam beberapa tahun terakhir, khususnya dalam aspek manajemen kinerja, pengembangan kompetensi, serta penguatan sistem merit. Sasaran ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Dari sisi manajemen kinerja, berdasarkan Surat Kepala Kantor Regional III BKN Nomor 283/BM.01/SD/KR.III/2025 tanggal 9 Juli 2025, hasil sementara Pengukuran IP ASN Tahun 2024 yang diterbitkan pada tahun 2025 memperoleh nilai 83,38 dengan kategori Tinggi. Terjadi kenaikan sebesar 4,63 poin dibandingkan tahun sebelumnya yang memperoleh nilai 78,75. Pemerintah Kota Cirebon telah mengimplementasikan sistem penilaian kinerja berbasis indikator dan target yang terukur melalui penyelarasan perjanjian kinerja, Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dan capaian organisasi. Evaluasi menunjukkan adanya

peningkatan keselarasan antara target individu dengan target perangkat daerah, sehingga mendorong akuntabilitas dan budaya kerja berbasis hasil (result oriented). Monitoring dan evaluasi kinerja juga dilakukan secara berkala untuk memastikan capaian program dan kegiatan berjalan sesuai rencana.

Gambar 2.36

Capaian Indeks Profesionalitas ASN



Peningkatan atas capaian ini didukung oleh berbagai program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.56

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 3.3
“Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme ASN”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Kepegawaian Daerah	3.021.298.286	2.133.827.144	70,63%	
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.791.424.638	3.723.496.263	98,21%	

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pengelolaan Arsip	343.764.792	329.785.688	95,93%	
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	91.389.821	85.665.655	93,74%	
Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno	259.204.197	256.541.461	98,97%	
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			91,50%	

Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, diperlukan identifikasi faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi penyelesaian permasalahan yang efektif sebagai berikut:

Tabel 2.57

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.3 “ Meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Profesionalitas ASN		
Komitmen pimpinan daerah dalam penguatan manajemen ASN dan sistem merit	- Keterbatasan anggaran pengembangan kompetensi ASN - Kualitas dan konsistensi	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis prioritas dan pemanfaatan pola cost sharing/pelatihan daring

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Implementasi manajemen kinerja melalui e-Kinerja dan pemantauan berkala • Tingkat pendidikan ASN relatif tinggi dan mendukung peningkatan profesionalitas • Pembinaan disiplin ASN dan pengawasan internal yang semakin baik • Dukungan regulasi nasional terkait penguatan profesionalitas dan sistem merit • Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data kepegawaian	• pengisian data kinerja belum merata • Belum meratanya kesempatan pengembangan kompetensi teknis dan fungsional • Masih terdapat ASN dengan tingkat kedisiplinan dan motivasi kerja yang fluktuatif • Perubahan regulasi dan kebijakan pusat yang dinamis • Validitas dan kelengkapan data ASN yang belum sepenuhnya optimal	• Penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan kapasitas admin/operator perangkat daerah • Penyusunan rencana pengembangan kompetensi berbasis kebutuhan jabatan (training need analysis) • Masih terdapat ASN dengan tingkat kedisiplinan dan motivasi kerja yang fluktuatif Peningkatan pembinaan, coaching, mentoring, dan penerapan reward and punishment secara konsisten • Penyesuaian kebijakan daerah secara cepat melalui harmonisasi regulasi dan peningkatan koordinasi dengan instansi pembina • Pemutakhiran data ASN secara berkala dan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
		integrasi sistem informasi kepegawaian

Sasaran 3.4 “Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”

Tabel 2.58

Capaian Sasaran 3.4 “Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
3.4	Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Pelayanan Publik	Skor	4,04	3,97	4,70	4,51	116,33%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Poin	86,64	86,59	86,96	86,89	100,37%

han dan pelayanan publik							
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator							108,35%

Sasaran Strategis 3.4 “Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” merupakan bagian dari upaya mendukung Tujuan Ketiga Kota Cirebon, yakni Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sejumlah indikator, beberapa di antaranya merupakan sub-indikator yang membangun indikator utama lainnya. Berikut adalah indikator, diantaranya:

1. Indeks Pelayanan Publik
2. Indeks Kepuasan Masyarakat

Pencapaian Indikator ke-1 “Indeks Pelayanan Publik”

Gambar 2.37

Hasil capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025

C. KOTA

No	Instansi	Indeks	Kategori
1	Pemerintah Kota Surabaya	4.84	A
2	Pemerintah Kota Surakarta	4.80	A
3	Pemerintah Kota Denpasar	4.80	A
4	Pemerintah Kota Depok	4.76	A
5	Pemerintah Kota Bandung	4.73	A
6	Pemerintah Kota Bekasi	4.73	A
7	Pemerintah Kota Pontianak	4.71	A
8	Pemerintah Kota Pasuruan	4.71	A
9	Pemerintah Kota Madiun	4.71	A
10	Pemerintah Kota Lubuk Linggau	4.70	A
11	Pemerintah Kota Balikpapan	4.70	A
12	Pemerintah Kota Cirebon	4.70	A
13	Pemerintah Kota Pekalongan	4.70	A
14	Pemerintah Kota Blitar	4.69	A

Sumber: KemenPAN-RB 2025

Berdasarkan hasil dari penilaian Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) yang dikelola oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, melalui Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 3 Tahun 2026 tentang hasil pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pelayanan Publik di K/L dan Daerah tahun 2025, bahwa Pemerintah Kota Cirebon memperoleh hasil atas Indeks Pelayanan Publik **sebesar 4,70** dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 4,04. Dengan demikian, hasil ini **meningkat dari tahun sebelumnya** yaitu 3,97. Jika dibandingkan dengan Indeks Pelayanan Publik Nasional sebesar 4,04, Kota Cirebon masih memiliki hasil IPP yang lebih tinggi daripada IPP Nasional. Persentase dari capaian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{4,70}{4,04} \times 100\% = 116,33\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, capaian ini telah melebihi target dengan capaian 100%.

Gambar 2.38

Hasil nilai Indeks Pelayanan Publik 5 tahun terakhir



Sumber : Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon

Pada tahun 2022 Pengukuran tingkat kota dilaksanakan hanya satu lokus saja, sehingga penilaian tidak dilakukan untuk tingkat pemerintah daerah.

Pencapaian Indikator ke-2 "Indeks Kepuasan Masyarakat"

Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi Suvei Kepuasan Masyarakat (SUKMA) yang telah di rilis pada Tahun 2025, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh hasil sebesar **86,96** dari target yang telah di tetapkan melalui dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yaitu sebesar 86,64 dengan rincian capaian kinerja sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% =$

$\frac{86,96}{86,64} \times 100\% = 100,37\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, capaian ini telah melebihi target dengan capaian 100%. **Ini masih jauh lebih baik kondisi IKM nasional dengan hasil sebesar 89,11.**

Hasil ini diperoleh melalui rekapan nilai perangkat daerah atas survei kepuasan masyarakat, capaian ini menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus meningkatkan kinerja agar bermanfaat bagi masyarakat. Berikut adalah rincian atas hasil capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025:

Gambar 2.39

Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025

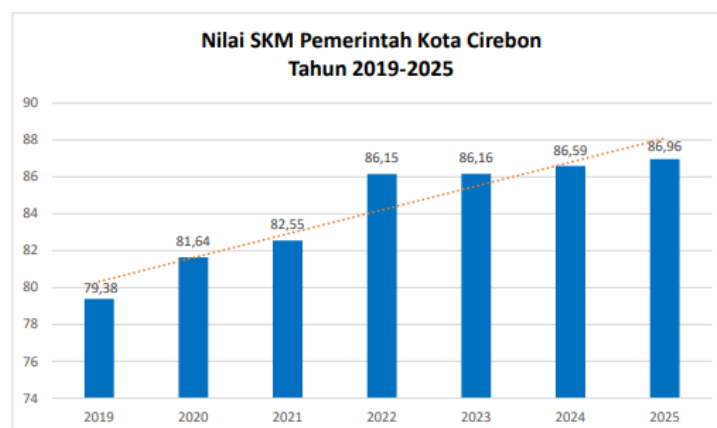
86.96		
NO	UNSUR PENILAIAN	NILAI RATA-RATA
U1	Persyaratan	86,78
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	86,66
U3	Waktu Penyelesaian	85,34
U4	Biaya / Tarif	94,71
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	86,13
U6	Kompetensi Pelaksana	87,08
U7	Perilaku Pelaksana	87,63
U8	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	83,80
U9	Sarana dan Prasarana	92,44
JUMLAH NILAI UNSUR		1.011,92
NRR / UNSUR		3,51
NRR TERTIMBANG/UNSUR		3,48

Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon data diolah

Berdasarkan data diatas, maka Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya meningkatkan capaian dari Indeks Kepuasan Masyarakat dengan hasil pada tahun 2025 sebesar 86,96. Hasil ini terus meningkat dalam 5 tahun terakhir, dapat diuraikan pada tabel dibawah ini:

Gambar 2.40

Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025



Sumber: Bagian Organisasi Setda Kota Cirebon

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa terjadi konsistensi peningkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dari tahun 2019 hingga tahun 2025 di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon.

Evaluasi Sasaran 3.4 "Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik"

Evaluasi terhadap sasaran "**Meningkatnya Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik**" di Kota Cirebon menunjukkan tren yang semakin positif, seiring dengan penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi publik. Sasaran ini menjadi indikator penting dalam menilai kualitas hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama pembangunan.

Dari aspek partisipasi, Pemerintah Kota Cirebon terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Partisipasi masyarakat juga difasilitasi melalui forum konsultasi publik, kanal pengaduan berbasis digital, serta media sosial resmi pemerintah daerah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi dan memperoleh informasi secara cepat dan terbuka. Dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini, terdapat beberapa program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 2.59

Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung sasaran 3.4" Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik"

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	29.399.646.916	26.855.872.397	91,35%	
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	501.641.197	448.870.828	89,48%	

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	380.677.250	364.161.970	95,66%	
Program Pendaftaran Penduduk	183.534.961	153.141.637	83,44%	
Program Pencatatan Sipil	77.327.302	77.326.502	100,00%	
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			91,90%	

Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan dalam penentuan target pada tahun-tahun mendatang. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat, dan strategi pemecahan masalah yang dapat diterapkan:

Tabel 2.60

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 3.4 “Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Pelayanan Publik		
- Regulasi & Standar Pelayanan - Kompetensi dan Profesionalisme SDM - Sarana dan Prasarana Pelayanan - Sistem Informasi dan	- Regulasi dan Standar Pelayanan Tidak Optimal - Kualitas SDM Pelayanan Kurang Memadai	- Lengkapi dokumen standar pelayanan - Perbaiki sarpras yang terlihat langsung oleh publik - Optimalkan SKM dan tindak lanjutnya

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
- Digitalisasi Layanan - Pengaduan & Transparansi - Inovasi Pelayanan Publik - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) - Evaluasi & Komitmen Pimpinan	- Sarana dan Prasarana Tidak Mendukung - Digitalisasi Layanan Belum Optimal - Pengelolaan Pengaduan Lemah - Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tidak Berkualitas - Minimnya Inovasi Pelayanan - Lemahnya Monitoring dan Komitmen Pimpinan	Tertibkan pengaduan dan dokumentasinya
Indeks Kepuasan Masyarakat		
Kualitas interaksi petugas dengan masyarakat	Kurangnya komitmen pimpinan terhadap budaya pelayanan prima.	- Penguatan Komitmen dan Tata Kelola Pelayanan - Peningkatan Kompetensi dan

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Kecepatan dan kepastian layanan • Transparansi biaya dan prosedur • Kenyamanan fasilitas • Respons terhadap keluhan	• Evaluasi dan tindak lanjut hasil survei IKM tidak optimal. • Kompetensi petugas pelayanan belum memadai. • Kurangnya pelatihan pelayanan publik dan etika komunikasi. • Fasilitas ruang tunggu kurang nyaman. • Aksesibilitas bagi disabilitas belum sepenuhnya terpenuhi. • Sistem antrean manual dan belum terdigitalisasi. • Gangguan jaringan atau sistem aplikasi pelayanan • Waktu penyelesaian layanan melebihi standar. • Prosedur berbelit dan kurang transparan.	• Budaya Pelayanan SDM • Penyederhanaan Proses dan Standar Pelayanan • Perbaikan Sarana dan Prasarana • Penguatan Sistem Pengaduan dan Feedback • Optimalisasi 9 Unsur IKM (Fokus Prioritas) • Inovasi Pelayanan Publik • Pelibatan Masyarakat

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	- Persyaratan administrasi terlalu banyak atau tidak jelas - Informasi layanan tidak tersosialisasi dengan baik. - Website/medsos instansi tidak update.	

Sasaran 3.5 “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik”

Tabel 2.61

Capaian Sasaran 3.5 “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
3.5	Meningkatnya inovasi dalam	Indeks Inovasi Daerah	Poin	53,74	53,24	48,18	56,24	89,65%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
	penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik							
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								89,65%

Sasaran “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik” merupakan bagian dari upaya mendukung tujuan Kota Cirebon dalam Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Indikator Indeks Inovasi Daerah.

Pencapaian Indikator ke-1 “Indeks Inovasi Daerah”

Pencapaian **Indeks Inovasi Daerah** di Kota Cirebon menunjukkan belum adanya perkembangan yang progresif dikarenakan indikator tersebut adalah indikator yang baru di dalam dokumen RPJMD Pemerintah Kota Cirebon tahun 2025-2029. Target pada indikator Indeks Inovasi Daerah di tahun 2025 yaitu sebesar 53,74 poin dan **memperoleh hasil sebesar 48,18 poin**. Jika dibandingkan

dengan rata-rata nasional Indeks Inovasi Daerah mencapai 49,43 lebih tinggi.

Hasil ini menjadi tantangan untuk Pemerintah Kota Cirebon agar terus meningkatkan capaian dari target tahun-tahun selanjutnya, serta mendorong budaya kerja inovatif di lingkungan pemerintahan daerah. Indeks ini mengukur kapasitas dan konsistensi pemerintah daerah dalam melahirkan, mengimplementasikan, serta mereplikasi inovasi yang berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan daya saing daerah.

Upaya Pemerintah Kota Cirebon untuk meningkatkan capaian atas indikator tersebut adalah secara aktif mendorong perangkat daerah untuk menghasilkan inovasi berbasis kebutuhan masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi. Berbagai terobosan dilakukan melalui digitalisasi layanan administrasi, pengembangan sistem informasi terintegrasi, serta penyederhanaan prosedur pelayanan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi. Inovasi tidak hanya berfokus pada sektor pelayanan publik, tetapi juga mencakup pengelolaan keuangan daerah, perencanaan pembangunan, hingga penguatan pengawasan internal. Berikut adalah dokumentasi dalam pelaksanaan inovasi daerah melalui KOIN KOCIR (Kompetisi Inovasi Kota Cirebon):

Gambar 2.41
Dokumentasi Penganugrahan KOIN KOCIR Tahun 2025



Sumber: *Bappelitbangda Kota Cirebon Tahun 2025*

KOIN KOCIR adalah ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Bappelitbangda Kota Cirebon untuk mendorong inovasi berkelanjutan dengan tema Meningkatkan Daya Saing Melalui Inovasi Berkelanjutan. Kompetisi ini diluncurkan pada bulan September tahun 2025 bertujuan menampung ide kreatif untuk memajukan sektor layanan publik. Kompetisi ini menjadi wujud komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam melakukan perubahan nyata melalui ide-ide kreatif dari Aparatur Pemerintah.

Evaluasi Sasaran 3.5 “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik”

Evaluasi terhadap sasaran “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik” di Kota Cirebon menunjukkan arah yang semakin konstruktif dan adaptif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat. Inovasi telah menjadi bagian dari strategi reformasi birokrasi daerah dalam mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih efektif, efisien, serta berbasis teknologi.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Cirebon mendorong setiap perangkat daerah untuk mengembangkan inovasi yang relevan dengan tugas dan fungsinya, baik dalam bentuk digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, integrasi sistem informasi, maupun penguatan pola koordinasi lintas sektor. Evaluasi menunjukkan bahwa jumlah inovasi yang terdokumentasi dan dilaporkan secara resmi mengalami peningkatan, yang turut berdampak pada capaian Indeks Inovasi Daerah.

Namun demikian, hasil evaluasi juga mengidentifikasi beberapa tantangan, antara lain keberlanjutan inovasi yang masih bergantung pada inisiatif individu, belum meratanya kapasitas inovasi antarperangkat daerah, serta perlunya penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi dampak inovasi secara kuantitatif. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan manajemen inovasi yang lebih sistematis, termasuk pembinaan, replikasi praktik baik, serta pemberian apresiasi bagi perangkat daerah yang berhasil menciptakan inovasi berdampak nyata.

Dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini terdapat beberapa program yang mendukung langsung terhadap pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 2.62

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.5
“Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	623.115.601	603.102.520	96,79%
Program Riset dan Inovasi Daerah			
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			96,79 %

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, pencapaian di tahun-tahun berikutnya menjadi tantangan tersendiri. Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.63

Faktor Pendukung, Faktor Penghambat
dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.5
Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Inovasi Daerah		
Adanya tim kelitbangan yang terdiri dari perangkat daerah serta akademis dari perguruan tinggi	- Berubahnya komponen penilaian indeks inovasi daerah - Belum meratanya pemahaman	- Melakukan pendampingan terhadap inovasi yang sudah berjalan - Meningkatkan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait indikator Indeks Inovasi Daerah

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
• Dukungan kolaborasi antara pemerintah daerah dengan dunia pendidikan dan penelitian • Komitmen OPD dalam mengembangkan inovasi pelayanan publik • Ketersediaan regulasi daerah yang mendukung pengembangan inovasi • Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendorong inovasi daerah	• OPD terkait indikator dan kriteria inovasi • Keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi di bidang inovasi dan kelitbangan • Dokumentasi dan pelaporan inovasi yang belum optimal • Kurangnya keberlanjutan (sustainability) dari inovasi yang telah dibuat	• Memperkuat peran tim kelitbangan sebagai koordinator dan fasilitator inovasi daerah • Mendorong peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan workshop inovasi • Meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelaporan inovasi secara sistematis

Tujuan 4 : “ Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah Daerah Kota Cirebon juga memperhatikan perkembangan kondisi yang ada agar dapat menghasilkan perencanaan pembangunan yang responsif terhadap dinamika pembangunan yang terjadi. Selain muatan visi – misi dan arah pembangunan, isu – isu strategis menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kota Cirebon. Dengan memperhatikan visi – misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cirebon Tahun 2025-2045, analisa sasaran

pokok dan arah kebijakan RPJPD, dapat dirumuskan tujuan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025-2029. Terdapat tiga tujuan yang ditetapkan sebagai tujuan pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun perencanaan 2025-2029 salah satunya yaitu “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”.

Tabel 2.64
Capaian Kinerja Tujuan 4 “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
1.	Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	tonCO2 eq/2010 IDRMilyar	0,15	N/A	0,31	1,52	206,67%
Rata Rata Capaian Indikator Kinerja								206,67%

Tujuan “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan” diukur dengan sebuah indikator : “ Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”, merupakan bagian penting dari komitmen pembangunan daerah yang

berorientasi pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan kelestarian lingkungan hidup. Sebagai kota pesisir dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dan aktivitas ekonomi yang dinamis, Kota Cirebon menghadapi tantangan kompleks seperti pengelolaan sampah, keterbatasan ruang terbuka hijau, banjir rob, serta penurunan kualitas lingkungan permukiman. Oleh karena itu, penataan lingkungan dilakukan secara terintegrasi melalui perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan, penguatan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang ditetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional Pemerintah Indonesia berkomitmen di dalam penurunan tingkat emisi Gas Rumah Kaca (GRK) nasional sudah diperbaharui, yaitu 31,89% dari sebelumnya 29% di bawah tingkat emisi GRK *Business-As-Usual* (BaU) pada tahun 2030 untuk skenario *unconditional* dan sampai dengan 43,20% dari sebelumnya 41% di bawah tingkat emisi BaU untuk skenario *conditional* sebagaimana dalam NDC, peta jalan mitigasi dan adaptasi dan strategi Jangka Panjang untuk Perjanjian Rendah Karbon dan Kompatibel dengan Paris untuk 2050 (LTSLCCR 2050).

Upaya penataan tersebut diwujudkan melalui optimalisasi ruang terbuka hijau, rehabilitasi kawasan pesisir, peningkatan sistem drainase perkotaan, serta pengendalian pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pemerintah daerah juga mendorong penerapan prinsip pembangunan rendah emisi dan ramah lingkungan dalam setiap proyek infrastruktur, termasuk pengelolaan persampahan berbasis *reduce, reuse, recycle* (3R) dan pengembangan bank sampah di tingkat kelurahan. Selain itu, penataan kawasan kumuh dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat guna menciptakan lingkungan hunian yang sehat, tertata, dan layak huni.

Gambar 2.42
Infografis Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca



Pencapaian Indikator Tujuan “Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)”

Pencapaian indikator penurunan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) di Kota Cirebon menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan rendah karbon dan berkelanjutan. Intensitas emisi GRK mencerminkan jumlah emisi yang dihasilkan per unit Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), sehingga penurunannya menjadi tolok ukur seberapa efektif suatu

daerah dalam mengurangi dampak lingkungan sekaligus mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Kota Cirebon telah mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis yang fokus pada pengendalian sumber emisi utama, seperti sektor transportasi, energi, dan pengelolaan limbah. Upaya penurunan emisi dilakukan melalui optimalisasi transportasi publik, promosi penggunaan kendaraan ramah lingkungan, serta pengembangan infrastruktur sepeda dan pejalan kaki untuk mengurangi ketergantungan pada kendaraan bermotor pribadi. Selain itu, penerapan teknologi hemat energi di gedung-gedung pemerintahan dan fasilitas umum turut berkontribusi terhadap efisiensi penggunaan energi serta penurunan emisi sektor energi.

Pada Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon menargetkan sebesar 0,15 (tonCO₂eq/2010 IDRMilyar) sesuai dengan dokumen RPJMD Kota Cirebon. Target ini, memiliki realisasi sebesar 0,31 (tonCO₂eq/2010 IDRMilyar). Dari hasil ini capaian yang telah diperoleh menjadi acuan bagi Pemerintah Kota Cirebon untuk terus meningkatkan kinerja agar capaian realisasi sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Jika disandingkan dengan kondisi Nasional, kondisi Gas Rumah Kaca pada tahun 2022 tercatat sebesar 1.228.721,14 (tonCO₂eq/2010 IDRMilyar), kemudian meningkat menjadi 1.360.346,59 (tonCO₂eq/2010 IDRMilyar) pada tahun 2023. Kondisi nasional yang tersedia hingga tahun 2023 menunjukkan bahwa emisi GRK nasional terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 10,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{0,31}{0,15} \times 100\% = 206,67\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, capaian ini telah melebihi target dengan capaian 100%.

Evaluasi Tujuan “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”

Pencapaian indikator dari tujuan “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”, dengan indikator emisi gas rumah kaca, menjadi salah satu tolok ukur dalam menilai keberhasilan upaya pengelolaan lingkungan di Cirebon. Pengendalian emisi gas rumah kaca dilakukan melalui berbagai upaya, seperti peningkatan pengelolaan sampah, efisiensi penggunaan energi, serta penguatan ruang terbuka hijau sebagai upaya penyerapan emisi.

Hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya agar tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Tujuan ini terdapat 27 program yang tersebar di 4 sasaran dengan jumlah anggaran Rp. 141.088.653.825 dan realisasi Rp. 133.871.413.476 atau 94,89%.

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian tujuan, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya :

Tabel 2.65
Faktor Pendukung, Faktor Penghambat
dan Strategi Pemecahan Masalah Tujuan 4
“Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)		
- Adanya kebijakan dan komitmen pemerintah pusat dalam pengendalian perubahan iklim. - Potensi integrasi program lingkungan dalam perencanaan 231Industry231an daerah. - Dukungan dan keterlibatan stakeholder seperti akademisi, sektor swasta, dan	- Belum adanya dukungan regulasi (Perda, Perwal) terkait Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)/Rencana Aksi Iklim - Lemahnya koordinasi antar SKPD terkait prioritas	- Mengintegrasikan target penurunan emisi ke RPJMD dan Renstra OPD. - Memperkuat Pokja Iklim Kota Cirebon - Mencoba akses Pendanaan Iklim Internasional

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
komunitas lingkungan. • Meningkatnya kesadaran dan partisipasi dalam menjaga lingkungan. • Peluang pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar APBD.	pelaksanaan aksi iklim • Keterbatasan APBD dan kurangnya skema pembiayaan inovatif (Blended finance/KPBU)	

Untuk menunjang tujuan “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”, telah ditetapkan 4 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 4.1 “ Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup”

Tabel 2.66

Capaian Sasaran 4.1 “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
4.1	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	52,99	59,20	64,44	54,25	121,61%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								121,61%

Sasaran “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup” sangat relevan dijadikan sasaran karena pemerintahan berbasis elektronik atau dikenal dengan istilah *e-government* merupakan bagian dari sebuah manajemen pemerintahan di Kota Cirebon hal ini seiring untuk mendukung tujuan ke tiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025-2029 yaitu “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”.

Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup di Kota Cirebon merupakan wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan

berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Sebagai kota pesisir dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, tantangan lingkungan seperti pengelolaan sampah, penurunan kualitas air, alih fungsi lahan, serta risiko banjir dan rob menjadi perhatian strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

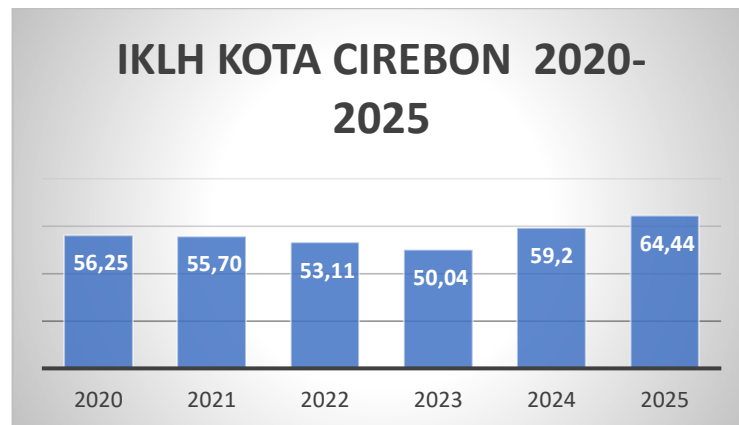
Pencapaian Indikator “ Indeks Kualitas Lingkungan Hidup “

Pencapaian Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) di Kota Cirebon menunjukkan tren yang semakin positif sebagai hasil dari penguatan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan secara terpadu. IKLH yang merupakan komposit dari kualitas air, kualitas udara, dan tutupan lahan menjadi tolok ukur penting dalam menilai keberhasilan pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dalam konteks Kota Cirebon, peningkatan nilai IKLH didorong oleh beberapa strategi. Dari aspek kualitas udara, pengendalian emisi kendaraan bermotor, pengawasan terhadap kegiatan industri, serta peningkatan ruang terbuka hijau berkontribusi terhadap perbaikan konsentrasi partikulat dan gas pencemar. Upaya penghijauan kota, penataan taman, dan rehabilitasi jalur hijau jalan menjadi bagian dari strategi menjaga keseimbangan ekologis perkotaan. Pada sasaran ini Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 64,44 dari target 52,99. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 59,20. Capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut : $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{64,44}{52,99} \times 100\% = 121,61\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, capaian ini telah melebihi target dengan capaian 100%. **Jika disandingkan dengan IKLH Nasional pada tahun 2025 di level 76,49. Maka Realisasi Kota Cirebon lebih rendah** dari capaian Nasional di kualitas Lingkungan Hidup, kendati hal ini terjadi karena Kota Cirebon yang didominasi wilayah perkotaan, namun menjadi catatan penting perlunya peningkatan yang serius dalam kebijakan lingkungan hidup. Berikut merupakan nilai indeks Kualitas Lingkungan Hidup dalam 5 tahun terakhir Kota Cirebon:

Gambar 2.43

Indeks IKLH Kota Cirebon Tahun 2020-2025



Sumber : DLH Kota Cirebon dan Cirebon Satu Data, di olah

Evaluasi sasaran 4.1 “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup”

Pencapaian sasaran “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup” dengan satu indikator diatas, memiliki rata – rata pencapaian 121,61% berada pada predikat **Melebihi Target**. Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya supaya tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 4.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.67

Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Persampahan	20,281,769,705	16,776,229,576	82.72%
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan	89,848,637	89,841,120	99.99%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)			
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	84,358,812	84,121,120	99.72%
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	84,917,822	84,060,750	98.99%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	188,220,489	188,048,244	99.91%
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	439,276,609	436,529,034	99.37%
Program Penghargaan Lingkungan	158,160,116	157,700,566	99.71%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Hidup Untuk Masyarakat			
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	162,575,956	162,136,722	99.73%
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	196,626,292	188,852,558	96.05%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.68

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Sasaran sasaran 4.1 “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		
- Terbitnya PermenLH No. 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Respon terhadap perubahan Lingkungan - Aplikasi SITALA (Sistem Indeks Kualitas Lingkungan Hidup)	- Hasil Perhitungan Nilai IKLH final terlambat - Kurangnya pemahaman SKPD terkait data Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD). - Tidak tersedianya Dokumen Pendukung Indeks Respon Lingkungan Hidup Daerah (IRLHD) yang terupdate	Berkoordinasi dengan SKPD terkait pelaksanaan program kali bersih, Langit Biru dan Indonesia Hijau untuk meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungana Hidup

Sasaran 4.2 “ Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas”

Tabel 2.69

Capaian Sasaran 4.2 "Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas" Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1 (2024)	2025		
4.2	Tertatanya ruang kota yang fungsional	Indeks Layanan Infrastruktur Kota	Persen	63,23	62,61	64,34	71,88	101,76%
	, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas	Proporsi Ruang Terbuka Hijau	Persen	4	4,391	8,8	4,518	200,41%
		Indeks Smart City	Indeks	3,44	3,31	3,32	4,00	96,51%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								132,89%

Sasaran “Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas” diukur melalui tiga indikator berupa “Indeks Layanan Infrastruktur Kota, Proporsi Ruang Terbuka Hijau, Indeks Smart City”. Indikator ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja Tujuan ke-4 Kota Cirebon sebagaimana yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029, yaitu “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan”

Pencapaian Indikator “ Indeks Layanan Infrastruktur Kota”

Kinerja layanan infrastruktur di Kota Cirebon memperlihatkan perbaikan layanan infrastruktur yang tercermin dari kenaikan Nilai Indikator Layanan Infrastruktur Kota (ILIK) meningkat dari 62,61 pada 2024 menjadi 64,34 pada 2025. Peningkatan ini menggambarkan adanya perbaikan pada kualitas layanan infrastruktur dasar perkotaan, khususnya pada sektor transportasi dan pengelolaan persampahan. Perbaikan tersebut menunjukkan bahwa berbagai intervensi pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan pemerintah daerah mulai memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas layanan publik di bidang infrastruktur perkotaan.

Sejalan dengan prioritas pembangunan pemerintah pusat dan provinsi, sepanjang tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon melaksanakan berbagai upaya peningkatan layanan infrastruktur pada sektor-sektor strategis. Pada sektor transportasi, peningkatan kinerja layanan dilakukan melalui kegiatan peningkatan kualitas jalan lingkungan, penambahan fasilitas keselamatan jalan, serta perbaikan elemen pelengkap jalan guna mendukung terpenuhinya standar pelayanan minimal transportasi perkotaan. Upaya ini turut berkontribusi pada peningkatan kelengkapan infrastruktur jalan dan menjaga tingkat kemantapan jaringan jalan di wilayah perkotaan.

Selain itu, peningkatan layanan pada sektor air minum dan sanitasi dilakukan melalui penguatan sistem penyediaan air minum serta pengembangan layanan sanitasi perkotaan. Intervensi yang dilaksanakan antara lain melalui optimalisasi sistem penyediaan air minum, peningkatan sambungan rumah tangga, serta pengembangan infrastruktur sanitasi berbasis masyarakat yang mendukung

pencapaian target pembangunan nasional di bidang air minum dan sanitasi. Pada saat yang sama, penguatan sistem pengelolaan sampah perkotaan juga menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah pada tahun 2025, yang diwujudkan melalui optimalisasi operasional fasilitas pengolahan sampah, perluasan layanan pengumpulan sampah rumah tangga, serta peningkatan kinerja pengelolaan di tempat pemrosesan akhir.

Pemerintah Kota Cirebon pada tahun 2025 telah menetapkan target indikator Indeks Layanan Infrastruktur Kota yang akan ditindaklanjuti sebagai bahan kebijakan daerah sebesar 63,23%. Berdasarkan target yang telah ditetapkan, realisasi indikator tersebut pada tahun 2025 mencapai 64,34%. Jika dihitung berdasarkan formula kinerja, maka pencapaian indikator ini adalah $\frac{R}{T} \times 100\% =$

$\frac{64,34}{63,23} \times 100\% = 101,76\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian Indikator “ Proporsi Ruang Terbuka Hijau”

Pencapaian Indikator Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Cirebon menunjukkan komitmen yang konsisten dalam mewujudkan tata ruang kota yang seimbang, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Sebagai kota pesisir dengan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi, keberadaan RTH memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas udara, mengurangi suhu permukaan, meningkatkan daya resap air, serta menyediakan ruang interaksi sosial bagi masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, Pemerintah Kota Cirebon terus melakukan penataan dan pengembangan taman kota, jalur hijau jalan, serta ruang publik terbuka sebagai bagian dari upaya meningkatkan proporsi RTH. Optimalisasi pemanfaatan lahan milik pemerintah untuk dijadikan taman tematik dan ruang publik ramah anak turut berkontribusi terhadap peningkatan luasan RTH. Selain itu, rehabilitasi kawasan pesisir dan penghijauan di lingkungan permukiman juga menjadi langkah konkret dalam memperluas tutupan vegetasi perkotaan.

Pemerintah Kota Cirebon menargetkan Proporsi Ruang Terbuka Hijau di tahun 2025 adalah 4%. Capaian dari indikator Proporsi Ruang Terbuka Hijau di Kota Cirebon tahun 2025 adalah 8,8%. Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja

$\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{8,8}{4} \times 100\% = 200,41\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, capaian ini telah melebihi target dengan capaian 100%.

Pencapaian Indikator “ Indeks Smart City”

Pencapaian Indikator Indeks Smart City Kota Cirebon mencerminkan kemajuan transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin terintegrasi, inovatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Sebagai kota yang terus berkembang, Kota Cirebon berupaya mengimplementasikan konsep kota cerdas secara bertahap melalui penguatan tata kelola berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Peningkatan nilai Indeks Smart City didukung oleh pengembangan infrastruktur digital, seperti perluasan jaringan internet pada fasilitas publik dan perangkat daerah, serta pemanfaatan aplikasi layanan daring untuk perizinan, administrasi kependudukan, pengaduan masyarakat, dan layanan publik lainnya. Integrasi sistem informasi antar perangkat daerah juga semakin diperkuat guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan.

Pada sasaran ini Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 3,32 (Indeks) dari target 3,44 (indeks). Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 3,31 (Indeks). Capaian kinerja dapat dirumuskan sebagai berikut :

$\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{3,22}{3,44} \times 100\% = 96,51\%$ yang berarti Sangat Tinggi.

Evaluasi sasaran 4.2 “Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas”

Pemerintah Kota Cirebon telah melakukan berbagai langkah strategis seperti peningkatan kualitas jalan dan drainase perkotaan, pengembangan ruang terbuka hijau, penataan kawasan strategis kota, serta peningkatan kualitas kawasan permukiman. Upaya tersebut tidak hanya berorientasi pada aspek fungsionalitas ruang, tetapi juga pada peningkatan estetika kota melalui penataan koridor jalan, revitalisasi ruang publik, serta penguatan identitas kawasan perkotaan.

Secara umum, capaian sasaran ini menunjukkan arah yang positif dalam mewujudkan Kota Cirebon sebagai kota yang tertata, nyaman, dan

berkelanjutan. Ke depan, upaya penataan ruang kota perlu terus diperkuat melalui pengembangan infrastruktur yang terintegrasi, peningkatan kualitas lingkungan perkotaan, serta pemanfaatan teknologi cerdas guna mendukung terwujudnya kota yang inklusif, berdaya saing, dan ramah lingkungan.

Pencapaian sasaran “Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas” dengan tiga indikator diatas, memiliki rata – rata pencapaian 132,89% berada pada predikat **Melebihi Target**. Kendati tingkat pencapaian telah melebihi target namun hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya supaya tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 4.2 adalah sebagai berikut

:

Tabel 2.70

Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 4.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	100.000.000	98.815.500	98,82%
Program Penataan Bangunan Gedung	11.881.618.716	11.702.774.174	98,49%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.520.797.624	4.254.642.989	94,11%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	6.669.842.782	6.646.001.576	99,64%
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	1.040.512.053	989.475.419	95,10%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Penyediaan Air Minum			
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	8.532.100.513	8.388.769.826	98,32%
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	362.933.093	344.903.727	95,03%
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	729.489.067	723.510.767	99,18%
Program Penyelenggaraan Jalan	23.683.842.928	23.525.647.032	99,33%
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	300.866.471	255.243.870	84,84%
Program Penatagunaan Tanah	129.999.800	128.934.111	99,18%
Program Kawasan Permukiman	12.365.276.512	12.270.156.684	99,23%
Program Pengembangan Perumahan	349.848.150	52.748.360	15,08%
Program Peningkatan	26.220.693.702	25.087.266.354	95,68%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)			
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.193.018.000	1.193.018.000	100,00%
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati			
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	904.466.385	801.854.960	88,66%
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.412.759.457	8.959.377.561	95,18%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			91,52%

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.71

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah

Sasaran sasaran 4.2 “ Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Layanan Infrastruktur Kota		
- Adanya komitmen Pemerintah Kota Cirebon dalam penguatan tata kelola pemerintahan dan pengembangan konsep smart city untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur. - Tersedianya perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyediaan serta pengelolaan infrastruktur dasar perkotaan. - Dukungan kebijakan pembangunan daerah yang mengarahkan pada penataan ruang kota yang	- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi program antar perangkat daerah dalam penyediaan layanan infrastruktur perkotaan. - Keterbatasan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan. - Belum meratanya kualitas akses dan layanan infrastruktur dasar di	- Penguatan koordinasi dan sinkronisasi program pembangunan infrastruktur antar perangkat daerah. - Optimalisasi perencanaan pembangunan yang terintegrasi dengan penataan ruang kota. - Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung layanan infrastruktur berbasis smart city. - Penguatan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan sektor swasta dalam pembiayaan serta

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
fungsional, estetik, dan ramah lingkungan. Adanya peluang kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, dan pihak swasta dalam pembangunan serta pengembangan infrastruktur kota.	beberapa wilayah kota. Pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung konsep kota cerdas yang masih perlu ditingkatkan.	pengembangan infrastruktur. Peningkatan kualitas dan pemerataan akses layanan infrastruktur dasar bagi masyarakat.
Proporsi Ruang Terbuka Hijau		
- Komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pembangunan Berkelanjutan - Optimalisasi Pemanfaatan Aset dan Lahan Pemerintah - Program Penataan Kota dan Revitalisasi Ruang Publik - Partisipasi Masyarakat dan Dunia Usaha"	- Keterbatasan Lahan di Kawasan Perkotaan - Tingginya Tekanan Alih Fungsi Lahan - Keterbatasan Anggaran Pemeliharaan dan Pengembangan RTH - Belum Optimalnya Integrasi RTH Privat	- Strategi penyediaan RTH Kota Cirebon untuk kekurangan 11,20% seluas 791,65 ha telah ada komitmen Kepala Daerah dan terakomodir dalam lampiran dan indikasi program RTRW Kota Cirebon - Menghentikan alih fungsi lahan hijau yang tidak sesuai aturan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	• Kesadaran Lingkungan yang Belum Merata	• Penerbitan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 76 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Tahun 2021-2041, yang sudah terintegrasi dengan portal OSS. • Penerbitan Database RTH berikut Pengelolaanya
Indeks Smart City		

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
- Adanya komitmen pemerintah daerah dalam penerapan konsep kota cerdas melalui pengembangan sistem digital dan tata kelola berbasis teknologi. - Ketersediaan infrastruktur dasar perkotaan yang mendukung layanan publik berbasis digital. - Dukungan integrasi data dan sistem informasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan layanan publik. - Peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi sebagai integrator sistem, orkestrator data, pengawal keamanan	- Tata Kelola & Integrasi a. Ego sektoral antar OPD b. Sistem aplikasi berjalan sendiri-sendiri (tidak terintegrasi) c. Data belum terstandar dan belum satu pintu d. Belum optimalnya implementasi arsitektur SPBE - Infrastruktur a. Belum maksimalnya Jaringan Intra Pemerintah b. Kapasitas Server dan perangkat masih kurang - SDM a. Literasi digital ASN belum merata b. Pola pikir masih	- Benchmarking dengan daerah yang nilai indeksnya tinggi. - Fokus pada indikator yang bobotnya besar. - Penguatan evidence/dokumen pendukung. - Monitoring triwulanan capaian indicator. - Audit internal kesiapan sebelum evaluasi nasional. - Menjalankan fungsi sebagai: ✓ Integrator Sistem ✓ Orkestrator Data ✓ Pengawal Keamanan Informasi ✓ Penggerak Transformasi Digital

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
informasi, dan penggerak transformasi digital. • Penerapan strategi peningkatan kinerja melalui benchmarking, penguatan dokumen pendukung, serta monitoring dan evaluasi capaian indikator secara berkala.	administratif, belum berbasis data • Pembiayaan a. Keterbatasan anggaran pengembangan dan pemeliharaan sistem b. Belum optimalnya skema KPBU / kolaborasi swasta • Keamanan Informasi a. Kerentanan siber b. Belum optimalnya penerapan manajemen risiko keamanan informasi	

Sasaran 4.3 “ Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi”

Tabel 2.72

Capaian Sasaran 4.3 ” Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
4.3	Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	Rasio Konektivitas Kota	Persen	0,18	N/A	0.48	0,60	266,67%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								266,67%

Sasaran strategis 4.3 “Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi” merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan ke-4 Kota Cirebon, yakni Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan.

Sasaran ini mencakup langkah-langkah dalam meningkatkan efektivitas, efisiensi, serta akuntabilitas pemerintahan, yang mencakup optimalisasi sumber daya, kebijakan, dan layanan publik berbasis inovasi serta transparansi. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan satu indikator utama, yaitu Rasio Konektivitas Kota. Indikator ini juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon. Berikut adalah pencapaian masing-masing indikator tersebut.

Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi di Kota Cirebon merupakan bagian dari komitmen pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek lingkungan, ekonomi, dan sosial. Sebagai kota pesisir yang berperan sebagai simpul perdagangan dan jasa di wilayah timur Jawa Barat, Kota Cirebon menghadapi tantangan mobilitas berupa kepadatan lalu lintas, peningkatan jumlah kendaraan bermotor, serta potensi peningkatan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi.

Pencapaian indikator Rasio Konektivitas Kota

Pencapaian indikator Rasio Konektivitas Kota di Kota Cirebon menunjukkan kemajuan dalam memperkuat keterhubungan antarwilayah, baik di dalam kota maupun dengan kawasan sekitarnya. Sebagai kota strategis yang berada pada jalur pantura dan menjadi simpul transportasi regional, peningkatan konektivitas menjadi faktor penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, kelancaran mobilitas, serta pemerataan akses pelayanan publik.

Upaya peningkatan rasio konektivitas dilakukan melalui pembangunan dan pemeliharaan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan, kawasan permukiman, sentra perdagangan, serta fasilitas layanan dasar. Penataan simpul transportasi seperti terminal dan kawasan sekitar stasiun juga berkontribusi terhadap integrasi moda transportasi dan kelancaran arus pergerakan orang maupun barang.

Indikator kinerja “Rasio Konektivitas Kota” menjadi indikator pertama dalam sasaran “Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi.” Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh nilai 0,48% dari target 0,18%, hasil ini masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Dengan pencapaian tersebut Pemerintah Kota Cirebon berhasil melampaui

target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{0,48}{0,18} \times 100\% = 266,67\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan, capaian ini telah melebihi target dengan capaian 100%. Jika disandingkan dengan Rasio Konektivitas Transportasi Nasional Tahun 2025 sebesar 0,692, capaian indikator di daerah menunjukkan bahwa tingkat keterhubungan jaringan transportasi sudah berada pada kategori yang cukup baik dalam mendukung mobilitas barang dan manusia. Nilai rasio tersebut menggambarkan bahwa konektivitas antarwilayah, baik melalui jaringan jalan maupun sarana transportasi lainnya, telah mampu mendukung aktivitas ekonomi serta pelayanan masyarakat secara relatif efektif.

Evaluasi Sasaran 4.3 “Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi”

Evaluasi Sasaran Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi di Kota Cirebon menunjukkan adanya progres yang cukup signifikan, meskipun masih terdapat beberapa tantangan yang perlu ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pergerakan orang dan barang yang lancar, terintegrasi, hemat energi, serta mampu menekan tingkat emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi. Dari sisi efisiensi mobilitas, berbagai langkah penataan lalu lintas dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan telah memberikan dampak terhadap berkurangnya titik kemacetan dan meningkatnya kelancaran arus kendaraan pada koridor utama kota. Perbaikan dan pemeliharaan rutin jaringan jalan, optimalisasi fungsi drainase untuk mencegah genangan, serta rekayasa lalu lintas di kawasan padat aktivitas menjadi faktor pendukung meningkatnya waktu tempuh yang lebih efisien. Peningkatan ini didukung oleh berbagai program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.73

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 4.3
"Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan"

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	9.412.759.457	8.959.377.561	95,18%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,18%

Meskipun demikian, mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2025, rata-rata pencapaian indikator dari sasaran 4.3, yaitu "Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan," mencapai 266,67%. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, diperlukan identifikasi faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi penyelesaian permasalahan yang efektif sebagai berikut:

Tabel 2.74

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 4.3 "Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi"

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Rasio Konektivitas Kota		
Ketersediaan Infrastruktur Jalan yang Memadai dan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang Baik Pemanfaatan Teknologi dan Sistem Informasi Transportasi	Kondisi Jalan yang Buruk Parkir dan Pedagang di Badan Jalan Kurangnya Integrasi Antar Moda Transportasi	Melakukan Rekayasa Lalu Lintas Melakukan Pengawasan dan Pengendalian pada Jalan yang terdapat Parkir Liar dan Pedagang

Sasaran 4.4 “Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim”

Tabel 2.75

Capaian Sasaran 4.4 “ Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
4.4	Meningkatnya ketahanan daerah	Indeks Risiko Bencana	Indeks	112,32 - 112,07	112,32	93,31	111,07 110,82	120,11%
	terhadap bencana dan perubahan iklim	Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif	tonCO2 eq	8.381,49	5.587,79	7.687,86	67.186,46	91,72%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								105,92%

Sasaran Strategis 4.4 “Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim” merupakan bagian dari upaya mendukung Tujuan Keempat Kota Cirebon, yakni Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim di Kota Cirebon merupakan bagian penting dari arah pembangunan berkelanjutan yang responsif terhadap risiko lingkungan dan karakteristik wilayah pesisir. Sebagai kota yang berada di dataran rendah dan berbatasan langsung dengan laut, Kota

Cirebon menghadapi potensi bencana seperti banjir, rob, cuaca ekstrem, serta dampak peningkatan suhu akibat perubahan iklim.

Pemerintah Kota Cirebon secara bertahap meningkatkan kualitas infrastruktur pengendali banjir, seperti normalisasi saluran drainase, peningkatan kapasitas pompa air, serta penataan kawasan rawan genangan. Rehabilitasi kawasan pesisir dan penanaman vegetasi penahan abrasi juga menjadi langkah strategis dalam mengurangi risiko dampak gelombang pasang dan kenaikan muka air laut. Sasaran ini tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan sejumlah indikator, beberapa di antaranya merupakan sub-indikator yang membangun indikator utama lainnya. Berikut adalah indikator tersebut:

1. Indeks Risiko Bencana
2. Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif

Pencapaian Indikator ke-1 “ Indeks Risiko Bencana”

Pencapaian Indikator Indeks Risiko Bencana Kota Cirebon menunjukkan adanya upaya sistematis Pemerintah Daerah dalam menurunkan tingkat kerentanan wilayah terhadap berbagai potensi bencana. Sebagai kota pesisir dengan karakteristik dataran rendah, Kota Cirebon memiliki risiko terhadap banjir, rob, cuaca ekstrem, serta dampak perubahan iklim. Oleh karena itu, pengelolaan risiko bencana menjadi prioritas strategis dalam perencanaan pembangunan daerah.

Perbaikan nilai Indeks Risiko Bencana didorong oleh penguatan aspek mitigasi struktural maupun non-struktural. Dari sisi infrastruktur, peningkatan kapasitas dan normalisasi saluran drainase, rehabilitasi kawasan rawan genangan, serta penataan kawasan pesisir menjadi langkah konkret dalam mengurangi potensi dampak bencana hidrometeorologi. Selain itu, pengembangan ruang terbuka hijau dan pengendalian pemanfaatan ruang turut mendukung pengurangan tingkat kerentanan lingkungan.

Pemerintah Kota Cirebon terus berupaya menurunkan potensi risiko bencana, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029 melalui indikator Risiko Bencana menargetkan sebesar 112,32 dan realisasi

sebesar 93,31 dengan rata-rata capaian sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% =$

$\frac{112,32}{93,31} \times 100\% = 120,11\%$ atau **Melebihi Target**.

Pada tahun 2025 Kota Cirebon memiliki Indeks Risiko Bencana tingkat sedang ditandai dengan 156 kejadian bencana sepanjang tahun yang didominasi oleh cuaca ekstrem, pohon tumbang (67 kejadian), dan bangunan ambruk (45 kejadian). Ancaman utama meliputi banjir, rob, dan longsor, terutama di Kecamatan Lemahwungkuk, Pekalipan, dan Harjamukti. Berikut adalah rincian kejadian di tahun 2025 dan jumlah ini lebih besar dibanding kejadian di tahun-tahun sebelumnya sepanjang tahun 2020-2025.

Gambar 2.44

Grafik kejadian tahun 2020-2025



Sumber: BPBD Kota Cirebon 2025

Untuk mempermudah Masyarakat dalam menyampaikan aduan bencana, Pemerintah Kota Cirebon memiliki akses layanan dan beberapa opsi yang digunakan Ketika melaporkan kejadian bencana, sebagai berikut:

Gambar 2.45

Akses Layanan Pengaduan Bencana



Sumber: BPBD Kota Cirebon

Pencapaian Indikator ke-2 "Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif"

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan, serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap kelurahan diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Salah satunya adalah "Swasembada," yang mencerminkan tingkat kemandirian tinggi dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Berikut adalah tabel distribusi terkait perkembangan kelurahan dalam kategori ini:

Tabel 2.76

Klasifikasi Swakarya / Swasembada pada Setiap Kelurahan Kota Cirebon

No	Kelurahan	Indeks	Klasifikasi
1.	ARGASUNYA	0,67	SWAKARYA
2.	KALIJAGA	0,77	SWAKARYA
3.	HARJAMUKTI	0,77	SWAKARYA
4.	KECAPI	0,74	SWAKARYA

No	Kelurahan	Indeks	Klasifikasi
5.	LARANGAN	0,84	SWASEMBADA
6.	PEGAMBIRAN	0,80	SWASEMBADA
7.	KESEPUHAN	0,83	SWASEMBADA
8.	LEMAHWUNGKUK	0,81	SWASEMBADA
9.	PANJUNAN	0,81	SWASEMBADA
10.	JAGASATRU	0,81	SWASEMBADA
11.	PULASAREN	0,80	SWASEMBADA
12.	PEKALIPAN	0,87	SWASEMBADA
13.	PEKALANGAN	0,77	SWAKARYA
14.	KARYAMULYA	0,73	SWAKARYA
15.	SUNYARAGI	0,82	SWASEMBADA
16.	DRAJAT	0,84	SWASEMBADA
17.	KESAMBI	0,82	SWASEMBADA
18.	PEKIRINGAN	0,80	SWASEMBADA
19.	KEJAKSAN	0,82	SWASEMBADA
20.	KEBONBARU	0,78	SWAKARYA
21.	SUKAPURA	0,72	SWAKARYA
22.	KESENDEN	0,73	SWAKARYA
Indeks Rerata		0,79	

Sumber: Laman <https://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/> (2024) data diolah

Berdasarkan data pada Sistem Aplikasi Prodeskel (Profil Desa/Kelurahan), jumlah kelurahan dengan status Swasembada adalah 13 kelurahan, sedangkan Swakarya berjumlah 9 kelurahan. Dengan demikian, persentase Kelurahan Swasembada di Kota Cirebon sebesar 59,09%. Pada tahun 2024, Pemerintah Kota Cirebon telah menetapkan target indikator persentase Kelurahan Swasembada sebesar 40,91%. Jika dihitung menggunakan rumus capaian kinerja: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{59,09}{40,91} \times 100\% = 144,44\%$. Maka capaian ini dikategorikan sebagai "Melebihi Target."

Evaluasi Sasaran 4.4 " Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim"

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukkan oleh capaian dua indikator pada tahun 2025 cukup signifikan, dengan rata-rata predikat **"Melebihi Target"** sebesar 105,92%. Dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini, terdapat beberapa program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 2.77

Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung sasaran 4.4 "Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim"

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Penanggulangan Bencana	1.592.074.676	1.321.375.315	83,00%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			83,00%

Meskipun demikian, evaluasi lebih lanjut perlu dilakukan untuk merealisasikan target pada tahun-tahun mendatang. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat, dan strategi pemecahan masalah yang dapat diterapkan:

Tabel 2.78

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 4.4 " Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim"

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Risiko Bencana		
Meningkatnya koordinasi lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan mitigasi struktural.	Meningkatkan sinergi program pengurangan risiko bencana dengan perangkat daerah dan instansi terkait.

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Tersedianya dokumen kajian risiko bencana dan peta rawan bencana sebagai dasar perencanaan. Pelaksanaan program pencegahan dan mitigasi bencana secara berkelanjutan.	Masih adanya kawasan rawan bencana yang memerlukan penanganan lintas kewenangan. Keterbatasan data kebencanaan yang terintegrasi dan real time.	Penguatan sistem informasi kebencanaan berbasis data spasial dan kejadian. Peningkatan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan kepada masyarakat.
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Kumulatif		
Adanya komitmen kebijakan nasional terkait mitigasi perubahan iklim yang menjadi acuan pemerintah daerah. Potensi integrasi program pengurangan emisi dalam pembangunan daerah, seperti pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau.	Belum adanya dukungan regulasi (Perda, Perwal) terkait Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK)/Rencana Aksi Iklim Lemahnya koordinasi antar SKPD terkait prioritas pelaksanaan aksi iklim	Mengintegrasikan target penurunan emisi ke RPJMD dan Renstra OPD. Memperkuat Pokja Iklim Kota Cirebon Mencoba akses Pendanaan Iklim Internasional

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Dukungan stakeholder dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan.	Keterbatasan APBD dan kurangnya skema pembiayaan inovatif (Blended finance/KPBU)	

Tujuan 5 : “ Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”

Penyusunan tujuan dan sasaran Pembangunan jangka menengah Daerah Kota Cirebon juga memperhatikan kesejahteraan sosial. Selain muatan visi – misi dan arah pembangunan, isu – isu strategis menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Kota Cirebon. Terdapat tujuan yang ditetapkan sebagai landasan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam Rencana pembangunan jangka menengah Kota Cirebon tahun 2025-2029 salah satu tujuannya yaitu “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”.

Tabel 2.79

Capaian Kinerja Tujuan 5 “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”

	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
	Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan	Tingkat Kemiskinan	Persen	8,37	9,02	8,66	4,56	96,54%
	Rata Rata Capaian Indikator Kinerja							96,54%

Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan

lokal dalam pembangunan” diukur dengan sebuah indikator : “ Tingkat Kemiskinan”.

Gambar 2.46

Infografis Tingkat Kemiskinan



Pencapaian Indikator Tujuan “Tingkat Kemiskinan”

Berdasarkan hasil dari target yang telah ditetapkan, Indeks Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon yang memperoleh hasil sebesar 8,66% dari target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu 8,37% dengan rata-rata capaian sebagai berikut:

$$\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{8,66}{8,37} \times 100\% = 103,46\%.$$

Maka capaian ini dikategorikan sebagai "Melebihi Target". Hasil ini menunjukkan bahwa Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Cirebon.

Gambar 2.47

Indeks Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Evaluasi Tujuan “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”

Hal ini menjadi tantangan pada tahun berikutnya agar tetap dapat dipertahankan bahkan meningkat, beberapa program yang mendukung capaian Tujuan ini terdapat 28 program yang tersebar di 4 sasaran dengan jumlah anggaran 20.990.391.463 dan realisasi 18.427.706.407 atau 87,79%.

Sementara itu berikut adalah Faktor Pendorong, Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalahnya

:

Tabel 2.80

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Tujuan 5 “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Tingkat Kemiskinan		
- Adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Potensi ekonomi lokal seperti sektor perdagangan, UMKM, pariwisata, dan industri kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Kearifan lokal dan budaya Cirebon yang dapat dikembangkan sebagai sumber	- Adanya berbagai program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah pusat dan daerah yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. - Potensi ekonomi lokal seperti sektor perdagangan, UMKM, pariwisata, dan industri kreatif yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.	- Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan UMKM. Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan. - Optimalisasi pemanfaatan potensi budaya lokal dan ekonomi kreatif. - Penguatan koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan antar perangkat daerah. - Peningkatan kolaborasi dengan stakeholder dan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
ekonomi melalui pelestarian budaya dan pariwisata.	Kearifan lokal dan budaya Cirebon yang dapat dikembangkan sebagai sumber ekonomi melalui pelestarian budaya dan pariwisata.	partisipasi masyarakat.

Untuk menunjang tujuan “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”, telah ditetapkan 4 sasaran yang sinergis, dimana setiap sasaran pengukuran, analisa dan evaluasinya akan diuraikan satu persatu secara rinci sebagai berikut :

Sasaran 5.1 “ Meningkatkan akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”

Tabel 2.81

Capaian Sasaran 5.1 “ Meningkatkan akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
5.1	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar	Persen	46,61	N/A	88,34	100	189,53%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								189,53%

Sasaran “Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” di Kota Cirebon merupakan wujud komitmen pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti fakir miskin, penyandang disabilitas, lanjut usia, anak terlantar, korban bencana, serta kelompok marjinal lainnya.

Dalam aspek akses pelayanan dasar, Pemerintah Kota Cirebon terus memperkuat sinergi lintas perangkat daerah guna menjamin keterjangkauan layanan kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, serta bantuan sosial. Integrasi data kesejahteraan sosial melalui pemutakhiran basis data

terpadu menjadi langkah strategis untuk memastikan ketepatan sasaran program bantuan dan meminimalkan exclusion error maupun inclusion error. Pelayanan yang semakin berbasis digital dan responsif juga turut mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi serta mengakses layanan yang tersedia.

Pencapaian Indikator “ Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar “

Pencapaian Indikator “Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar” di Kota Cirebon menunjukkan kinerja yang selaras dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menjamin pemenuhan hak dasar bagi kelompok rentan secara merata dan berkeadilan.

Berdasarkan hasil dari target yang telah ditetapkan, Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar memperoleh hasil sebesar 88,34% dari target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu 46,61% dengan rata-rata capaian sebagai berikut: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{88,34}{46,61} \times 100\% = 189,53\%$. Maka capaian ini dikategorikan sebagai "Melebihi Target". Hasil ini menunjukkan bahwa Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lebih baik dari rata-rata nasional. Berikut merupakan grafik yang menggambarkan perkembangan Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Cirebon.

Capaian ini didukung oleh penguatan sistem pendataan melalui pemutakhiran basis data kesejahteraan sosial, sehingga intervensi program menjadi lebih tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.

Evaluasi sasaran 5.1 “Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”

Evaluasi Sasaran 5.1 “Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial” di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif dalam memperluas jangkauan dan kualitas intervensi sosial kepada kelompok rentan. Sasaran ini diarahkan

untuk memastikan bahwa Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) memperoleh hak atas layanan dasar secara layak, berkeadilan, dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, evaluasi Sasaran ini memperlihatkan bahwa upaya Pemerintah Kota Cirebon telah berada pada jalur yang tepat dalam membangun sistem kesejahteraan sosial yang inklusif dan berkelanjutan, dengan fokus pada pemenuhan hak dasar serta peningkatan kemandirian masyarakat rentan, beberapa program yang mendukung capaian Sasaran 5.1 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.82
Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pemberdayaan Sosial	554.838.873	544.479.423	98,13%	
Program Rehabilitasi Sosial	668.733.007	613.339.591	91,72%	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	968.072.460	959.221.643	99,09%	
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	87.999.604	84.212.800	95,70%	
Program Penanganan Bencana	302.695.369	280.556.857	92,69%	
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			95,46%	

Sebagai upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya, telah dilakukan analisa terhadap keberhasilan atau pendukung pencapaian sasaran, kendala

serta strategi pemecahan masalah tersebut. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat dan strategi pemecahan masalahnya:

Tabel 2.83

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran sasaran 5.1 “Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang mendapat akses layanan dasar		
- Regulasi yang jelas - Dukungan anggaran APBD dan APBN untuk program pemberdayaan, rehabilitasi, perlindungan dan jaminan sosial - Ketersediaan SDM kesejahteraan sosial - Sinergi lintas sektor - Pemanfaatan DTSEN	- Data PPKS belum akurat dan belum update - Keterbatasan anggaran dibanding jumlah PPKS - Rendahnya kesadaran dan partisipasi PPKS dalam program pemberdayaan - Ketergantungan penerima terhadap bantuan sosial (mindset bantuan)	- Penguatan Akses Pelayanan Dasar - Penguatan Perlindungan Sosial - Pemberdayaan Sosial - Penguatan Kelembagaan & SDM

Sasaran 5.2 “ Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan”

Tabel 2.84

Capaian Sasaran 5.2 “ Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
5.2	Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan	Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya	Persen	69,63	65,59	77,14	74,50	111%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								111%

Sasaran “Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan” diukur melalui satu indikator berupa

“Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya”. Indikator ini menjadi tolak ukur dalam pencapaian kinerja Tujuan ke-5 Kota Cirebon, yaitu “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”.

Pencapaian Indikator “ Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya”

Pencapaian Indikator “Persentase Pelestarian Obyek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya” di Kota Cirebon menunjukkan komitmen yang konsisten dalam menjaga warisan budaya sebagai bagian dari identitas dan kekuatan pembangunan daerah. Indikator ini mengukur sejauh mana obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya yang telah terdata memperoleh perlindungan, pemeliharaan, pengembangan, serta pemanfaatan secara berkelanjutan, dengan memperoleh capaian sebesar 77,14% dari target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu 69,63% dengan rata-rata capaian: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{77,14}{69,63} \times 100\% = 111\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Tabel 2.85

Rekap Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Opk) yang Dilestarikan

NO	DATA PEMAJUAN KEBUDAYAAN, MELIPUTI	JUMLAH	PEMBINAAN	
			Yang dibina	Presentase
1	2	3	4	5
1	TRADISI LISAN	31	1	3
2	MANUSKRIP	23	1	4
3	ADAT ISTIADAT	34	7	21
4	RITUS	20	7	35
5	PENGETAHUAN TRADISIONAL	58	8	14
6	TEKNOLOGI TRADISIONAL	11	2	18
7	SENI	32	20	63

NO	DATA PEMAJUAN KEBUDAYAAN, MELIPUTI	JUMLAH	PEMBINAAN	
			Yang dibina	Presentase
8	BAHASA	7	4	57
9	PERMAINAN RAKYAT	25	1	4
10	OLAHRAGA TRADISIONAL	9	4	44
		250	55	22,00

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025 diolah

Berdasarkan Tabel 3.31, dari total 250 objek pemajuan kebudayaan, sebanyak 198 objek telah dilestarikan dengan persentase 79,20%. Tradisi lisan memiliki tingkat pelestarian tertinggi (97%), diikuti oleh bahasa, olahraga tradisional, dan teknologi tradisional yang mencapai 100%. Sementara itu, kategori dengan tingkat pelestarian lebih rendah adalah manuskrip (43%) dan permainan rakyat (52%). Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa upaya pelestarian objek pemajuan kebudayaan di Kota Cirebon telah berjalan baik, meskipun masih ada beberapa kategori yang perlu mendapatkan perhatian lebih agar warisan budaya tetap terjaga.

Tabel 2.86
Data Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan Tahun 2025

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
PERLINDUNGAN SANGAT KETAT					
1	Gedung Balai Kota	Siliwangi	Sukapura	Kejaksan	pemerintah
2	Gedung Negara / Kersidenan	Siliwangi	Kesenden	Kejaksan	pemerintah
3	Pendopo Kabupaten Cirebon	Kartini	Kejaksan	Kejaksan	pemerintah

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
4	Bank Indonesia	Yos Sudarso	LMWK	LMWK	pemerintah
5	Bank Mandiri (eks.BDN)	Kantor	LMWK	LMWK	BUMN
6	Masjid (At Thyah) Merah Panjuran	Pekarungan	Panjuran	LMWK	masyarakat
7	Masjid Agung Sang Cipta Rasa	Kasepuhan	Kasepuhan	LMWK	masyarakat
8	Masjid Baitul Karim (Pesambanga n)	Kampung pekalangan	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
9	Klenteng Talang	Talang No. 2	LMWK	LMWK	masyarakat
10	Klenteng Winaon	Winaon	Pekalipan	Pekalipan	masyarakat
11	Vihara Dewi Welas Asih	Kantor No. 2	Panjuran	LMWK	masyarakat
12	Gereja Bala Keselamatan	Sukalila Utara	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
13	Gereja Katolik Santo Yusup	Yos Sudarso	LMWK	LMWK	masyarakat
14	Stasiun Kereta Api Kejaksan	Siliwangi	Kesenden	Kejaksan	BUMN
15	Stasiun Kereta Api Parujakan	Nyimas Gandasari	Pekalangan	Pekalipan	BUMN

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
16	Pabrik Es Sari Petojo	Mayor Sastra Atmaja	LMWK	LMWK	BUMD
17	Rumah Sakit Gunung Jati Cirebon	Kesambi no 38	Kesambi	Kesambi	pemerintah
18	SD Negeri Pulasaren	Pulasaren	Pulasaren	Pekalipan	pemerintah
19	Gudang Bank BNI (BNI Syariah)	Sisingamangar aja	Panjunan	LMWK	BUMN
20	Patilasan/Ta man Kera Kalijaga	Pramuka	Kalijaga	Harjamukti	masyarakat
21	Makam Syekh Maulana Maghribi	Astagarib Utara	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
22	Makam Tumenggung Arya Wiracula	Sukalila Utara	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
PERLINDUNGAN KETAT					
23	Gedung PT. Cipta Niaga	Niaga	LMWK	LMWK	BUMN
24	Gedung SMP Negeri 14	Kebumen	LMWK	LMWK	pemerintah
25	Gedung Kantor Pos Besar	Yos Sudarso	LMWK	LMWK	BUMN
26	Gedung SMP Negeri 16	Kebumen	LMWK	LMWK	pemerintah

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
27	Gedung SMP Negeri 15	Pasuketan	LMWK	LMWK	pemerintah
28	SPK & AKPER Depkes	KS. Tubun	Kejaksan	Kejaksan	pemerintah
29	Makam Syekh Lemah Abang	Kampung Kemlaten	Harjamukti	Harjamukti	masyarakat
PERLINDUNGAN CUKUP KETAT					
30	Menara PDAM Jalan Tuparev	Perujakan	Pekalangan	Pekalipan	pemerintah
31	Masjid Agung At Taqwa	Kartini	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat
32	SD Negeri Kebon Baru	Veteran	Kebon Baru	Kejaksan	pemerintah
33	Gedung SMP Negeri 1	Siliwangi	Sukapura	Kejaksan	pemerintah
34	L P Klas I Kesambi	Kesambi	Kesambi	Kesambi	pemerintah
35	Kawasan Keraton Kasepuhan	Kasepuhan	LMWK	LMWK	Keraton Kasepuhan
36	Kawasan Keraton Kanoman	Kampung Kanoman	LMWK	LMWK	Keraton Kanoman
37	Kawasan Kraton Kacirebonan	Pulasaren	Pulasaren	Pekalipan	Keraton Kacirbonan
38	Kawasan Gua Sunyaragi	Sunyaragi	Sunyaragi	Kesambi	Keraton Kasepuhan

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
39	Kawasan Etnis Arab (Panjunan)	Panjunan	Panjunan	Kejaksan	Masyarakat
40	Kawasan Etnis Cina (Pecinan)	Lemahwungk k	LMWK	LMWK	Masyarakat
41	Situs Kejawanan	Yos Sudarso	Pegambiran	Harjamukti	masyarakat
42	Gereja Kristen Pasundan Jemaat Cirebon	Kebumen	LMWK	LMWK	Masyarakat
43	Makam Pangeran Sipat Lurung	Pangeran drajat	Drajat	Drajat	masyarakat
44	Petilasan Pangeran Drajat	Pangeran Drajat	Drajat	Kesambi	masyarakat
45	Makam Pangeran Suryanegara	Jend.Sudirma n	Harjamukti	Harjamukti	masyarakat
46	Makam Pangeran Sapu Jagat	Jagasatru	Jagasatru	Pekalipan	masyarakat
47	Tajug Pejlagrahan	Mayor sastraatmadja	Kasepuhan	Lemahwungkuk	masyarakat
48	Masjid P. Kejaksan	Pamitran	Kejaksan	Kejaksan	masyarakat

NO	NAMA OBYEK	ALAMAT			Kepemilikan
		Jalan	Kelurahan	Kecamatan	
49	Masjid Jagabayan	Karanggetas No.191	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
50	Gedung B A T	Merdeka	Panjunan	LMWK	swasta
51	Situs Pedati Gede	Pekalangan	Pekalangan	Pekalipan	masyarakat
52	Kereta Singabarong	Jl.Kasepuhan No.43	Kasepuhan	Lemahwungkuk	keraton
53	Kereta Paksinagaliman Keraton Kanoman	Jl. Kanoman No.40	Lemahwungkuk	Lemahwungkuk	keraton
54	Gedung Bundar Kebumen	Kebumen	LMWK	LMWK	Pemerintah

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2025 diolah

Evaluasi sasaran 5.2 “ Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan”

Keberlanjutan upaya pelestarian ini menjadi krusial dalam memperkuat daya tarik budaya Kota Cirebon, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi wisatawan dan pelaku budaya. Dengan mempertahankan serta meningkatkan program pelestarian dan pengembangan kebudayaan, Kota Cirebon dapat terus menjadi pusat kebudayaan yang berdaya saing serta memperkuat identitas lokal dalam arus modernisasi. Dalam mendukung pencapaian indikator Tujuan/Sasaran “Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan” tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan program-program sebagai berikut:

Tabel 2.87

Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 5.2

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.163.604.747	576.847.382	49,57%
Program Pemasaran Pariwisata	1.025.267.295	994.543.195	97,00%
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	120.000.000	114.781.650	95,65%
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	793.019.695	791.350.300	99,79%
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	904.466.385	801.854.960	88,66%
Program Pengelolaan Permuseuman	165.769.260	162.027.150	97,74%
Program Pembinaan Sejarah			
Program Pengembangan Kebudayaan	2.247.224.286	2.229.134.386	99,20%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pengembangan Kesenian Tradisional			
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			89,66%

Berikut adalah Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi pemecahan masalah pada pencapaian kinerja sasaran 5.2:

Tabel 2.88

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 5.2 “ Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Persentase pelestarian obyek pemajuan kebudayaan dan cagar budaya		
Keberadaan Keraton sebagai Pusat Budaya menjadi institusi penjaga adat yang masih eksis Cirebon merupakan bagian dari Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI), yang membuka akses terhadap kolaborasi pelestarian tingkat nasional. Lokasi yang Strategis memudahkan wisatawan mancanegara dan domestik mengakses warisan budaya. Kekayaan Warisan Budaya Takbenda Tradisi menjadi daya tarik visual dan spiritual yang tinggi	Banyak bangunan bersejarah (gedung peninggalan kolonial atau rumah adat) yang dimiliki pribadi dan mulai rusak karena biaya perawatan yang tinggi. Minimnya SDM yang menguasai narasi sejarah Cirebon secara mendalam dan multibahasa. Potensi budaya besar namun pengemasan paket wisata budaya yang berkelanjutan belum optimal Pergeseran nilai di kalangan generasi muda perkotaan yang lebih tertarik pada tren global dibandingkan melestarikan tradisi lokal seperti bahasa Cirebon	Membuat basis data digital (GIS) yang memetakan seluruh situs cagar budaya di Cirebon untuk mempermudah pengawasan dan perizinan pembangunan. Mewajibkan kembali pengenalan bahasa Cirebon dan seni tari di tingkat SD-SMP melalui kurikulum berbasis praktik. Memberikan kompensasi berupa pengurangan PBB atau bantuan restorasi bagi warga yang mempertahankan keaslian bangunan bersejarah miliknya. Menata kawasan seperti "Kota Tua" Cirebon (sekitar Pelabuhan dan Bank Indonesia lama) agar ramah pejalan kaki dan estetik, sehingga menghidupkan kembali suasana sejarah. Menyusun kalender budaya tahunan (seperti Festival Keraton atau Kirab Budaya) yang dipromosikan sejak jauh hari untuk menarik kunjungan mancanegara. Mengembangkan narasi pemasaran yang kuat bahwa Cirebon adalah titik temu budaya Jawa, Sunda, Tionghoa, dan Arab

Sasaran 5.3 “ Meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender”

Tabel 2.89

Capaian Sasaran 5.3 ” Meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender”

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
5.3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan	Indeks	66,6	65,7	66,9	71,3	100,4%
		Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	61,54-62,8	61,4-61,9	69,2	62,54-68,7	112,45%
		Indeks Pembangunan Gender/IPG	Poin	95,85	95,83	96,92	95,95	101,12
		Indeks Ketimpangan Gender	Poin	0,381	0,383	0,383	-	99,48
		IPA (Indeks Perlindungan Anak)	Poin	67,63	N/A	74,79	67,73	110,58%
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								104,81%

Sasaran strategi 5.3 “Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender” merupakan bagian dari upaya mewujudkan tujuan ke-5 Kota Cirebon. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan lima indikator utama, yaitu Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan, Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Pembangunan Gender/IPG, Indeks Ketimpangan Gender, IPA (Indeks

Perlindungan Anak). Indikator ini juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon. Berikut adalah pencapaian masing-masing indikator tersebut.

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang positif dalam mengintegrasikan aspek kependudukan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. IPBK merupakan indikator yang mengukur sejauh mana kebijakan pembangunan telah mempertimbangkan dinamika, struktur, serta kualitas penduduk sebagai faktor strategis dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil evaluasi, capaian IPBK Kota Cirebon berada pada kategori baik dan menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan semakin kuatnya sinergi antara kebijakan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan mobilitas dan persebaran penduduk yang seimbang. Integrasi data kependudukan dalam perencanaan pembangunan menjadi faktor kunci dalam menjaga konsistensi capaian. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 66,9% dari target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu 69,63% dengan rata-rata capaian: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{66,9}{66,6} \times 100\% = 100,45\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan rata-rata indeks gini nasional, Pemerintah Kota Cirebon memperoleh capaian sebesar 66,9, sedangkan capaian nasional sebesar 63,7. Hasil ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) lebih baik dari rata-rata nasional. IPBK merupakan indikator baru yang di gunakan dalam RPJMD kali ini sehingga data time series pada tahun-tahun sebelumnya tidak tersedia.

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Pencapaian Indikator Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) di Kota Cirebon menunjukkan tren yang positif sebagai refleksi meningkatnya kualitas dan ketahanan keluarga dalam mendukung pembangunan daerah. iBangga merupakan indikator komposit yang mengukur keberhasilan pembangunan

keluarga melalui tiga dimensi utama, yaitu ketenteraman dan kemandirian keluarga, kesehatan keluarga, serta ketahanan sosial dan ekonomi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, nilai iBangga Kota Cirebon mengalami peningkatan dan berada pada kategori baik sesuai target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Capaian ini didukung oleh berbagai program penguatan ketahanan keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi pengasuhan, serta pembinaan keluarga melalui program pemberdayaan masyarakat. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 69,2 , maka capaian kinerja nya adalah : $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{69,2}{61,54} \times 100\% = 112,45\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Pencapaian indikator Indeks Pembangunan Gender/IPG

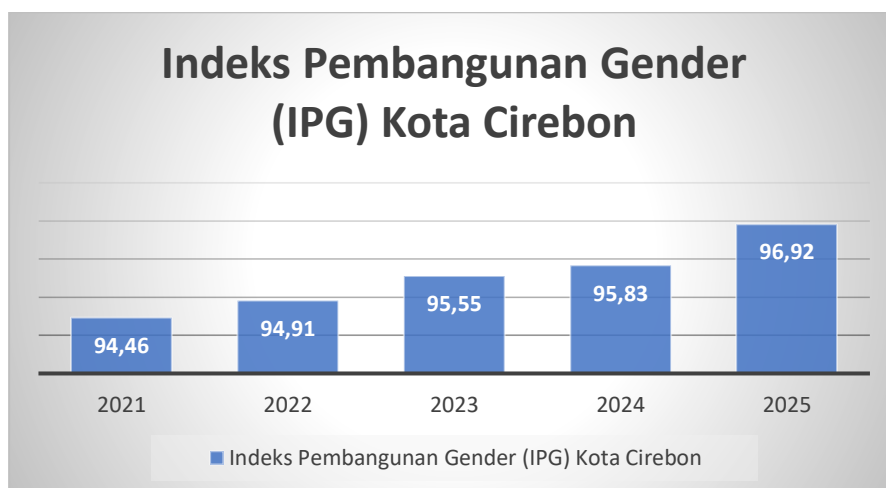
Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian pembangunan manusia (dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi) telah merata antara laki-laki dan perempuan. IPG dikembangkan oleh **United Nations Development Programme (UNDP)** sebagai bagian dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi dengan mempertimbangkan kesenjangan gender dalam indikator-indikator utama. Kota Cirebon menargetkan IPG sebagai upaya mendorong pemberdayaan perempuan, urgensi penerapan IPG menjadi indikator diantaranya untuk mendorong kebijakan inklusif, meningkatkan partisipasi Perempuan dalam Perekonomian, meningkatkan kesejahteraan sosial Menekan Ketimpangan Sosial. Kesenjangan gender yang tinggi dapat memicu ketidakstabilan sosial dan konflik. Dengan menerapkan IPG dalam perencanaan kota, kebijakan dapat dirancang untuk memastikan akses yang adil bagi semua gender.

Pada tahun 2025 realisasi IPG di ambil berdasarkan data terkini yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang melakukan rilis Berita Resmi Statistik. Data tersebut tetap dapat digunakan sebagai gambaran perkembangan pemberdayaan gender tahun 2025 dengan nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah 96,92 meningkat 1,14 dibanding tahun sebelumnya yaitu 95,83 maka pencapaian kinerja adalah $\frac{Realisasi}{Target} \times 100\% =$

$\frac{96,92}{95,85} \times 100\% = 101,12\%$ atau **Melebihi Target**. Indeks Pembangunan Gender (IPG) dengan point yang tinggi ini karena didukung kesetaraan pembangunan manusia laki-laki dan perempuan, peningkatan kesetaraan ini didorong oleh meningkatnya jumlah perempuan yang mengakses pendidikan dengan layak di Kota Cirebon serta kesetaraan ekonomi yang memberikan akses ekonomi dengan terbuka pada perempuan. Jika disandingkan dengan Nasional Indeks Pembangunan Gender Kota Cirebon yang berjumlah 96,92 **lebih tinggi dari Nasional** dengan jumlah 92,69.

Gambar 2.48

Indeks Pembangunan Gender (IPG)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), diolah

Pencapaian indikator Indeks Ketimpangan Gender

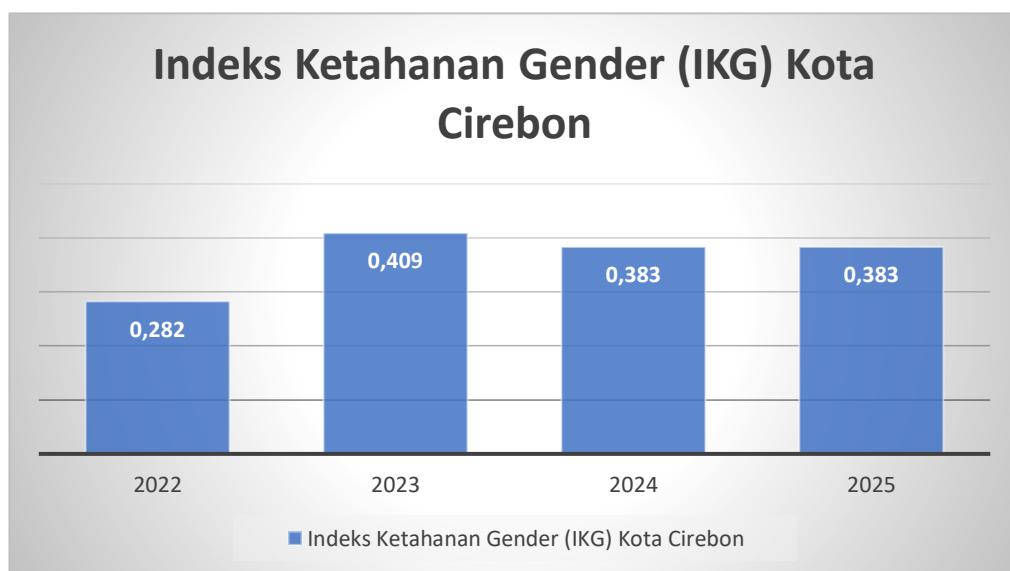
Pencapaian Indikator Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang semakin baik sebagai hasil dari penguatan kebijakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah. Indeks Ketimpangan Gender mengukur kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, serta partisipasi ekonomi. Berdasarkan hasil evaluasi, nilai IKG Kota Cirebon menunjukkan tren penurunan (semakin mendekati nol), yang berarti tingkat ketimpangan gender semakin berkurang dan sejalan dengan target dalam dokumen perencanaan daerah. Perbaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya akses perempuan terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, termasuk kesehatan ibu dan anak, serta bertambahnya keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi dan

pengambilan keputusan. Indeks ketahanan Gender Tahun 2025 belum selesai diukur pada Triwulan ke 1 Tahun 2026, sehingga relevan untuk menggunakan data pada Tahun terakhir dengan realisasi 0,383. Jika disandingkan dengan IKG Nasional yaitu 0,41 pada Tahun 2024 maka IKG di Kota Cirebon menunjukkan kondisi yang jauh lebih baik. Pencapaian atas IKG adalah sebagai berikut :

$$\frac{T+(R-T)}{T} \times 100\% = \frac{0,383+(0,381-0,383)}{0,383} \times 100\% = 99,48\% \text{ atau pencapaian Sangat Baik.}$$

Gambar 2.49

Indeks Ketahanan Gender (IKG)



Pencapaian indikator IPA (Indeks Perlindungan Anak)

Pencapaian Indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) di Kota Cirebon menunjukkan kemajuan yang positif dalam mewujudkan lingkungan yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. IPA merupakan indikator yang mengukur efektivitas kebijakan dan program perlindungan anak melalui dimensi kelembagaan, pencegahan kekerasan, pemenuhan hak anak, serta penanganan kasus yang responsif dan terintegrasi.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, nilai IPA Kota Cirebon mengalami peningkatan dan berada pada kategori baik sesuai dengan target yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah. Peningkatan ini didukung oleh penguatan regulasi daerah yang berpihak pada perlindungan anak, peningkatan kapasitas lembaga layanan, serta optimalisasi peran unit pelayanan terpadu dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak secara cepat dan

komprehensif. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 74,79 dari target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu 67,63, sehingga capaiannya : $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{74,79}{67,63} \times 100\% = 110,58\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan. Jika disandingkan dengan kondisi Jawa barat 71,66 maka Kota Cirebon berada pada kondisi yang lebih baik. Pada tingkat Kota Indeks perlindungan anak merupakan indikator yang baru di ukur sehingga tidak memiliki data time series perkembangan 3-5 tahun kebelakang.

Evaluasi Sasaran 5.3 “ Meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender”

“Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender” di Kota Cirebon menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dalam memperkuat dimensi pembangunan manusia yang inklusif dan berkeadilan. Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, tanpa terkecuali, memperoleh kesempatan yang setara dalam meningkatkan kualitas hidupnya.

Dalam aspek ketahanan dan kualitas keluarga, berbagai program pembinaan keluarga, peningkatan akses layanan kesehatan ibu dan anak, edukasi pengasuhan, serta penguatan ekonomi keluarga telah memberikan dampak positif terhadap stabilitas sosial dan kesejahteraan rumah tangga. Indikator seperti Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) menunjukkan tren peningkatan yang mencerminkan membaiknya ketenteraman, kemandirian, dan kesehatan keluarga. Peningkatan ini didukung oleh berbagai program utama yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran sebagai berikut:

Tabel 2.90

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 5.3
“Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender”

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan	2.002.873.733	1.899.015.750	94,81%	

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian	Pelaksana
Keluarga Sejahtera (KS)				
Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	1.610.440.550	1.293.267.800	80,31%	
Program Pengendalian Penduduk	234.308.730	172.925.090	73,80%	
Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	157.720.926	96.833.800	61,40%	
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	59.523.325	38.298.000	64,34%	
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	11.632.000	10.350.000	88,98%	
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	281.878.653	261.107.000	92,63%	
Program Perlindungan Khusus Anak	165.387.184	106.546.421	64,42%	
Program Perlindungan Perempuan	151.878.250	78.488.250	51,68%	
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			74,71%	

Meskipun demikian, mempertahankan dan meningkatkan capaian di tahun-tahun mendatang menjadi tantangan tersendiri. Pada tahun 2025, rata-rata pencapaian indikator dari sasaran 5.3, yaitu " Meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender," mencapai 104,81%. Untuk menjaga dan meningkatkan capaian ini, diperlukan identifikasi faktor pendorong, faktor penghambat, serta strategi penyelesaian permasalahan yang efektif sebagai berikut:

Tabel 2.91

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah
Sasaran 5.3 “ Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan,
serta tercapainya kesetaraan gender”

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan		
Peningkatan kualitas kelembagaan dan kegiatan pendidikan kependudukan di lembaga pendidikan dan masyarakat. Peningkatan kualitas data dan pemanfaatan data oleh stakeholder terkait melalui RDK.	Isu kependudukan belum mendapat perhatian dari stakeholder terkait Belum optimalnya pemanfaatan data oleh stakeholder terkait dalam perencanaan pembangunan berwawasan kependudukan	Sosialisasi dan advokasi pendidikan kependudukan di lembaga pendidikan dan masyarakat. Pendampingan pendidikan kependudukan melalui Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Rumah Data Kependudukan (RDK), dan Pusat Edukasi Isu Kependudukan bagi Masyarakat (PESAT)
Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)		
Keaktifan Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, PIK-R, UPPKA), Sekolah Lansia, Satya Gatra. Sinergitas dan kolaborasi dengan program lain (Sekolah keluarga, RW ramah Anak, Sekolah Ramah Anak, Kelurahan Ramah Perempuan, P2WKSS). Validitas dan kualitas pemutakhiran data keluarga	Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pembina dan pengelola Kelompok Kegiatan (penyuluh lapangan KB dan kader Bangga Kencana). Belum optimalnya sinergitas dan kolaborasi dengan program lain. Keterbatasan anggaran dalam pemutakhiran data keluarga serta kurangnya pendampingan dan	Peningkatan Kuantitas dan kapasitas penyuluh lapangan dan kader Bangga Kencana. Peningkatan sinergitas dan kolaborasi dengan program lain. Memaksimalkan pendampingan terhadap kader pendata dalam pemutakhiran data keluarga

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
	pembinaan terhadap kader pendata.	
Indeks Pembangunan Gender/IPG		
Tersedianya Anggaran, SDM yang berkualitas	Kurangnya kuantitas SDM, Rilis data dari BPS dipertengahan Tahun	Mengoptimalkan SDM yang tersedia, Mengoptimalkan anggaran yang tersedia
Indeks Ketimpangan Gender		
Tersedianya Anggaran, SDM yang berkualitas	Kurangnya kuantitas SDM, Rilis data dari BPS dipertengahan Tahun	Mengoptimalkan SDM yang tersedia, Mengoptimalkan anggaran yang tersedia
IPA (Indeks Perlindungan Anak)		
Menjalankan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pasal 91 Ayat 2 bahwa pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian Data Terpilah Gender dan Anak dilaksanakan sesuai prosedur. Kebutuhan akan data terpilah untuk mengukur kesenjangan dan merancang kebijakan	Belum tersedianya basis data akurat terkait dengan data terpilah atau data responsif gender dan pemenuhan hak anak pada beberapa Perangkat Daerah. Belum optimalnya kegiatan advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak. Belum adanya komitmen Pemerintah Daerah terhadap Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) dan Perencanaan Penganggaran Responsif Anak (PPRA) sehingga dukungan anggaran dan fasilitasi pelaksanaan	Sosialisasi dan advokasi tentang Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 kepada Perangkat Daerah sehingga pelembagaan penyelenggaraan Data Gender dan Anak yang terdiri dari komponen-komponen peraturan, lembaga, dan mekanisme di kementerian/lembaga dan daerah dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan hasil kebijakan/program/kegiatan pembangunan yang responsif gender dan peduli hak anak. Sosialisasi dan advokasi dengan pemangku kepentingan dan stakeholder terkait maupun melalui pertemuan/rakor Tim Gugus KLA sebagai media komunikasi untuk memperhatikan dan

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA). Adanya Kebijakan Daerah yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan advokasi program Pemenuhan Hak Anak (PHA) kepada Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Media yang melahirkan beberapa kegiatan yang bersifat koordinatif, baik lintas sektor maupun lintas program yang mendukung upaya pemenuhan hak anak. Dilaksanakannya kegiatan berupa: pembinaan teknis, pendampingan, monitoring, dan evaluasi bagi lembaga-lembaga penyedia layanan ramah anak (LPLRA). Adanya jejaring dan mitra yang berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.	program/kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas hidup anak belum optimal. Masih kurangnya pelibatan partisipasi anak dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan dari tingkat RW hingga Kota Cirebon. Belum optimalnya fasilitasi Pemerintah Daerah untuk penyediaan SDM profesional dan sarana prasarana lembaga penyedia layanan ramah anak yang mendukung pemenuhan indikator standardisasi lembaga-lembaga layanan ramah anak. Pola asuh positif yang masih belum banyak dipahami oleh masyarakat terutama pada kelompok masyarakat rentan, seperti masyarakat dengan ekonomi kebawah. Pandangan atau anggapan masyarakat bahwa kekerasan pada anak merupakan urusan domestik keluarga	memetakan data dukung yang dibutuhkan pada Klaster I-IV. Sosialisasi parenting kepada orang tua yang memiliki kategori rentan, lembaga pendidikan, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan dan perilaku sosial menyimpang lainnya. Rapat sosialisasi perlindungan anak bagi pemangku kepentingan serta melakukan koordinasi dengan lembaga layanan serta jejaring dan mitra kerja agar efektif dan efisien dalam penanganan kekerasan terhadap anak.

Faktor Pendorong	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Teknologi yang pesat dan mudah dijangkau semua orang membuat informasi tentang perlindungan anak mudah diakses. Landasan regulasi yang kuat, baik dari pusat maupun daerah. Ketersediaan Kelembagaan Layanan, yaitu P2TP2A dan UPT PPA. Adanya jejaring dan mitra yang berperan aktif dalam penanganan kekerasan pada anak.	yang tidak memperkenalkan untuk dicampuri oleh pihak luar. Anggapan kekerasan pada anak sebagai urusan domestik keluarga.	

Sasaran 5.4 “ Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis”

Tabel 2.91

Capaian Sasaran 5.4 “ Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis” Tahun 2025

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
5.4	Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran,	Indeks Harmoni Indonesia	Skor	6,65	N/A	6,87	6,90	103%

NO	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025	Realisasi		Target Akhir RPD (2026)	Capaian Kinerja 2025
					N-1(2024)	2025		
	dan harmonis							
Rata-rata Capaian Kinerja Indikator								103%

Sasaran Strategis 5.4 “Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis” di Kota Cirebon merupakan bagian penting dari pembangunan sosial yang menempatkan keberagaman sebagai kekuatan dan modal sosial daerah. Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat kohesi sosial, mencegah potensi konflik, serta membangun kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati, setara, dan berkeadilan.

Dalam konteks inklusivitas, pemerintah daerah mendorong kebijakan dan program yang memberikan ruang partisipasi bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk kelompok minoritas, penyandang disabilitas, perempuan, pemuda, dan kelompok rentan lainnya. Penguatan layanan publik yang ramah dan mudah diakses menjadi salah satu instrumen dalam memastikan tidak ada warga yang tertinggal dalam proses pembangunan. Untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut, ditetapkan satu indikator utama, yaitu Indeks Harmoni Indonesia. Indikator ini juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Kota Cirebon. Berikut adalah pencapaian indikator tersebut.

Pencapaian Indikator ke-1 “ Indeks Harmoni Indonesia”

Pencapaian Indikator “Indeks Harmoni Indonesia” di Kota Cirebon menunjukkan kondisi sosial kemasyarakatan yang relatif kondusif, rukun, dan toleran dalam kehidupan sehari-hari. Indeks Harmoni Indonesia menjadi ukuran penting dalam menilai tingkat kerukunan, toleransi, serta kerja sama antarwarga di tengah keberagaman latar belakang agama, budaya, dan sosial.

Nilai Indeks Harmoni Indonesia Kota Cirebon berada pada kategori baik dan menunjukkan tren yang stabil bahkan meningkat dibandingkan periode sebelumnya. Capaian ini mencerminkan kuatnya modal sosial masyarakat,

budaya gotong royong, serta peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan dalam menjaga suasana yang damai dan inklusif. Indikator ini memperoleh capaian sebesar 6,87 dari target yang telah ditetapkan RPJMD yaitu 6,65 dengan rata-rata capaian: $\frac{R}{T} \times 100\% = \frac{6,87}{6,65} \times 100\% = 103\%$ yang berarti telah melampaui target yang ditetapkan.

Evaluasi Sasaran 5.4 "Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis"

Evaluasi Sasaran "Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis" di Kota Cirebon menunjukkan capaian yang relatif positif dalam menjaga stabilitas sosial dan memperkuat kohesi masyarakat di tengah keberagaman. Sasaran ini menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang aman, kondusif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi, tingkat kerukunan dan toleransi antarwarga berada pada kategori baik, tercermin dari stabilnya Indeks Harmoni Indonesia serta minimnya konflik sosial yang bersifat terbuka. Peran aktif tokoh agama, tokoh masyarakat, forum komunikasi antarumat beragama, dan organisasi kemasyarakatan menjadi faktor utama dalam membangun dialog yang konstruktif serta memperkuat semangat kebersamaan.

Tingkat pencapaian terhadap sasaran yang ditunjukkan oleh capaian indikator pada tahun 2025 cukup signifikan, dengan rata-rata predikat **"Melebihi Target"** sebesar 103%. Dalam rangka mendukung kinerja pada sasaran ini, terdapat beberapa program yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target sebagai berikut:

Tabel 2.93

Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 5.4
"Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis"

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan	894.841.910	880.202.010	98,36%

Program	Anggaran	Realisasi	Capaian
Organisasi Kemasyarakatan			
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	332.203.836	253.032.600	76,17%
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.311.923.045	1.006.645.015	76,73%
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	2.378.588.072	1.800.993.342	75,72%
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	2.395.500.268	2.377.651.992	99,25%
Rata-rata Capaian Realisasi Program Anggaran			85,25%

Meskipun capaian indikator menunjukkan hasil yang sangat baik, pencapaian di tahun-tahun berikutnya menjadi tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan pada tahun 2025, rata-rata capaian indikator dari Sasaran 5.4 "Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis" telah melampaui target akhir yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Berikut adalah faktor pendorong, faktor penghambat, dan strategi pemecahan masalah yang dapat diterapkan:

Tabel 2.94

Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 5.4 " Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis"

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
Indeks Harmoni Indonesia		
Peran aktif tokoh agama, tokoh	Kurangnya pemahaman terhadap	Penguatan pendidikan toleransi, moderasi

Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Strategi Pemecahan Masalah
masyarakat, dan FKUB dalam menjaga kerukunan. Partisipasi organisasi kemasyarakatan dan komunitas lintas identitas dalam kegiatan sosial. Koordinasi lintas perangkat daerah, instansi vertikal dan stakeholder lainnya dalam penanganan isu sosial. Dukungan regulasi nasional, seperti kebijakan penguatan moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.	regulasi yang mendukung penguatan toleransi dan moderasi beragama Masih adanya sikap intoleransi dan kesalahpahaman antarumat beragama, termasuk penolakan terhadap pendirian tempat ibadah minoritas. Penyebaran hoaks berbau agama dan penggunaan isu agama untuk kepentingan politik yang memicu perpecahan. Rendahnya literasi kebangsaan dan toleransi, khususnya pada generasi muda. Pengaruh globalisasi dan modernisasi menyebabkan berkurangnya minat generasi muda terhadap budaya lokal Cirebon, seperti seni tradisional dan adat istiadat.	beragama, dan wawasan kebangsaan melalui forum, pelatihan, dan dialog lintas agama/budaya. Pemberdayaan FKUB, ormas, dan komunitas lokal sebagai agen kerukunan Peningkatan deteksi dini dan pencegahan konflik social Penguatan literasi digital dan kontra narasi hoaks/ ujaran kebencian di ruang publik dan media sosial. Pelaksanaan kegiatan kolaboratif lintas kelompok (sosial, budaya, dan kemasyarakatan) yang mendorong interaksi positif. Penguatan koordinasi lintas sektor (Perangkat Daerah, aparat keamanan, tokoh masyarakat) dalam menjaga stabilitas dan harmoni sosial.

B. Akuntabilitas Keuangan-Analisis, Efektivitas dan Efesiensi

Pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.649.388.268.851,78 atau sebesar 92,49 persen dari target yang

telah ditetapkan Rp1.783.291.694.082,00. Tabel anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95

Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Operasi	1.589.575.724.110,65	1.483.635.808.913,78	93,34
Belanja Modal	188.693.236.309,,35	164.964.572.154,00	87,42
Belanja Tidak Terduga	5.022.733.662,00	787.887.784,00	15,69
JUMLAH	1.783.291.694.082,00	1.649.388.268.851,78	92,49

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2025

Secara terperinci, realiasi Belanja daerah adalah sebagai berikut:

B.1 Belanja Operasi

Belanja operasi dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp1.589.575.724.110,65. Sedangkan realisasi belanja operasi sebesar 93,34 persen atau sebesar Rp1.483.635.808.913,78. Adapun rincian target dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.96

Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Pegawai	820.088.912.831,81	757.741.828.212,00	92,40
Belanja Barang dan Jasa	709.908.158.268,84	667.903.867.279,78	94,08
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	1.872.500.000,00	1.757.069.805,00	93,84
Belanja Hibah	55.568.153.010,00	54.095.043.617,00	97,35
Belanja Bantuan Sosial	2.138.000.000,00	2.138.000.000,00	100,00
JUMLAH	1.589.575.724.110,65	1.483.635.808.913,78	93,34

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2025

Belanja Pegawai dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp820.088.912.831,81 dan realisasi belanja pegawai sebesar 92,40 persen atau sebesar Rp757.741.828.212,00.

Belanja Barang dan Jasa dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp709.908.158.268,84 dan realisasi belanja barang dan jasa sebesar 94,08 persen atau sebesar Rp667.903.867.279,78.

Belanja Subsidi dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp1.872.500.000,00 sedangkan realisasi belanja subsidi sebesar 93,84 persen atau sebesar Rp1.757.069.805,00.

Belanja Hibah dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp55.568.153.010,00 sedangkan realisasi belanja hibah sebesar 97,35 persen atau sebesar Rp. 54.095.043.617,00.

Belanja Bantuan Sosial dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp2.138.000.000,00 sedangkan realisasi belanja bantuan sosial sebesar 100,00 persen atau sebesar Rp2.138.000.000,00.

B.2 Belanja Modal

Belanja modal dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp164.964.572.154,00 sedangkan realisasi belanja modal sebesar 87,42 persen atau sebesar Rp188.693.236.309,35. Adapun rincian target dan realisasi belanja operasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.97

Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025		Realisasi
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Modal Tanah	789.181.030,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	107.312.548.678,00	86.721.319.727,00	80,81
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.434.025.172,00	44.189.422.689,00	95,17
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	29.072.465.455,35	28.981.636.408,00	99,69
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.085.015.974,00	5.072.193.330,00	99,75
Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00
JUMLAH	188.693.236.309,35	164.964.572.154,00	87,42

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Cirebon, 2025

Belanja Modal Tanah dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp789.181.030,00 dan realisasi belanja modal tanah sebesar 0,00 persen atau sebesar Rp0,00 .

Belanja Modal Peralatan Dan Mesin dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp107.312.548.678,00 sedangkan realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar 80,81 persen atau sebesar Rp 86.721.319.727,00.

Belanja Modal Bangunan Dan Gedung dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp46.434.025.172,00, sedangkan realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 95,17 persen atau sebesar Rp44.189.422.689,00.

Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan dialokasikan pada Perubahan APBD Tahun 2025 sebesar Rp29.072.465.455,35 sedangkan realisasi sebesar 99,69 persen atau sebesar Rp28.981.636.408,00.

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dialokasikan pada Perubahan APBD sebesar Rp5.085.015.974,00, sedangkan realisasi belanja aset tetap lainnya sebesar 99,75 persen atau sebesar Rp5.072.193.330,00.

Berdasarkan data-data diatas menunjukan Belanja Daerah pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 direalisasikan sebesar Rp1.649.388.268.851,00 dari target yang telah ditetapkan Rp1.783.291.694.082. Dengan demikian realisasi anggaran Pemerintah daerah Kota Cirebon pada tahun 2025 cukup tinggi yaitu 92,49%.

C. Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran

Dalam rangka mengukur efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, dilakukan analisis dengan membandingkan data capaian kinerja pada setiap sasaran dalam RPD dengan realisasi anggaran dari seluruh program yang mendukung pencapaian sasaran tersebut. Suatu penggunaan anggaran dinilai efisien apabila capaian kinerja yang diperoleh lebih besar dibandingkan dengan realisasi anggaran yang digunakan, data disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.98

Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya
(Anggaran) Tahun 2025

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2025		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
1	Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter	1	101,38%		
1.1	Meningkatnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	3	98,60%	97,05%	1,55%
1.2	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata	3	144,71%	97,25%	47,46%
1.3	Meningkatnya kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif	1	243,88%	76,20%	167,68%
1.4	Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius	1	100,00%	98,20%	1,80%
2	Mewujudkan pertumbuhan	4	101,36%		

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2025		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
	ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah				
2.1	Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif	5	100,40%	89,66%	10,75%
2.2	Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif	2	389,64%	95,41%	294,23%
2.3	Meningkatnya kinerja BUMD	1	139,40%	77,26%	62,14%
2.4	Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi	2	93,62%	95,15%	-1,53%
2.5	Meningkatnya kesempatan kerja	1	98,81%	76,20%	22,61%
2.6	Meningkatnya pemanfaatan potensi	2	95,81%	95,07%	0,74%

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2025		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
	ekonomi hijau dan biru				
2.7	Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan	2	97,91%	95,44%	2,47%
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas	2	102,00%		
3.1	Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel	5	97,75%	79,12%	18,62%
3.2	Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat	1	128,58%	88,57%	40,01%
3.3	Meningkatnya kinerja dan profesionalisme ASN	1	105,54%	91,50%	14,05%

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2025		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
3.4	Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	2	108,35%	91,90%	16,45%
3.5	Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik	1	89,65%	96,79%	-7,14%
4	Terwujudnya penataan lingkungan kota yang berkelanjutan	1	206,67%		
4.1	Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup	1	121,61%	97,35%	24,26%
4.2	Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetis, dan ramah lingkungan dengan	3	133,25%	91,52%	41,73%

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2025		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
	pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas				
4.3	Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi	1	266,67%	95,18%	171,49%
4.4	Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim	2	97,43%	83,00%	14,43%
5	Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal dan integrasi kearifan	1	96,54%		

NO	Tujuan/ Sasaran	Jumlah Indikator	Tahun 2025		
			Presentase Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran (%)	Rata-Rata Realisasi Program Anggaran (%)	Selisih Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran
	lokal dalam pembangunan				
5.1	Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial	1	189,53%	95,46%	94,07%
5.2	Meningkatnya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan	1	111,00%	89,66%	21,34%
5.3	Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender	5	105,52%	74,71%	30,81%
5.4	Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis	1	103,00%	85,25%	17,75%

Dari tabel di atas terdapat beberapa kriteria dari perbandingan antara pencapaian kinerja pada setiap sasaran dengan persentase realisasi anggaran atau realisasi yang di belanjakan dari Anggaran yang disediakan, disebut efisien dalam penggunaan anggaran jika capaian kinerja melebihi penyerapan anggaran, tidak efisien jika pencapaian kinerja di bawah realisasipenyerapan anggaran program, berikut adalah kriteria tersebut:

1. Rata-rata capaian kinerja seluruh sasaran mencapai 135,86%, sedangkan rata-rata realisasi anggaran sebesar 89,70%. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat pencapaian kinerja berada di atas tingkat penyerapan anggaran, sehingga dapat diindikasikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan cukup efisien dalam penggunaan anggaran, karena hasil kinerja yang dicapai lebih tinggi dibandingkan dengan sumber daya anggaran yang digunakan.
2. Terdapat sasaran yang masuk dalam kriteria efektif dan paling efisien, yaitu Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif” dengan tingkat efisiensi sebesar 294,23%. Hal ini terlihat dari capaian kinerja sasaran sebesar 389,64%, sementara realisasi anggaran program sebesar 95,41%, sehingga menghasilkan selisih capaian kinerja dan realisasi anggaran tertinggi sebesar 294,23%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sasaran tersebut mampu menghasilkan capaian kinerja yang sangat tinggi dengan penggunaan anggaran yang relatif lebih rendah.
3. Sementara itu, terdapat sasaran dengan selisih capaian kinerja dan realisasi anggaran paling rendah, yaitu pada Sasaran 3.5 “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik” dengan capaian kinerja sebesar 89,65%, sedangkan realisasi anggaran mencapai 96,79%, sehingga memiliki selisih sebesar -7,14%. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran lebih tinggi dibandingkan capaian kinerja, sehingga dapat dikategorikan kurang efisien dan memerlukan evaluasi lebih lanjut terhadap efektivitas pelaksanaan program yang mendukung sasaran tersebut.

Metode analisa efisiensi penggunaan sumberdaya ini merupakan metode sederhana dalam menggambarkan secara umum tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap penggunaan sumber daya (anggaran), sebagai upaya

penelitian lebih lanjut terhadap efektivitas dan efesiensi kinerja agar melakukan analisa lebih dalam terhadap capaian kinerja disetiap indikator, berikut faktor-faktor yang mendukung serta permasalahannya yang telah diuraikan pada BAB III di bagian Sub Bab 3.2 dalam Laporan Kinerja ini.

D. Inovasi dan Prestasi

Pada tahun 2025, Pemerintah Daerah Kota Cirebon terus memfokuskan pengembangan inovasi dan prestasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan 5 tujuan RPJMD Kota Cirebon Tahun 2025–2029. Berbagai inovasi yang dikembangkan oleh perangkat daerah turut mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, pertumbuhan ekonomi, penataan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat. Upaya tersebut juga memperoleh berbagai penghargaan dari tingkat nasional, provinsi, maupun daerah sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan kreativitas Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Tabel 2.99

Inovasi dan Prestasi Pemerintah Kota Cirebon

No	Inovasi	Prestasi
1.	Tujuan 1: Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter	
	1. SILAGA JOMPALITAN MANTEB (Sistem Melamar Gawe Lewat Job Fair Mini online dengan Pelatihan berbasis Penempatan Berorientasi pada Minat dan Bakat) 2. Sistem Informasi Manajemen Talenta Terintegrasi dan Mudah (SiMantan Terindah)	1. Penghargaan “TERBAIK” Momentum Pelayanan KB Perusahaan Kategori Terbanyak Target Kecil Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan

No	Inovasi	Prestasi
	3. SIMPEG (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian) 4. Dolan Bae (Dokumen Pelatihan Berbasis Elektronik) 5. BUKU SAKTI (Buku Saku Sistem Akuntabilitas Kinerja Terintegrasi) 6. BUKTI PRESTASI (Buku Sakti Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Terintegrasi) 7. PINTAR BER-AKHLAK (Pedoman Instruksi Penerapan Budaya Kerja Ber-AKHLAK) 8. SIJARI (Sistem Informasi Jejaring Inovasi Kota Cirebon) 9. SIKOCIR (Sistem Informasi Kelitbangan Kota Cirebon) 10. SAKTI (Surat Keterangan Penelitian) 11. SIDAKEP (Sistem Elektronik Data Dokumen Arsip Kepegawaian) 12. Bunda Literasi 13. CIKAL (Cipta Karsa Literasi) 14. Inovasi Maskot Rang3R Boy untuk	Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 2. Juara I Kabupaten / Kota dengan Pencatatan Pelaporan Tamasya Terbaik Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 3. Duta GenRe Kabupaten/Kota terlampir sebagai TOP 10 dan Finalis Kegiatan Apresiasi Jambore dan Ajang Kreativitas GenRe Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga /

No	Inovasi	Prestasi
	Mengkampanyekan Gerakan Cinta Lingkungan di SMPN 7 Cirebon	BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 4. Gebyar Kirab MUPEN (Mobil Unit Penerangan) Terbaik Tahun 2025 untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga / BKKBN Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Barat 5. Penghargaan Ibu Sakinah Ketua Posyandu Sakura Kelurahan Panjunan Kecamatan Lemahwungkuk Menjadi Juara 2 Pada Regional 1 Kader Berprestasi Tingkat Nasional
2.	Tujuan 2 : “Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan sektor unggulan daerah.”	
	1. MALL UKM (Melayani Anda Lewat Layanan Usaha Kecil dan Menengah) Kota Cirebon 2. Festival Milm Kampung (Ciptakan Karya Kreatif dan Kearifan Lokal)	1. Penghargaan SiPangan Award tahun 2025 sebagai Daerah terbaik ke-2 dalam pengelolaan informasi pangan “SiPangan Daerah” untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota

No	Inovasi	Prestasi
	3. Kemis Nyerbon (Upaya Pelestarian Budaya Cirebon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota) 4. Sistem Inovasi Cepat Peta Potensi- Investasi " SICEPPOT-INVEST" 5. Smart Card KIR 6. QRIS Parking 7. Pemanfaatan Geospasial dalam Ketertiban Transaksi Perdagangan Khususnya Metrologi Legal 8. SIMPENDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah) 9. SINGPADA (Sistem Informasi Geografis Pajak Daerah)	Cirebon dari Badan Pangan Nasional 2. Penghargaan Ketahanan Pangan Award Juara 3 Terbaik Gerakan Pangan Murah (GPM) Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional 3. Penghargaan Ketahanan Pangan Award Juara 3 Enumerator Konsumen Terbaik Tingkat Jawa Barat untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional 4. Penghargaan Ketahanan Pangan Award Juara Harapan 3 Neraca Pangan Tingkat Provinsi Jawa Barat untuk Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Badan Pangan Nasional 5. Penghargaan Penganugrahan Penghargaan Pasar Tertib Ukur Tahun 2025 (Penganugerahan

No	Inovasi	Prestasi
		Penghargaan Pasar Tertib Ukur = Pasar Drajat Pagi Pronggol Penganuregerahan Pasar SNI : Pasar Pagi dan Drajat) untuk inas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kota Cirebon dari Kementrian Perdagangan 6. Penghargaan Pasar Tertib Ukur 2025 (DKUKMPP). 7. Penghargaan Program Gapura Sapta Pesona (Gerakan Penataan dan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata) Tingkat Provinsi Tahun 2025 untuk Pengelola Kampung Wisata Proklam Kota Cirebon (Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Cirebon) dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) 8. Penghargaan Kategori Dinas Urusan Pangan Terinovatif dalam rangka Gerakan Selamatkan Pangan Terinovatif Award Tingkat Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk Dinas Ketahanan

No	Inovasi	Prestasi
		Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Cirebon dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Jawa Barat
3.	Tujuan 3 : “Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas”	
	1. E-Retribusi Pelayanan Kebersihan Pengelolaan Sampah 2. Aplikasi Cirebon Wistakon (Wisata Kota Cirebon) 3. CIREBON BROJOL AJA KLALEN (Akte Kelahiran Langsung Jadi Kalau Laporan Lewat Online) 4. Uang Insentif Akta Kematian (UIS TAMAT) 5. Cirebon Mata Hatiku (Memantau Kota Penuh Bahagia dengan CCTV-ku) 6. SIGFLLAJ (Sistem Informasi Geografis Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) 7. Portal Satin Cirebon Pasti Weru/Cirebon Satu Data (CSD)	1. Penghargaan World Stroke Organization (WSO) Angels Award Q2 2025 kategori Excellence in Stroke Patient Care tahun 2025 untuk RSD Gunung Jati Kota Cirebon dari Lembaga World Stroke Organization 2. Penghargaan Public Service Of The Year Jawa Barat Tahun 2025 untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon dari Markplus Institute 3. Penghargaan Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan Predikat Unggul Tahun 2025 untuk Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Cirebon dari Lembaga

No	Inovasi	Prestasi
	8. CIREBON SEDULUR (Sistem Elektronik Terpadu Layanan Untuk Rakyat) 9. Layanan kegawatdaruratan Cirebon Siaga 112 10. SUKMA (Survei Kepuasan Masyarakat) 11. ISUN (Informasi Surat Undangan dan Kehadiran) 12. SIKOPER (Sistem Koordinasi Perumusan Kebijakan Terpadu) 13. Diorama Arsip Digital 14. Sistem Informasi Pelayanan Antar Kerja (SiPeKa) 15. SAMPEAN (Sistem Informasi Administrasi Pemerintahan) 16. Peta Rawan Gangguan Trantibum (PERAWAN GATRA) 17. KECE TU (Kecamatan Cerdas Terpadu) 18. Cirebon Satu Data: Visualisasi Data Statistik	Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia 4. Pemerintah Kota Cirebon raih opini Kualitas Tertinggi kategori A pada Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 5. Penghargaan kepada Tim Akselerasi Pelayanan Publik Pemerintah Kota Cirebon atas kontribusi dalam peningkatan kepatuhan standar pelayanan publik oleh Ombudsman RI 6. Evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indeks Reformasi Birokrasi Kota Cirebon mencapai 85,14 dengan kategori A– (Memuaskan) 7. Pemerintah Kota Cirebon memperoleh Opini “Kualitas Tinggi — Tanpa Maladministrasi” pada Opini Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025 8. Pemerintah Kota Cirebon memperoleh Indeks Pelayanan Publik sebesar 4,70 dengan kategori A (menempatkan Kota Cirebon

No	Inovasi	Prestasi
		dalam 10 besar pemerintah kota secara nasional) 9. Penghargaan Capaian Pengiriman Aliran Data Rekam Medik Elektronik (RME) ke SATU SEHAT Terbaik di Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 untuk RSD Gunung Jati dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 10. Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik dengan predikat Kota Informatif Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Cirebon melalui Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon dari Komisi Informasi Jawa Barat
4.	Tujuan 4: "Terwujudnya Penataan Lingkungan Kota yang Berkelanjutan"	
	1. Gerakan Pencanaan Pohon Eks. TPA Grenjeng menjadi KATA PROF DININGRAT (kawasan Tanaman Produktif Dalam Upaya Peningkatan Ruang Terbuka Hijau 2. GERIMIS (Gerakan Minim Sampah)	1. Penghargaan Program Kampung Iklim Kategori Madya (RW 15 Kelurahan Kalijaga) tahun 2025 untuk Dinas Lingkungan Hidup Kota Cirebon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

No	Inovasi	Prestasi
	3. SIGENTONG (Sistem Informasi Geografis Bencana Kota Udang) 4. GeoPAD AI-Reklame	2. Penghargaan Terbaik Posko Kolaborasi Siaga Bencana Pada Masa Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 1446 H Tahun 2025 untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cirebon dari Gubernur Jawa Barat 3. Penghargaan Posko Kolaborasi Siaga Bencana Arus Mudik dan Arus Balik Idul Fitri 2025 (BPBD)
5.	Tujuan 5: "Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan integrasi kearifan lokal dalam pembangunan"	
	1. Inovasi Cegah dan Evaluasi Kasus Stunting (CEK-STUNTING) GEOSPASIAL 2. MEGAH TINGTING LUR (Mari Cegah Stunting dengan Pemberian Telur) 3. PANTAU SI DIA (Pemantauan Penyakit Tidak Menular Hipertensi dan Diabetes Melitus Oleh Kader Kesehatan) 4. SAYONARA TB (Semua Ayo beRantas tunTas Tuberkulosis)	1. Penghargaan Swasti Saba Wiwerda pada ajang Penganugerahan Kabupaten/Kota Sehat (KKS) dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat Tahun 2025 kepada Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kota Cirebon dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia 2. Penghargaan Tiga Kabupaten/Kota dengan Indikator Penanggulangan TBC (Tuberkulosis) dengan

No	Inovasi	Prestasi
	5. SI ANAK EMAS (digitalisasiSI pelayANan reKam mEdis puskesMAS) 6. JEJAK CINTA (Jejaring, Jemput dan Ajak Ibu Hamil ANC rutin untuk Cegah Kematian Ibu, Bayi dan Balita) 7. JARI MANIS (JAga diRI MengAtasi Hipertensi Pada ProlaNIS) 8. SAE TBC Larangan (Sembuh Aman Edukatif dari Tuberkulosis) 9. Mari Ceria (Remaja Putri Cerdas Tanpa Anemia) 10. GeMa CerMat (Gerakan Masyarakat Cerdas Menggunakan ObAT) 11. GEMMES (Gerakan Mencegah dan Menangani Stunting) 12. Si Kumbang Madu (Program ini memberikan stimulasi tumbuh kembang untuk ibu hamil dan anak balita dalam penurunan stunting melalui kegiatan yang melibatkan ibu PKK) 13. MOBILE SENYUM- untuk mendekatkan layanan	Pencapaian Terbaik Tahun 2025 kepada Kota Cirebon melalui Dinas Kesehatan Kota Cirebon dari Kementerian Kesehatan RI 3. Penghargaan Kepada Pemerintah Kota Cirebon atas keberhasilan pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) Tahun 2025 untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dari Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri 4. Penghargaan sebagai Wujud Ucapan Terimakasih atas Dukungan dan Kerjasamanya Menyukkseskan Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2025 dalam rangka Menyemarakkan Hari Ulang Tahun Ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Cirebon dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

No	Inovasi	Prestasi
	sosial langsung ke masyarakat	5. Penghargaan Kota Layak Anak Kategori Pratama tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Cirebon untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Cirebon dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

E. Laporan Hasil Evaluasi Implementasi AKIP Tahun 2025

Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah menjadi sebuah mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang baik, menjamin akuntabilitas dan terus mendorong berbagai upaya inovasi untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan secara optimal. Melalui Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instruksi Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud sebagai laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku Kepala Pemerintahan.

Hasil evaluasi pada tahun 2025 yang ditunjukan Laporan Hasil Evaluasi Nomor B/626/AA.05/2025 Tahun 2025 menunjukan adanya peningkatan nilai akuntabilitas kinerja, sebelumnya pada tahun 2024 bernilai 69,04 menjadi 69,20 pada tahun 2025 dengan komponen sebagai berikut :

Tabel 2.100

Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cirebon

No	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai	Nilai
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	24,01	24,04
2	Pengukuran Kinerja	30	18,04	18,03
3	Pelaporan Kinerja	15	10,37	10,49
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,62	16,64
	Nilai Hasil Evaluasi	100	69,04	69,20
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B	B

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam kerangka tersebut, hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui mekanisme desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan.

Tugas pembantuan (*medebewind*) merupakan penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom atau dari pemerintah daerah provinsi kepada kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemberi tugas dengan kewajiban mempertanggungjawabkannya kepada pemberi tugas.

Dalam praktiknya, tugas pembantuan menjadi instrumen strategis untuk menjaga keterpaduan kebijakan nasional sekaligus memanfaatkan kapasitas pemerintah daerah sebagai pelaksana teknis. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan administratif dan koordinatif. Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Selain itu, dapat dimaknai sebagai salah satu bentuk kewenangan yang dimiliki pemerintah terhadap daerah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia..

Tujuan pelaksanaan tugas pembantuan adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan di daerah serta menciptakan keselarasan dan sinergi secara nasional antara program dan kegiatan yang dibiayai dari APBN serta program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Provinsi dalam rangka mewujudkan tujuan

Pemerintah Daerah dalam mencapai visi misinya. Adapun informasi capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
- b. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang;
- d. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2024;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- i. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- j. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- k. Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

2. Gambaran Umum Pelaksanaan Tugas Pembantuan di Kota Cirebon

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, terdapat perubahan paradigma mengenai penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Pertama, penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan tidak lagi berdasarkan kegiatan fisik atau non fisik melainkan didasarkan pada jenis dan karakteristik substansi Urusan Pemerintahan serta kewenangan Pemerintah Pusat. Kedua, prinsip penugasan kepada daerah dalam penyelenggaraan tugas pembantuan merupakan penugasan Urusan Pemerintahan selain pembinaan dan pengawasan.

Pada tahun 2025, Pemerintah Kota Cirebon tidak melaksanakan tugas pembantuan, karena tidak ada penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat ataupun sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

3. Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan

Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi, sehingga pada Tahun 2025 tidak ada capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan.

3.1. Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon

3.1.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat, maka untuk Tahun 2025 tidak ada target pelaksanaan dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.1.2. Realisasi

Tabel 3.1

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Cirebon

No	K/LP NK	Dasar Pelaksa naan Tugas	Program/ Kegiatan/ Output/Ri ncian Kegiatan	Lokasi	Perang kat Daerah Pelaks ana	Alokasi Anggar an	Realis asi Angga ran	%	Realisasi Capaian Kegiatan	%	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-	Nihil	-	

3.2. Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Cirebon

3.2.1. Target Kinerja

Target kinerja adalah target program/kegiatan dan anggaran yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga atas pelaksanaan penugasan yang tertuang dalam peraturan menteri atau dokumen/lembar penugasan.

Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi, maka untuk Tahun 2025 tidak ada target pelaksanaan dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.2.2. Realisasi

Tabel 3.2

Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Cirebon

N o	K/L PN K	Dasar Pelaksa naan Tugas	Program/ Kegiatan/ Output/Ri ncian Kegiatan	Lok asi	Peran gkat Daera h Pelaks ana	Alo kasi Ang gar an	Real isasi Angg aran	%	Real isasi Capa ian Kegi atan	%	K e t
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	-	Nihil	-	

3.3. Permasalahan dan Kendala

Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka untuk Tahun 2025 tidak ada permasalahan/kendala dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

3.4. Saran dan Tindak Lanjut

Tahun 2025 Pemerintah Daerah Kota Cirebon tidak mendapatkan alokasi anggaran untuk tugas pembantuan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Barat maka untuk Tahun 2025 tidak ada tindak lanjut dalam kegiatan tugas pembantuan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

BAB IV

PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Bidang Urusan Pendidikan

Bidang urusan pendidikan di isi dengan bidang urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Jenis pelayanan dasar pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon meliputi sebagai berikut:

1. Pendidikan Dasar;
2. Pendidikan Kesetaraan; dan
3. Pendidikan Anak Usia Dini. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

4.1.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar tingkat Kota Cirebon pada Laporan Tahunan Standar Pelayanan Minimal Dinas Pendidikan Kota Cirebon ini disesuaikan dengan ketentuan dasar hukum di atasnya, yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 32 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, Penyederhanaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon hasil pelaksanaan Pembangunan Pendidikan Kota Cirebon, yang diukur dari aspek pelayanan minimal melalui tiga jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (Paud);
2. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SDMI, SMP/MTs);
3. Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Atas dasar tersebut Capaian Standar Pelayanan Minimal Urusan Pendidikan Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2025 adalah seperti yang digambarkan pada tabel dibawah ini:

No.	Urusan	Program	Target	Ket
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	
2.		Pendidikan Dasar	100%	
3.		Pendidikan Menengah Pertama	100%	
4.		Pendidikan Kesetaraan	100%	

4.1.3 Realisasi

No.	Urusan	Program	Target	Realisasi	Ket
1.	Pendidikan	Pendidikan Anak Usia Dini	100%	96.21%	
2.		Pendidikan Dasar	100%	98.83%	
3.		Pendidikan Menengah Pertama	100%	97.83%	
4.		Pendidikan Kesetaraan	100%	99.17%	

4.1.4 Alokasi Anggaran

Anggaran yang bersumber dari dana APBD Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025 dalam rangka terkait penerapan dan pencapaian SPM oleh Dinas Pendidikan Kota Cirebon. Pemerintah Daerah Kota Cirebon sebagaimana digambarkan pada tabel dibawah ini akan dijelaskan

tingkat capaian penyerapan anggaran pada Dinas Pendidikan Kota Cirebon pada Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

No.	Anggaran	PAGU	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perangkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	Rp. 1,747,877,496,705,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	Rp. 407,223,422,213,-	23.29%	23.29%
3.	Anggaran Penerapan SPM	Rp. 407,223,422,213,-		100%

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa alokasi anggaran untuk perangkat daerah penunjang urusan pendidikan sebesar **407,223,422,213,-** (*Empat Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), sedangkan untuk anggaran penerapan Standar Pelayanan Minimal pada urusan pendidikan berjumlah **407,223,422,213,-** (*Empat Ratus Tujuh Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Dua Ribu Dua Ratus Tiga Belas Rupiah*), atau 100 % dari total anggaran perangkat daerah.

Anggaran penerapan SPM tersebut dialokasikan pada Program dan Kegiatan sebagai berikut :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				407,223,422,213	407,223,422,213	100.00%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN						
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar (SD)			23,906,348,970	23,626,585,431	98.83%
Angka Partisipasi Sekolah							

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personal Peserta Didik PAUD/Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Nonformal/Kesetaraan	Peserta Didik	8,978,641,100	8,849,709,691	98.56%
		3	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,325,574,165	1,305,536,760	98.49%
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		6	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	3,670,967,725	3,612,092,000	98.40%
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		2	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	0	0	0%
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		5	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik	Komunitas	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			dan Tenaga Kependidikan				
		8	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		10	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		4	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		5	Fasilitasi Komunikasi Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0%
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	0	0	0%
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		9	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
Keamanan							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	3,310,388,660	3,274,388,660	98,91%
		4	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
Kebhinekaan							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	3,310,388,660	3,274,388,660	98.91%
		4	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan	Kegiatan	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			perundungan, kekerasan dan intoleransi				
Inklusifitas							
		1	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	3,310,388,660	3,310,388,660	100.00%
		4	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				23,906,348,970	23,626,504,431	98.83%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP)			14,425,488,133	14,112,814,792	97.83%
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	515,605,975	465,065,000	90.20%
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta Didik	5,829,022,005	5,777,093,381	99.11%
		4	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		5			0	0	0%
		6	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	1,026,330,720	1,011,060,961	98.51%
Literasi							
		1	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		4	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		5	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		7	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Orang	0	0	0%
		8	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	347,362,195	345,010,195	99.32%
		9	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang		0	0%
		10	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
Numerasi							
		1	Penyediaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Orang	0	0	0%
		4	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0%
		5	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		6	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	347,362,195	345,010,195	99.32%
		7	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	Buku	0	0	0%
		8	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	Paket	0	0	0%
		9	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		10	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
Keamanan							
		1	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan	Satuan Pendidikan	2,119,935,014	2,056,525,020	97.01%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Manajemen Sekolah				
		4	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan Perundungan, Kekerasan, dan Intoleransi	Keluarga	0	0	0%
Kebhinekaan							
		1	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,119,935,014	2,056,525,020	97.01%
		4	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%
Inklusifitas							
		1	Pengembangan Konten Digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		2	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	2,119,935,014	2,056,525,020	97.01%
		4	Pemberian Layanan Pendampingan bagi Satuan Pendidikan untuk Pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Kegiatan	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				14,425,488,133	14,112,814,792	97.83%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			2,156,800,890	2,075,130,866	96.21%
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	0	0	0%
		2	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	Peserta Didik	0	0	0%
		3	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD	Orang	0	0	0%
		4	Koordinasi, Perencanaa, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembangunan Ruang Kelas Baru	Ruang	0	0	0%
		6	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)	Unit	0	0	0%
		7	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	Paket	100,053,120	96,342,048	96.29%
Kekhusuan PAUD							
		1	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	0	0	0%
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	Paket	0	0	0%
		3	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	0	0	0%
		4	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	1,744,596,308	1,675,143,716	96.02%
		5	Pengembangan konten digital untuk Pendidikan	Konten Digital	0	0	0%
		6	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
		7	Sosialisasi dan Advokasi	Dokumen	312,151,462	303,645,102	97.27%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Kebijakan Bidang Pendidikan				
		8	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Komunitas	0	0	0%
		9	Bimbingan Teknis Pelatihan, dan/atau Magang PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Orang	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				2,156,800,890	2,075,130,866	96.21%
	4	Pendidikan Kesetaraan Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			1,163,583,922	1,618,003,922	99.17%
Angka Partisipasi Sekolah							
		1	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Dokumen	0	0	0%
		1	Penataan Pendistribusian Pendidikan dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Lapora	1,631,583,922	1,618,003,922	99.17%
		5	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya dalam Daerah Orang		0	0	0%
Literasi							
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten/Kota	Buku	0	0	0%
Numerasi							

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		1	Penyediaan dan Pendistribusian Buku Cerita Rakyat Daerah Penunjang Literasi Kabupaten / Kota	Buku	0	0	0%
	JUMLAH INDIKATOR				1,163,583,922	1,618,003,922	99.17%
	JUMLAH PROGRAM						

4.1.5 Dukungan Personil

Jumlah personil dalam rangka pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan pendidikan berjumlah 2.731 personil dengan jumlah laki-laki 1.068 personil dan 1.663 Perempuan.

4.1.6 Permasalahan dan Solusi

Tidak ada permasalahan yang di input.

4.2 Bidang Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Pemerintah Kota Cirebon menyelenggarakan Jenis Pelayanan SPM Bidang Urusan Kesehatan antara lain :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- 10) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis
- 12) Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus HIV

4.2.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Penentuan program prioritas bidang kesehatan dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program. Berikut ini adalah target pencapaian SPM Pemerintah Kota Cirebon dibandingkan dengan target Nasional (Kemenkes) Tahun 2023.

.No.	Program/Kegiatan	Target	Ket
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	
5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%	
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	
10.	Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).	100%	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	

4.2.3 Realisasi

.No.	Program/Kegiatan	Target	Realisasi	Ket
1.	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	98.26%	
2.	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	100%	
3.	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	98.17%	
4.	Pelayanan Kesehatan Balita	100%	99.98%	

5.	Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	98.06%	
6.	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	91.16%	
7.	Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	100%	100%	
8.	Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	100%	98.84%	
9.	Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	100%	100%	
10.	Pelayanan Kesehatan otang dengan gangguan jiwa berat	100%	91.97%	
11.	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosism	100%	99.91%	
12.	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	100%	100%	

4.2.4. Alokasi Anggaran

Program dan kegiatan bidang kesehatan yang dilaksanakan pada Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Untuk merealisasikan program tersebut melalui Pemerintah Kota Cirebon urusan kesehatan mendapatkan anggaran sebagai berikut :

No	Anggaran	PAGU	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perangkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	Rp 1.747.877.496.705,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	Rp. 641.826.431.896,-	36.72%	27.10%

3.	Anggaran Penerapan SPM	Rp. 473.753.168.439,-		73.81%
----	---------------------------	-----------------------	--	--------

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan anggaran urusan kesehatan mendapatkan 36.72 % anggaran untuk penerapan SPM Urusan kesehatan dari total anggaran perangkat daerah sebesar Rp. 641.826.431.896,-(*enam ratus empat puluh satu milyar delapan ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah*). Berikut rincian atas program/kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				8,227,708,312	8,133,428,674	98.85%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT						
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			8,227,708,312	8,133,428,674	98.85%
		1	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1,400,263,800	1,375,929,550	98.26%
		2	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	395,347,300	395,347,300	100%
		3	Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	616,505,350	605,218,200	98.17%
		4	Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	Orang	249,085,900	249,033,900	99.98%
		5	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Orang	462,841,800	453,842,050	98.06%
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	220,780,126	201,254,939	91.16%
		7	Pengelolaan	Orang	298,866,675	298,866,675	100%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut				
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	69,237,500	68,437,500	98.84%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	654,457,200	654,457,200	100%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	332,324,756	305,648,456	91.97%
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	2,802,739,180	2,800,134,179	99.91%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	725,258,725	725,258,725	100%
	JUMLAH INDIKATOR				8,227,708,312	8,133,428,674	98.85%
	JUMLAH PROGRAM						
KEGIATAN LAINNYA							
2	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA						

4.2.5 Dukungan Personil

Dalam pelaksanaan penerapan SPM urusan kesehatan selain dukungan anggaran, pada Tahun 2025 juga ditunjang dengan dukungan personil

dengan jumlah 2.044 orang dengan jumlah laki-laki 704 orang dan 1.340 orang perempuan.

4.2.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Urusan Kesehatan adalah sebagai berikut :

A. Pendataan

Adanya keterlambatan pengisian data untuk Indikator pelayanan kesehatan pendidikan usia dasar dikarenakan kegiatan dan pelaporan masih berjalan hingga akhir tahun dan awal tahun.

B. Perhitungan

Kesenjangan antara estimasi sasaran dan sasaran riil terlalu jauh sehingga capaian masih terlalu tinggi atau terlalu rendah

C. Perencanaan

Tidak ditemukan adanya permasalahan dalam proses perencanaan

D. Pelaksanaan

1. Adanya ibu hamil yang abortus sehingga tidak sampai K6.
2. Ibu hamil ANC pertama terlambat di TM 2, sehingga tidak sesuai standar K6
3. Adanya perpindahan domisili dan andon lahir sehingga ANC tidak mencapai K6
4. Adanya kelahiran kurang bulan, sehingga belum ANC 6X
5. Masih adanya masyarakat yang bersalin di rumah di tolong oleh dukun di wilayah Kelurahan Argasunya
6. Adanya perpindahan domisili dan andon lahir

4.3 Bidang Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Pemerintah Kota Cirebon

Jenis Pelayanan Dasar dalam bagi Bidang Urusan Pekerjaan Umum adalah sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
2. penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.

4.3.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum oleh daerah adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kota cirebon dalam mencapai SPM sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	100%	
2.	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	100%	

4.3.3 Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1.	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;	100%	98.15%	
2.	penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik.	100%	87.46%	

4.3.4 Alokasi Anggaran

Program dan kegiatan bidang urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan pada Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis. Program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan dalam Rencana Kerja merupakan rincian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan. Dalam Komponen kegiatan ditetapkan kelompok indikator kinerja kegiatan, yang meliputi masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil (outcomes). Untuk merealisasikan program tersebut melalui Pemerintah Kota Cirebon urusan kesehatan mendapatkan anggaran sebagai berikut :

No	Anggaran	PAGU (Rp)	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perangkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	Rp. 1,747,877,496,705,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	Rp. 73.775.717.105,-	4.22%	0.19%
3.	Anggaran Penerapan SPM	Rp. 3.368.145.127,-		4.56%

Dari tabel diatas dapat terlihat dengan anggaran urusan Pekerjaan Umum mendapatkan 4.22 % anggaran untuk penerapan SPM Urusan Pekerjaan Umum dari total anggaran perangkat daerah sebesar **Rp. 73.775.717.105-** (*tujuh puluh tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus tujuh belas ribu seratus lima rupiah*) . Berikut rincian atas program/kegiatan yang bersumber dari anggaran APBD :

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				5,561,309,677	5,244,188,408	94.30 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR DAERAH KABUPATEN / KOTA						
	1	Pengelolaan dan Pengembangan sistem penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			1,040,512,053	989,475,419	95.10%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPM	Dokumen	0	0	0.00%
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	0.00%
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Detik	0	0	0.00%
		4	Pembangunan SPAM	SR	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			jaringan perpipaan di kawasan pedesaan				
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Liter/Desa	0	0	0.00%
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	Liter/Desa	0	0	0.00%
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	SR	0	0	0.00%
		8	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Pedesaan	SR	0	0	0.00%
		9	Pembinaan dan Pengawasan terhadap tarif Air Minum	Penyelenggaraan SPAM	0	0	0.00%
		10	Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	0.00%
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok masyarakat	0	0	0.00%
		12	Fasilitasi penyiapan kerangka SPAM	Unit	0	0	0.00%
		13	Pembinaan dan	Unit	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Pengawasan terhadap pelaksanaan kerjasama SPAM				
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM	Penyelenggaraan SPAM	0	0	0.00%
		15	Operasi dan Pemeliharaan SPAM di kawasan perkotaan	Unit	0	0	0.00%
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Pedesaan	Unit	0	0	0.00%
		17	Pembangunan baru SPAM buka jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	-	0	0	0.00%
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	-	0	0	0.00%
		20	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan	Unit	0	0	0.00%
		21	Perbaikan SPAM jaringan perpipaan di kawasan pedesaan	Unit	0	0	0.00%
		22	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan	Unit	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			jaringan perpipaan				
		23	Peningkatan kapasitas kelembagaan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Lembaga	0	0	0.00%
		24	Pembinaan dan Pemberayaan Masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Orang	0	0	0.00%
		25	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem penyediaan air minum (SPAM)	Dokumen	98,549,987	96,801,771	98.23%
		26	Peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Liter/Desa	0	0	0.00%
		27	Pembinaan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) Desa	Desa	0	0	0.00%
		28	Pembangunan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan	Liter/Desa	0	0	0.00%
		29	Operasi dan Pemeliharaan sistem penyediaan air minum (SPAM)	Unit	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		30	Fasilitasi kerjasama penyelenggaraan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/ kota		0	0	0.00%
		31	Optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan		941,962,066	892,673,648	94.77%
		32	Perluasan sistem penyediaan air minum (SPAM) jaringan perpipaan		0	0	0.00%
		33	Optimalisasi sistem penyediaan air minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan		0	0	0.00%
	JUMLAH INDIKATOR				1,040,512,053	989,475,419	95.10%
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH						
	1	Pengelolaan dan pengembangan sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			4,520,797,624	4,254,642,989	94.11%
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis sistem pengelolaan air limbah domestik dalam daerah kabupaten/ kota	Dokume	0	0	0.00%
		2	Supervisi pembangunan/Rehabilitas/peningkatan/perluasan sistem pengelolaan	Dokumen	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			n air limbah domestik terpusat skala kota				
		3	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan n air limbah terpusat skala kota	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		4	Rehabilitasi /peningkatan/perluasan sistem pengelolaan n air limbah domestik terpusat skala kota	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		5	Rehabilitasi /peningkatan/perluasan sistem pengelolaan n air limbah domestik terpusat skala pemukiman	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengelolaan setempat	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		7	Pembinaan teknik pengelolaan n air limbah domestik	Orang	0	0	0.00%
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan sistem pengelolaan n air limbah domestik	Kelompok Masyarakat	0	0	0.00%
		9	Pengembangan SDM dan Kelembagaan pengelolaan n air limbah domestik	Otong	0	0	0.00%
		10	Operasi dan pemeliharaan	Unit	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			an sistem pengelolaan air limbah domestik				
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/peluasan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat skala pemukiman	Dokumen	0	0	0.00%
		12	Pembangunan/penyediaan sistem pengelolaan air limbah terpusat skala pemukiman	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	0.00%
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	0	0	0.00%
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana	M3/Hari	0	0	0.00%
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M3/Hari	0	0	0.00%
		17	Supervisi pembangunan Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	0.00%
		18	Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala	Unit	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			kawasan tertentu				
		19	Optimalisasi instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	Unit	0	0	0.00%
		20	Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala pemukiman berbasis masyarakat	M3/Hari	0	0	0.00%
		21	Peningkatan instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	M3/Hari	0	0	0.00%
		22	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala pemukiman berbasis masyarakat	M3/Hari	0	0	0.00%
		23	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala permukiman berbasis masyarakat	M3/Hari	0	0	0.00%
		24	Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	Unit	983,836,344	890,139,750	90.48%
		25	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPLAD) terpusat skala perkotaan	M3/Hari	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		26	Fasilitasi kerjasama penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) di Daerah Kabupaten/ Kota	Unit	0	0	0.00%
		27	Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala pemukiman berbasis masyarakat	M3/Hari	0	0	0.00%
		28	Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala perkotaan	M3/Hari	0	0	0.00%
		29	Optimalisasi sistem pengelolaan air limbah domestik (SPLAD) terpusat skala pemukiman	Unit	210,711,640	209,627,520	99.49%
		30	Peningkatan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala kawasan tertentu	M3/Hari	0	0	0.00%
		31	Pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala tertentu	M3/Hari	0	0	0.00%
		32	Peningkatan sistem	M3/Hari	0	0	0.00%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			pengelolaan air limbah domestik (SPALD) terpusat skala pemukiman				
		33	Penyediaan jasa penyeteroran lumpur tinja	Rumah Tangga	243,612,318	172,005,513	70.61
		34	Pembinaan pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) desa	Desa	0	0	0.00%
		35	Pengembangan kapasitas kelembagaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)	Penyelenggara	0	0	0.00%
		36	Pembangunan Instalasi pengelolaan lumpur tinja (IPLT)	M3/Hari	0	0	0.00%
		37	Penyediaan sarana pengangkat an lumpur tinja	Unit	0	0	0.00%
		38	Operasi dan pemeliharaan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)	Unit	1,949,552,232	1,859,327,736	95.37%
		39	Penyediaan sub sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD)	Rumah Tangga	1,049,503,002	1,043,656,888	99.44%
		40	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan sistem pengelolaan	Orang	0	0	0.00%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			n air limbah domestik (SPALD)				
		41	Penyusunan rencana,kebijakan,strategi dan teknis sistem pengelolaa n air limbah domestik (SPALD)	Dokumen	83,582,088	79,885,582	95.58%
	JUMLAH INDIKATOR				4,520,797,624	4,254,642,989	94.11%
	JUMLAH PROGRAM						
KEGIATAN LAINNYA							

4.3.5 Dukungan Personil

Dukungan personil menggambarkan jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Urusan Pekerjaan Umum berjumlah 177 orang dengan 146 laki-laki dan 31 perempuan.

4.3.6 Permasalahan dan Solusi

Kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal urusan Pekerjaan Umum di tahun 2025 antara lain :

Seluruh realisasi target SPM DPUTR Triwulan 1 2025 adalah 0 (nol), hal ini dikarenakan selama TW 1 masih dalam proses penyusunan dokumen perencanaan sehingga belum ada realisasi fisik pada Triwulan 1.

4.4. Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 /PRT/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta

Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Pemerintah Kota Cirebon.

Jenis Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat adalah sebagai berikut :

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah.

4.4.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Indikator SPM	Target	Ket
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	100%	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	

4.4.3 Realisasi

Target pencapaian SPM urusan Perumahan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 sebagai berikut :

No.	Indikator SPM	Target	Realisasi	Ket
1.	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni bagi Korban Bencana	100%	100%	
2.	Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni bagi Masyarakat yang terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah	100%	100%	

4.4.4 Alokasi Anggaran

Anggaran untuk penerapan SPM urusan Perumahan Rakyat dari PAGU Perangkat Daerah sebesar **Rp.37.127.515.650,-** (*tiga puluh tujuh milyar seratus dua puluh tujuh juta lima ratus lima belas ribu enam ratus lima puluh rupiah*) sekitar 2.12% atau senilai dengan **Rp.37.127.515.650,-** (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Belas Ribu*

Enam Ratus Lima Puluh Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk merealisasikan program tersebut melalui Pemerintah Kota Cirebon urusan Perumahan Rakyat mendapatkan anggaran sebagai berikut :

No	Anggaran	PAGU (Rp)	Anggaran Perangkat Daerah dengan APBD (%)	Anggaran Penerapan SPM dengan Anggaran Perangkat Daerah(%)
1.	APBD Kota Cirebon	Rp. 1.747.877.496.705,-		
2.	Anggaran Perangkat Daerah	Rp. 37.127.515.650,-	2.12%	
3.	Anggaran Penerapan SPM	Rp.37.127.515.650,-		100%

4.4.5 Dukungan Personil

Tahun 2025 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam penerapan SPM urusan perumahan rakyat didukung **106 personil** yang terdiri dari 82 laki-laki dan 24 perempuan.

4.4.6 Permasalahan dan Solusi

Pelaksanaan SPM urusan perumahan rakyat di kota cirebon pada tahun 2025 tidak berjalan dengan lancar dan ada beberapa kendala atau masalah yang muncul diantaranya sebagai berikut :

Pada triwulan IV untuk rehabilitasi korban bencana belum dapat dilaksanakan karena adanya regulasi yang masih perlu diperbaiki

4.5. Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Peraturan Menteri Pekerjaan

Umum serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Pemerintah Kota Cirebon.

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah :

- 1) Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum.
- 2) Pelayanan informasi rawan bencana.
- 3) Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana.
- 4) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- 5) Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dari lima pelayanan dasar tersebut diatas yang merupakan Standar Pelayanan Minimal yang harus dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah “ **Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum** “.

B. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah :

1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan informasi rawan bencana
4. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
5. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Dari lima pelayanan dasar tersebut diatas yang merupakan Standar Pelayanan Minimal yang harus dikerjakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja adalah “ Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi korban bencana “

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Jenis pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah jenis-jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang telah ditetapkan Standar Pelayanan Minimal nya oleh pemerintah, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), diantaranya adalah :

1. Pelayanan informasi rawan bencana
2. Pelayanan informasi rawan bencana
3. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

4.5.2 Target pencapaian Standar Pelayanan Minimal

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Target pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	

B. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Target pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	

C. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Target pencapaian SPM urusan ketentraman dan ketertiban umum khususnya Dinas Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan Permendagri 59 tahun 2021 adalah sebagai berikut :

No.	Indikator	Target	Ket
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	

4.5.3 Realisasi

No.	Indikator	Target	Realisasi	Ket
Satuan Polisi Pamong Praja				
1.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100%	99.00%	
Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan				
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.	100%	100%	
Badan Penanggulangan Bencana Daerah				
1.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	
2.	Pelayanan informasi rawan bencana	100%	100%	
3.	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	100%	

4.5.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

a. Satuan Polisi Pamong Praja

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON				0	0	0%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				0	0	0%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			0	0	0%
		1	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	0	0	0%
		2	Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	Kasus	0	0	0%
		3	Koordinasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan	Dokumen	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			ketertiban umum				
		5	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	0	0	0%
		6	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum	Dokumen	0	0	0%
		7	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	0	0	0%
		8	Penyusunan SOP ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Dokumen	0	0	0%
		9	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	0	0	0%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			0	0	0%
		1	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan	Laporan	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Bupati/Wali Kota				
		2	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
		3	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Laporan	0	0	0%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			0	0	0%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	0	0	0%

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				0	0	0%
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			0	0	0%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	0	0	0%
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			0	0	0%
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	0	0	0%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	0	0	0%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			0	0	0%
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	3	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			0	0	0.00%
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				8,135,625,750	6,630,404,786	81.50%
	4	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			7,925,726,135	6,569,215,386	82,88%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	4,080,001,03	4,076,101,93	99.90%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	0	0	0%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit	0	0	0%
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen	3,821,932,50	2,439,113,45	65,23%
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen	18,259,634	0	0%
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit	1,264,019	0	0%
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Orang	4,268,945	0	0%
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen	0	0	0%
	5	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			0	0	0.00%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	0	0	0%
	6	Investigasi Kejadian Kebakaran			20,112,522	20,108,400	99,98%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	20,112,522	20,108,400	99,98%
	7	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			148,623,930	0	0.00%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	148,623,930	0	0%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran		0	0	0%
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan prasarana	Dokumen	0	0	0%
	8	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			41,163,163	41,081,000	99.80%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	13,440,000	13,440,000	100%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyela	Dokumen	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			matan dan evakuasi				
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyela matan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyela matan dan evakuasi	Laporan	27,723,163	27,641,000	99,70%

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				1.592.074.676	1.321.375.315	83.00%
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			81.090.700	59.919.000	73.89%
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	4.100.000	3.950.000	96.34%
		2	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	76.990.700	55.969.000	72.70%
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			1.372.584.208	1.164.807.805	84.86%
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap	Dokumen	0	0	0%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			bencana Kabupaten/Kota				
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit	0	0	0%
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen	0	0	0%
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	22.530.279	19.361.446	86.02%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota		0	0	0%
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	132.214.208	126.174.000	95.43%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	0	0	0%
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	0	0	0%
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	100.468.034	94.301.500	93.86%
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam		0	0	0%
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			79.422.000	55.043.500	69.31%
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan	0	0	0%
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			korban bencana Kabupaten/Kota				
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	0	0	0%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan	0	0	0%
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen	0	0	0%
	4	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			58.977.768	41.605.000	70.54%
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	0	0	0%
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan	52.263.920	37.355.000	71.47%
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	0%

4.5.5 Dukungan Personil

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan dan Ketertiban Umum di

dukung dengan **74 personil** yang terdiri dari 65 laki-laki dan 9 perempuan.

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan dan Ketertiban Umum di dukung dengan 268 personil yang terdiri dari 240 laki-laki dan 28 perempuan.

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan penerapan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan dan Ketertiban Umum di dukung dengan 45 personil yang terdiri dari 36 laki-laki dan 9 perempuan.

4.5.6 Permasalahan dan Solusi

Sub Urusan Kebencanaan dalam pelaksanaan penerapan SPM mendapati beberapa kendala sebagai berikut :

1. belum tersedianya data kependudukan yang baru
2. belum optimalnya anggaran

Belum tersedianya Early Winning System (EWS)

Sub Urusan Damkar dalam pelaksanaan penerapan SPM mendapati beberapa kendala sebagai berikut :

1. pemberdayaan masyarakat dalam mitigasi dan pemadaman awal
 - a. rendahnya kesadaran masyarakat tentang pencegahan kebakaran
 - b. masyarakat belum terlatih melakukan pemadaman awal secara aman
 - c. minimnya kelompok relawan atau satgas kebakaran tingkat RT/RW/Desa
 - d. APAR dan alat pemadam sederhana belum tersedia di lingkungan pemukiman
2. Kompetensi SDM Pemadam
 - a. petugas pemadam belum seluruhnya mengikuti pelatihan teknis berkelanjutan
 - b. kurangnya pelatihan penggunaan peralatan modern dan teknik pemadaman terkini
 - c. minimnya simulasi kebakaran terpadu lintas sektor
 - d. kurangnya tenaga instruktur bersertifikasi

4.6 Bidang Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal serta Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Penerapan Pelayanan Minimal. Pemerintah Kota Cirebon.

- rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
- rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
- perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota

4.6.2 Target Pencapaian Standar Pelayanan Minimal

Target pencapaian SPM urusan sosial untuk Tahun 2023 menetapkan target sebagai berikut :

No	Indikator	Target	Ket
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	100%	
2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	100%	
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	100%	
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	100%	
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	

4.6.3 Realisasi

No	Indikator	Target	Realisasi	Ket
1.	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;	100%	100%	

2.	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;	100%	100%	
3.	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;	100%	100%	
4.	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;	100%	100%	
5.	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota	100%	100%	

4.6.4 Alokasi Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, untuk urusan sosial dalam penerapannya yang bersumber dari:

Pelaksanaan penerpan SPM urusan sosial di Pemerintah Kota Cirebon pada Tahun 2023 dengan besaran anggaran Rp.1.186.675.209,- (Satu Milyar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Dua Ratus Sembilan Rupiah) atau 11.02% dari besar PAGU perangkat daerah Rp. 10.760.293.910,- (Sepuluh Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Rupiah). Adapun rinciannya sebagai berikut.

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KOTA CIREBON						
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				1.075.907.209	1.025.681.481	95.33%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial K20220131040736			829.809.320	801.202.104	96.55%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	204.431.867	187.530.783	91.73%
		2	Penyediaan sandang	Orang	19.833.358	19.833.358	100.00%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	78.708.257	69.409.689	88.19%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	34.499.740	33.999.740	98.55%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental,	Orang	308.120.000	307.120.000	99.68%

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) KOTA CIREBON TAHUN 2025

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			spiritual, dan sosial				
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	101.982.879	101.151.455	99.18%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	6.999.970	6.999.970	100%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	0	0	0%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	0	0	0%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	0	0	0%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	55.233.374	55.232.234	100%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	19,999,875	19.924.875	99.62%
	JUMLAH INDIKATOR						
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			246.097.889	224.479.377	91.22%
		1	Penyediaan makanan	Orang	208.676.275	187.057.763	89.64%
		2	Penyediaan sandang	Orang	24,999,745	24,999,745	100%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	5.109.109	5.109.109	100%
		4	Penanganan khusus bagi	Orang	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			kelompok rentan				
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	7.312.760	7.312.760	100%
	JUMLAH INDIKATOR						
	JUMLAH PROGRAM						
KEGIATAN LAINNYA							

4.6.5 Dukungan Personil

Dukungan personil pada Dinas Sosial selaku pemangku urusan sosial untuk penerapan SPM berjumlah 45 Personil atau 21 laki-laki dan 24 perempuan.

4.6.6 Permasalahan dan Solusi

Penerapan Standar Pelayanan minimal (SPM) Urusan Sosial dalam pelaksanaannya mengalami beberapa kendala sebagai berikut :

1. Belum adanya verifikasi data terpilah penerima SPM (Standar pelayanan Minimal)
2. Belum optimalnya analisa kebutuhan terhadap penerima SPM
3. Keterbatasan kompetensi pengampu SPM terhadap mekanisme layanan SPM
4. Hambatan proses reunifikasi bagi klien yang keluarganya tidak ditemukan
5. Hambatan dukungan dari keluarga dan lingkungan terhadap klien disabilitas mental pasca pengobatan
6. Belum adanya shelter bagi klien yang dalam proses rujukan maupun reunifikasi
7. Keterbatasan sarana prasarana pendukung pasca bencana dan kompetensi SDM siaga bencana.

4.7 Program dan Kegiatan

a. Urusan Pendidikan

Dinas Pendidikan selaku pemangku urusan pendidikan pada penerapan SPM pada Tahun 2023 melaksanakan 3 (tiga) Program, 5 (lima) Kegiatan dan 7 (tujuh) Sub Kegiatan dalam rangka mencapai hasil yang optimal telah melaksanakan beberapa program yang terkait dengan Standar Pelayanan Minimal sebagai berikut :

1. Pendidikan Anak Usia Dini, yaitu jumlah warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Pendidikan Dasar, yaitu jumlah warga negara usia 7 -15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar (SDMI, SMP/MTs);
3. Pendidikan Kesetaraan, yaitu jumlah warga negara usia 7 – 18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang partisipasi dalam pendidikan kesetaraan

Uraian dari program dan kegiatan dapat dijabarkan sebagai berikut :

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	100%
			Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini	97.02%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
			di setiap desa	
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	100%
			Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	98.79%
2.	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	100%
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak	99.85%

No	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
		(SD/SMP/MI/MTs/Pake t A/Paket B)	sedang dan rusak berat	
3.	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	100%

b. Urusan Kesehatan

Dalam Permenkes Nomor 4 Tahun 2020 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan, untuk skala Pemerintah Kabupaten/ Kota antara lain :

- 1) Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
- 2) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
- 3) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
- 4) Pelayanan Kesehatan Balita
- 5) Pelayanan Kesehatan pada usia pendidikan dasar
- 6) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- 7) Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut
- 8) Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi
- 9) Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus
- 10) Pelayanan Kesehatan otang dengan gangguan jiwa berat
- 11) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosism dan Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus).

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Hamil	42.69%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
	DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT			
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	61.42%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	50.30%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Balita	40.14%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	35.66%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	50.57%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	37.76%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	54.58%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	26.92%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang	55.30

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
			Dengan Gangguan Jiwa Berat	
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	89.53%
			Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	65.70
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	64.33
			Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	77.16

c. Urusan Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum dalam melaksanakan penerapan SPM membagi menjadi 2 (dua) program sebagai berikut

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	-	-	98.15%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	-	-	87.46%

d. Urusan Perumahan Rakyat

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan urusan Perumahan Rakyat melaksanakan Program sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			100%
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			100%

e. Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum

a. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum melaksanakan program sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawasan	72.63%
			Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui penertiban dan	69.26%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
			penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	
			Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	100.00%
			Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	87.94%
			Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	100.00%
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Sosialisasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	59.85%
			Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	87.11%
			Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	78.38%
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	80.27%

b. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Pelayanan Ketentraman Umum dan Ketertiban Umum melaksanakan program sebagai berikut :

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	95.87%
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	100.00%
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	97.43%
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	95.11%
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	98.29%
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	91.96%
	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	99.97%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
	KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		
			Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	99.11%

c. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	100%
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	95.87%
			Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	100.00%
			Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	97.43%
			Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	98.29%
			Pengembangan kapasitas Tim Reaksi	95.11%

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
			Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	91.96%

f. Urusan Sosial

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	Capain
1.	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Penyediaan permakanan	96.81%
			Penyediaan alat bantu	95.70%
			Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	95.98%
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan makanan	98.91%

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Cirebon Tahun 2025 merupakan refleksi dari upaya nyata Pemerintah Kota Cirebon dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat. Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, secara umum capaian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah menunjukkan progres yang positif.

Keberhasilan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara komprehensif dapat dilihat dari hasil capaian indikator makro, indikator kinerja kunci, capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah. Hasil capaian indikator dan penyelenggaraan urusan pemerintahan tahun anggaran 2025 di Kota Cirebon, sebagai berikut :

1. Capaian Indikator Makro merupakan instrument untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Capaian indikator tersebut, menunjukkan keberhasilan dalam capaian indikator Gini Ratio mengalami penurunan sebesar (-5.19) dibanding tahun sebelumnya, tingkat penduduk miskin (-3.99), sementara yang mengalami peningkatan antara lain Indeks Pembangunan Manusia sebesar 1.15% dan tingkat pengangguran terbuka mengalami kenaikan sebesar 1.91.

2. Indikator Kinerja Kunci.

Indikator Kinerja Kunci tahun 2025 berjumlah 127 yang terdiri dari indikator Makro : 6 Indikator, 121 Indikator Kinerja. Tingkat Kesesuaian Indikator Kinerja Kunci terhadap 17 Program Prioritas sebagai berikut :

❖ Pelayanan dasar terhadap Program Nasional	: 97.78 %
❖ Non Pelayanan dasar terhadap Program Nasional	: 86.67 %
❖ Urusan Pilihan terhadap Program Nasional	: 92.86 %
❖ Fungsi Penunjang terhadap Program Nasional	: 100%

3. Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon Tahun 2025: 97,66 %

Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Cirebon berdasarkan Urusan :

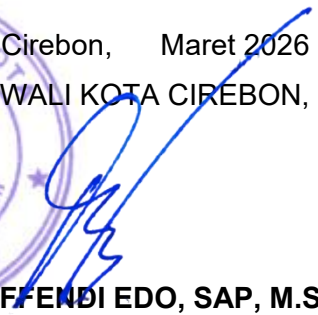
❖ Urusan Kesehatan	: 97.59%
❖ Urusan Pendidikan	: 91.54%
❖ Urusan Pekerjaan umum	: 100%
❖ Urusan Perumahan Rakyat	: 100%
❖ Urusan Trantibumlinmas	: 96.84%
❖ Urusan Sosial	: 100%

4. Capaian Laporan Akuntabilitas Kinerja dengan nilai 69,2 predikat B dan hasil menggembirakan dari opini BPK RI bahwa Kota Cirebon dalam pengelolaan keuangan dan kinerja dalam kategori Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Demikian laporan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan dokumentasi atas kinerja pelayanan publik. Besar harapan kami agar data dan analisis dalam laporan ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Semoga upaya berkelanjutan ini dapat mewujudkan pelayanan publik yang semakin transparan, akuntabel, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.



Cirebon, Maret 2026
WALI KOTA CIREBON,


EFFENDI EDO, SAP, M.Si

Lampiran - lampiran**Daftar Lampiran Gambar**

Gambar 1 Peta Wilayah Kota Cirebon	6
Gambar 2.1 Infografis Capaian Indikator Makro	72
Gambar 2.2 Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon Tahun 2025	73
Gambar 2.3 IPM Kota Cirebon 2021-2025.....	74
Gambar 2.4 RLS dan HLS 2021-2025 Kota Cirebon	77
Gambar 2.5 Perkembangan Usia Harapan Hidup 2015-2025.....	82
Gambar 2.6 Data Prevalensi Stunting 2015-2025.....	83
Gambar 2.7 Penghargaan Universal Health Coverage Awards 2026	85
Gambar 2.8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025.....	104
Gambar 2.9 Indeks Gini Kota Cirebon 2021-2025	106
Gambar 2.10 Kontribusi PDRB sektor Perdagangan Besar dan Eceran Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025.....	114
Gambar 2.11 Kontribusi PDRB sektor Transportasi dan Pergudangan Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025.....	115
Gambar 2.12 Indeks Akses Keuangan Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025.....	117
Gambar 2.13 Indeks Pembentukan Modal Tetap Bruto Kota Cirebon.....	126
Gambar 2.14 REALISASI INVESTASI KOTA CIREBON CAPAI RP.1,85 TRILIUN DENGAN DOMINASI UMKM	128
Gambar 2.15 Jumlah Koperasi Aktif dan Pasif di Kota Cirebon dalam 5 tahun terakhir.....	136
Gambar 2.16 Jumlah UMKM di Kota Cirebon dalam 5 tahun terakhir	136
Gambar 2.17 JADIKAN MALL UMKM RUMAH INOVASI, PEMKOT CIREBON GELAR SATU VISI COFFEE FESTIVAL 2026.....	137
Gambar 2.18 Grafik Tingkat Kesempatan Kerja Kota Cirebon dalam 5 Tahun Terakhir.....	143
Gambar 2.19 Grafik Indeks Kontribusi PDRB sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dalam 5 Tahun Terakhir	148
Gambar 2.20 Grafik Indeks Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) dalam 5 Tahun Terakhir	156
Gambar 2.21 PEMKOT CIREBON KONSISTEN WUJUDKAN KETAHANAN PANGAN	157
Gambar 2.22 Indeks Daya Saing Daerah 2025	167
Gambar 2.23 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah 2025	174
Gambar 2.24 Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 2025	175
Gambar 2.25 Halaman dashboard sistem informasi E-SAKIP Kota Cirebon	176
Gambar 2.26 Indeks SPBE Kota Cirebon Tahun 2018-2024	178

Gambar 2.27 Indeks Profesionalitas ASN 2025	193
Gambar 2.28 Capaian Indeks Profesionalitas ASN.....	194
Gambar 2.29 Hasil capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025.....	198
Gambar 2.30 Dokumentasi Penganugrahan KOIN KOCIR Tahun 2025	207
Gambar 2.31 Indeks IKLH Kota Cirebon Tahun 2020-2025.....	217
Gambar 2.32 Grafik kejadian tahun 2020-2025	237
Gambar 2.33 Akses Layanan Pengaduan Bencana	238
Gambar 2.34 Indeks Tingkat Kemiskinan Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025	245
Gambar 2.35 Diagram realisasi pencapaian Indikator Kinerja Utama.....	298

Daftar Tabel

Tabel 1.1 Penduduk Kota Cirebon Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2025	9
Tabel 1.2 Wilayah Administrasi Kota Cirebon.....	10
Tabel 1.3 Rincian PNS per Perangkat Daerah	13
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Makro.....	41
Tabel 2.2 Tabel Predikat Capaian Kinerja Berdasar Kode Warna	69
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Tujuan 1 "Terwujudnya SDM yang unggul, kompetitif dan berkarakter" Tahun 2025	71
Tabel 2.4 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah "Indeks Pembangunan Manusia Kota Cirebon".....	74
Tabel 2. 5 Capaian Sasaran 1.1 " Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas" Tahun 2025	76
Tabel 2.6 Capaian Realisasi Anggaran program pendukung sasaran 1.1	78
Tabel 2.7 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.1. " Meningkatkan akses dan mutu pendidikan yang berkualitas"	79
Tabel 2.8 Capaian Sasaran 1.2 " Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat secara merata" Tahun 2025	81
Tabel 2.9 Capaian Realisasi Program Anggaran Pendukung Sasaran 1.2	85
Tabel 2.10 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran " Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat secara merata" Tahun 2025	86
Tabel 2.11 Capaian Sasaran 1.3 " Meningkatkan kompetensi dan keterampilan kerja masyarakat usia produktif" Tahun 2025.....	90
Tabel 2.12 Data tingkat produktifitas tenaga kerja kota 2021-2025.....	91
Tabel 2.13 Capaian Realisasi Program Anggaran Pendukung Sasaran 1.3	92
Tabel 2.14 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Pemecahan Masalah Sasaran	91
Tabel 2.15 Capaian Sasaran 1.4 "Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius" Tahun 2025	94
Tabel 2. 16 Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 1.4 "Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius"	96
Tabel 2.17 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.4 " Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius" Tahun 2025	96
Tabel 2.18 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 1.4 " Terciptanya SDM yang berkarakter, berintegritas, dan religius"	

Tahun 2025.....	99
Tabel 2.19 Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka antara Kota Cirebon dengan regional Jawa Barat	105
Tabel 2.20 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah.....	107
Tabel 2.21 Capaian Realisasi Anggaran Sasaran 2.1 “Meningkatnya kontribusi sektor jasa perdagangan, transportasi, pariwisata, ekonomi kreatif”	118
Tabel 2.22 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah.....	119
Tabel 2.23 Capaian Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif”	125
Tabel 2.24 Nilai Realisasi Investasi Kota Cirebon Tahun 2021 – 2025	127
Tabel 2.25 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.2	128
Tabel 2.26 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.2 “Meningkatnya iklim investasi yang kompetitif”	129
Tabel 2.27 Capaian Sasaran 2.3 “Meningkatnya kinerja BUMD” Tahun 2025.....	131
Tabel 2.28 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.3	132
Tabel 2.29 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.3 “Meningkatnya kinerja BUMD” Tahun 2025.....	132
Tabel 2.30 Capaian Sasaran 2.4 “Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi” Tahun 2025.....	134
Tabel 2.31 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.4	138
Tabel 2.32 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.4 “Meningkatnya kapasitas dan kemandirian pelaku UMKM dan Koperasi” Tahun 2025	140
Tabel 2.33 Capaian Sasaran 2.5 “Meningkatnya kesempatan kerja” Tahun 2025	141
Tabel 2.34 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.5	144
Tabel 2.35 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.5 “Meningkatnya kesempatan kerja” Tahun 2025	144
Tabel 2.36 Capaian Sasaran 2.6 “Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru” Tahun 2025	148
Tabel 2.37 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 2.6	150
Tabel 2.38 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 2.6 “Meningkatnya pemanfaatan potensi ekonomi hijau dan biru” Tahun 2025	151
Tabel 2.39 Capaian Sasaran 2.7 “Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan” Tahun 2025	154
Tabel 2.40 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah	

Sasaran 2.7 “Meningkatnya sistem ketahanan pangan daerah yang tangguh dan berkelanjutan” Tahun 2025	159
Tabel 2.41 Capaian Kinerja Tujuan 3 “ Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan berorientasi”	162
Tabel 2.42 Rincian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Cirebon 2024-2025.....	166
Tabel 2.43 Capaian Sasaran 3.1 “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel” Tahun 2025	172
Tabel 2.44 Perbandingan Nilai Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2024 dan Tahun 2025	175
Tabel 2.45 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3.1.....	179
Tabel 2.46 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.1 “Terciptanya birokrasi yang bersih, efisien dan akuntabel”	181
Tabel 2.47 Capaian Sasaran 3.2 “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat” Tahun 2025	187
Tabel 2.48 Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 3.2	189
Tabel 2.49 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.2 “Meningkatnya lingkungan kota yang tentram, tertib dan kondusif bagi masyarakat”	190
Tabel 2.50 Capaian Sasaran 3.3 “ Meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN”	192
Tabel 2.51 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 3.3 “Meningkatnya Kinerja dan Profesionalisme ASN”	194
Tabel 2.52 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.3 “ Meningkatkan kinerja dan profesionalisme ASN”	196
Tabel 2.53 Capaian Sasaran 3.4 “Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik” Tahun 2025.....	197
Tabel 2.54 Hasil nilai Indeks Pelayanan Publik 5 tahun terakhir	199
Tabel 2.55 Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025	200
Tabel 2.56 Capaian Indeks Pelayanan Publik tahun 2025	200
Tabel 2.57 Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung sasaran 3.4“ Meningkatkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”	201
Tabel 2.58 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.4 “Meningkatnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”	202
Tabel 2.59 Capaian Sasaran 3.5 “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik” Tahun 2025	205
Tabel 2.60 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 3. “Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik”	203

Tabel 2.61 Faktor Pendukung, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 3.5 Meningkatnya inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan public.....	203
Tabel 2.62 Capaian Kinerja Tujuan 4 “Terwujudnya penataan lingkungan yang berkelanjutan” ...	210
Tabel 2.63 Capaian Sasaran 4.1 “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup” Tahun 2025	263
Tabel 2.64 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 4.1.....	217
Tabel 2.65 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran sasaran 4.1 “Meningkatnya kualitas perlindungan, pengelolaan, dan pelestarian lingkungan hidup”	220
Tabel 2.66 Capaian Sasaran 4.2 “Tertatanya ruang kota yang fungsional, estetik, dan ramah lingkungan dengan pendekatan kota cerdas didukung ketersediaan, akses dan layanan infrastruktur dasar yang berkualitas” Tahun 2025.....	221
Tabel 2.67 Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 4.2	224
Tabel 2.68 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 4.3 “Meningkatnya dukungan penyelenggaraan pemerintahan”	234
Tabel 2.69 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 4.3 “ Terciptanya sistem transportasi dan mobilitas kota yang efisien dan rendah emisi”	235
Tabel 2.70 Capaian Sasaran 4.4 “ Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim” Tahun 2025.....	235
Tabel 2.71 Klasifikasi Swakarya / Swasembada pada Setiap Kelurahan Kota Cirebon	238
Tabel 2.72 Capaian Realisasi Anggaran Program pendukung sasaran 4.4 “Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim”	240
Tabel 2.73 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana dan perubahan iklim”	240
Tabel 2.74 Capaian Kinerja Tujuan 5 “Mewujudkan kesejahteraan sosial melalui penurunan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, pelestarian budaya lokal, integrasi kearifan lokal dalam pembangunan”.....	243
Tabel 2.75 Capaian Sasaran “ Meningkatkan akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”	247
Tabel 2.76 Realisasi Anggaran Program Pendukung Sasaran 5.1.....	249
Tabel 2.77 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran sasaran 5.1 “Meningkatnya akses pelayanan dasar, perlindungan dan pemberdayaan sosial bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial”	250
Tabel 2.78 Capaian Sasaran 5.2 “ Meningkatkan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan warisan budaya daerah yang berkelanjutan” Tahun 2025.....	251
Tabel 2.79 Rekap Data Objek Pemajuan Kebudayaan (Opk) yang Dilestarikan	253
Tabel 2.80 Data Cagar Budaya Yang Dimanfaatkan Tahun 2025	254
Tabel 2.81 Realisasi Program Anggaran yang mendukung sasaran 5.2	259
Tabel 2.82 Capaian Sasaran 5.3 “ Meningkatkan kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender”	262

Tabel 2.83 Capaian Realisasi Anggaran Program Pendukung Capaian Sasaran 5.3 “Meningkatnya kualitas hidup keluarga, pemuda, kelompok rentan, serta tercapainya kesetaraan gender”	266
Tabel 2.84 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah.....	268
Tabel 2.85 Capaian Sasaran 5.4 “ Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis” Tahun 2025.....	271
Tabel 2.86 Faktor Pendorong, Faktor Penghambat dan Strategi Pemecahan Masalah Sasaran 5.4 “ Terciptanya masyarakat yang inklusif, toleran, dan harmonis”.....	274
Tabel 2.87 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.....	275
Tabel 2.88 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025	276
Tabel 2.89 Target dan Realisasi Belanja Modal Kota Cirebon Tahun Anggaran 2025.....	277
Tabel 2.90 Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2025.....	278
Table 2.91 Capaian Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Cirebon Tahun 2025.....	285
Tabel 2.92 Peningkatan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Cirebon	306
Tabel 2.93 Rencana Aksi Peningkatan Implementasi SAKIP Tahun 2025 Pemerintah Kota Cirebon	307
Tabel 2.94 Data Analisis Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Penggunaan Sumber Daya (Anggaran) Tahun 2024.....	313
Tabel 2.95 Target dan Realisasi Belanja Operasi Kota Cirebon Tahun 2025	316
Tabel 3.1 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Cirebon	320
Tabel 3.2 Matriks Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan oleh Daerah Kota Cirebon	321